

# LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur

MEI 2026



# LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur

MEI 2026

Salinan Publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi :

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur**  
**Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya Jawa Timur 60175

Telp. : 031-3520011

Faksimili : 031-3520025

E-mail : KPwJatim-KPKP@bi.go.id

Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-  
Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2026.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2026.aspx)



## VISI Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju



## MISI Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

# Kata Pengantar

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Perekonomian yang diterbitkan triwulanan ini disusun sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi mitra utama dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Laporan ini mencakup perkembangan ekonomi makroregional, keuangan pemerintah, inflasi daerah, pembiayaan daerah dan pengembangan akses keuangan serta UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi dan melanjutkan momentum peningkatan. Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96% (yoy), setelah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,85% (yoy). Kenaikan konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan ditopang oleh pertumbuhan pada konsumsi ritel komponen pakaian, barang pribadi, dan rekreasi, serta konsumsi makanan dan minuman yang tetap tinggi. Aktivitas konsumsi juga didorong tingginya aktivitas masyarakat selama momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri 2026 yang juga tecermin dari volume transaksi pembayaran nontunai yang mengalami lonjakan. Sementara itu, kenaikan belanja pemerintah meningkat sejalan dengan lebih tingginya realisasi belanja pegawai APBN dan APBD kabupaten/kota seiring pencairan tunjangan hari raya, kenaikan belanja barang utamanya untuk pelayanan publik, serta realisasi barang dan jasa sejalan dengan program MBG. Investasi juga turut mencatatkan peningkatan seiring realisasi program sekolah rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, kenaikan investasi juga sejalan dengan kenaikan barang modal dan lebih tingginya pembiayaan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah didukung oleh peningkatan lapangan usaha (LU) Perdagangan, Pertanian, Konstruksi dan Akomodasi Makan Minum.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan I 2026 sebesar 3,79% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan IV 2025 yang sebesar 2,93% (yoy). Peningkatan ketegangan geopolitik berdampak langsung pada peningkatan harga komoditas energi dan turunannya. Di sisi lain, faktor HBKN Idulfitri menjadi faktor yang memengaruhi permintaan komoditas yang berdampak pada tekanan kenaikan inflasi pada triwulan I 2026. Pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui sinergi pelaksanaan strategi 4K, yang mencakup keterjangkauan harga,

ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasi strategi ini semakin dioptimalkan seiring HBKN Idulfitri 2026 untuk tetap mengendalikan inflasi.

Ketahanan perbankan di Jawa Timur tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Risiko kredit masih terjaga dan masih berada dalam batas aman. Secara agregat, rasio NPL pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,27%, dari triwulan sebelumnya sebesar 3,23%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal CAR meningkat menjadi 32,93% pada triwulan I 2026, jauh di atas ketentuan minimum 8% yang ditetapkan oleh OJK. Capaian tersebut menegaskan resiliensi sektor perbankan yang tetap terjaga dalam memitigasi dampak risiko eksternal, di tengah eskalasi ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Pada tahun 2026, perekonomian Jawa Timur diperkirakan tetap kuat dengan level pertumbuhan pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Faktor pendukung pertumbuhan adalah investasi serta permintaan domestik dan eksternal yang tetap meningkat sejalan dengan prospek perekonomian mitra dagang utama Jawa Timur. Sementara itu, inflasi Jawa Timur diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%, didukung oleh upaya pengendalian inflasi TPID Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur, perbankan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, asosiasi pelaku usaha di wilayah Jawa Timur, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Kediri, dan Jember. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi dalam mendukung Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Provinsi Jawa Timur, serta bangsa dan negara.

Surabaya, Mei 2026

**Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Jawa Timur**  
ttd.

Ibrahim  
Direktur Eksekutif

# Daftar Isi

Visi dan Misi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	ix
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator Makro	xvi

## 01

### Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1. Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur	2
1.2. PDRB Sisi Pengeluaran	4
1.2.1. Konsumsi	4
1.2.2. Investasi	7
1.2.3. Ekspor – Impor	8
1.3. PDRB Sisi Lapangan Usaha	11
1.3.1. Industri Pengolahan	11
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12
1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
1.3.4. Konstruksi	14
1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15
Boks 1: Investasi Jawa Timur Melaju di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus: Sebagai Motor Pertumbuhan Investasi Daerah	17
Boks 2: Sinergi APBN dan APBD untuk Memperkuat Momentum Belanja Pemerintah di Jawa Timur	21

## 02

### Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Kondisi Umum	28
2.2. Kinerja Inflasi Jawa Timur	28
2.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026	28
2.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	29
2.3. Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur	33
2.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	34
2.5. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2026	36

## 03

## Pembiayaan Daerah

3.1.	Kondisi Umum	46
3.2.	Pembiayaan Daerah di Jawa Timur	46
3.2.1.	Dana Pihak Ketiga	47
3.2.2.	Penyaluran Kredit	48
3.2.3.	<i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR)	49
3.3.	Perkembangan Kinerja Korporasi	49
3.3.1.	Kinerja Umum Korporasi	49
3.3.2.	Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi	49
3.4.	Perkembangan Kinerja Rumah Tangga	51
3.4.1.	Kinerja Umum Rumah Tangga	51
3.4.2.	Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga	52
3.5.	Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM	55
3.5.1.	Eksposur Perbankan Pada UMKM	55
3.5.2.	Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM	57
Boks 3:	<i>High Level Meeting</i> Kunci Sinergi Pengendalian Inflasi Pada Idulfitri 1447 Hijriah	38
Boks 4:	El Niño, Potensi Kekeringan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur	40

## 04

## Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1.	Kondisi Umum	64
4.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur	64
4.2.1.	Aliran Uang Masuk/Keluar ( <i>Cash Inflow/Outflow</i> )	64
4.2.2.	Sistem Pembayaran	71
4.3.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	71
4.3.1.	Penanganan Uang Palsu	71
4.3.2.	Penyediaan Uang Rupiah	72
4.3.3.	Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai	

## 05

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.	Gambaran Umum	78
5.2.	Ketenagakerjaan	78
5.2.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	78
5.3.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	82
5.3.1.	Kesejahteraan Petani	82
5.3.2.	Kesejahteraan Nelayan	83
5.3.3.	Kesejahteraan Peternak	84
5.4.	Kesejahteraan	84

## 06

## Prospek Ekonomi Daerah

6.1.	Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026	88
6.1.1.	Sisi Permintaan	89
6.1.2.	Sisi Lapangan Usaha	90
6.2.	Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2026	92
Boks 5:	Pengembangan Konektivitas dan Pemerataan Pariwisata di Jawa Timur	97
Boks 6:	Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi Unggulan untuk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur	103
Boks 7:	Dampak Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Terhadap Perekonomian Jawa Timur	108

# Daftar Grafik

## 01

### Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

<b>Grafik 1.1</b>	Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional	2	<b>Grafik 1.24</b>	Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Bandara	10
<b>Grafik 1.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa	2	<b>Grafik 1.25</b>	Pertumbuhan Bongkar Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak	10
<b>Grafik 1.3</b>	Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT	4	<b>Grafik 1.26</b>	Harga Minyak Global	10
<b>Grafik 1.4</b>	Keyakinan Konsumen dan Kondisi Ekonomi Saat Ini	4	<b>Grafik 1.27</b>	Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur Berdasarkan Komoditas	10
<b>Grafik 1.5</b>	Konsumsi Ritel Jawa Timur	5	<b>Grafik 1.28</b>	Peningkatan <i>Prompt Manufacturing Index</i> (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur	11
<b>Grafik 1.6</b>	Perkembangan Kinerja LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman	5	<b>Grafik 1.29</b>	Perlambatan <i>Prompt Manufacturing Index</i> (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur	11
<b>Grafik 1.7</b>	Transaksi QRIS, Uang Elektronik, BI-FAST	5	<b>Grafik 1.30</b>	Perkembangan Ekspor LU Industri Pengolahan	12
<b>Grafik 1.8</b>	Mobilitas Bandara dan Pelayaran	5	<b>Grafik 1.31</b>	Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Industri Pengolahan	12
<b>Grafik 1.9</b>	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan IV 2025 – Triwulan I 2026	5	<b>Grafik 1.32</b>	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	12
<b>Grafik 1.10</b>	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2025 – Triwulan I 2026	6	<b>Grafik 1.33</b>	Perkembangan Penjualan LU Perdagangan	13
<b>Grafik 1.11</b>	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai di Jawa Timur	6	<b>Grafik 1.34</b>	Perkembangan Penjualan Eceran Jawa Timur	13
<b>Grafik 1.12</b>	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur	6	<b>Grafik 1.35</b>	Perkembangan Transaksi Nontunai dan Uang Elektronik	13
<b>Grafik 1.13</b>	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	7	<b>Grafik 1.36</b>	Perkembangan Kredit LU Perdagangan	13
<b>Grafik 1.14</b>	Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur	7	<b>Grafik 1.37</b>	Perkembangan Kondisi Usaha Sub LU Tanaman Pangan	14
<b>Grafik 1.15</b>	Pertumbuhan Impor Barang Modal dan Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur	7	<b>Grafik 1.38</b>	Produksi Padi Jawa Timur	14
<b>Grafik 1.16</b>	Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur	7	<b>Grafik 1.39</b>	Produksi Daging dan Telur Ayam Jawa Timur	14
<b>Grafik 1.17</b>	Pertumbuhan Kredit Investasi Jawa Timur	8	<b>Grafik 1.40</b>	Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	15
<b>Grafik 1.18</b>	Neraca Perdagangan Jawa Timur	8	<b>Grafik 1.41</b>	Perkembangan Konsumsi Semen	15
<b>Grafik 1.19</b>	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tujuan Jawa Timur	9	<b>Grafik 1.42</b>	Perkembangan Impor Barang Pendukung Konstruksi	15
<b>Grafik 1.20</b>	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama	9	<b>Grafik 1.43</b>	Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman dan Budaya Rekreasi	15
<b>Grafik 1.21</b>	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama (Swiss)	9	<b>Grafik 1.44</b>	Perkembangan SPPG yang Telah Beroperasi	16
<b>Grafik 1.22</b>	Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak	9	<b>Grafik 1.45</b>	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	16
<b>Grafik 1.23</b>	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama	10	<b>Grafik 1.46</b>	Pertumbuhan Perjalanan Wisatawan Nusantara Tujuan Jawa Timur	16

## 02

### Perkembangan Inflasi Daerah

<b>Grafik 2.1.</b>	Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (yoy)	29
<b>Grafik 2.2.</b>	Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan I 2026 (yoy)	29
<b>Grafik 2.3.</b>	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	30
<b>Grafik 2.4.</b>	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	30
<b>Grafik 2.5.</b>	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, serta HPP Jagung	31

<b>Grafik 2.6.</b> Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur	31	<b>Grafik 3.15.</b> Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi	51
<b>Grafik 2.7.</b> Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Merah di Jawa Timur	31	<b>Grafik 3.16.</b> Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	52
<b>Grafik 2.8.</b> Perkembangan Harga Minyak Sawit Dunia dan Minyak Goreng di Jawa Timur	31	<b>Grafik 3.17.</b> Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit	52
<b>Grafik 2.9.</b> Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	31	<b>Grafik 3.18.</b> Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR, KPA dan KKB	53
<b>Grafik 2.10.</b> Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik	31	<b>Grafik 3.19.</b> Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB	53
<b>Grafik 2.11.</b> Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	32	<b>Grafik 3.20.</b> Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna	54
<b>Grafik 2.12.</b> Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	32	<b>Grafik 3.21.</b> Perkembangan Pertumbuhan DPK RT	54
<b>Grafik 2.13.</b> Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya	33	<b>Grafik 3.22.</b> Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT	54
<b>Grafik 2.14.</b> Perkembangan Harga Avtur di Bandara Juanda Surabaya	33	<b>Grafik 3.23.</b> Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur	56
<b>Grafik 2.15.</b> Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	33	<b>Grafik 3.24.</b> Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur	56
<b>Grafik 2.16.</b> Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)	34	<b>Grafik 3.25.</b> Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	56
		<b>Grafik 3.26.</b> Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	56
		<b>Grafik 3.27.</b> Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM	57
		<b>Grafik 3.28.</b> Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	57
		<b>Grafik 3.29.</b> Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur	57

## 03

## Pembiayaan Daerah

<b>Grafik 3.1.</b> Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur	46
<b>Grafik 3.2.</b> Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan	46
<b>Grafik 3.3.</b> Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum	47
<b>Grafik 3.4.</b> Perkembangan Rasio CASA Bank Umum	47
<b>Grafik 3.5.</b> Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	48
<b>Grafik 3.6.</b> Perkembangan NPL Berdasarkan LU Utama	48
<b>Grafik 3.7.</b> Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Bank Tertimbang	49
<b>Grafik 3.8.</b> Perkembangan Rasio NPL Bank Umum	49
<b>Grafik 3.9.</b> Perkembangan <i>Loan at Risk</i> (LAR) Bank Umum	49
<b>Grafik 3.10.</b> Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Bank Umum	49
<b>Grafik 3.11.</b> Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis	50
<b>Grafik 3.12.</b> Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur	50
<b>Grafik 3.13.</b> Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi	50
<b>Grafik 3.14.</b> Pertumbuhan DPK Korporasi	51

## 04

## Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

<b>Grafik 4.1.</b> Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal	64
<b>Grafik 4.2.</b> Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> uang kartal Secara Spasial	65
<b>Grafik 4.3.</b> Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur	65
<b>Grafik 4.4.</b> Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan I 2026	65
<b>Grafik 4.5.</b> Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai	66
<b>Grafik 4.6.</b> Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai melalui APMK dan UE	66
<b>Grafik 4.7.</b> Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai di Jawa Timur untuk pembelian dan pembayaran	66
<b>Grafik 4.8.</b> Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai melalui APMK, UE, dan QRIS	66

Grafik 4.9.	Nominal Transaksi Sistem Pembayaran melalui Transfer	67
Grafik 4.10.	Pertumbuhan Volume Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST	67
Grafik 4.11.	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Jawa Timur	67
Grafik 4.12.	Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS Jawa Timur	67
Grafik 4.13.	Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur	67
Grafik 4.14.	Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia	67
Grafik 4.15.	Perkembangan Kliring Jawa Timur	68
Grafik 4.16.	Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur	68
Grafik 4.17.	Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Jawa Timur	68
Grafik 4.18.	Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di Jawa Timur	68
Grafik 4.19.	Perkembangan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	69
Grafik 4.20.	Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	69
Grafik 4.21.	Penggunaan Kartu ATM/Debit	69
Grafik 4.22.	Penggunaan Kartu Kredit	69
Grafik 4.23.	Pangsa Nominal Transaksi Kartu Debit	70
Grafik 4.24.	Pangsa Nominal Transaksi Kartu Kredit	70
Grafik 4.25.	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	70
Grafik 4.26.	Perkembangan Volume Uang Elektronik	70
Grafik 4.27.	Perkembangan UKA di Jawa Timur	71
Grafik 4.28.	Komposisi Penjualan & Pembelian UKA berdasarkan mata uang	71
Grafik 4.29.	Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis	71
Grafik 4.30.	Pemenuhan ULE Secara Spasial	72
Grafik 4.31.	Nominal Transaksi Penukaran	72
Grafik 4.32.	Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur	72
Grafik 4.33.	Nominal Transaksi Kas Titipan	72
Grafik 4.34.	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS	72
Grafik 4.35.	Perkembangan Volume Transaksi QRIS	73
Grafik 4.36.	Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha	73
Grafik 4.37.	Merchant QRIS Spasial di Jawa Timur	73
Grafik 4.38.	Perkembangan Pengguna QRIS	73
Grafik 4.39.	Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur	73
Grafik 4.40.	Penerima Program Sembako di Jawa Timur	74
Grafik 4.41.	Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur	74
Grafik 4.42.	Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur Triwulan I 2026	74
Grafik 4.43.	Jumlah Penerima PKH di Jawa Timur	74
Grafik 4.44.	Penyaluran Program PKH di Jawa Timur	74
Grafik 4.45.	Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur pada Triwulan I 2026	75

## 05

### Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Grafik 5.1.	Jumlah Tenaga Kerja LU Utama	79
Grafik 5.2.	Pangsa Tenaga Kerja Sektoral	79
Grafik 5.3.	Penyerapan Tenaga Kerja Formal- Informal	80
Grafik 5.4.	Komposisi Tenaga Kerja Formal- Informal	80
Grafik 5.5.	Penyerapan Tenaga Kerja Formal- Informal Secara Status Pekerjaan (Berdasarkan Persentase)	80
Grafik 5.6.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	80
Grafik 5.7.	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	80
Grafik 5.8.	Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Grafik 5.9.	Kondisi Ketersediaan Tenaga Kerja	82
Grafik 5.10.	Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa	82
Grafik 5.11.	NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)	82
Grafik 5.12.	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	83
Grafik 5.13.	Inflasi Pedesaan Jawa Timur	83
Grafik 5.14.	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa	83
Grafik 5.15.	NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur	83
Grafik 5.16.	Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Provinsi di Jawa	84
Grafik 5.17.	NT Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur	84

## 06

### Prospek Ekonomi Daerah

Grafik 6.1	Grafik 6.1. Prediksi El Nino/La Nina 2025-2026	91
------------	--	----

# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha	3
Tabel 2.1.	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan I 2026 (yoy)	29
Tabel 2.2.	Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan I 2026 (yoy)	29
Tabel 2.3.	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan I 2026 (%yoy)	34
Tabel 3.1.	Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai	47
Tabel 4.1.	Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan IV 2025 dan I 2026	64
Tabel 5.1.	Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)	79
Tabel 5.2.	Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha	81
Tabel 5.3.	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	83
Tabel 6.1.	Prospek Perekonomian Dunia	88
Tabel 6.2.	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2026	95

# Ringkasan Eksekutif

## Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah



**Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96% (yoy), setelah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,85% (yoy). Kenaikan konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan disokong oleh pertumbuhan pada konsumsi ritel komponen pakaian, barang pribadi, dan rekreasi, serta konsumsi makanan dan minuman yang tetap tinggi. Aktivitas konsumsi juga didorong tingginya aktivitas masyarakat selama momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri 2026 yang tecermin dari volume transaksi pembayaran nontunai yang juga mengalami lonjakan. Sementara itu, kenaikan belanja pemerintah meningkat sejalan dengan lebih tingginya realisasi belanja pegawai APBN dan APBD Kabupaten/Kota seiring pencairan tunjangan hari raya, dan realisasi barang dan jasa sejalan dengan program strategis pemerintah seperti MBG. Investasi juga turut mencatatkan peningkatan seiring realisasi program sekolah rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, investasi juga sejalan dengan kenaikan barang modal dan lebih tingginya pembiayaan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah didukung oleh peningkatan LU Perdagangan, Pertanian, Konstruksi dan Akomodasi Makan Minum.

**Perekonomian Jawa Timur juga didukung oleh kinerja ekspor yang masih positif, meskipun kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan melandai.** Perlambatan net ekspor utamanya terjadi karena perlambatan ekspor yang lebih dalam dari impor. Perlambatan ekspor LN, muat barang angkutan laut dalam negeri dan udara mengindikasikan penurunan pertumbuhan ekspor pada triwulan laporan. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan juga tecermin pada kinerja LU Industri Pengolahan, yang turut menunjukkan moderasi aktivitas ekspor pada periode tersebut

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 5,85% (yoy).

Peningkatan kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan ekspor, serta membaiknya konsumsi pemerintah. Di sisi lain, lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Makan Minum turut mendukung peningkatan pertumbuhan dimaksud.

## Asesmen Inflasi Daerah



**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan Triwulan IV 2025.** Inflasi pada triwulan laporan sebesar 3,79% (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,93% (yoy), atau sedikit di atas sasaran. Peningkatan inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan permintaan bahan pokok strategis pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H di tengah terbatasnya pasokan dari wilayah sentra produksi seiring curah hujan di Jawa Timur yang tinggi. Curah hujan yang relatif tinggi di beberapa sentra produksi memengaruhi kualitas hasil panen hingga gagal panen serta distribusi beberapa bahan pokok strategis, khususnya komoditas hortikultura. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada periode laporan didorong oleh (i) kelompok perawatan pribadi dan

Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 akibat momen Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H.

jasa lainnya, (ii) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (iii) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta (iv) kelompok transportasi.

**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2026 diperkirakan melandai dibandingkan dengan triwulan I 2026 dan tetap dalam rentang sasaran target inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).** Prakiraan inflasi yang lebih rendah pada triwulan II 2026 didorong oleh normalisasi permintaan pasca Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H serta berakhirnya dampak normalisasi kebijakan tarif listrik tahun 2025. Selain itu, periode panen raya berbagai komoditas pangan strategis diperkirakan turut mendukung kuatnya pasokan dan mendukung stabilisasi harga. Panen raya beras diperkirakan terjadi hingga pertengahan triwulan II dan panen raya aneka cabai dan bawang merah diperkirakan terjadi pada rentang bulan Mei – Agustus 2026. Sementara itu, tren moderasi harga emas dunia juga diperkirakan mendukung terjaganya inflasi. Namun demikian, risiko inflasi ke depan masih perlu dicermati seiring meningkatnya tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz berpotensi mendisrupsi pasokan energi global termasuk produk turunannya, yang selanjutnya dapat memicu imported inflation serta tekanan harga berbagai komoditas domestik melalui kenaikan biaya produksi, transportasi, dan distribusi (*second-round effects*).

TPID Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk menjaga inflasi tetap terkendali khususnya pada momentum HBKN Idulfitri. Pada Keterjangkauan Harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) yang tersebar di 38 kabupaten/kota, serta penyelenggaraan pasar murah EPIK Mobile hasil sinergi Bank Indonesia Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memastikan akses masyarakat terhadap komoditas strategis. Pada Ketersediaan Pasokan, upaya difokuskan pada program peningkatan produktivitas baik *on-farm* berupa budidaya perikanan, unggas, maupun pertanian serta *off-farm* berupa program perbaikan infrastruktur jalan di kawasan pertanian dan pembangunan lumbung pangan pertanian, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi serta penerapan pola *build up stock* BBM oleh Pertamina Patra Niaga guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi saat mudik. Pada Kelancaran Distribusi, dukungan diberikan melalui pemanfaatan truk hibah untuk distribusi komoditas pasar murah serta penyelenggaraan program Mudik Gratis darat dan laut guna memperlancar mobilitas masyarakat. Sementara itu, pada Komunikasi Efektif, penguatan dilakukan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan *High Level Meeting* (HLM) di berbagai daerah serta optimalisasi transparansi harga melalui pemanfaatan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) sebagai sarana pemantauan harga dan pasokan secara digital.

Pada triwulan II 2026, inflasi Jawa Timur diperkirakan melandai dan berada pada rentang sasaran nasional  $2,5 \pm 1\%$ .

## Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM



Kinerja intermediasi perbankan pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian positif ini utamanya didorong oleh perbaikan kinerja penyaluran kredit sektor korporasi, kendati masih berkontraksi, perbaikan tersebut sejalan dengan menguatnya kinerja kredit perdagangan dan industri pengolahan serta turunnya suku bunga kredit korporasi di tengah sikap wait and see perusahaan akibat dampak rambatan perang Timur Tengah. Risiko kredit korporasi juga tetap terkendali.

Kinerja intermediasi perbankan terpantau tetap positif, tecermin dari kinerja penyaluran kredit dan DPK yang tumbuh positif.

Sementara itu, kredit rumah tangga tumbuh moderat utamanya akibat melambatnya pertumbuhan pada hampir seluruh komponen pembentuk kredit kecuali Peralatan RT dan Multiguna seiring kenaikan tingkat suku bunga meski BI Rate dalam tren penurunan. Kondisi perlambatan tersebut, sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap *durable goods* serta penurunan peminatan terhadap pembelian aset properti dan kendaraan bermotor, yang tecermin dari penurunan realisasi KPR, KPA, KP Ruko/Rukan dan KKB. Kinerja penyaluran kredit UMKM terus mengalami kontraksi pada Triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan tekanan daya beli masyarakat, meskipun suku bunga kredit UMKM terus mengalami penurunan. Lebih lanjut, pangsa UMKM masih di atas 30%, kendati terus menunjukkan penurunan. Tingkat intermediasi perbankan pada periode laporan berada pada level optimal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat sebesar 87,81%. Capaian tersebut sedikit di atas rentang intermediasi optimal 84%–94% sebagaimana digunakan dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia. Penghimpunan DPK masih mencatatkan pertumbuhan, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan DPK Rumah Tangga yang tercatat mengalami peningkatan didorong kenaikan pada komponen giro dan tabungan. Selanjutnya, DPK Korporasi tumbuh meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pada komponen giro.

**Ketahanan perbankan di Jawa Timur tetap menunjukkan resiliensi yang kuat dan berada dalam batas aman.** Secara agregat, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,27%, masih relatif terjaga dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 3,23%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) meningkat menjadi 32,93% pada triwulan I 2026, jauh di atas ketentuan minimum 8% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Capaian tersebut menegaskan resiliensi sektor perbankan yang tetap terjaga dalam memitigasi dampak risiko eksternal, di tengah eskalasi ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Ketahanan korporasi dan rumah tangga di Jawa Timur masih terjaga, tecermin dari risiko kredit yang masih dalam batas aman serta CAR yang terpantau baik.

## Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran



Pada triwulan I 2026, aktivitas sistem pembayaran di Jawa Timur tetap menunjukkan penguatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada momentum HBKN Idulfitri 1447 H. Penguatan tersebut tecermin pada kinerja sistem pembayaran ritel maupun *wholesale* yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Di tengah kondisi tersebut, penggunaan instrumen pembayaran nontunai semakin meluas, termasuk dalam distribusi THR dan pemenuhan kebutuhan belanja masyarakat, sehingga mendorong pergeseran preferensi transaksi ke kanal yang lebih cepat dan *real-time*. Untuk mendukung penguatan sistem pembayaran di Jawa Timur, pada triwulan I 2026 turut dilakukan penguatan literasi melalui kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, disertai pemenuhan kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) serta pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). Berbagai upaya tersebut dilakukan guna menjaga kualitas dan ketersediaan uang beredar, sehingga stabilitas dan efisiensi sistem pembayaran tetap terjaga dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Pada triwulan I 2026, aktivitas sistem pembayaran tumbuh stabil yang diwarnai dengan momentum HBKN Idulfitri, pembayaran ritel, dan *wholesale* serta peralihan kepada sistem pembayaran nontunai.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja transaksi nontunai di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan penguatan, khususnya BI-RTGS, BI-FAST, APMK, UE, serta QRIS yang meningkat didorong oleh aktivitas konsumsi pemerintah, investasi, serta meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat selama periode HBKN Idulfitri 1447 H.

Uang kartal tetap menunjukkan tren *net-outflow*, seiring dengan kebutuhan likuiditas menjelang HBKN Idulfitri.

Di sisi lain, aktivitas kliring mengalami normalisasi sejalan dengan pola musiman awal tahun serta berlanjutnya pergeseran penggunaan instrumen pembayaran menuju kanal digital berbasis *real-time*. Sementara itu, sistem pembayaran tunai masih mencatat *net outflow*, namun dengan nilai yang relatif terkendali seiring durasi aktivitas ekonomi selama Idulfitri yang lebih singkat dibandingkan periode sebelumnya, serta semakin luasnya adopsi pembayaran digital dalam berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

## Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat



**Ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2026 secara struktural mengalami perbaikan dibandingkan November 2025 dan Februari 2025.** Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disertai peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perbaikan tersebut secara umum ditopang oleh peningkatan tenaga kerja bekerja paruh waktu, terutama di sektor informal. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada LU Pertanian dan Jasa Kemasyarakatan. Jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah hingga menengah meningkat, namun sebagian disertai kenaikan TPT, menunjukkan daya serap yang belum optimal. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan tinggi menurun seiring turunnya tingkat penganggurannya, antara lain karena bukan periode kelulusan dan peningkatan tenaga kerja di periode Februari 2026 lebih didominasi oleh sektor informal, sehingga kebutuhan penyerapan tenaga kerja terdidik relatif rendah.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2026 menunjukkan perbaikan seiring peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan November dan Februari 2025.

**Kesejahteraan masyarakat pedesaan di Jawa Timur tetap terjaga di tengah penurunan nilai tukar petani (NTP) di Triwulan I 2026.** Penurunan NTP terutama disebabkan oleh datangnya masa panen raya tanaman pangan. Di sisi lain, harga komoditas hortikultura, hasil ternak, dan perikanan masih mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan momen hari raya dan peningkatan keperluan MBG di triwulan I 2026. NTP menurun dari 118,96 pada triwulan IV 2025 menjadi 118,39 pada triwulan I 2026. Penurunan NTP terutama disebabkan oleh menurunnya indeks harga yang diterima petani pada tanaman pangan seiring dengan datangnya musim panen, sedangkan NTP pada tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan tetap mengalami peningkatan. Peningkatan harga pada komoditas tersebut di atas sejalan dengan peningkatan permintaan pada momen Ramadan, perayaan Nyepi, momen Imlek, dan HBKN Idulfitri 2026, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kesejahteraan pedesaan tetap terjaga pada triwulan I 2026, terutama didukung peningkatan nilai tukar petani tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan.

## Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2026



**Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal, dengan inflasi yang terkendali di target sasaran.** Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 4,9%-5,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025. Dari sisi permintaan, solidnya kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh prakiraan perbaikan konsumsi swasta, investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran, sejalan dengan prospek perbaikan konsumsi swasta dan investasi, kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, lanskap perekonomian global yang relatif kondusif, ditopang oleh membaiknya kinerja ekonomi mitra dagang strategis Jawa Timur, diperkirakan

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh tinggi, ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal.

membuka ruang bagi ekspansi ekspor luar negeri (LN) sekaligus mendorong penguatan investasi nonbangunan pada tahun 2026. Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek infrastruktur Pemerintah dan swasta, akselerasi pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta dampak lanjutan berbagai kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2025 yang mulai sepenuhnya terealisasi pada 2026.

**Inflasi Jawa Timur pada 2026 diperkirakan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1% (yoy).** Inflasi yang terjaga didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai, terutama untuk komoditas pangan strategis seperti beras, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, yang dibantu oleh kondisi cuaca yang kondusif untuk produksi. Di sisi lain, inisiasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta berbagai program pemerintah yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan turut berperan dalam menstabilkan harga di daerah. Upaya koordinasi antara TPIP dan TPID juga akan terus diintensifkan guna memastikan inflasi tetap berada dalam koridor sasaran yang ditetapkan.

**Inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy).**



# Tabel Indikator Ekonomi

## A. PDRB

Indikator	2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB Lapangan Usaha - Harga Konstan (Rp Miliar)</b>						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.077	50.210	53.395	39.980	186.663	46.318
Pertambangan dan Penggalian	18.361	18.395	18.516	18.400	73.673	17.521
Industri Pengolahan	151.985	155.026	157.596	159.197	623.803	161.091
Pengadaan Listrik dan Gas	1.796	1.656	1.806	1.802	7.061	1.695
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	473	483	496	510	1.962	510
Konstruksi	44.341	46.336	48.590	51.038	190.305	47.499
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	93.716	94.350	96.339	99.175	383.581	99.512
Transportasi dan Pergudangan	17.219	17.867	17.723	18.081	70.889	18.310
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.990	29.510	28.440	30.663	117.603	32.041
Informasi dan Komunikasi	35.697	36.022	36.261	37.394	145.374	38.245
Jasa Keuangan dan Asuransi	12.166	11.825	11.542	11.980	47.512	11.960
<i>Real Estate</i>	8.441	8.669	8.703	8.725	34.538	8.754
Jasa Perusahaan	3.975	4.216	4.224	4.317	16.731	4.298
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.676	9.696	9.319	9.882	38.573	10.031
Jasa Pendidikan	13.395	13.514	13.613	13.790	54.313	13.768
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.723	3.781	3.828	4.010	15.342	3.986
Jasa lainnya	7.159	7.896	7.724	8.259	31.037	8.121
<b>PDRB Pengeluaran - Harga Konstan (Rp Miliar)</b>						
Konsumsi RT	296.459	304.886	304.512	309.324	1.215.180	313.910
Konsumsi LNPRT	5.829	5.835	5.801	6.188	23.653	6.341
Konsumsi Pemerintah	16.480	19.185	19.898	22.098	77.662	19.830
Pembentukan Modal Tetap Bruto	126.366	132.645	139.440	144.006	542.457	135.843
Ekspor Barang dan Jasa	283.711	287.493	299.560	295.282	1.166.045	289.267
Impor Barang dan Jasa	237.305	244.548	254.464	262.194	998.510	244.429
Net Ekspor	46.406	42.945	45.096	33.088	167.534	44.837

Sumber: BPS Jawa Timur

Indikator	2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I
PDRB Lapangan Usaha - (%; yoy)						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,30	0,60	4,43	6,01	4,98	7,52
Pertambangan dan Penggalian	4,37	2,09	1,33	(1,61)	1,50	(4,58)
Industri Pengolahan	4,11	7,36	6,18	6,28	5,98	5,99
Pengadaan Listrik dan Gas	10,40	1,95	2,71	5,53	5,10	(5,62)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(1,05)	0,99	6,47	7,92	3,55	7,87
Konstruksi	1,11	5,56	5,94	5,57	4,59	7,12
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,57	3,93	3,41	5,01	3,99	6,18
Transportasi dan Pergudangan	7,22	9,32	7,11	5,77	7,33	6,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	8,38	7,52	8,96	8,06	10,53
Informasi dan Komunikasi	7,11	6,48	8,16	8,47	7,56	7,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,49	1,55	(1,62)	4,59	2,24	(1,70)
Real Estate	2,14	4,03	3,69	3,58	3,36	3,70
Jasa Perusahaan	8,49	9,37	9,89	9,16	9,24	8,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,87	(2,11)	0,73	0,66	2,10	3,67
Jasa Pendidikan	6,31	5,18	5,75	7,25	6,12	2,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	4,60	4,08	7,82	6,48	7,06
Jasa lainnya	5,55	6,62	9,50	9,86	7,92	13,44
PDRB Pengeluaran - (%; yoy)						
Konsumsi RT	5,12	4,85	4,91	5,15	5,01	5,89
Konsumsi LNPRT	6,53	6,42	5,31	5,13	5,83	8,77
Konsumsi Pemerintah	1,92	(0,55)	(0,53)	2,13	0,73	20,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,20	6,13	6,96	6,66	5,54	7,50
Ekspor Barang dan Jasa	6,30	7,05	6,54	6,65	6,63	1,96
Impor Barang dan Jasa	4,90	6,84	6,51	6,23	6,13	3,00
Net Ekspor	14,08	8,27	6,68	10,14	9,75	(3,38)
Pertumbuhan PDRB (%; yoy)	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33	5,96

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

## B. INFLASI

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)									
JAWA TIMUR	106,61	106,37	106,21	107,11	107,43	108,52	108,90	110,25	111,50
- Kota Surabaya	106,48	106,41	106,32	107,11	107,15	108,47	109,17	110,81	111,34
- Kota Malang	106,50	106,11	105,99	106,94	107,02	108,35	109,16	110,06	111,03
- Kota Kediri	106,17	105,67	105,37	106,27	106,13	107,66	108,37	110,99	110,41
- Kab. Jember	106,37	106,35	106,19	107,09	107,58	108,16	108,78	111,56	111,71
- Kab. Sumenep	109,15	108,48	108,58	109,71	110,60	111,21	112,75	108,32	116,47
- Kota Probolinggo	106,64	106,39	106,41	107,18	107,91	108,74	109,64	113,82	112,41
- Kota Madiun	106,12	105,28	105,03	106,00	106,33	107,28	107,90	109,41	110,00
- Kab. Banyuwangi	106,61	106,61	106,46	107,32	108,63	109,42	109,89	109,95	112,21
- Kab. Bojonegoro	108,44	107,48	106,98	108,34	108,58	109,88	110,25	110,43	112,93
- Kab. Gresik	105,51	105,22	104,87	105,74	106,36	106,74	107,00	108,91	109,72
- Kab. Tulungagung	107,31	106,58	106,44	107,54	108,27	109,52	109,73	110,28	111,71
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , yoy)									
JAWA TIMUR	3,04	2,21	1,73	1,51	0,77	2,02	2,53	2,93	3,79
- Kota Surabaya	2,99	2,35	1,64	1,38	0,63	1,94	2,68	3,45	3,91
- Kota Malang	2,90	2,02	1,62	1,36	0,49	2,11	2,99	2,92	3,75
- Kota Kediri	2,88	1,72	0,88	1,19	-0,04	1,88	2,85	4,44	4,03
- Kab. Jember	2,53	1,99	1,55	1,74	1,14	1,70	2,43	4,17	3,84
- Kab. Sumenep	4,68	3,24	2,45	1,97	1,33	2,52	3,84	-1,26	5,31
- Kota Probolinggo	3,54	2,29	1,96	1,90	1,13	2,21	3,04	6,19	4,17
- Kota Madiun	3,05	1,85	1,22	1,31	0,20	1,90	2,73	3,22	3,45
- Kab. Banyuwangi	2,67	2,38	2,07	1,73	1,89	2,64	3,22	2,45	3,30
- Kab. Bojonegoro	4,68	1,89	1,88	1,14	0,13	2,23	3,05	1,93	4,01
- Kab. Gresik	2,81	2,13	2,15	1,85	0,81	1,44	2,03	3,00	3,16
- Kab. Tulungagung	2,98	2,05	1,81	1,75	0,89	2,76	3,09	2,55	3,18
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , ytd)									
JAWA TIMUR	0,64	0,81	0,66	1,51	0,30	1,32	1,67	2,93	1,13
- Kota Surabaya	0,60	0,72	0,63	1,38	0,04	1,27	1,93	3,45	0,48
- Kota Malang	0,66	0,57	0,45	1,36	0,07	1,32	2,08	2,92	0,88
- Kota Kediri	0,61	0,62	0,33	1,19	0,13	1,44	1,98	4,44	(0,52)
- Kab. Jember	0,63	1,04	0,88	1,74	0,46	1,00	1,57	4,17	0,14
- Kab. Sumenep	0,77	0,83	0,92	1,97	0,81	1,37	2,77	(1,26)	7,52
- Kota Probolinggo	0,77	1,15	1,17	1,90	0,68	1,68	2,30	6,19	(1,24)
- Kota Madiun	0,66	0,62	0,38	1,31	0,31	1,21	1,79	3,22	0,54
- Kab. Banyuwangi	0,56	1,06	0,92	1,73	1,22	1,95	2,39	2,45	2,06
- Kab. Bojonegoro	0,70	0,34	-0,13	1,14	1,32	1,42	1,76	1,93	2,26
- Kab. Gresik	0,81	1,35	1,01	1,85	0,59	0,94	1,19	3,00	0,74
- Kab. Tulungagung	0,76	0,84	0,71	1,75	0,68	1,84	2,04	2,55	1,30

Sumber: BPS Jawa Timur

## C. SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kinerja (Rp Triliun)									
<i>Inflow</i>	27,79	29,03	16,44	13,39	22,96	29,28	12,41	8,26	27,77
<i>Outflow</i>	21,42	21,72	17,13	23,49	25,89	12,88	17,48	21,55	23,02
SKNBI	51,82	48,02	53,70	56,51	48,15	43,54	49,46	51,62	43,66
RTGS	341,89	377,05	421,14	461,09	362,66	349,64	417,09	489,58	405,35
BI-FAST	363,99	408,20	475,51	499,81	494,09	493,89	543,79	580,38	682,13
APMK	260,43	259,16	252,84	250,53	269,89	262,69	263,22	269,90	300,69
UE	15,52	15,79	15,98	16,31	17,20	16,50	17,51	20,00	22,02
QRIS	7,96	12,27	18,65	22,55	26,05	31,65	36,39	46,26	44,44
KUPVA	2,19	2,20	2,75	2,88	2,38	2,42	2,68	3,10	3,05
Pertumbuhan (% , yoy)									
<i>Inflow</i>	12,20	13,73	-19,62	-7,09	-17,39	0,86	-24,46	-38,32	20,95
<i>Outflow</i>	32,49	-19,70	10,48	-7,00	20,88	-40,69	2,07	-8,23	-11,08
SKNBI	-8,75	-2,22	-3,57	-4,56	-7,10	-9,32	-7,9	-8,66	-9,31
RTGS	-12,85	4,78	7,50	20,48	6,07	-7,27	-0,96	6,18	11,77
BI-FAST	68,06	57,91	46,28	39,38	35,74	20,99	14,36	16,12	38,06
APMK	6,62	0,86	0,38	-1,56	3,50	1,35	3,95	7,73	11,41
UE	13,71	9,05	10,75	10,74	9,78	4,28	8,78	22,61	27,97
QRIS	114,61	154,82	191,63	167,75	227,18	157,91	95,2	105,11	70,59
KUPVA	2,08	-0,60	24,99	14,40	8,84	10,42	-2,3	7,73	27,95
Rata-rata Nilai Transaksi (Rp Juta/Transaksi)									
SKNBI	66,48	64,46	65,25	64,43	67,53	65,88	64,78	63,91	69,70
RTGS	3140,16	3611,84	3555,28	3635,03	3072,56	3870,00	3730	4097	3843
BI-FAST	2,74	2,73	2,73	2,64	2,63	2,65	2,62	2,69	2,56
UE	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
QRIS	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,04	0,09	0,09	0,09

Sumber: Bank Indonesia

**D. PERBANKAN**  
**D.1. Bank Umum**

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kinerja (Rp Miliar)									
Total Aset	888.676	906.795	916.627	913.504	908.005	929.540	947.709	943.893	974,077
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	360.825	367.721	368.431	374.129	368.104	378.975	377.534	366.396	390,849
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	114.893	116.516	122.117	114.630	113.734	114.534	123.003	440.627	115,044
- Bank Umum Swasta Nasional	396.433	405.914	410.680	408.563	409.680	418.618	429.750	16.914	450,705
- Bank Asing	16.525	16.644	15.399	16.182	16.487	17.412	17.422	119.955	17,480
Dana Pihak Ketiga	752.817	766.653	768.466	771.716	776.089	794.997	805.556	799.487	831,072
- Giro	154.690	159.855	155.993	157.670	149.868	164.071	170.507	175.808	193,309
- Tabungan	323.936	328.496	333.414	339.928	342.540	346.507	346.686	356.837	364,626
- Deposito	274.191	278.302	279.059	274.118	283.681	284.418	288.363	266.841	273,137
Kredit Lokasi Bank (LB)	556.494	565.108	583.884	596.322	590.841	597.727	602.656	606.530	606,054
- Kredit Modal Kerja	292.418	296.386	308.541	314.299	306.737	310.901	312.735	306.032	303,907
- Kredit Investasi	95.275	96.654	98.318	100.604	100.376	100.446	101.229	108.469	109,353
- Kredit Konsumsi	168.801	172.069	177.025	181.419	183.728	186.379	188.692	192.030	192,794
Kredit Lokasi Proyek (LP)	685.935	700.934	707.023	719.729	721.045	729.408	729.585	728.197	729,770
- Kredit Modal Kerja	346.398	353.630	356.163	365.597	362.681	363.002	358.975	351.169	351,638
- Kredit Investasi	140.172	143.798	141.683	141.504	140.824	145.605	146.985	150.129	149,601
- Kredit Konsumsi	199.365	203.505	209.176	214.627	217.540	220.801	223.625	226.899	228,531
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	298.546	303.270	316.126	322.660	314.453	318.203	318.692	318.472	316,718
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	112.093	114.384	122.440	127.391	120.805	121.414	121.615	120.288	121,178
- Kredit Sektor Perdagangan	147.114	148.927	153.527	154.735	152.345	154.614	154.590	155.201	152,160
- Kredit Sektor Pertanian	39.339	39.959	40.159	40.534	41.303	42.175	42.487	42.983	43,380
Pertumbuhan (% , yoy)									
Total Aset	6,13	5,81	3,66	3,82	2,18	2,51	3,39	3,33	7,28
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	8,89	7,47	3,76	5,00	2,02	3,06	2,47	(2,07)	6,18
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	0,03	-4,34	-3,30	-3,46	-1,01	-1,70	0,73	284,39	1,15
- Bank Umum Swasta Nasional	6,42	7,94	6,55	5,32	3,34	3,13	4,64	(95,86)	10,01
- Bank Asing	-11,16	-1,68	-11,85	-4,21	-0,23	4,62	13,13	641,29	6,02
Dana Pihak Ketiga	7,59	7,68	6,18	4,84	3,09	3,70	4,83	3,60	7,08
- Giro	14,47	13,48	10,43	6,62	-3,12	2,64	9,30	11,50	28,99
- Tabungan	5,75	4,49	7,01	5,68	5,74	5,48	3,98	4,97	6,45
- Deposito	6,15	8,78	3,02	2,84	3,46	2,20	3,33	-2,65	-3,72
Kredit Lokasi Bank (LB)	6,42	5,35	7,84	8,13	6,17	5,77	3,21	1,71	2,57
- Kredit Modal Kerja	3,77	2,17	6,49	-65,74	4,90	4,90	1,36	-2,63	-0,92
- Kredit Investasi	11,19	8,84	8,82	96,13	5,35	3,92	2,96	7,82	8,94
- Kredit Konsumsi	8,60	9,24	9,71	9,75	8,84	8,32	6,59	5,85	4,93
Kredit Lokasi Proyek (LP)	7,99	6,07	4,92	5,27	5,12	4,06	3,19	1,18	1,21
- Kredit Modal Kerja	5,25	2,19	1,01	3,88	4,70	2,65	0,79	-3,95	-3,04
- Kredit Investasi	12,09	9,96	6,75	3,48	0,47	1,26	3,74	6,10	6,23
- Kredit Konsumsi	10,14	10,62	10,94	10,06	9,12	8,50	6,91	5,72	5,05

Sumber : Laporan Bank (diolah)

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	4,26	3,55	8,36	8,74	5,33	4,92	0,81	-1,30	0,72
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	0,62	-1,02	8,99	13,67	7,77	6,15	-0,67	-5,58	0,31
- Kredit Sektor Perdagangan	6,01	6,62	7,89	5,71	3,56	3,82	0,69	0,30	-0,12
- Kredit Sektor Pertanian	8,76	6,19	8,21	5,87	4,99	5,55	5,80	6,04	5,03
Rasio Keuangan (%)									
NPL Lokasi Bank	3,05	2,98	2,78	2,61	3,01	3,28	3,25	3,08	3,36
- NPL Kredit Modal Kerja	3,88	3,70	3,30	2,97	3,54	3,87	3,77	3,63	3,98
- NPL Kredit Investasi	2,35	2,61	2,68	2,76	2,88	3,08	3,12	2,82	3,18
- NPL Kredit Konsumsi	1,99	1,95	1,93	1,89	2,20	2,38	2,45	2,35	2,48
NPL Lokasi Proyek	3,11	3,05	2,79	2,70	3,02	3,26	3,37	3,23	4,23
LDR Lokasi Bank	73,92	73,71	75,98	77,12	76,29	75,36	74,79	75,81	73,03
LDR Lokasi Proyek	91,12	91,43	92,00	93,26	92,91	91,75	90,57	91,08	92,08

Sumber : Laporan Bank (diolah)

## D.2. Bank Umum Syariah

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kinerja (Rp Miliar)									
Total Aset	55.609	55.619	59.752	64.304	61.373	62.476	65.283	67.432	66,081
Dana Pihak Ketiga	50.239	50.222	52.907	57.133	55.284	55.200	57.103	58.762	58,065
- Giro	6.444	6.933	7.019	7.754	7.178	7.114	7.723	8.701	9,106
- Tabungan	24.336	24.678	26.118	27.334	26.894	27.843	29.150	30.869	29,580
- Deposito	19.459	18.612	19.770	22.046	21.212	20.243	20.229	19.192	19,379
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	38.792	39.980	41.451	42.321	42.193	44.066	45.258	46.238	47,299
- Modal Kerja	9.833	10.217	10.765	10.654	10.193	10.630	10.906	10.757	10,828
- Investasi	7.746	7.935	8.200	8.498	8.839	8.840	8.895	8.759	8,634
- Konsumsi	21.213	21.829	22.487	23.169	23.880	24.596	25.458	26.722	27,838
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	53.742	54.098	55.989	55.311	55.659	56.595	56.967	56.088	56,769
- Modal Kerja	18.537	18.071	19.099	17.497	17.066	17.240	16.803	15.242	15,144
- Investasi	12.517	12.674	12.776	12.996	13.100	13.230	13.226	12.599	12,124
- Konsumsi	22.688	23.354	24.114	24.818	25.493	26.125	26.938	28.247	29,500
Pembiayaan LB ke Sektor Ekonomi Utama	10.308	10.690	11.219	11.156	11.002	11.639	11.772	11.399	11,477
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	4.151	4.687	5.208	4.976	4.950	5.415	5.682	5.207	5,477
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	5.221	5.117	5.115	5.279	5.162	5.334	5.225	5.335	5,135
- Pembiayaan Sektor Pertanian	936	886	896	901	891	890	865	857	865
Pertumbuhan (% , YOY)									
Total Aset	14,31	11,59	11,02	17,73	10,37	12,33	9,26	4,86	7,67
Dana Pihak Ketiga	15,14	13,41	10,86	17,01	10,04	9,91	7,93	2,85	5,03
- Giro	42,38	47,39	29,24	33,30	11,39	2,61	10,03	12,22	26,86
- Tabungan	10,26	12,66	13,69	11,43	10,51	12,83	11,61	12,93	9,99
- Deposito	14,22	5,30	2,33	19,30	9,01	8,76	2,32	-12,95	-8,64
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	12,26	11,59	12,94	12,18	8,77	10,22	9,19	9,26	12,10
- Modal Kerja	3,92	5,31	11,21	11,09	3,66	4,04	1,31	0,96	6,23
- Investasi	26,55	17,64	17,66	12,84	14,11	11,40	8,47	3,07	-2,32
- Konsumsi	11,82	12,63	12,13	12,43	12,57	12,68	13,21	15,34	16,57
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	55,53	12,06	13,17	7,17	3,57	4,62	1,75	1,40	1,99
- Modal Kerja	95,91	11,69	15,81	0,79	-7,94	-4,60	-12,02	-12,89	-11,26
- Investasi	104,49	10,66	9,97	6,03	4,66	4,39	3,52	-3,05	-7,45
- Konsumsi	19,59	13,13	12,88	12,85	12,36	11,87	11,71	13,82	15,72
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	7,44	7,61	14,19	14,27	6,73	8,88	4,93	2,18	4,32
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	14,32	24,79	42,72	37,92	19,25	15,54	9,10	4,64	10,64
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	2,43	-1,39	-1,03	1,15	-1,13	4,23	2,15	1,06	-0,52
- Pembiayaan Sektor Pertanian	8,08	-10,41	-11,11	-3,74	-4,81	0,43	-3,49	-4,88	-2,96

Sumber : Laporan Bank (diolah)

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Rasio Keuangan (%)									
NPL Lokasi Bank	2,78	2,88	2,92	2,82	3,02	2,80	2,76	2,60	2,70
- Modal Kerja	5,03	5,01	4,99	5,01	5,82	5,61	5,49	5,12	5,18
- Investasi	1,40	1,75	2,46	2,15	2,01	1,81	1,98	2,08	2,26
- Konsumsi	2,23	2,14	2,10	2,06	2,11	1,94	1,87	1,75	1,86
NPL Lokasi Proyek	2,44	2,54	2,63	2,69	2,79	2,69	2,70	2,63	2,76
LDR Lokasi Bank	77,21	79,61	74,04	76,51	76,08	79,69	78,90	78,69	80,89
LDR Lokasi Proyek	106,97	107,72	105,82	96,81	100,68	102,53	99,76	95,45	97,77

Sumber : Laporan Bank (diolah)



BANYUWANGI  
220 KM  
PROBOLINGGO  
112 KM

MALANG  
102 KM  
JEMBER  
208 KM →

**SURABAYA**

**SURABAYA**

**SURABAYA**

# Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



### 1.1. Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta kenaikan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU) utama, kinerja ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh lebih tingginya LU Perdagangan, LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Akomodasi dan Makan Minum, di tengah perlambatan pertumbuhan LU Industri Pengolahan.

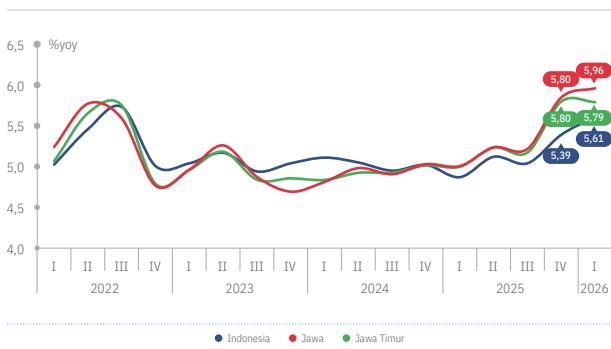
#### Kinerja Perekonomian Triwulan I 2026

Tren melambat masih membayangi perekonomian global sebagai dampak eskalasi perang di Timur Tengah. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi serta diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antar negara. Hal ini tecermin pada peningkatan *Global Supply Chain Pressure Index* (GSCPI)<sup>1</sup> pada triwulan I 2026 yang secara rata-rata sebesar 0,55, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2023-2025 yaitu -0,30, dan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,11. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,0%, dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,1%. Dari sisi harga, inflasi global 2026 diprakirakan naik menjadi 4,2% dari sebelumnya 4,1%, sehingga mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Hal ini berdampak pada penundaan prakiraan penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) hingga akhir tahun 2026. Dari sisi keuangan pemerintah, defisit fiskal AS yang lebih besar mempengaruhi imbal hasil (*yield*) US Treasury. Selain itu kecenderungan preferensi investor terhadap aset aman (*safe haven asset*) mendorong pergeseran aliran modal global menuju pasar uang AS. Aliran modal menuju AS ini mendorong penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY), sedangkan mata uang *emerging markets* semakin tertekan. Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global terus mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga ketahanan eksternal, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Di tengah perkembangan global, ekonomi Indonesia dan Jawa Timur dapat tumbuh lebih tinggi. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, menguati dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,39%. Penguatan ekonomi Indonesia tersebut disokong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. Sejalan dengan pertumbuhan nasional, perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 juga tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,85% (yoy) (Grafik 1.1). Kinerja ekonomi Jawa Timur terpantau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Nasional yang masing-masing tumbuh 5,79% (yoy) dan 5,61% (yoy) (Grafik 1.2).

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berdaya tahan ditopang oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta lebih tingginya kinerja investasi. Konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2026 didorong oleh peningkatan konsumsi ritel khususnya komponen pakaian, barang pribadi, rekreasi dan konsumsi komponen makanan dan minuman yang tumbuh tinggi seiring meningkatnya aktivitas konsumsi pada momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri 2026. Peningkatan konsumsi rumah tangga turut tecermin dari peningkatan pertumbuhan transaksi nontunai seperti QRIS, BI-FAST, dan uang elektronik (UE). Sementara itu, akselerasi kinerja konsumsi pemerintah didukung oleh peningkatan komponen belanja pegawai dalam rangka pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), serta peningkatan kinerja realisasi belanja barang pada bidang pendidikan, kesehatan, dan dalam mendukung program strategis pemerintah seperti MBG (*Social Transfer in Kind*)<sup>2</sup>. Dari sisi investasi, kenaikan sejalan dengan berlanjutnya program pembangunan pemerintah seperti Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan proyek infrastruktur khususnya jalan tol dan nasional di wilayah Jawa Timur, antara lain jalan tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 3, Kertosono-Kediri, Kediri-Tulungagung, dan pembangunan ruas jalan lintas Pantai Selatan (Pansela). Peningkatan realisasi investasi non bangunan juga tecermin dari kenaikan impor barang modal.

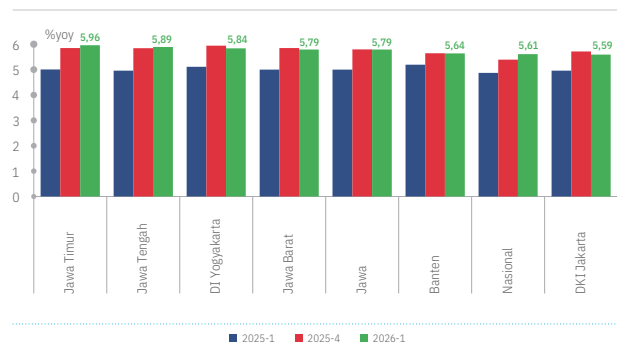
Grafik 1.1. Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional



Sumber : BPS (dialah)

1. Indeks GSCPI bersumber dari New York Fed. GSCPI yang lebih tinggi mengindikasikan tekanan rantai pasok yang lebih tinggi dipengaruhi komponennya antara lain tarif logistik, dan purchasing managers index.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (dialah)

2. Social Transfer in Kind adalah bantuan sosial nontunai yang diberikan pemerintah atau lembaga kepada masyarakat dalam bentuk barang (makanan, bahan pokok) atau jasa (layanan kesehatan, pendidikan, hunian).

**Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran**

Komponen	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I
Konsumsi Rumah Tangga	5,20	4,80	5,08	4,91	4,99	5,12	4,85	4,91	5,15	5,01	5,89
Konsumsi LNPRT	18,06	12,01	10,95	9,53	12,49	6,53	6,42	5,31	5,13	5,83	8,77
Konsumsi Pemerintah	10,23	5,67	4,07	2,47	5,24	1,92	-0,55	-0,53	2,13	0,73	20,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,42	5,06	5,40	6,05	5,49	2,20	6,13	7,09	6,66	5,54	7,50
Ekspor Barang Dan Jasa	8,25	10,13	10,78	7,58	9,17	6,08	7,73	7,19	6,65	6,63	1,96
Impor Barang Dan Jasa	10,46	11,01	12,46	7,95	10,42	4,63	7,63	7,35	6,23	6,13	3,00
PDRB Provinsi Menurut Penggunaan	4,81	4,98	4,91	5,03	4,93	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33	5,96

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,59	4,28	1,90	0,93	0,08	10,30	0,60	4,43	6,01	4,98	7,52
Pertambangan dan Penggalian	-2,89	-3,28	-0,97	4,70	-0,65	4,37	2,09	1,33	-1,61	1,50	-4,58
Industri Pengolahan	6,10	4,55	5,89	5,05	5,40	4,11	7,36	6,18	6,28	5,98	5,99
Pengadaan Listrik dan Gas	10,17	11,74	5,00	1,83	6,93	10,40	1,95	2,71	5,53	5,10	-5,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	3,36	0,69	0,36	2,24	-1,05	0,99	6,47	7,92	3,55	7,87
Konstruksi	8,16	7,15	6,52	5,97	6,92	1,11	5,56	5,94	5,57	4,59	7,12
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	3,97	4,36	5,35	4,55	3,57	3,93	3,41	5,01	3,99	6,18
Transportasi dan Pergudangan	14,89	8,37	8,25	7,05	9,50	7,22	9,32	7,11	5,77	7,33	6,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	8,60	5,56	4,27	6,98	7,32	8,38	7,52	8,96	8,06	10,53
Informasi dan Komunikasi	7,72	6,22	5,97	5,85	6,43	7,11	6,48	8,16	8,47	7,56	7,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,68	4,48	1,67	1,96	3,89	4,49	1,55	-1,62	4,59	2,24	-1,70
Real Estate	3,14	2,78	2,87	2,85	2,91	2,14	4,03	3,69	3,58	3,36	3,70
Jasa Perusahaan	7,27	8,64	7,50	8,10	7,88	8,49	9,37	9,89	9,16	9,24	8,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	7,00	9,43	11,39	7,78	9,87	-2,11	0,73	0,66	2,10	3,67
Jasa Pendidikan	4,15	6,30	4,46	4,35	4,81	6,31	5,18	5,75	7,25	6,12	2,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	4,93	7,18	8,79	5,53	9,61	4,60	4,08	7,82	6,48	7,06
Jasa lainnya	8,92	9,69	5,73	9,87	8,56	5,55	6,62	9,50	9,86	7,92	13,44
Produk Domestik Regional Bruto	4,81	4,98	4,91	5,03	4,93	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33	5,96

Sumber : BPS (diolah)

Dari sisi lapangan usaha (LU), akselerasi kinerja perekonomian terutama didukung oleh peningkatan LU Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, serta Akomodasi dan Makan Minum. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah berimplikasi pada pertumbuhan LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makan Minum. Menguatnya kinerja LU Perdagangan ditunjang oleh perdagangan barang budaya dan rekreasi, barang sandang, barang pribadi, serta kenaikan perdagangan makanan dan minuman. Percepatan perdagangan tersebut juga turut tecermin dari transaksi QRIS, BI-FAST, dan Uang Elektronik yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Lebih lanjut, LU Pertanian tercatat tumbuh sejalan dengan pertumbuhan produksi padi dan jagung seiring dengan siklus panen komoditas pertanian pada triwulan

laporan. Peningkatan produksi daging dan telur ayam untuk kebutuhan MBG, serta produksi kayu bulat turut meningkatkan kinerja LU Pertanian. Kenaikan kinerja LU konstruksi juga sejalan dengan pertumbuhan investasi bangunan yang tecermin dari berlanjutnya program pembangunan pemerintah seperti Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, proyek infrastruktur khususnya jalan tol dan nasional, serta ekspansi pembangunan SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Jawa Timur.

**Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga didukung oleh tetap kuatnya kinerja ekspor Jawa Timur meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Ekspor yang tetap kuat ini sejalan dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara yang meningkat pada triwulan laporan didorong oleh libur hari raya keagamaan seperti Idulfitri dan Nyepi serta program wisata untuk menarik minat wisatawan. Namun demikian, pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi tertekan oleh perlambatan laju ekspor barang baik dalam negeri, dan luar negeri. Moderasi ekspor dalam negeri tecermin pada deselerasi muat barang angkutan darat dalam negeri (DN) dan muat barang angkutan udara yang berkontraksi lebih dalam pada triwulan laporan. Lebih lanjut, ekspor luar negeri yang tumbuh lebih rendah utamanya terjadi pada komoditas emas perhiasan, tembaga, kayu, produk kimia, ikan dan hasil laut, kertas, tembakau dan rokok.

## 1.2. PDRB Sisi Pengeluaran

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga disokong oleh peningkatan aktivitas konsumsi pada momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri 2026 pada periode laporan. Di sisi lain, belanja pemerintah pada periode laporan terakselerasi seiring dengan realisasi belanja pegawai dan belanja barang APBN K/L di Jawa Timur. Peningkatan pertumbuhan investasi sejalan dengan investasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, serta impor barang modal.

### 1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Momentum ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat seiring tingginya aktivitas masyarakat selama momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri 2026. Peningkatan tersebut tecermin dari naiknya konsumsi ritel komponen pakaian, barang pribadi, dan rekreasi, serta konsumsi makanan dan minuman yang tetap tumbuh tinggi. Selain itu, volume transaksi pembayaran nontunai juga mengalami lonjakan. Masifnya kegiatan keagamaan pada momen Ramadan dan Idulfitri turut menopang peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan, sehingga meningkatkan kinerja konsumsi LNPRT. Dari sisi fiskal, konsumsi pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan tinggi pada triwulan laporan.

#### 1.2.1.1. Konsumsi Swasta (Rumah Tangga & LNPRT)<sup>3</sup> Kinerja Konsumsi Swasta Triwulan I 2026

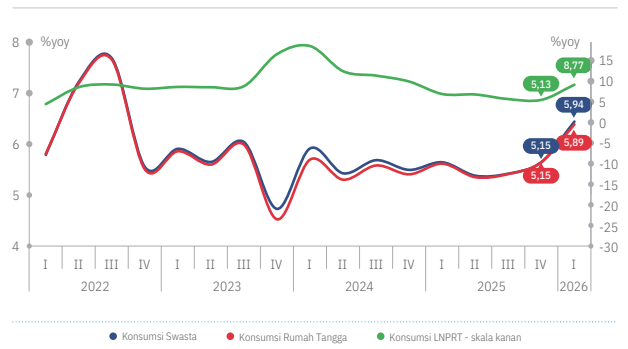
**Konsumsi swasta pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan IV 2025.** Pada triwulan I 2026, konsumsi swasta tumbuh 5,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Peningkatan pertumbuhan konsumsi swasta Jawa Timur dipacu oleh konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,89% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Sementara itu,

kinerja konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 8,77% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 5,13% (yoy) (Grafik 1.3).

**Kenaikan kinerja konsumsi rumah tangga Jawa Timur dipicu oleh aktivitas saat momen Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri seiring tingkat keyakinan ekonomi saat ini yang dalam fase optimis dan membaik.** Keyakinan konsumen Jawa Timur pada kondisi ekonomi saat ini berada pada fase optimis dan tercatat lebih tinggi pada triwulan laporan. Peningkatan keyakinan konsumen tersebut tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 118,13 berada pada fase optimis (>100) dan sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat 118,03 (Grafik 1.4).

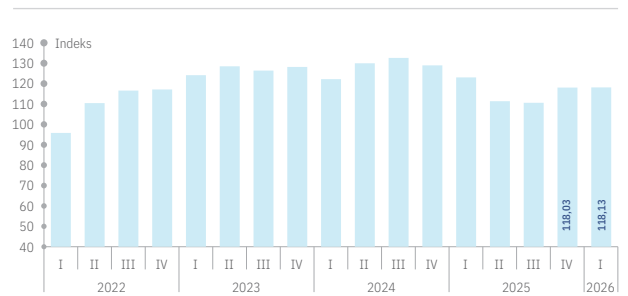
**Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga Jawa Timur pada triwulan laporan terjadi di sektor ritel, terutama barang sandang (pakaian), barang lainnya (barang pribadi), barang budaya rekreasi, serta konsumsi komponen makanan dan minuman yang tetap tumbuh tinggi dipicu oleh aktivitas konsumsi pada Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri.** Konsumsi ritel Jawa Timur yang solid direpresentasikan oleh Indeks Penjualan Riil (IPR) Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur. IPR pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 492,78 atau tumbuh tinggi sebesar 12,91% (yoy). Peningkatan konsumsi ritel terutama bersumber dari komponen barang sandang (pakaian), barang

Grafik 1.3. Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT



Sumber : BPS

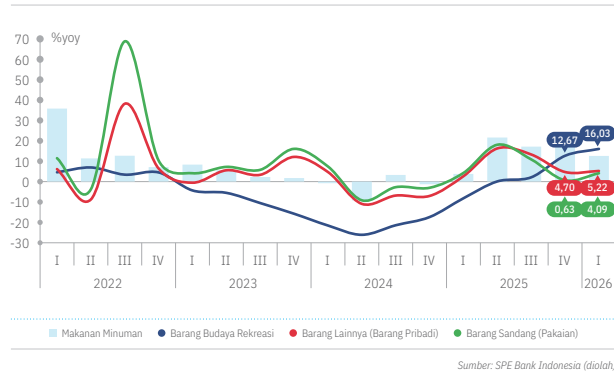
Grafik 1.4. Keyakinan Konsumen dan Kondisi Ekonomi Saat Ini



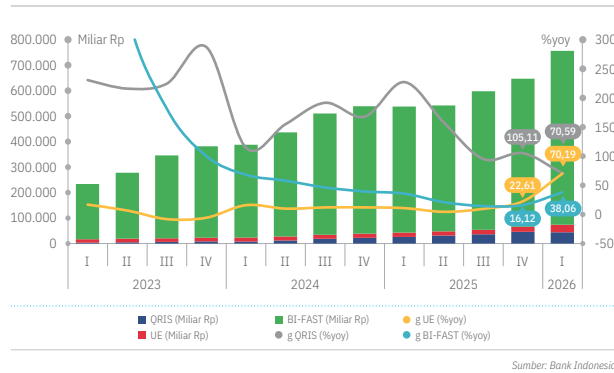
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

3. Konsumsi swasta merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.

**Grafik 1.5. Konsumsi Ritel Jawa Timur**



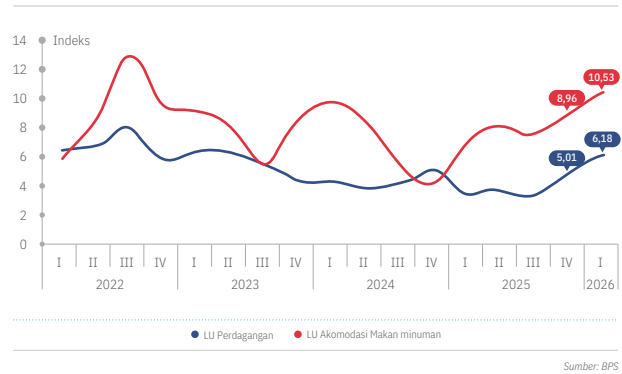
**Grafik 1.7. Transaksi QRIS, Uang Elektronik, BI-FAST**



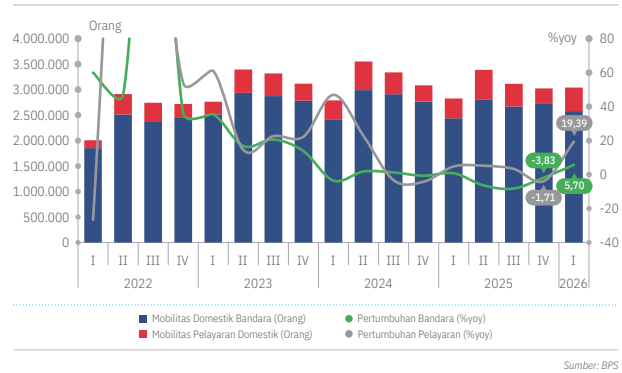
lainnya (barang pribadi), dan barang budaya rekreasi tercermin dari Indeks Riil Penjualan Eceran Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur yang masing-masing tercatat sebesar 0,63%, 4,70%, dan 12,67% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat menjadi 4,09%, 5,22%, dan 16,03% (yoy) pada periode laporan. Konsumsi makanan dan minuman juga tetap tumbuh tinggi pada triwulan I 2026 sebesar 12,58% (yoy) (Grafik 1.5). Lonjakan konsumsi ritel komponen barang sandang, barang pribadi, barang budaya rekreasi, dan tumbuhnya konsumsi makanan dan minuman menunjukkan tingginya konsumsi masyarakat terhadap pakaian, barang pribadi, aktivitas hiburan dan perayaan pada momen Idulfitri. Hal ini juga terkonfirmasi dari peningkatan LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman yang terutama meningkat pada triwulan laporan (Grafik 1.6).

**Penguatan kinerja konsumsi pada triwulan I 2026 juga tercermin pada peningkatan transaksi pembayaran nontunai dan mobilitas masyarakat.** Transaksi pembayaran nontunai, seperti transaksi QRIS, BI-FAST, dan uang elektronik (UE) secara keseluruhan mengalami peningkatan pada triwulan I 2026, dengan peningkatan terutama terjadi pada transaksi BI-FAST dan uang elektronik, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 38,06% dan 70,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (16,12% dan 22,61%, yoy). Transaksi QRIS juga tumbuh tinggi sebesar 70,59% (yoy) (Grafik 1.7). Lebih lanjut, percepatan konsumsi rumah tangga turut terkonfirmasi dari peningkatan mobilitas masyarakat, baik melalui jalur darat, laut, dan udara terutama pada musim mudik lebaran. Peningkatan

**Grafik 1.6. Perkembangan Kinerja LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman**



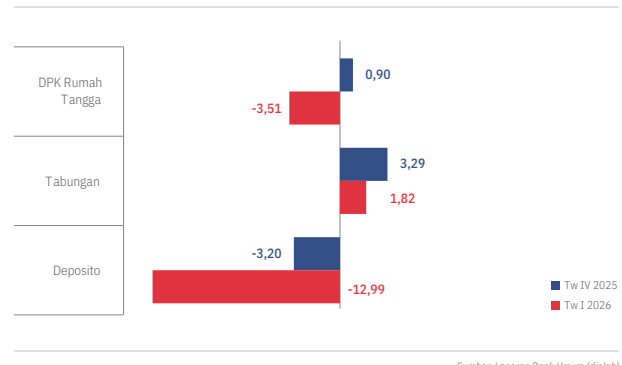
**Grafik 1.8. Mobilitas Bandara dan Pelayaran**



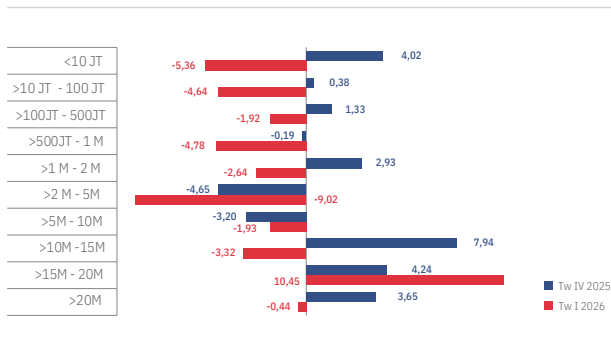
angkutan darat dan rel masing-masing tumbuh sebesar 13,64% dan 10,99% (yoy) (Rilis BPS 5 Mei 2026). Sementara mobilitas domestik melalui bandara Juanda dan pelayaran Tanjung Perak pada triwulan I 2026 masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,70% dan 19,39% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar 1,71% dan 3,83% (yoy) (Grafik 1.8).

**Di tengah peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2026 melambat, terutama disumbang komponen tabungan dan deposito.** DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Timur pada triwulan I 2026 terkontraksi sebesar 3,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang

**Grafik 1.9. Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan IV 2025 – Triwulan I 2026**



**Grafik 1.10. Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2025 – Triwulan I 2026**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

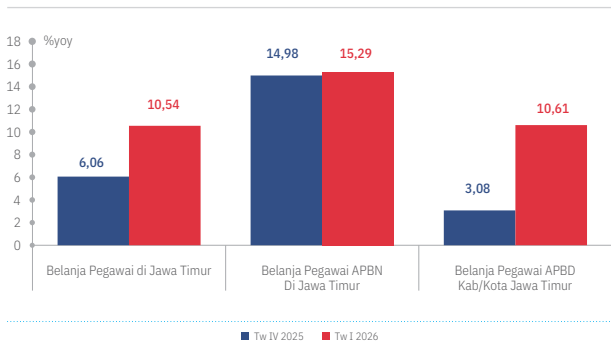
tumbuh terbatas 0,90% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK rumah tangga terutama disebabkan oleh perlambatan komponen tabungan dan terkontraksinya komponen deposito (Grafik 1.9). Ditinjau dari nilainya, perlambatan DPK rumah tangga pada triwulan laporan hampir terjadi pada semua kelompok nilai, kecuali pada kelompok nilai Rp 5-10 miliar dan Rp 15-20 miliar (Grafik 1.10). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat berasal dari penggunaan tabungan, serta adanya pergeseran preferensi keuangan ke instrumen lainnya yang lebih aman dengan imbal hasil (*yield*) yang lebih tinggi, seperti surat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah konsumsi masyarakat yang tinggi, daya beli di sebagian masyarakat, terutama kelas menengah bawah cenderung tertahan dan tidak mencerminkan kenaikan upah riil, sehingga menjadi sinyal potensi tertahannya daya beli masyarakat di periode yang akan datang, terutama pada periode *low season*.

### 1.2.1.2. Konsumsi Pemerintah

#### Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan I 2026

**Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 mencatatkan peningkatan pertumbuhan.** Pada triwulan I 2026, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 20,33% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,13% (yoy). Peningkatan kinerja terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai di Jawa Timur, diikuti oleh belanja barang APBN di Jawa Timur pada triwulan laporan.

**Grafik 1.11. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai di Jawa Timur**

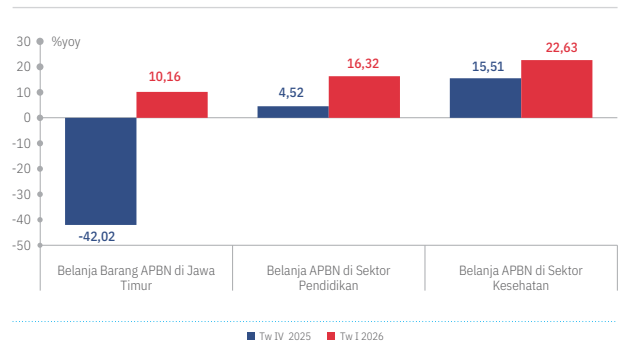


Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi Jawa Timur

**Belanja pegawai di Jawa Timur tumbuh meningkat pada triwulan I 2026.** Belanja pegawai di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 10,54% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,06% (yoy). Peningkatan belanja pegawai di Jawa Timur terutama ditunjang oleh peningkatan belanja pegawai kementerian/ lembaga (K/L) APBN dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Belanja pegawai yang bersumber dari APBN di Jawa Timur tercatat tumbuh 15,29% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,98% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja pegawai yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 10,61% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat cukup tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 3,08% (yoy). Peningkatan realisasi belanja pegawai pemerintah di lingkungan kementerian/ lembaga dan Kabupaten/Kota Jawa Timur terutama didukung oleh pengangkatan ASN baru dan percepatan pembayaran THR. THR yang disalurkan melalui APBN mencapai Rp1,39 triliun diterima oleh 371.003 pegawai, yang meliputi ASN, TNI/Polri, PPPK, dan PPNPN (Grafik 1.11).

**Realisasi belanja barang APBN di Jawa Timur meningkat pada triwulan I 2026.** Belanja barang kementerian/ lembaga (K/L) APBN di Jawa Timur tercatat tumbuh 10,16% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi cukup dalam sebesar 42,02% (yoy) (Grafik 1.12). Peningkatan belanja barang utamanya untuk pelayanan publik (satker BLU) bidang kesehatan dan juga pendidikan. Realisasi belanja APBN pada sektor pendidikan di Jawa Timur meningkat signifikan, dengan total realisasi hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp3,31 triliun, tumbuh sebesar 16,32% (yoy) pada triwulan I 2026. Sementara untuk belanja APBN di sektor kesehatan di Jawa Timur terealisasi mencapai Rp614,45 miliar atau tumbuh tinggi sebesar 22,63% (yoy) pada triwulan I 2026. Beberapa program kesehatan yang menjadi fokus belanja program pembangunan keluarga dan pengawasan obat (fasilitasi dan pembinaan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, penyelenggaraan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan), program pelayanan kesehatan lanjutan (pelatihan bidang kesehatan di 291 nakes, pembangunan dan perbaikan

**Grafik 1.12. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur**



Sumber: DJPb Provinsi Jawa Timur

sarana prasarana kesehatan 27 unit), serta program pelayanan kesehatan primer dan ketahanan pangan. **Lebih lanjut, realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda juga meningkat seiring realisasi untuk program MBG (Social Transfer in Kind).**

### 1.2.2. Investasi

Investasi pada triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi seiring peningkatan investasi bangunan untuk pembangunan program Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan. Akselerasi investasi juga disokong oleh investasi nonbangunan yang tecermin dari peningkatan pertumbuhan impor barang modal dan pembiayaan investasi pada triwulan laporan.

#### Kinerja Investasi Triwulan I 2026

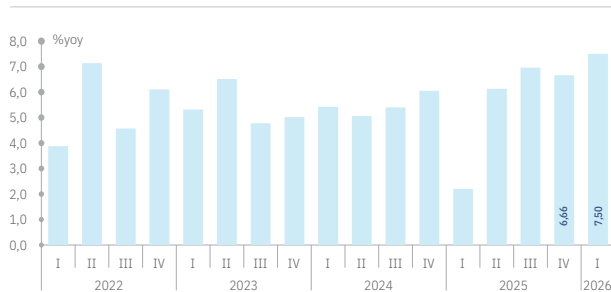
Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat. Investasi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 7,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 6,66% (yoy) (Grafik 1.13). Peningkatan investasi pada triwulan laporan terjadi pada investasi komponen bangunan maupun nonbangunan.

Peningkatan investasi bangunan terutama disumbang oleh pembangunan beberapa program pemerintah. Akselerasi pembangunan program pemerintah tecermin dari belanja modal yang bersumber dari APBN di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh signifikan sebesar 290,47% (yoy) dipengaruhi basis realisasi yang rendah pada periode yang sama tahun

sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan capaian di triwulan IV 2025 yang berkontraksi sebesar 4,88% (yoy) (Grafik 1.14). Beberapa pembangunan program pemerintah tersebut, meliputi Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan infrastruktur jalan, seperti Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, khususnya pada akses bandara Kediri, serta pembangunan jalur lintas selatan (JLS), terutama pada Brumbun-Pantai Sine, Bululawang-Tambak Rejo, Pantai Serang-Sumbersih, dan pembangunan Jalan Sirip Gondanglegi ke Balekambang. Ekspansi pembangunan SPPG dan KDMP di Jawa Timur turut menyokong investasi bangunan tumbuh lebih tinggi.

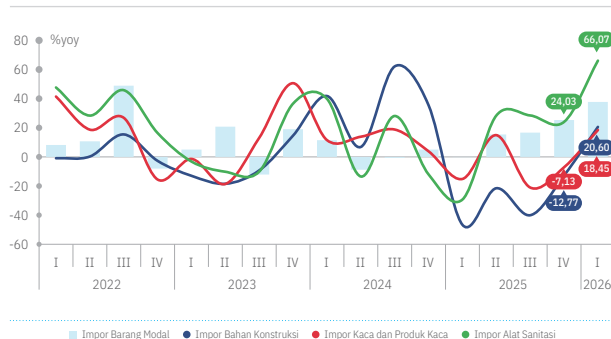
Percepatan investasi juga tecermin dari lebih tingginya pertumbuhan impor barang modal dan impor barang pendukung konstruksi. Pertumbuhan investasi nonbangunan sejalan dengan impor barang modal di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 37,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (25,32%, yoy). Peningkatan impor barang modal terjadi pada komoditas mesin peralatan mekanis, perabotan/alat penerangan, barang dari besi baja, dan kapal, perahu, struktur terapung. Aktivitas pembangunan yang lebih tinggi turut ditopang oleh pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi, seperti bahan konstruksi (semen, tanah liat, gips), kaca dan produk kaca, serta alat sanitasi. Impor bahan konstruksi, kaca, dan alat sanitasi pada triwulan I 2026 masing-masing tercatat sebesar 20,60%; 18,45%; dan 66,07% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat -12,77%; -7,13%; dan 24,03% (yoy) (Grafik 1.15 dan 1.16).

Grafik 1.13. Pertumbuhan Investasi Jawa Timur



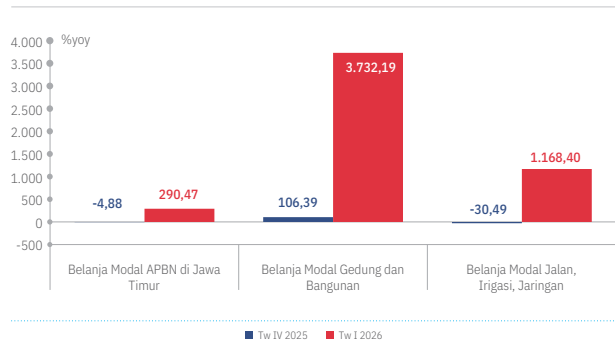
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.15. Pertumbuhan Impor Barang Modal dan Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur



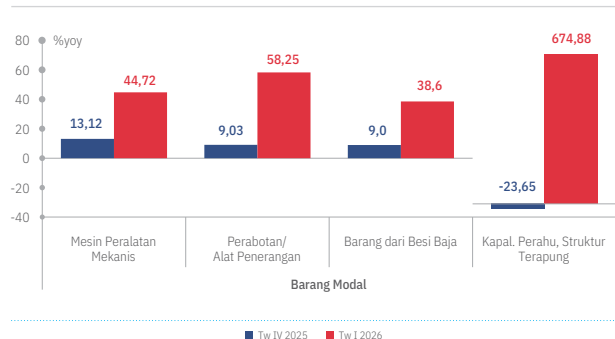
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.14. Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur



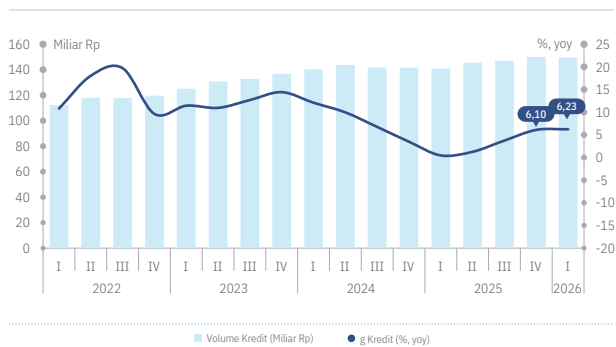
Sumber: DJPb Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.16. Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur



Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.17. Pertumbuhan Kredit Investasi Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Peningkatan kinerja investasi turut didorong oleh peningkatan kredit investasi, dan berlanjutnya pembangunan beberapa proyek besar swasta di Jawa Timur. Penyaluran kredit investasi di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,23% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,10% (yoy) (Grafik 1.17). Lebih lanjut, pertumbuhan investasi pada triwulan laporan turut disokong oleh pembangunan proyek besar swasta seperti, proyek industri kimia, proyek hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, serta *groundbreaking* beberapa proyek Badan Pengelola Investasi Indonesia di Jawa Timur, khususnya pada wilayah Sampang, Gresik, Malang, dan Banyuwangi.

### 1.2.3. Ekspor – Impor

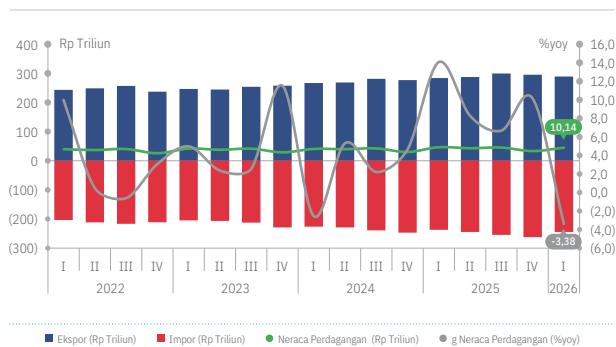
Kinerja net ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2026 mencatatkan surplus yang mengindikasikan daya saing ekspor daerah yang masih terjaga. Kinerja tersebut turut didukung oleh peningkatan aktivitas pariwisata yang tercermin dari kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga mendorong pertumbuhan ekspor jasa. Namun demikian, secara pertumbuhan net ekspor tercatat berkontraksi seiring perlambatan pertumbuhan ekspor yang lebih dalam dibandingkan perlambatan impor. Perlambatan ekspor LN, muat barang angkutan laut dalam negeri dan angkutan udara mengindikasikan penurunan pertumbuhan ekspor pada triwulan laporan. Sementara itu, lebih rendahnya kinerja impor utamanya terjadi pada impor DN yang tercermin dari aktivitas bongkar muat dalam negeri yang melambat dan moderasi impor LN beberapa komoditas seperti migas, besi baja, pupuk, dan mesin elektrik sebagai dampak dari konflik geopolitik Timur Tengah yang dimulai akhir Februari 2026.

### Kinerja Ekspor Impor Triwulan I 2026

**Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan I 2026 mencatatkan surplus.** Pada triwulan I 2026, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp44,84 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar Rp33,09 triliun (ADHK 2010). Meski demikian, secara pertumbuhan, pencapaian tersebut mencatatkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025, yakni dari 10,61% (yoy) menjadi -3,38% (yoy). Terkontraksinya

4. Pangsa ADHK ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2026 sebesar 55,24% terhadap total PDRB Jawa Timur.

**Grafik 1.18. Neraca Perdagangan Jawa Timur**



Sumber: BPS (diolah)

pertumbuhan tahunan (yoy) net ekspor seiring perlambatan ekspor yang lebih dalam dari perlambatan impor (Grafik 1.18).

**Kinerja ekspor triwulan I 2026 tetap tumbuh kuat meskipun lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya.** Ekspor Jawa Timur triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 1,96% (yoy), lebih landai dari capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 6,65% (yoy) (Tabel 1.1). Ekspor yang tetap kuat ditopang oleh ekspor jasa seiring peningkatan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kendati demikian, kinerja ekspor tercatat termoderasi utamanya disebabkan oleh perlambatan ekspor LN, kinerja muat barang angkutan laut (Pelabuhan Tanjung Perak) dalam negeri, dan muat barang angkutan udara. Kinerja ekspor LN yang lebih rendah terutama pada komoditas seperti emas perhiasan, tembaga, produk kimia, kayu, ikan dan hasil laut, tembakau, dan kertas.

Sementara itu, kinerja impor terpantau mengalami perlambatan, dari 6,23% (yoy) pada triwulan IV 2025, menjadi 3,00% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan terutama terjadi pada komponen impor dalam negeri (DN). Hal tersebut tercermin dari melambatnya aktivitas bongkar barang angkutan laut domestik, yang mengindikasikan penurunan intensitas arus barang antarwilayah. Selain itu, penurunan impor pada komoditas migas, besi baja, pupuk, mesin elektrik sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah turut berimplikasi pada perlambatan impor pada triwulan laporan.

### Kinerja Ekspor Triwulan I 2026

Kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh lebih landai dibandingkan triwulan IV 2025. Ekspor pada triwulan I 2026 mencapai Rp289,27 triliun (ADHK 2010), atau tumbuh sebesar 1,96% (yoy). Pencapaian tersebut melandai dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 6,65% (yoy)<sup>4</sup>. Tetap kuatnya ekspor ditopang oleh meningkatnya ekspor jasa di triwulan laporan. Berdasarkan olahan data laporan BPS, wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan 14,78% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 11,59% (yoy). Wisatawan nusantara tujuan Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang tercatat 3,79% (yoy), naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,16% (yoy). Kunjungan wisman ke Jawa Timur pada triwulan laporan didominasi oleh negara Malaysia sebanyak

22.436 kunjungan atau tumbuh mencapai 66,03% (yoy). Selain itu, pengunjung dari negara Amerika Serikat (AS) juga mengalami pertumbuhan sebesar 37,30% (yoy) pada triwulan I 2026, terutama pada Maret 2026 yang tumbuh hingga 155,73% (yoy) (Grafik 1.19).

**Kendati demikian, kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat melambat.** Perlambatan ini utamanya terjadi pada komponen ekspor LN. Berdasarkan data laporan Bea Cukai, ekspor LN non migas pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar 10,21% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,41% (yoy). Berdasarkan negara tujuan, perlambatan kinerja ekspor LN terjadi pada negara mitra dagang utama Jawa Timur, seperti AS, Swiss, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan (Grafik 1.20 – 1.21).

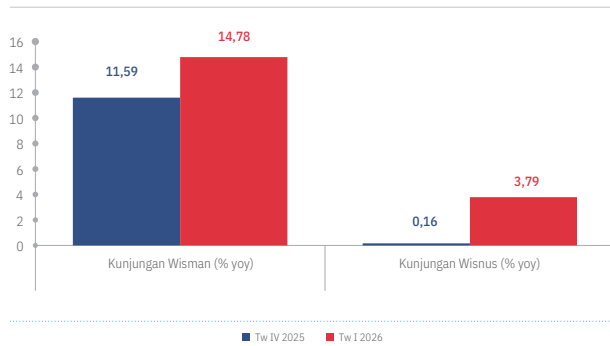
**Sementara berdasarkan komoditas, kinerja ekspor LN Jawa Timur yang lebih landai terutama dipengaruhi oleh ekspor komoditas emas perhiasan, tembaga, produk kimia, kayu, ikan dan hasil laut, tembakau rokok, serta kertas yang tumbuh melambat** (Grafik 1.22 – 1.23). Ekspor emas perhiasan pada triwulan I 2026 menunjukkan kontraksi yang lebih dalam sejalan dengan pelemahan ekonomi global dan inflasi tinggi yang memangkas daya beli barang mewah global. Selain itu, prospek inflasi dunia yang tinggi juga mendorong kecenderungan *hawkish* pada suku bunga AS. Hal ini mendorong peningkatan imbal hasil (*yield*) US *Treasury* menyebabkan investor mengalihkan investasinya pada pasar uang Amerika Serikat.

Kondisi ini berdampak pada *selling pressure* komoditas emas. Dari sisi negara tujuan ekspor, penurunan ekspor emas perhiasan terjadi pada negara tujuan Swiss, Vietnam, Korea Selatan.

Selain emas, perlambatan ekspor juga tercermin pada komoditas tembaga terutama di awal periode (Januari-Februari) terjadi seiring dengan penurunan produksi tembaga akibat perlambatan pasokan konsentrat tembaga seiring kendala operasional tambang yang terjadi di Papua Tengah. Selain itu, kondisi ketidakpastian global yang tinggi berdampak pada penurunan harga tembaga global sepanjang Maret 2026 yang berimplikasi pada pelemahan pendapatan ekspor. Selanjutnya, kinerja ekspor produk kimia dan kayu yang lebih rendah terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan global akibat tingginya ketidakpastian global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada berkurangnya permintaan kayu. Lebih lanjut, landainya kinerja ekspor ikan dan hasil laut, dan kertas disebabkan oleh tekanan konflik geopolitik Timur Tengah, serta perlambatan ekspor tembakau rokok dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat libur hari besar sepanjang triwulan I 2026.

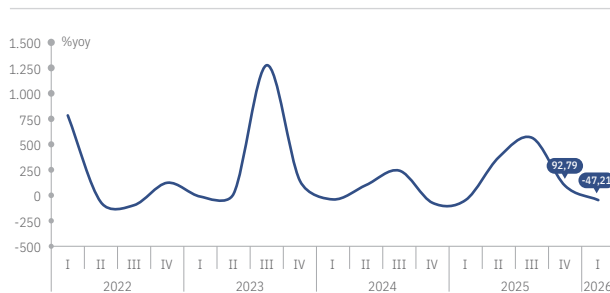
**Perlambatan kinerja ekspor Jawa Timur juga dipengaruhi oleh aktivitas muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda yang lebih tertahan.** Pertumbuhan aktivitas muat barang angkutan laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 3,01% (yoy), melambat

**Grafik 1.19.** Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tujuan Jawa Timur



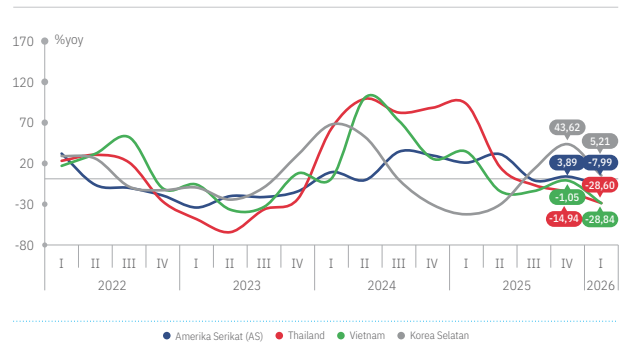
Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 1.21.** Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama (Swiss)



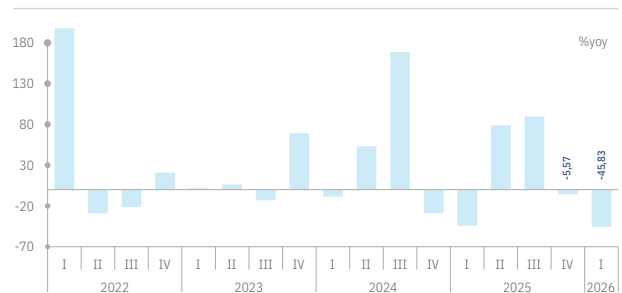
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.20.** Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama



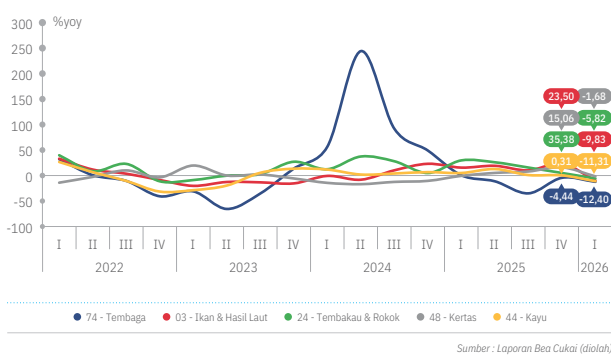
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.22.** Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak

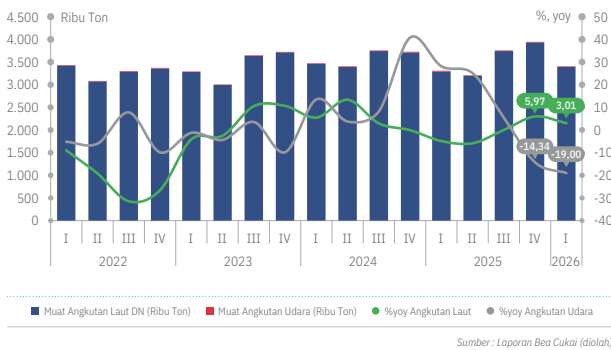


Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

**Grafik 1.23. Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama**



**Grafik 1.24. Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Bandara**



dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,97% (yoy). Aktivitas muat barang angkutan udara melalui Bandara Juanda juga mengalami perlambatan, dari terkontraksi sebesar 14,34% (yoy) pada triwulan IV 2025, menjadi terkontraksi lebih dalam pada triwulan laporan, yaitu sebesar 19,00% (yoy). Deselerasi muat barang angkutan udara juga mencerminkan perlambatan ekspor komoditas emas perhiasan di Jawa Timur (Grafik 1.24).

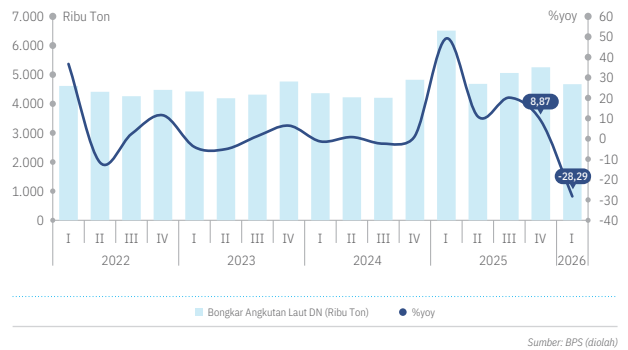
### Kinerja Impor Triwulan I 2026

**Impor Jawa Timur pada triwulan I 2026 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Impor pada PDRB Jawa Timur tercatat sebesar Rp244,43 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 3,00% (yoy), lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,23% (yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan impor pada triwulan I 2026 terutama dipicu oleh penurunan impor DN. Perlambatan kinerja impor DN terindikasi dari kinerja bongkar barang angkutan laut dalam negeri melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan laporan. Aktivitas bongkar barang di Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan I 2026 terpantau terkontraksi sebesar 28,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,87% (yoy) (Grafik 1.25).

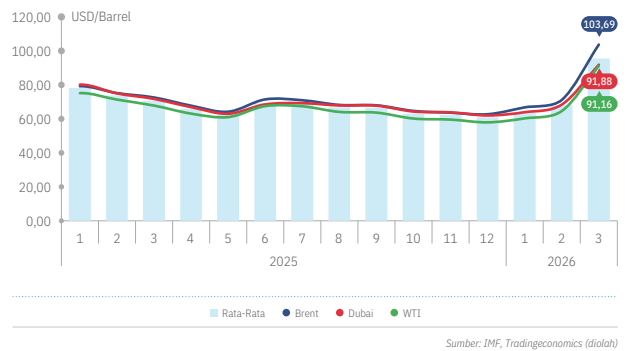
Perlambatan kinerja impor Jawa Timur juga dipengaruhi oleh moderasi impor LN pada beberapa komoditas yang terdampak konflik geopolitik Timur Tengah. Berdasarkan data laporan Bea

Cukai, beberapa komoditas impor LN, seperti migas, besi baja, pupuk, dan mesin elektrik pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan sejalan dengan ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Komoditas migas dan pupuk merupakan komoditas perdagangan utama di Timur Tengah, dan Selat Hormuz menjadi jalur perdagangan utama, sehingga konflik geopolitik di Timur Tengah akan berdampak pada terganggunya perdagangan dan kenaikan harga migas dan pupuk (Grafik 1.26). Kenaikan harga tersebut juga memicu kenaikan harga komoditas besi baja dan juga mesin sebagai produk turunan dari logam. Perlambatan impor komoditas migas, besi baja, pupuk, dan mesin elektrik pada triwulan I 2026 masing-masing tercatat sebesar -28,66%, -14,82%, 5,58%, dan 8,05% (yoy), lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya

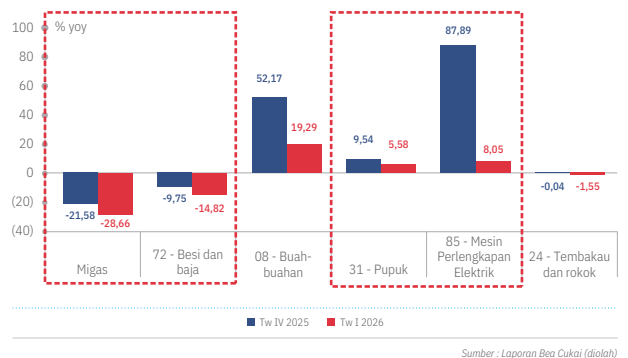
**Grafik 1.25. Pertumbuhan Bongkar Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak**



**Grafik 1.26. Harga Minyak Global**



**Grafik 1.27. Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur Berdasarkan Komoditas**



(-21,58%, -9,75%, 9,54%, dan 87,89%, (yoy). Selain itu, impor buah-buahan dan tembakau juga mengalami perlambatan pada triwulan laporan (Grafik 1.27).

### 1.3. PDRB Sisi Lapangan Usaha

Kinerja ekonomi Jawa Timur triwulan I 2026 yang meningkat didorong oleh peningkatan kinerja LU utama, yakni LU Perdagangan, LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Akomodasi Makan dan Minum. Kendati demikian, ekonomi Jawa Timur tertahan untuk tumbuh lebih tinggi akibat perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan.

#### 1.3.1. Industri Pengolahan

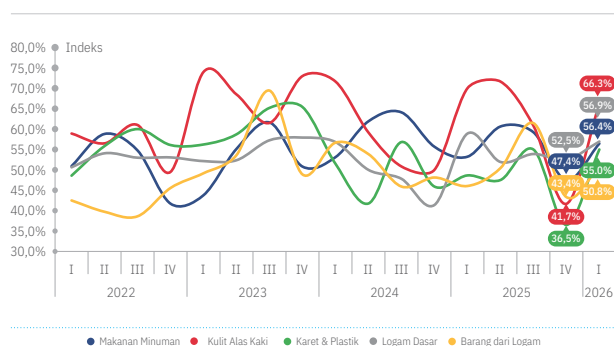
Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 tetap tumbuh solid, kendati termoderasi dibandingkan triwulan IV 2025, seiring dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi, di tengah perlambatan kinerja ekspor pada triwulan laporan.

#### Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan I 2026

Pada triwulan I 2026, kinerja LU Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,99% (yoy), tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibandingkan capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,28% (yoy) (Tabel 1.2). Tetap kuatnya Industri Pengolahan Jawa Timur ditopang oleh kinerja sub LU industri makanan dan minuman, industri kulit dan alas kaki, industri karet, industri logam dasar, dan industri barang dari logam sejalan dengan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) sub LU tersebut yang meningkat (Grafik 1.28).

Tertahannya pertumbuhan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur yang lebih tinggi pada triwulan I 2026 dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas manufaktur pada industri sub LU industri pengolahan tembakau, industri kimia, industri kayu, industri tekstil pakaian jadi, industri kertas, industri galian non-logam, serta industri furnitur. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia di Jawa Timur, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) di sub LU industri pengolahan

Grafik 1.28. Peningkatan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur



Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

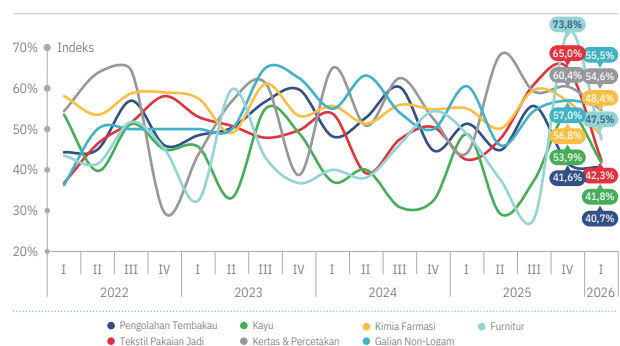
tembakau, industri kimia, industri kayu, industri tekstil pakaian jadi, industri kertas, industri galian non-logam, serta industri furnitur pada triwulan laporan masing-masing tercatat sebesar 40,66%, 48,39%, 41,79%, 42,29%, 54,64%, 55,50% dan 47,50% (Indeks). Kinerja tersebut lebih moderat dibandingkan kinerja manufaktur pada triwulan IV 2025 yang masing-masing tercatat 41,58%, 56,79%, 53,93%, 65,00%, 60,42%, 57,00% dan 73,75% (Indeks). Pencapaian tersebut mencerminkan aktivitas produksi beberapa industri utama di Jawa Timur yang tertahan, terutama dipengaruhi oleh gejolak perekonomian global dan konflik geopolitik, sehingga berimplikasi pada lebih rendahnya permintaan global dan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang terdampak (Grafik 1.29).

#### Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur turut tecermin dari melambatnya kinerja ekspor Jawa Timur, terutama ekspor LN.

Data dari Laporan Bea Cukai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor LN pada LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 mencapai USD5.122 juta atau terkontraksi sebesar 8,83% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 6,98% (yoy) (Grafik 1.30). Perlambatan kinerja ekspor LN LU Industri Pengolahan terutama terjadi pada sub LU industri makanan, industri pengolahan lainnya, industri logam dasar, industri kayu, industri kimia, pengolahan tembakau, dan industri kertas. Perlambatan ekspor pada produk industri kayu, kimia, pengolahan tembakau, dan kertas sejalan dengan tertahannya kinerja manufaktur (PMI) dari sub LU tersebut. Perlambatan kinerja ekspor industri makanan dan minuman terutama terjadi pada komoditas margarin, kakao, dan pembekuan biota laut (ikan dan hasil laut).

Perlambatan ekspor dipengaruhi oleh ketegangan konflik geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, serta untuk kakao terdapat penurunan harga pada triwulan laporan. Lebih rendahnya ekspor industri pengolahan lainnya dan logam dasar disebabkan oleh ekspor perhiasan dan tembaga seiring dengan pelemahan ekonomi global, inflasi tinggi, penguatan dolar AS, serta penurunan produksi tembaga akibat penghentian sementara operasional tambang di Papua Tengah. Sementara tertahannya ekspor pada industri kayu, kimia, pengolahan tembakau, dan kertas terutama terjadi pada komoditas kayu

Grafik 1.29. Perlambatan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Sub LU Industri Pengolahan Jawa Timur

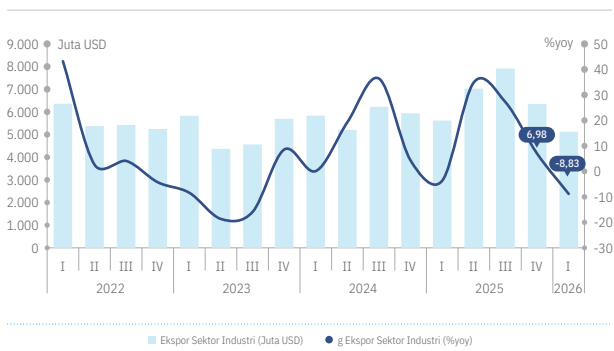


Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

lapis (*plywood*), kimia dari hasil pertanian, rokok putih, dan barang kertas dan karton. Perlambatan ekspor dari komoditas tersebut disebabkan oleh pelemahan ekonomi global, yang berdampak pada penurunan permintaan, pelemahan sektor properti (kayu), dan penurunan produksi (tembakau dan rokok) (Grafik 1.31).

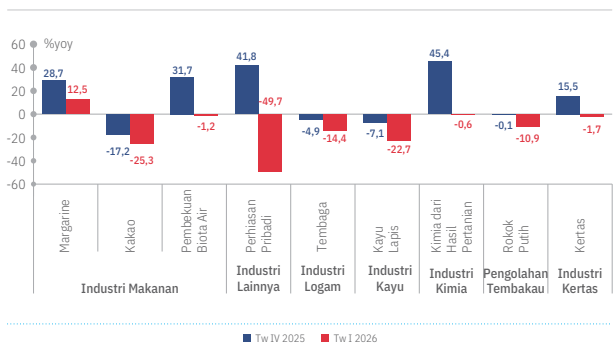
Lebih lanjut, aktivitas industri di Jawa Timur yang tertahan turut tercermin dari perlambatan konsumsi listrik di sektor industri. Konsumsi listrik industri Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,48 miliar KWh atau tumbuh terbatas 0,30% (yoy). Konsumsi listrik tersebut tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,85 miliar KWh atau tumbuh sebesar 4,78% (yoy) (Grafik 1.32).

Grafik 1.30. Perkembangan Ekspor LU Industri Pengolahan



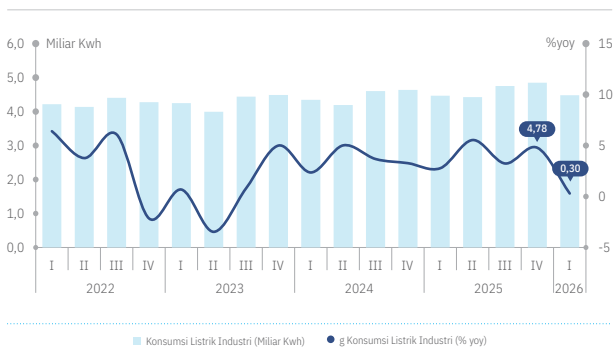
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.31. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Industri Pengolahan



Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.32. Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: PLN (diolah)

### 1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peningkatan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (LU Perdagangan) pada triwulan I 2026 terutama ditopang peningkatan penjualan eceran, khususnya pada komponen pakaian, barang pribadi, rekreasi, serta penjualan komponen makanan dan minuman yang masih tumbuh tinggi. Selain itu, penguatan aktivitas transaksi nontunai turut memperkuat kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur.

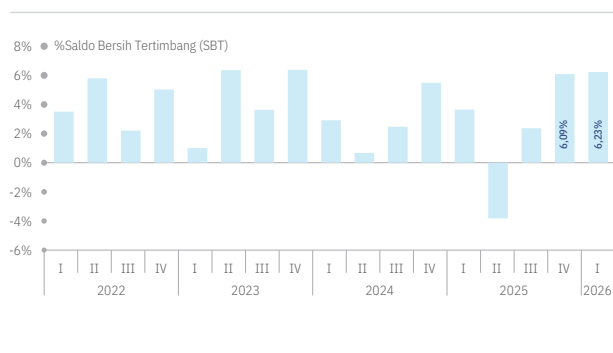
#### Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan I 2026

Pada triwulan I 2026, kinerja LU Perdagangan terpantau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 6,18% (yoy), berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) (Tabel 1.2). Pertumbuhan LU Perdagangan di Jawa Timur pada periode laporan terutama disokong oleh peningkatan penjualan eceran, khususnya komponen pakaian, barang pribadi, budaya rekreasi, penjualan komponen makanan dan minuman yang tumbuh tinggi, serta menguatnya transaksi nontunai. Peningkatan kinerja LU Perdagangan terkonfirmasi dari lebih tingginya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Kenaikan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan lebih tingginya kondisi usaha LU Perdagangan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur dari 6,09% (SBT) pada triwulan IV 2025, menjadi sebesar 6,23% (SBT) pada triwulan laporan (Grafik 1.33).

Peningkatan kinerja LU Perdagangan juga terefleksi pada peningkatan perdagangan ritel komponen barang sandang (pakaian), barang lainnya (barang pribadi), barang budaya dan rekreasi, serta makanan dan minuman yang tumbuh tinggi. Hal ini terkonfirmasi dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) – Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia komponen barang sandang, barang lainnya, serta barang budaya dan rekreasi masing-masing tercatat tumbuh sebesar 4,09%, 5,22%, dan 16,03% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,63%, 4,70%, dan 12,67% (yoy) (Grafik 1.34). Kemudian, penjualan ritel pada komponen makanan dan minuman pada triwulan I 2026 yang tumbuh tinggi sebesar 12,58% (yoy) turut menunjang pertumbuhan LU Perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi ritel masyarakat menunjukkan peningkatan seiring dengan periode Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan HBKN Idulfitri tahun 2026.

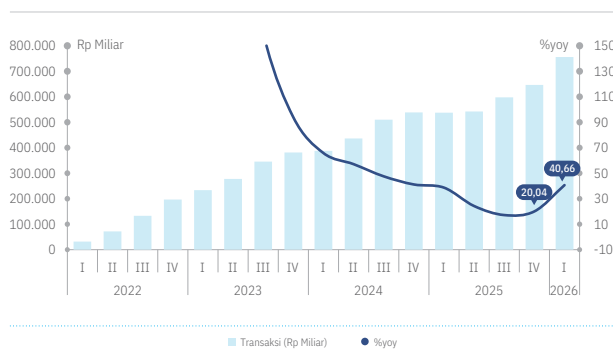
Meningkatnya kinerja perdagangan pada triwulan I 2026 juga turut didukung oleh peningkatan transaksi nontunai serta pembiayaan. Transaksi pembayaran nontunai, seperti transaksi QRIS, BI-FAST, dan uang elektronik (UE) secara total mengalami peningkatan pada triwulan I 2026. Transaksi nontunai pada triwulan laporan tercatat mencapai Rp755,86 triliun

**Grafik 1.33. Perkembangan Penjualan LU Perdagangan**



Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.35. Perkembangan Transaksi Nontunai dan Uang Elektronik**



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

atau tumbuh tinggi sebesar 40,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,04% (yoy) (Grafik 1.35). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat tidak hanya terakselerasi melalui kanal konvensional, namun juga transaksi digital yang tumbuh tinggi. Lebih lanjut, kredit perbankan yang disalurkan ke LU Perdagangan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp158,91 triliun atau tumbuh 0,37% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,02% (yoy). Peningkatan pembiayaan perbankan ke LU Perdagangan terjadi baik di Kredit Modal kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI) (Grafik 1.36).

### 1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan produksi padi, produksi jagung, dan produk peternakan seperti daging ayam dan telur ayam untuk mendukung program MBG. Selain itu produksi kayu juga mengalami peningkatan khususnya produksi kayu bulat.

#### Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan I 2026

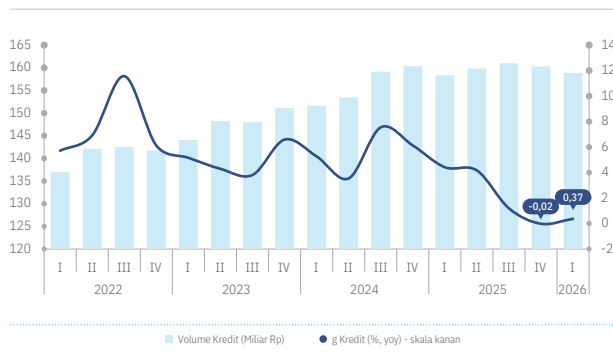
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 8,85% (yoy) pada triwulan I 2026, terakselerasi dibandingkan capaian triwulan IV 2025

**Grafik 1.34. Perkembangan Penjualan Eceran Jawa Timur**



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.36. Perkembangan Kredit LU Perdagangan**



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

sebesar 7,73% (yoy) (Tabel 1.2). Peningkatan kinerja LU Pertanian terutama disumbang oleh lebih tingginya produksi komoditas padi, jagung, daging dan telur ayam ras. Akselerasi kinerja LU Pertanian turut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia di Jawa Timur. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kondisi Usaha Sub LU Tanaman Pangan meningkat di triwulan I 2026 yaitu 0,65%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,00% (Grafik 1.37).

#### Peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2026 disokong oleh produksi komoditas padi di Jawa Timur yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan.

Produksi padi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat sejumlah 3,6 juta ton padi, meningkat dari produksi periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 2,9 juta atau tumbuh sebesar 21,86% (yoy) (Grafik 1.38). Peningkatan produksi jagung juga turut mendorong pertumbuhan LU Pertanian, khususnya tanaman pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, produksi jagung pada triwulan I 2026 tumbuh 21,43% (yoy), lebih tinggi dari produksi jagung pada triwulan IV 2025 yang berkontraksi -22,61% (yoy). Kinerja positif tersebut sejalan dengan peningkatan produksi pada musim panen raya padi dan jagung pada triwulan laporan.

Lebih tingginya kinerja LU Pertanian Jawa Timur turut didorong peningkatan sub sektor peternakan dan perikanan utamanya komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras. Peningkatan produksi tecermin dari data Dinas Peternakan yang menyampaikan bahwa produksi daging ayam mencapai

149 ribu ton dan produksi telur ayam mencapai 560 ribu ton pada triwulan I 2026 (Grafik 1.39). Peningkatan kinerja komoditas daging ayam ras tumbuh sejalan dengan penguatan program swasembada protein nasional, termasuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

**Program aksi pengamanan HBKN Idulfritri 2026 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendorong produktivitas komoditas pertanian Jawa Timur.** Beberapa program yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan Jawa Timur antara lain meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi dan pengembangan kawasan. Langkah ini dilakukan melalui program kerjasama dengan SPPG dalam rangka pemenuhan

pasokan bahan baku MBG, alokasi pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen, pemberian target pompanisasi, bantuan benih pada kawasan padi, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), dan memasifkan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dari subsektor peternakan, program prioritas dalam mendorong produktivitas antara lain program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD). Implementasi berbagai program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan mendukung pertumbuhan LU Pertanian di Jawa Timur.

### 1.3.4. Konstruksi

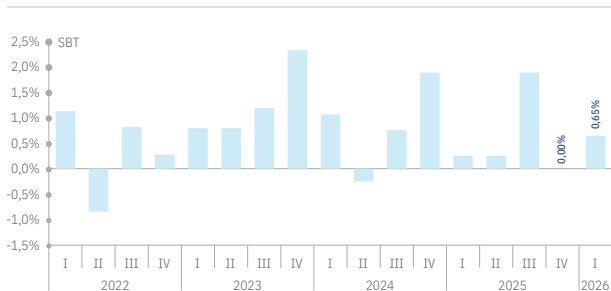
LU Konstruksi pada triwulan I 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pembangunan beberapa proyek pemerintah, meliputi Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan proyek infrastruktur khususnya jalan tol dan nasional, serta ekspansi pembangunan SPPG dan KDMP di wilayah Jawa Timur. Peningkatan kinerja LU Konstruksi juga tecermin pada peningkatan impor barang pendukung konstruksi, seperti bahan konstruksi, kaca, dan alat sanitasi.

#### Kinerja LU Konstruksi Triwulan I 2026

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi tumbuh 7,12% (yoy) pada periode laporan, tumbuh lebih tinggi daripada triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,57% (yoy) (Tabel 1.2). **Peningkatan LU Konstruksi terutama ditunjang oleh pembangunan beberapa program pemerintah.** Percepatan pembangunan program pemerintah tecermin dari peningkatan belanja modal yang bersumber dari APBN di Jawa Timur pada triwulan I 2026, yaitu sebesar 290,47% (yoy), tumbuh signifikan dan lebih tinggi dibandingkan capaian di triwulan IV 2025 yang masih terkontraksi sebesar 4,88% (yoy) (Grafik 1.40). Beberapa program pemerintah yang menjadi fokus pembangunan meliputi Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan infrastruktur jalan, seperti Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, khususnya pada akses bandara Kediri, serta pembangunan jalur lintas selatan (JLS), terutama pada Brumbun – Pantai Sine, Bululawang – Tambak Rejo, Pantai Serang – Sumbersih, dan pembangunan Jalan Sirip Gondanglegi ke Balekambang. Realisasi belanja untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Prasarana Strategis mencatatkan belanja yang tinggi, yaitu masing-masing tercatat sebesar Rp578,78 miliar dan Rp594,52 miliar (Grafik 1.41). Ekspansi pembangunan SPPG dan KDMP di wilayah Jawa Timur turut mendorong akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan.

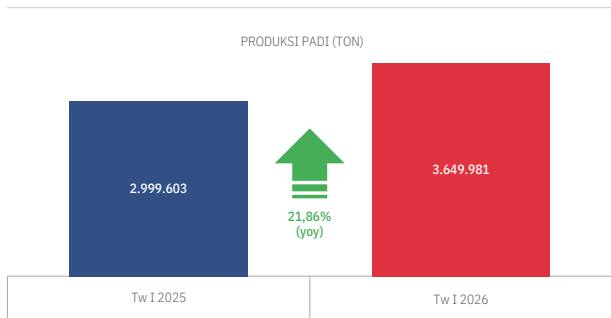
Peningkatan LU Konstruksi pada triwulan laporan sejalan dengan lebih tingginya pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi dan konsumsi semen yang masih tumbuh positif. Hal ini terefleksi pada impor bahan konstruksi (semen, tanah liat, gips), kaca dan produk kaca, serta alat sanitasi yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Impor

Grafik 1.37. Perkembangan Kondisi Usaha Sub LU Tanaman Pangan



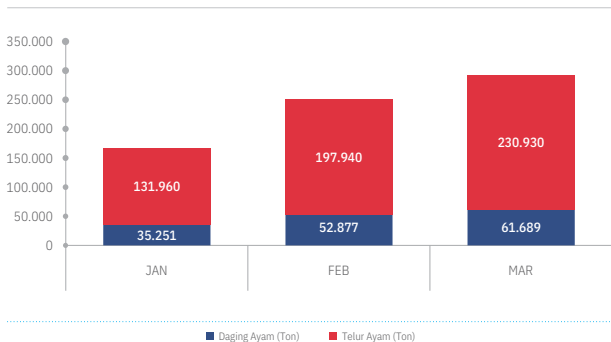
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.38. Produksi Padi Jawa Timur



Sumber: BPS, Dinas Pertanian Jawa Timur (diolah)

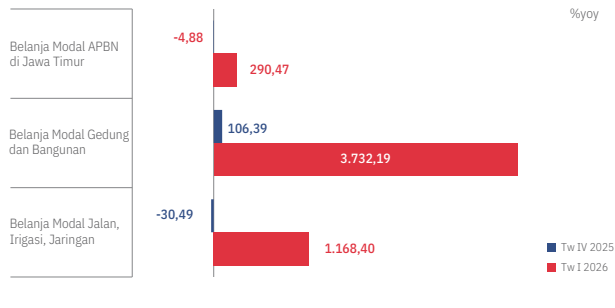
Grafik 1.39. Produksi Daging dan Telur Ayam Jawa Timur



Sumber: Dinas Peternakan Jawa Timur (diolah)

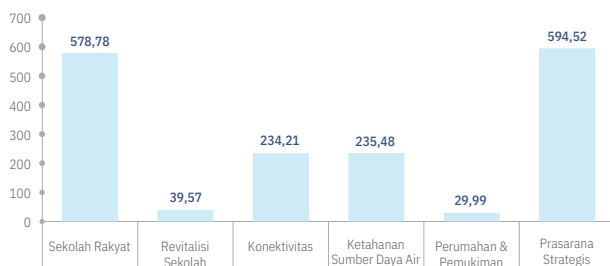
bahan konstruksi, kaca dan produk kaca, serta alat sanitasi pada triwulan I 2026, tercatat masing-masing tumbuh sebesar 20,60%, 18,45%, dan 66,07% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -12,77%, -7,13%, dan 24,03% (yoy) (Grafik 1.42). Konsumsi semen yang masih tumbuh positif turut menyumbang pada pertumbuhan LU Konstruksi. Konsumsi semen di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat 1.896.669 ribu ton atau tumbuh positif sebesar 8,36% (yoy).

**Grafik 1.40. Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi**



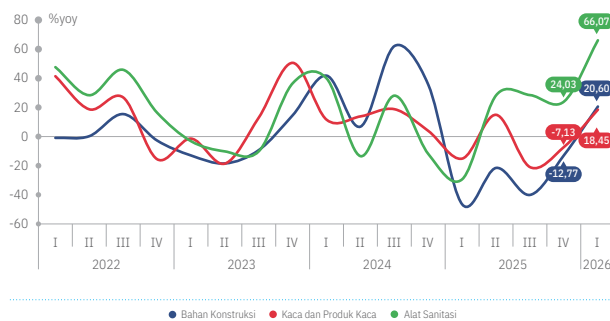
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.41. Sumber: Asosiasi Semen (diolah)**



Sumber: Asosiasi Semen (diolah)

**Grafik 1.42. Perkembangan Impor Barang Pendukung Konstruksi**



Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

### 1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan I 2026 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih tingginya pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan

laporan terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan penjualan barang budaya rekreasi, penjualan makanan dan minuman yang tumbuh positif, akselerasi jasa penyediaan makanan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pertumbuhan kunjungan wisatawan.

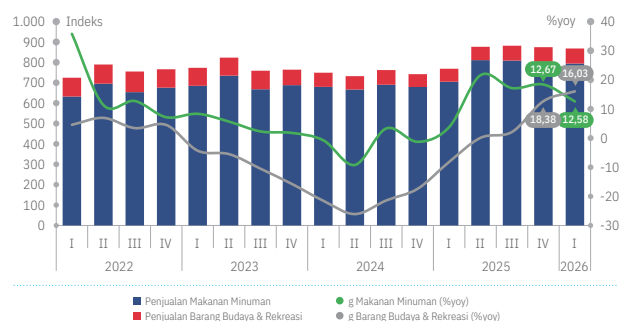
### Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan I 2026

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2026, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 10,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 8,86% (yoy) (Tabel 1.2). Akselerasi kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipicu oleh pertumbuhan penyedia makanan dan minuman, serta pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran – Bank Indonesia di Jawa Timur, permintaan penjualan makanan dan minuman tetap mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan positif, serta penjualan barang budaya dan rekreasi mengalami peningkatan. Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Eceran yang masing-masing tumbuh 12,58% dan 16,03% (yoy). Penjualan ritel makanan dan minuman yang masih tumbuh tinggi dan positif sejalan dengan peningkatan kondisi usaha jasa penyedia makanan dan minuman dipicu oleh peningkatan SPPG untuk program MBG yang hingga Maret tahun 2026 ini sudah beroperasi 25.082 unit, serta akselerasi permintaan pada periode Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan Idulfitri 2026 (Grafik 1.43 – 1.44).

Peningkatan lebih lanjut didorong oleh akselerasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan domestik ke Jawa Timur. Jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 63,39 ribu kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 14,78% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan tumbuh sebesar 11,59% (yoy) (Grafik 1.45). Kunjungan wisman ke Jawa Timur pada triwulan laporan didominasi oleh negara Malaysia sebanyak 22.436 kunjungan atau tumbuh mencapai

**Grafik 1.43. Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman dan Budaya Rekreasi**



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

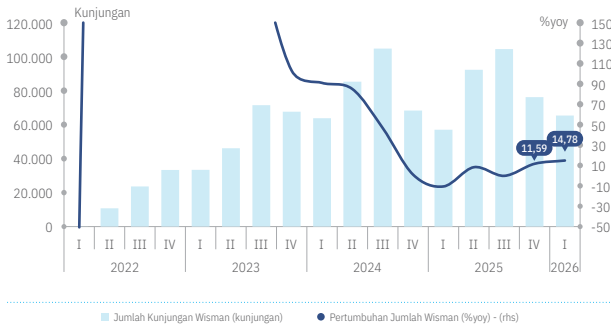
66,03% (yoy). Selain itu, pengunjung dari negara Amerika Serikat (AS) juga mengalami pertumbuhan sebesar 37,30% (yoy) pada triwulan I 2026, terutama pada Maret 2026 yang tumbuh hingga 155,73% (yoy). Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga ditunjang oleh lebih tingginya pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara ke Jawa Timur, dari tumbuh terbatas 0,16% (yoy) di triwulan IV 2025, menjadi tumbuh 3,79% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.46). Fenomena ini didukung oleh momen mudik libur lebaran Idulfitri 2026.

**Grafik 1.44. Perkembangan SPPG yang Telah Beroperasi**



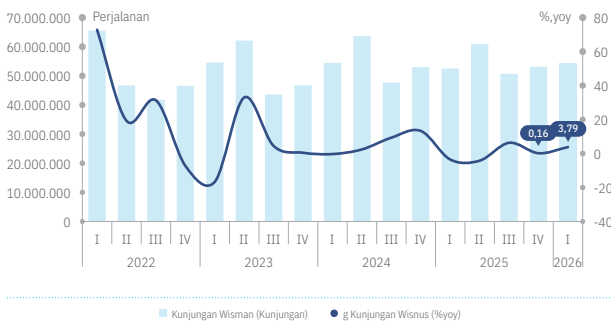
Sumber: BGN (diolah)

**Grafik 1.45. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)**



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 1.46. Pertumbuhan Perjalanan Wisatawan Nusantara Tujuan Jawa Timur**



Sumber: BPS (diolah)

## Investasi Jawa Timur Melaju di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus: Sebagai Motor Pertumbuhan Investasi Daerah

Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara merupakan pusat gravitasi (*center of gravity*) perekonomian nasional sekaligus simpul utama distribusi logistik bagi kawasan Indonesia bagian timur. Hal tersebut ditopang oleh keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 21 rute dari total 39 rute tol laut nasional, sehingga hampir 80% distribusi logistik menuju 19 provinsi di kawasan Indonesia bagian timur disuplai dari Jawa Timur. Kondisi ini menegaskan bahwa peran Jawa Timur tidak terbatas pada fungsi distribusi barang dan logistik, tetapi juga mencakup perannya sebagai penghubung utama aktivitas perdagangan, industri, dan investasi antarwilayah di Indonesia.

Selain didukung oleh pelabuhan strategis, Jawa Timur juga memiliki dukungan konektivitas yang cukup kuat melalui jaringan jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang saling terintegrasi. Dukungan konektivitas tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat rantai pasok industri, serta meningkatkan daya tarik investasi di berbagai wilayah Jawa Timur. Posisi tersebut semakin memperkuat peran Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan investasi di kawasan Indonesia bagian timur.

Keunggulan posisi dan konektivitas tersebut turut berkontribusi pada penguatan kinerja investasi Jawa Timur, khususnya yang didorong oleh perkembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada triwulan I tahun 2026, investasi berkontribusi sebesar 26,86 persen dari PDRB Jawa Timur dan meningkat sekitar 7,50% (yoy) dibandingkan triwulan I tahun 2025 (BPS 2026, diolah). Peningkatan tersebut ditopang pembangunan beberapa program pemerintah dan peningkatan investasi non-bangunan yang tecermin dari peningkatan impor barang modal. Selain itu,

terakselerasinya investasi di Jawa Timur juga didorong adanya investasi pada KI dan KEK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi masih menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, salah satunya melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Mendukung hal tersebut, saat ini di Provinsi Jawa Timur telah memiliki 2 (dua) KEK dan 13 (tiga belas) KI yang terus berkembang (Dewan Nasional KEK, 2026; Disperindag Jatim, 2026).

**Perkembangan investasi pada KEK di Jawa Timur menunjukkan penguatan aktivitas hilirisasi industri dan peningkatan daya tarik investasi.** Hal ini antara lain tecermin dari perkembangan KEK Malang yang pada triwulan I tahun 2026 mencatat realisasi investasi Rp53,4 miliar atau sekitar 8% dari target sebesar Rp700 miliar, dengan kontribusi terbesar untuk bidang usaha pendidikan (Dewan Nasional KEK, 2026). Perkembangan investasi KEK Gresik juga menunjukkan adanya akselerasi, dengan adanya investasi untuk pengembangan hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi yang diperkirakan akan turut menyerap hingga 7.000 tenaga kerja dan pada April 2026 telah dilakukan peresmian *groundbreaking* oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Selain itu di KEK Gresik juga terdapat aliran investasi yang diperkirakan sebesar USD 600 juta dari Tiongkok, untuk pembangunan pabrik melamin.

**Perkembangan serupa juga terjadi pada KI di berbagai wilayah Jawa Timur, yang turut mencatatkan peningkatan aktivitas dan menunjukkan potensi besar sebagai penggerak investasi daerah.** Salah satu KI di Kota Surabaya pada triwulan I tahun 2026 mencatat peningkatan aktivitas kawasan yang ditunjukkan melalui realisasi laba sebesar 131% dan nilai Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) yang mencapai Rp70 miliar, serta modernisasi fasilitas kawasan. Selain itu, terdapat beberapa kawasan industri lain yang berpotensi untuk ditawarkan sebagai lokasi investasi, meliputi KI di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Masing-masing kawasan industri tersebut memiliki karakteristik, fokus sektor industri, dan keunggulan komparatif yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur pendukung di wilayahnya. Secara lebih rinci, profil industri potensial dan keunggulan setiap KI berdasarkan lokasi kabupaten/kota disajikan pada Tabel 1. dan Gambar 2. berikut.



Gambar 1. Ilustrasi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur, 2026





**BOKS 1**

Selain penguatan infrastruktur, **aspek regulasi dan koordinasi lintas sektor juga merupakan bagian dari respons strategis terhadap tantangan yang diidentifikasi, mengingat kepastian regulasi dan stabilitas iklim usaha menjadi prasyarat utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.** Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan investasi, sehingga harmonisasi regulasi daerah dan evaluasi insentif investasi perlu terus dilakukan secara berkala. Di sisi lain, koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, OPD teknis, aparat keamanan, dan pelaku usaha juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan iklim investasi yang kondusif di lapangan.

**Secara keseluruhan, investasi di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang positif dan berpotensi terus menguat, didukung oleh pertumbuhan KI dan KEK yang terus menguat di berbagai wilayah.** Namun, berbagai tantangan yang ada perlu diselesaikan secara sistematis agar potensi tersebut dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk itu, diperlukan sinergi dan langkah strategis yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengembangan KI dan KEK sebagai motor pertumbuhan investasi di Jawa Timur.

**Pengembangan KI dan KEK merupakan salah satu kunci dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 sebesar 6,3–7,5%.** Hal tersebut sejalan dengan tema Rancangan Awal RKP Provinsi Jawa Timur 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tren peningkatan investasi dan memperkuat pengembangan KI dan KEK di Jawa Timur, terdapat beberapa usulan rekomendasi, antara lain:

- Dukungan percepatan harmonisasi RTRW dan RDTR, khususnya pada kawasan yang sedang dalam proses pengembangan menjadi KI dan KEK baru, guna memberikan kepastian tata ruang bagi investor
- Dukungan dan fasilitasi penyelesaian penyediaan lahan untuk investasi dalam kaitannya penyesuaian dengan kebijakan LSD, LP2B, dan LBS, disertai kejelasan arah kebijakan dalam penyesuaian antara kebutuhan lahan industrialisasi dan ketahanan pangan, guna meningkatkan kepastian dan kesiapan kawasan bagi investor.

- Penguatan konektivitas dan infrastruktur strategis antarwilayah, melalui percepatan pembangunan jalan tol dan Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang dapat membuka akses bagi kawasan industri di wilayah barat dan timur Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Nganjuk, dan Banyuwangi, serta pemenuhan utilitas dasar pada kawasan potensial investasi.
- Penguatan promosi dan pemasaran KI dan KEK di Jawa Timur, melalui fasilitasi kegiatan *investment matching*, *roadshow* investasi, serta optimalisasi platform informasi kawasan yang telah tersedia, khususnya untuk mendorong peningkatan tingkat okupansi pada kawasan yang masih memiliki kapasitas lahan tersedia.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan implementasi kebijakan investasi, melalui harmonisasi regulasi daerah, evaluasi insentif investasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, OPD teknis, pemerintah pusat, dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan dan iklim investasi di Jawa Timur yang kondusif.

## Sinergi APBN dan APBD untuk Memperkuat Momentum Belanja Pemerintah di Jawa Timur

### BOKS 2

Arah kebijakan fiskal pemerintah di Jawa Timur tahun 2026, meningkat pada sisi APBN sementara APBD menurun (Tabel 1). Pagu Belanja Pemerintah tahun 2026 ditopang oleh peningkatan Belanja APBN di Jawa Timur yang sebesar Rp48,06 triliun atau tumbuh 2,56% (yoy). Peningkatan Belanja APBN terjadi pada komponen Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang tumbuh 1,84% (yoy) dan 30,53% (yoy). Sementara itu, pagu Belanja Barang dan Jasa APBN berkontraksi sebesar -7,85% (yoy). Adapun Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2026 dilakukan secara terpusat melalui APBN pusat. Peningkatan pagu APBN menyebabkan proporsi belanja APBN terhadap seluruh Belanja Pemerintah meningkat, dari 26,56% pada tahun 2025 menjadi 29,39% pada tahun 2026. Secara keseluruhan, pagu Belanja Pemerintah mengalami kontraksi 7,33% (yoy), dipengaruhi oleh penurunan pagu dari sisi APBD baik untuk Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dengan penurunan masing-masing sebesar (-20,24%, yoy) dan (-8,37%, yoy).

Optimalisasi Belanja berbasis hasil dilakukan pada APBD seiring dengan penurunan penerimaan Transfer dari pusat tahun 2026 (Tabel 2). Pagu Belanja menurun pada semua komponen karena efisiensi yang lebih dalam baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer, dari Rp86,63 triliun menjadi Rp72,02 triliun. Pendapatan Transfer pada tahun 2026 menyumbang 33,55% dan 65,55% dari total penerimaan APBD Provinsi dan APBD 38 kabupaten/kota. Penurunan total pendapatan tertahan oleh peningkatan target PAD dan Pendapatan Lainnya.

Meskipun demikian, capaian persentase realisasi Belanja Pemerintah hingga triwulan I 2026 tumbuh dibanding periode yang sama tahun lalu. Sekalipun mengalami penurunan pagu, persentase realisasi belanja meningkat pada semua komponen (Tabel 3). Persentase realisasi Belanja Pemerintah meningkat 1,96% (yoy), yang terjadi baik pada APBN maupun APBD Provinsi

**Tabel 1. Pagu Belanja Pemerintah di Jawa Timur**

Belanja	Pagu			Proporsi		
	2025 (Rp Miliar)	2026 (Rp Miliar)	Perubahan (%)	2025 (%)	2026 (%)	Perubahan (%)
Belanja Pemerintah	176.433,03	163.496,03	(7,33)			
APBN di Jawa Timur	46.857,78	48.058,25	2,56	26,56	29,39	2,84
APBD Provinsi	27.707,42	22.098,51	(20,24)	15,70	13,52	(2,19)
APBD 38 Kab/Kota	101.867,83	93.339,27	(8,37)	57,74	57,09	(0,65)
Belanja Pegawai	78.850,01	76.418,35	(3,08)	44,69	46,74	2,05
APBN di Jawa Timur	25.690,08	26.163,31	1,84	32,58	34,24	1,66
APBD Provinsi	9.398,42	8.903,46	(5,27)	11,92	11,65	(0,27)
APBD 38 Kab/Kota	43.761,51	41.351,58	(5,51)	55,50	54,11	(1,39)
Belanja Barang dan Jasa	62.354,00	56.924,50	(8,71)			
APBN di Jawa Timur	14.471,97	13.336,16	(7,85)	23,21	23,43	0,22
APBD Provinsi	11.186,41	8.578,30	(23,32)	17,94	15,07	(2,87)
APBD 38 Kab/Kota	36.695,62	35.010,05	(4,59)	58,85	61,50	2,65
Belanja Modal	25.113,42	21.304,36	(15,17)			
APBN di Jawa Timur	6.556,91	8.558,78	30,53	26,11	40,17	14,06
APBD Provinsi	3.259,60	1.094,65	(66,42)	12,98	5,14	(7,84)
APBD 38 Kab/Kota	15.296,91	11.650,93	(23,83)	60,91	54,69	(6,22)
Belanja Bantuan Sosial	1.103,83	553,50	(49,86)			
APBN di Jawa Timur	138,81	-	(100,00)	12,58	-	(12,58)
APBD Provinsi	221,04	149,99	(32,15)	20,03	27,10	7,07
APBD 38 Kab/Kota	743,97	403,51	(45,76)	67,40	72,90	5,50

Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur, BPKAD Jawa Timur (diolah, 2026)

5. Belanja Pemerintah merupakan Total Belanja Daerah dikurangi Belanja Transfer

## BOKS 2

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD Jawa Timur

Belanja	Pagu			Realisasi s.d. Triwulan I 2026		
	2025 (Rp Miliar)	2026 (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)	2025 (Rp Miliar)	2026 (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	136.276,96	122.715,23	(9,95)	27.398,59	23.835,74	(13,00)
APBD Provinsi	28.559,29	26.310,97	(7,87)	5.166,48	4.651,59	(9,97)
APBD 38 Kab/Kota	107.717,67	96.404,26	(10,50)	22.232,10	19.184,15	(13,71)
Pendapatan Asli Daerah	49.442,20	50.483,35	2,11	8.904,92	9.222,24	3,56
APBD Provinsi	17.103,86	17.455,98	2,06	3.456,11	3.386,66	(2,01)
APBD 38 Kab/Kota	32.338,34	33.027,37	2,13	5.448,81	5.835,58	7,10
Pendapatan Transfer	86.630,69	72.023,33	(16,86)	18.486,34	14.595,53	(21,05)
APBD Provinsi	11.427,43	8.827,00	(22,76)	1.705,56	1.262,33	(25,99)
APBD 38 Kab/Kota	75.203,26	63.196,33	(15,97)	16.780,79	13.333,20	(20,54)
Pendapatan Lainnya	204,07	208,56	2,20	7,33	17,97	145,34
APBD Provinsi	28,00	28,00	-	4,82	2,60	(46,04)
APBD 38 Kab/Kota	176,07	180,56	2,54	2,50	15,37	514,08

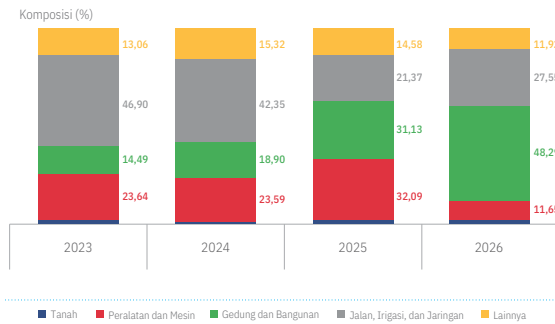
Tabel 3. Realisasi Belanja Pemerintah di Jawa Timur

Belanja	Realisasi			Realisasi Terhadap Pagu		
	2025 (Rp Miliar)	2026 (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)	2025 (%)	2026 (%)	Perubahan (%)
Belanja Pemerintah	24.515,08	25.922,50	5,74	13,89	15,86	1,96
APBN di Jawa Timur	8.266,89	10.242,26	23,90	17,64	21,31	3,67
APBD Provinsi	3.424,88	3.175,16	(7,29)	12,36	14,37	2,01
APBD 38 Kab/Kota	12.823,31	12.505,08	(2,48)	12,59	13,40	0,81
Belanja Pegawai	15.976,03	17.660,54	10,54	20,26	23,11	2,85
APBN di Jawa Timur	6.277,81	7.237,41	15,29	24,44	27,66	3,23
APBD Provinsi	1.769,78	1.653,65	(6,56)	18,83	18,57	(0,26)
APBD 38 Kab/Kota	7.928,43	8.769,49	10,61	18,12	21,21	3,09
Belanja Barang dan Jasa	6.803,74	6.116,59	(10,10)	10,91	10,75	(0,17)
APBN di Jawa Timur	1.604,97	1.767,99	10,16	2,57	3,11	0,53
APBD Provinsi	1.496,12	1.225,66	(18,08)	2,40	2,15	(0,25)
APBD 38 Kab/Kota	3.702,65	3.122,94	(15,66)	5,94	5,49	(0,45)
Belanja Modal	1.195,16	1.563,38	30,81	4,76	7,34	2,58
APBN di Jawa Timur	316,76	1.236,86	290,47	1,26	5,81	4,54
APBD Provinsi	31,94	18,89	(40,86)	0,13	0,09	(0,04)
APBD 38 Kab/Kota	846,46	307,64	(63,66)	3,37	1,44	(1,93)
Belanja Bantuan Sosial	180,30	98,02	(45,63)	16,33	17,71	1,38
APBN di Jawa Timur	67,35	-	(100,00)	6,10	-	(6,10)
APBD Provinsi	65,92	52,45	(20,43)	5,97	9,48	3,50
APBD 38 Kab/Kota	47,04	45,58	(3,11)	4,26	8,23	3,97

Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur, BPKAD Jawa Timur (diolah, 2026)

**BOKS 2**

**Gambar 1. Komposisi Pagu Belanja Modal APBN 2023-2026**



Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur (diolah, 2026)

serta Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan (3,67%, yoy), (2,01%, yoy), dan (0,81%, yoy). Namun, jika ditinjau berdasarkan nominalnya, pola pertumbuhan mengikuti pola pagu, yaitu meningkat pada Belanja APBN (23,90%, yoy) dan melambat pada Belanja APBD dengan penurunan masing-masing (7,29%, yoy) dan (2,48%, yoy).

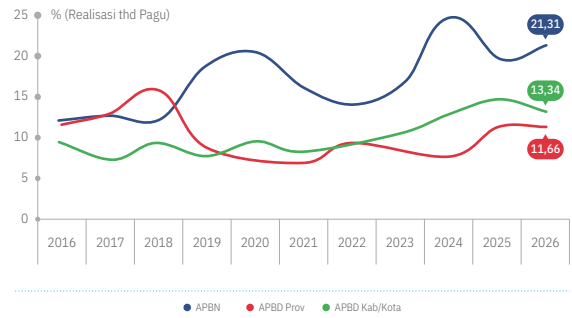
**Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah di Jawa Timur**

Program Prioritas Presiden	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%
Program 3 Juta Rumah	266,06	1,85	0,70
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	251,64	1,85	0,74
Revitalisasi Sekolah dan Madrasah	254,99	42,49	16,66
Sekolah Rakyat	3136,82	539,17	17,19
Bendungan	208,24	197,11	94,66
Irigasi	1024,34	13,39	1,31
Preservasi Jalan	718,96	175,4	24,40
Preservasi Jembatan	167,04	28,98	17,35
Replanting Perkebunan Rakyat	835,81	0,47	0,06

Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur (diolah, 2026)

Belanja Modal APBN ditujukan terutama untuk mendukung fungsi pendidikan serta pembangunan konektivitas dan ketahanan pangan. Pada sektor pendidikan, dukungan diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dengan realisasi sebesar Rp539,17 miliar, di mana sebanyak 19 lokasi telah terbangun dari target nasional. Selain itu, Rp42,49 miliar telah disalurkan untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, yang pada tahun 2026

**Gambar 2. Persen Realisasi Belanja Pemerintah di Jawa Timur**



Sumber: BPAKD Jawa Timur (diolah, 2026)

ini menargetkan pemutakhiran 1.408 unit bangunan agar lebih modern guna mendukung transformasi pendidikan nasional. Belanja Gedung dan Bangunan juga digunakan untuk realisasi program 3 Juta Rumah. Sementara itu, Belanja Modal untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan paling banyak direalisasikan untuk pembangunan bendungan (Bendungan Bagong) dan preservasi jalan masing-masing sebesar Rp197,11 miliar dan Rp175,4 miliar.

Kinerja belanja APBN perlu diimbangi dengan akselerasi belanja di semua level pemerintahan agar momentum pertumbuhan dapat ditangkap secara optimal. Studi World Bank (2024) atas 129 negara selama 1980–2019 menunjukkan bahwa peningkatan belanja untuk investasi publik sebesar 1% dari PDB akan mendorong *output* hingga 1,6% ketika belanja dilakukan secara efisien dan tepat waktu di seluruh level. Dalam konteks Jawa Timur, persentase realisasi APBN untuk Belanja Modal mencapai 5,81% pada triwulan I 2026, sementara APBD Provinsi dan

**Gambar 3. Peta Kapasitas Fiskal Daerah**



Sumber: Kemenkeu (diolah, 2025)

**BOKS 2**

APBD Kabupaten/Kota masih berada pada 0,13% dan 3,37%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang signifikan untuk memperkuat sinergi antara belanja APBN dan APBD, sehingga efek stimulus fiskal dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

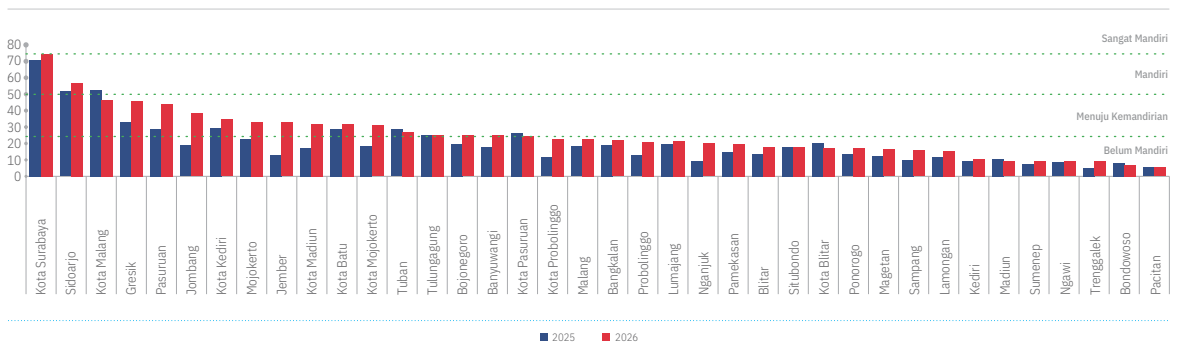
**Kondisi struktural kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mendorong akselerasi realisasi APBD.** Berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (PMK 97/2025), sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih berada pada kategori KFD Rendah hingga Sedang (Gambar 3), yang mencerminkan terbatasnya ruang fiskal riil untuk belanja prioritas di luar kewajiban yang sudah ditentukan. Kondisi ini diperkuat oleh capaian Derajat Otonomi Fiskal (DOF) kabupaten/kota yang memiliki rata-rata 25,29% (Gambar 4), yang berarti sebagian besar penerimaan daerah masih bersumber dari transfer pusat. Kombinasi rendahnya kapasitas fiskal daerah dan derajat otonomi fiskal mempersempit ruang pembiayaan belanja modal serta membatasi kemampuan daerah dalam merespons penyesuaian transfer pusat. Kondisi ini membutuhkan penguatan kapasitas fiskal yang sistematis dan berkelanjutan, baik melalui optimalisasi PAD maupun eksplorasi sumber pembiayaan alternatif.

**Sinkronisasi kebijakan percepatan belanja antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah yang dapat segera diupayakan dengan integrasi data digital.** Sinkronisasi ini tidak hanya terkait keselarasan jadwal, tetapi juga keselarasan substansi untuk memastikan prioritas belanja APBN ditransmisikan secara konkret ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sedang

mengembangkan *dashboard* sinergi fiskal dalam SIKD yang memungkinkan penilaian kesesuaian kebijakan fiskal pusat–daerah secara digital. Sinkronisasi ini dapat diwujudkan melalui tiga mekanisme, yaitu penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh OPD sebelum tahun anggaran dimulai, disertai proses lelang dini pada Oktober–November tahun sebelumnya sehingga kontrak sudah dapat ditandatangani di awal Januari. Kedua, pembentukan sistem monitoring serapan anggaran berbasis data *real-time*, sehingga dapat diidentifikasi hambatan realisasi secara dini dan penyelesaian cepat lintas OPD. Ketiga, penguatan koordinasi Pemprov dengan 38 kabupaten/kota, sehingga *front-loading* yang diinisiasi pusat dapat ditransmisikan hingga ke level pemerintahan terbawah. Sinkronisasi ini memungkinkan stimulus fiskal dari APBN dan APBD bergerak dalam irama yang sama sejak semester pertama.

**Transformasi pengelolaan aset, BLUD, dan BUMD diperlukan untuk mengoptimalkan kapasitas pembiayaan daerah.** Optimalisasi aset daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih menghadapi kendala regulasi yang perlu diselesaikan dari sisi pusat<sup>6</sup>. Sehingga, diperlukan penyederhanaan regulasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih ramah investasi, disertai penguatan kapasitas daerah dalam menyusun perjanjian kerja sama yang bankable agar aset daerah dapat digunakan sebagai modal pembangunan. Transformasi unit layanan publik seperti RSUD dan Puskesmas ke pola BLUD dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, sehingga belanja layanan tidak lagi bergantung pada siklus APBD dan surplus layanan dapat langsung direinvestasikan untuk peningkatan kapasitas

**Gambar 4. Derajat Otonomi Fiskal Jawa Timur**



6. PP 28 Tahun 2020 yang membatasi jangka waktu sewa hanya maksimal 5 tahun. Meski skema Kerja Sama dapat berlangsung hingga 30–50 tahun, kompleksitas prosesnya melampaui kapasitas teknis dan hukum yang dimiliki daerah.

## BOKS 2

BLUD. Selain itu, BUMD dapat dioptimalkan sebagai *special purpose vehicle*, karena BUMD dapat mengakses permodalan perbankan dan kewajiban utang tanpa membebani APBD.

**Selain itu, perluasan akses pembiayaan sesuai kapasitas fiskal daerah didukung dengan penguatan kompetensi SDM aparatur juga diperlukan.** Berdasarkan Peta KFD Jawa Timur pada (Gambar 3), sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih berada pada kategori Rendah hingga Sedang. Bagi daerah dengan KFD rendah hingga sangat rendah, skema pembiayaan dapat dilakukan melalui BGS/BSG atas aset daerah, kerja sama antardaerah berbasis potensi lokal, serta pengembangan CSR terstruktur yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah. Bagi daerah dengan KFD sedang, pinjaman PT SMI dengan proyek prioritas serta KPBU menjadi pilihan yang realistis. Adapun bagi daerah dengan KFD tinggi hingga sangat tinggi, instrumen pinjaman dari PT SMI, KPBU, atau obligasi daerah menjadi opsi yang relevan. Di sisi lain, penguatan kapasitas SDM perencanaan keuangan

daerah, khususnya dalam penyusunan *feasibility study* dan proposal pembiayaan yang bankable menjadi prasyarat agar peluang pembiayaan dapat diakses secara efektif. Fasilitasi melalui pelatihan teknis terpadu diperlukan untuk setiap daerah agar memiliki pemahaman yang memadai tentang jalur pembiayaan yang tersedia dan langkah konkret yang dapat ditempuh.

**Kombinasi ketiga langkah strategis tersebut mampu memperkuat daya ungkit konsumsi pemerintah sebagai penopang momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.** Langkah strategis yang meliputi sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, transformasi pengelolaan aset dan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan berbasis kapasitas fiskal perlu diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi. Di tengah tekanan penurunan transfer pusat yang masih berlangsung, sinergi APBN dan APBD yang lebih erat menjadi kunci agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.



# Perkembangan Inflasi Daerah



Foto: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, Jawa Timur

## 2.1. Kondisi Umum

**Didukung peningkatan permintaan musiman saat Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H, inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan I 2026 meningkat.** Inflasi pada Maret 2026 (akhir triwulan laporan) tercatat sebesar 3,79% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,93% (yoy). Peningkatan inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan permintaan bahan pokok strategis pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H di tengah terbatasnya pasokan terutama pada komoditas produk peternakan. Adanya diskon tarif listrik di triwulan yang sama tahun sebelumnya juga berdampak pada pembalikan inflasi yang meningkat pada komoditas perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

**Dampak konflik global turut memengaruhi tekanan inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2026.** Ketidakpastian global yang diwarnai dengan konflik di Timur Tengah mendorong berlanjutnya tren kenaikan harga emas secara tahunan sepanjang triwulan I seiring dengan pilihan investor dan masyarakat sebagai *safe haven asset*. Selain itu, normalisasi tarif listrik di bulan Maret 2026 pasca penerapan kebijakan diskon tarif listrik di triwulan I 2025 juga memberikan andil besar dalam inflasi tahunan Jawa Timur di triwulan I 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada periode laporan didorong oleh (i) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, (ii) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (iii) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta (iv) kelompok transportasi. Adapun, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi kelompok dengan andil penahan inflasi pada triwulan I 2026. Selain itu, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 perihal PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) turut mendukung terjaganya inflasi seiring dampaknya dalam menahan harga tiket pesawat selama *festive season* di periode puncak mobilisasi masyarakat pada HBKN Idulfitri 2026.

**Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2026 diperkirakan melandai dibandingkan dengan triwulan I 2026 dan tetap dalam rentang sasaran target inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).** Prakiraan inflasi yang lebih rendah pada triwulan II 2026 didorong oleh normalisasi permintaan pasca Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H serta berakhirnya dampak normalisasi kebijakan tarif listrik tahun 2025. Selain itu, periode panen raya berbagai komoditas pangan strategis diperkirakan turut mendukung kuatnya pasokan dan mendukung stabilisasi harga. Panen raya beras telah terjadi di akhir triwulan I 2026 dan akan masuk pasar pada triwulan II, dan panen raya aneka cabai dan bawang merah diperkirakan terjadi pada rentang bulan Mei–Agustus 2026. Tren moderasi harga emas dunia juga diperkirakan mendukung terjaganya inflasi. Namun demikian, perkembangan tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah tetap perlu diwaspadai mengingat dampak *imported inflation* akibat penutupan Selat Hormuz yang mendisrupsi pasokan energi global termasuk produk turunannya kepada peningkatan harga berbagai komoditas di Indonesia, baik secara langsung maupun dalam bentuk dampak rambatan (*second round effect*).

Kinerja pengendalian inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkuat melalui implementasi strategi 4K. Dari aspek Keterjangkauan Harga, telah dilaksanakan 602 kali pasar murah di 38 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga akses masyarakat terhadap komoditas strategis. Pada aspek Ketersediaan Pasokan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebanyak 17 kali guna meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi dan menjaga keberlanjutan pasokan pangan serta program peningkatan produktivitas sebanyak 155 program baik *on-farm* maupun *off-farm*. Dari sisi Kelancaran Distribusi, penyelenggaraan program Mudik Gratis memberangkatkan sekitar 4.000 pemudik menggunakan 100 armada bus menuju berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Idulfitri. Sementara itu, pada aspek Komunikasi Efektif, penguatan koordinasi dilakukan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan *High Level Meeting* (HLM) TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan sinergi pengendalian inflasi, khususnya menjelang HBKN Idulfitri.

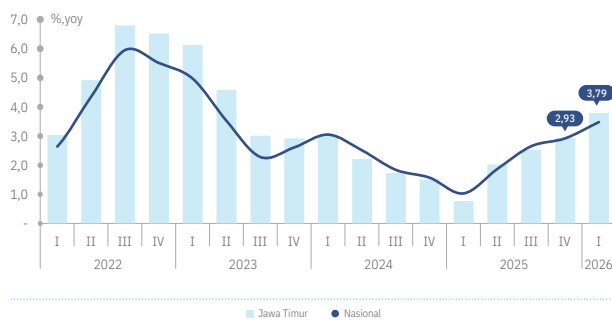
## 2.2. Kinerja Inflasi Jawa Timur

### 2.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026

**Pada triwulan I 2026 Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pada periode pelaporan sebelumnya.** Inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,79% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,93% (yoy). Capaian inflasi Jawa Timur di triwulan laporan terpantau di atas rentang sasaran inflasi nasional yakni  $2,5 \pm 1\%$  (yoy) utamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan selama HBKN Idulfitri maupun dampak normalisasi tarif listrik di bulan Maret 2026 pasca penerapan kebijakan diskon tarif listrik di triwulan I 2025. Secara spasial, seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,08% sementara Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami inflasi terendah sebesar 3,37%. Adapun inflasi Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi. Selanjutnya, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2026 ini didorong oleh berbagai komoditas sebagai berikut: emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, sigaret kretek mesin, daging sapi, angkutan udara, mobil, tomat, minyak goreng, ikan bandeng/bolu, dan jeruk.

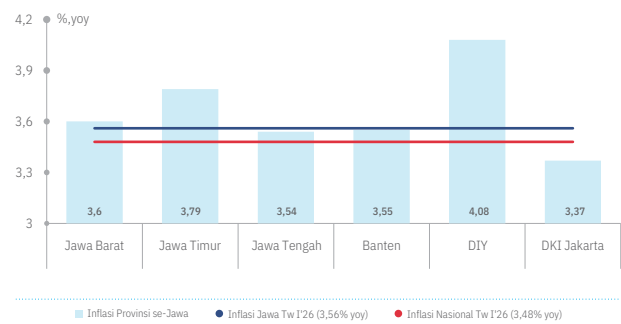
Secara umum, kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan beras seiring dengan peningkatan permintaan di tengah periode Ramadan serta Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, panen raya beras yang terjadi pada akhir triwulan I 2026 baru akan berdampak pada peningkatan pasokan di triwulan II 2026 karena masih harus diolah di penggilingan. Kebijakan diskon tarif PLN pada triwulan I 2025 memberikan pengaruh *baseline effect* terhadap peningkatan inflasi tarif listrik triwulan I 2026 secara tahunan. Kenaikan bahan bakar rumah tangga juga didorong penyesuaian

**Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (yoy)**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.2. Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan I 2026 (yoy)**



Sumber: BPS, diolah

**Tabel 2.1. Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan I 2026 (yoy)**

Jenis Komoditas/Barang	Inflasi (%)	Sumbangan Inflasi (%)
Emas Perhiasan	64,76	1,02
Tarif Listrik	33,76	0,99
Daging Ayam Ras	17,32	0,31
Beras	4,13	0,18
Telur Ayam Ras	8,53	0,09
Sigaret Kretek Mesin	4,21	0,08
Daging Sapi	8,25	0,07
Tomat	*)	0,04
Minyak Goreng	*)	0,04
Ikan Bandeng	*)	0,03

\*) Angka tidak dipublikasikan oleh BPS

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 2.2. Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan I 2026 (yoy)**

Jenis Komoditas/Barang	Deflasi (%)	Sumbangan Deflasi (%)
Bawang Putih	-17,97	-0,09
Bensin	-0,90	-0,04
Cabai Merah	-21,81	-0,04
Bawang Merah	-5,57	-0,03
Wortel	-25,80	-0,02
Pisang	-4,12	-0,01
Telepon Seluler	-1,35	-0,01

\*) Angka tidak dipublikasikan oleh BPS

Sumber: BPS, diolah

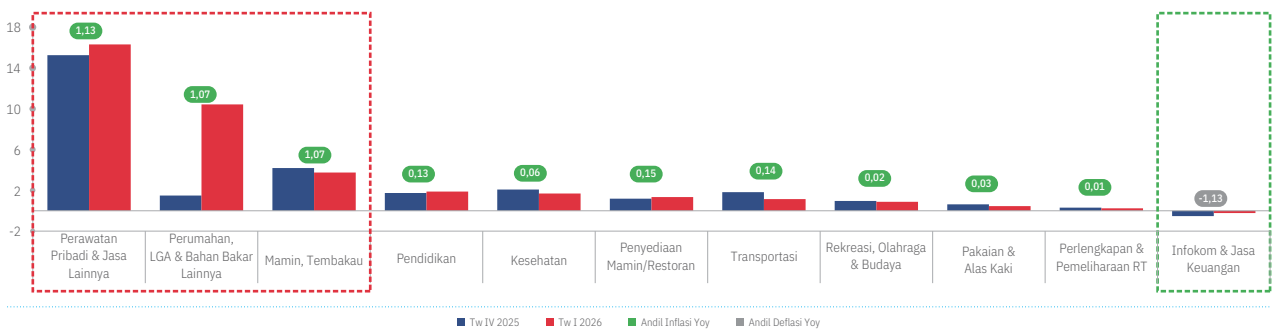
harga BBM non-subsidi, khususnya pertamax pada triwulan I 2026 seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendisrupsi pasokan komoditas energi dunia.

### 2.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, tekanan inflasi Jawa Timur meningkat pada triwulan I 2026 terutama disumbang oleh inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok transportasi. Pada triwulan laporan, tingkat inflasi berdasarkan kelompok barang dan jasa adalah sebagai berikut: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (inflasi 16,31% yoy; andil 1,13%), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (inflasi 3,75% yoy; andil 1,07%), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (inflasi 10,43% yoy; andil 1,07%), dan kelompok transportasi (inflasi 1,14% yoy; andil 0,14%). Namun demikian, meningkatnya inflasi pada periode laporan ditahan oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (deflasi -0,23% yoy; andil -0,02%) (Grafik 2.3).

Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh komoditas emas perhiasan. Naiknya harga emas perhiasan ini seiring dampak *imported inflation* dari kenaikan harga emas global yang terus meningkat disebabkan oleh tensi geopolitik yang memanas di wilayah Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Hal tersebut memicu peningkatan ketidakpastian global dan mendorong preferensi investor dalam menempatkan dana dalam bentuk *safe-haven* asset. Kemudian, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan laporan didorong oleh komoditas bahan pangan utamanya beras, komoditas unggas dan daging sapi. Tekanan harga pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat di tengah momen Ramadan serta menyambut Idulfitri. Selanjutnya, inflasi pada kelompok transportasi didorong oleh komoditas angkutan udara dengan andil 0,07% seiring peningkatan permintaan pada periode HBKN Idulfitri 2026 di tengah implementasi stimulus ekonomi dalam bentuk PPN DTP untuk menahan inflasi yang lebih tinggi pada komoditas angkutan udara. Di sisi lain, deflasi pada komoditas telepon seluler dalam kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mendukung tertahannya inflasi pada periode laporan.

**Grafik 2.3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**



Sumber: BPS, diolah

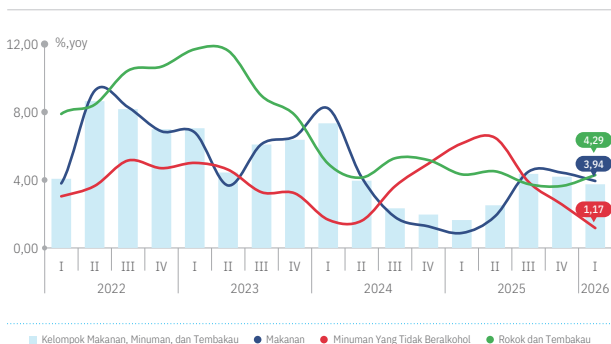
### 2.2.2.1 Kelompok Pendorong Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada Triwulan I 2026, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2025. Pada periode laporan, inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 3,75% (yoy) dengan andil 1,07% atau lebih rendah dibanding triwulan IV 2025 sebesar 4,19% (yoy) dengan andil 1,15%. Tekanan inflasi disumbang oleh subkelompok rokok dan tembakau sebesar 4,29% (yoy), makanan sebesar 3,94% (yoy) dan minuman tidak beralkohol sebesar 1,17% (yoy). (Grafik 2.4).

Pendorong inflasi tahunan pada kelompok ini terutama didorong inflasi komoditas beras, peternakan dan berbagai sigaret. Berikut adalah komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, daging ayam ras (inflasi 17,32% yoy; andil 0,31%), beras (inflasi 4,13% yoy; andil 0,18%), telur ayam ras (inflasi 8,53% yoy; andil 0,09%), sigaret kretek mesin (inflasi 4,21% yoy; andil 0,08%), daging sapi (inflasi 8,25% yoy; andil 0,07%). Tekanan inflasi pada komoditas beras didorong oleh terbatasnya pasokan menjelang panen raya. Berdasarkan pantauan harga SISKAPERBAPO, harga komoditas beras medium tercatat naik 3,71% (yoy) dari Rp12.438/kg menjadi Rp12.899/kg. Selanjutnya, komoditas daging dan unggas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, serta daging sapi juga terpantau mengalami kenaikan. Pada akhir triwulan I 2026, harga daging ayam ras tercatat mengalami peningkatan paling

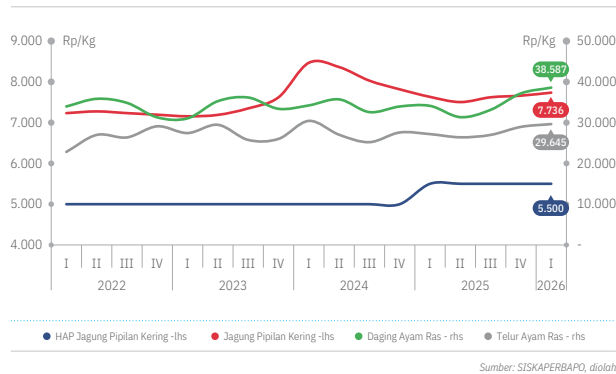
tinggi dibandingkan seluruh komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Harga daging ayam ras tercatat Rp38.587/kg setelah pada triwulan yang sama tahun sebelumnya berada pada harga Rp34.713/kg atau mengalami kenaikan 11,16% (yoy). Telur ayam ras terpantau meningkat 9,06% (yoy) dari harga Rp27.183/kg pada triwulan I 2025 menjadi Rp29.645/kg pada periode laporan. Kemudian, harga daging sapi juga mengalami kenaikan 1,32% (yoy) dari harga Rp119.186/kg pada triwulan I 2025 menjadi Rp120.763/kg pada triwulan pelaporan. Kenaikan harga komoditas unggas juga dipengaruhi oleh peningkatan harga jagung pipilan kering selaras dengan penyesuaian HPP Jagung pada Juli Tahun 2025, di mana harga jagung pipilan kering di level petani naik menjadi Rp5.500/kg dan di level bulog seharga Rp6.400/kg. Berdasarkan pantauan SISKAPERBAPO, harga jagung pipilan kering tercatat meningkat 2,68% (yoy) dibandingkan periode triwulan I 2025 atau dari Rp7.534/kg menjadi Rp7.736/kg di periode pelaporan. Selanjutnya, komoditas pangan hortikultura seperti cabai rawit dan tomat mengalami kenaikan harga seiring disrupsi produksi dan pasokan akibat curah hujan yang berada di kategori sedang hingga tinggi pada bulan Januari-Maret 2026 sehingga mendorong penurunan kualitas serta keterbatasan panen di wilayah sentra produksi. Dari pantauan harga SISKAPERBAPO, komoditas cabai rawit meningkat dari Rp81.290/Kg menjadi Rp89.010/Kg atau naik sebesar 9,50% (yoy). Selanjutnya, inflasi tomat juga meningkat, tecermin dari kenaikan harga dari Rp8.716/kg menjadi Rp9.044/Kg atau naik sebesar 3,75% (yoy). Selanjutnya, inflasi tahunan komoditas minyak goreng tercatat meningkat (andil 0,04%) seiring kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia yang turut ditransmisikan pada harga minyak goreng domestik. Di sisi lain, beberapa komoditas yang menahan laju inflasi pada kelompok Makanan, minuman, dan tembakau di antaranya adalah bawang putih, yang mencatatkan deflasi -17,97% (yoy) dengan andil sebesar -0,09%, cabai merah deflasi -21,81% (yoy) dengan andil -0,04%, bawang merah deflasi -5,57% (yoy) dengan andil -0,03%, wortel deflasi -25,80% (yoy) dengan andil -0,02%, dan pisang deflasi -4,12% (yoy) dengan andil -0,01%.

**Grafik 2.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau**

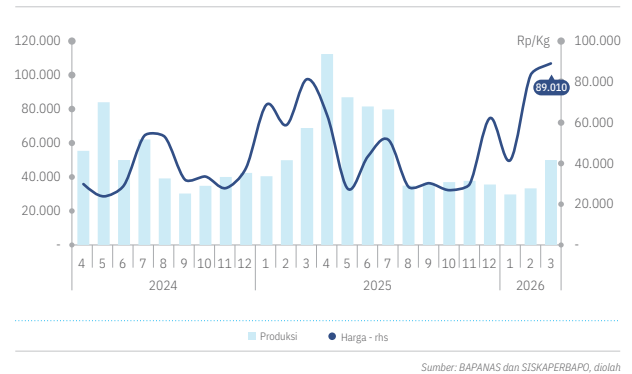


Sumber: BPS, diolah

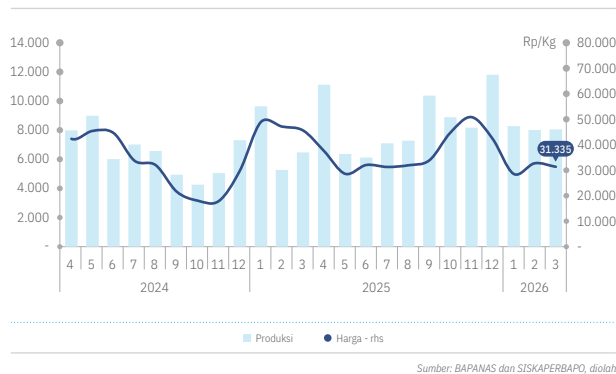
**Grafik 2.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, serta HPP Jagung**



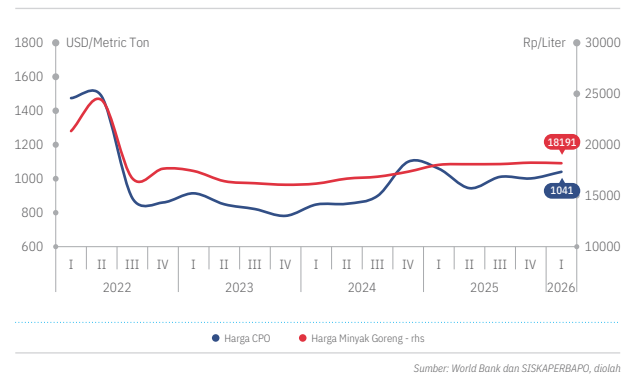
**Grafik 2.6. Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur**



**Grafik 2.7. Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Merah di Jawa Timur**



**Grafik 2.8. Perkembangan Harga Minyak Sawit Dunia dan Minyak Goreng di Jawa Timur**



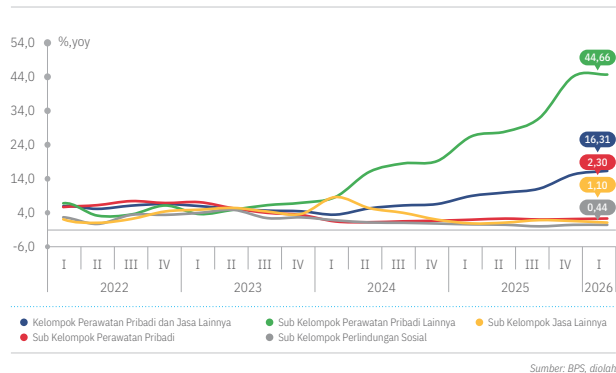
## Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali mengalami inflasi tahunan pada triwulan I 2026. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi 16,31% (yoy) dengan andil 1,13% atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 15,26% (yoy) dengan andil 1,02%. Tekanan inflasi terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 44,66% (yoy) setelah pada periode triwulan IV 2025 sebesar 44,09% (yoy). Selanjutnya, subkelompok perawatan pribadi tercatat juga meningkat dari sebelumnya 2,15% (yoy) menjadi 2,30% (yoy) pada periode laporan. Subkelompok jasa lainnya tercatat 1,10% (yoy) atau lebih

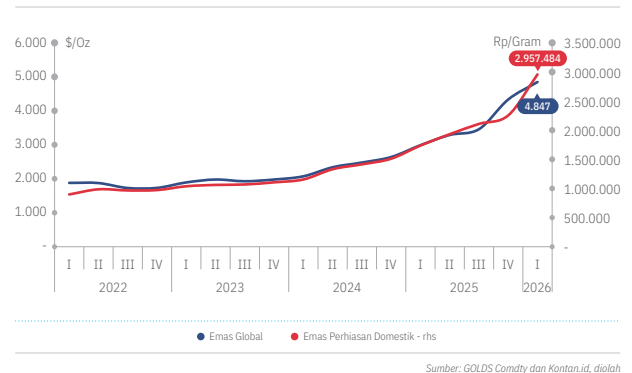
rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 1,56% (yoy). Kemudian, subkelompok perlindungan sosial tercatat mengalami inflasi terendah, yaitu 0,44% (yoy).

**Peningkatan inflasi pada subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh inflasi pada komoditas emas perhiasan.** Komoditas emas perhiasan tercatat mengalami inflasi 64,76% (yoy) dengan andil 0,92% atau tercatat melandai jika dibandingkan dengan periode triwulan IV 2025 dengan inflasi 66,68% (yoy) dan andil sebesar 0,92%. Konsistensi peningkatan harga emas domestik disebabkan oleh transmisi

**Grafik 2.9. Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**



**Grafik 2.10. Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik**

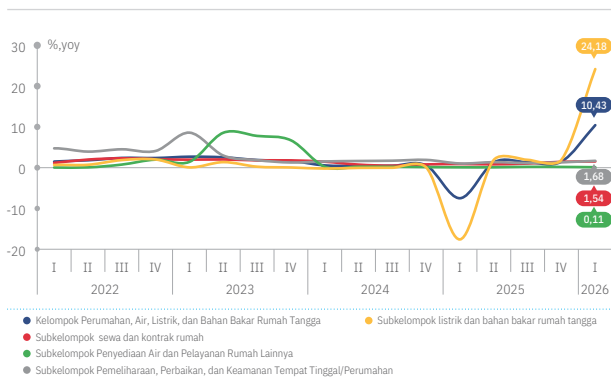


harga emas global yang tercatat terus tumbuh sejak akhir tahun 2025. Dinamika harga emas global pada triwulan I 2026 terus dipengaruhi oleh kuatnya sentimen *safe-haven* investor di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Permintaan emas dunia pada periode pelaporan juga tercatat meningkat didorong oleh kombinasi faktor makroekonomi, termasuk ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, serta ketegangan geopolitik yang mendorong investor mengamankan portofolio melalui alokasi aset emas. Kondisi ini turut memberikan tekanan kenaikan pada harga komoditas emas perhiasan di pasar domestik. Perkembangan rerata harga emas global pada triwulan laporan tercatat 4.847 USD/Oz setelah pada triwulan yang sama tahun 2025 berada pada level 2.987 USD/Oz, sehingga rerata harga emas tumbuh 62,25% (yoy). Di sisi domestik, harga emas perhiasan tercatat meningkat dari Rp1.736.290/gr menjadi Rp2.957.484/gr atau naik 70,33% (yoy) pada triwulan laporan. Ke depan, risiko kenaikan harga emas global diperkirakan masih terus berlanjut seiring dengan eskalasi dan rambatan geopolitik di Timur Tengah. (Grafik 2.10).

### Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat mengalami peningkatan sebagai dampak normalisasi kebijakan terkait diskon tarif listrik pada awal triwulan I 2025 yang masih memberikan pengaruh pada periode pelaporan.** Pada triwulan I 2026, kelompok tersebut mencatatkan inflasi sebesar 10,43% (yoy) dengan andil 1,07%. Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 1,49% (yoy) dengan andil 0,17%. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh *low base effect* tarif listrik, yakni kondisi di mana basis pembandingan bulan yang sama tahun lalu (Maret 2025) masih tertekan rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik pascabayar yang masih berlaku pada periode tersebut. Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% pada awal 2025 tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA – 2200 VA, dengan cakupan yang berbeda tiap bulannya. Sementara itu, pada Triwulan IV 2025 tidak terdapat efek serupa karena basis pembandingnya (Desember 2024) merupakan periode normal tanpa diskon listrik, sehingga

**Grafik 2.11. Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**



Sumber: BPS, diolah

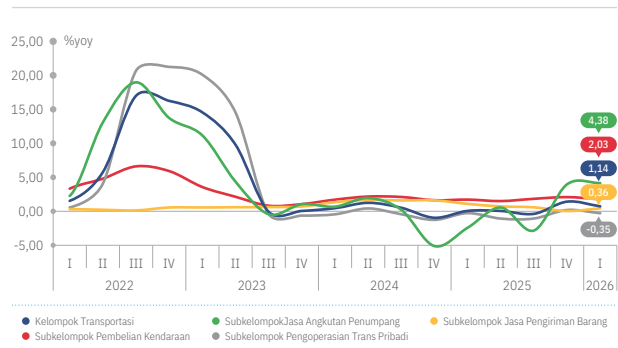
inflasi kelompok perumahan, air, dan listrik pada Desember 2025 hanya tercatat sebesar 1,49% yoy dengan kontribusi yang jauh lebih terbatas terhadap inflasi keseluruhan, yaitu subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 24,18% dan terendah yaitu subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya sebesar 0,11%. Sementara subkelompok lainnya yang mengalami inflasi yaitu subkelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 1,52%; serta subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 1,68% (Grafik 2.11). Tarif listrik sebagai komoditas utama yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 33,76% (yoy) dan andil 0,99%. Sementara itu, komoditas lain yang dominan memberikan andil yaitu kontrak rumah sebesar 0,03% dan sewa rumah dan tukang bukan mandor masing-masing sebesar 0,02%.

### Kelompok Transportasi

**Kelompok transportasi tercatat mengalami tingkat inflasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025.**

Pada triwulan laporan, inflasi pada kelompok transportasi tercatat sebesar 1,14% (yoy) dengan andil 0,14% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 1,82% (yoy) dengan andil 0,23%. Subkelompok jasa angkutan penumpang pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,38% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yaitu sebesar 4,19% (yoy). Selanjutnya, subkelompok pembelian kendaraan mengalami tekanan inflasi sebesar 2,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,34% (yoy). Subkelompok jasa pengiriman barang juga tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (yoy). Namun demikian, sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi mengalami deflasi -0,35% (yoy).

**Grafik 2.12. Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi**

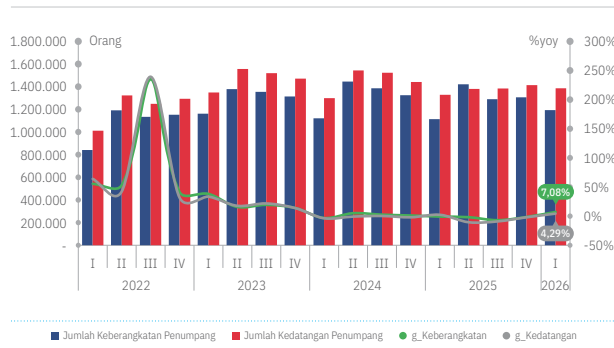


Sumber: BPS, diolah

**Pendorong utama inflasi tahunan pada kelompok ini bersumber dari subkelompok jasa angkutan penumpang.**

Adapun komoditas dengan andil tertinggi adalah angkutan udara sebesar 0,07%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0,09%. Perkembangan harga avtur di Bandara Juanda pada Triwulan berjalan mencatatkan kenaikan 2,16% (yoy), dari harga Rp14.914/ltr pada triwulan I 2025 menjadi Rp15.236/ltr di triwulan pelaporan. Jumlah keberangkatan penumpang domestik di triwulan I 2026 tercatat

**Grafik 2.13. Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya**

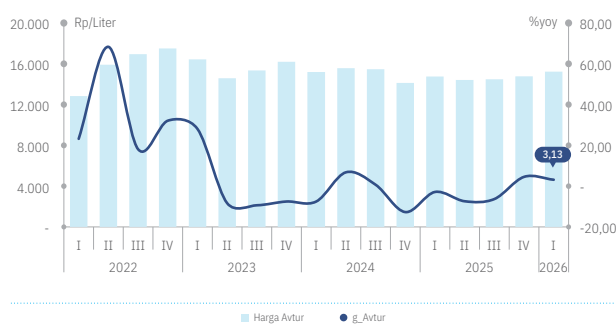


Sumber: Bapenda, diolah

sebanyak 1,19 juta orang, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebanyak 1,31 juta orang, sesuai dengan pola musiman yang konsisten terjadi setiap tahun. Namun secara tahunan, keberangkatan tumbuh 7,08% (yoy), mengindikasikan peningkatan permintaan pada HBKN Idulfitri 2026 dan menekan inflasi pada komponen angkutan udara. Namun di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada komoditas dimaksud dapat tertahan seiring dengan stimulus kebijakan pemerintah melalui pemberian diskon tarif angkutan udara pada periode penerbangan 14–29 Maret 2026 dengan skema: (i) PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, (ii) penurunan *fuel surcharge* pesawat jet dari 10% menjadi 2%, (iii) pemotongan biaya layanan penumpang udara (PJP2U) dan biaya pendaratan/penempatan pesawat (PJP4U) masing-masing sebesar 50%, (iv) penurunan harga avtur sebesar 10% pada 37 bandara, serta (v) perpanjangan jam layanan bandara (*advance & extend operating hours*), yang secara kumulatif dapat menekan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 17–18%.

Sementara itu, komoditas bensin mengalami deflasi secara tahunan seiring dengan penyesuaian harga BBM non subsidi. Bensin menyumbang andil deflasi -0,04% pada periode laporan atau berbanding terbalik jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang memiliki andil inflasi 0,03%. Deflasi bensin dan solar tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi berupa penurunan BBM jenis Pertamina, Pertamina Turbo,

**Grafik 2.14. Perkembangan Harga Avtur di Bandara Juanda Surabaya**



Sumber: Bapenda, diolah

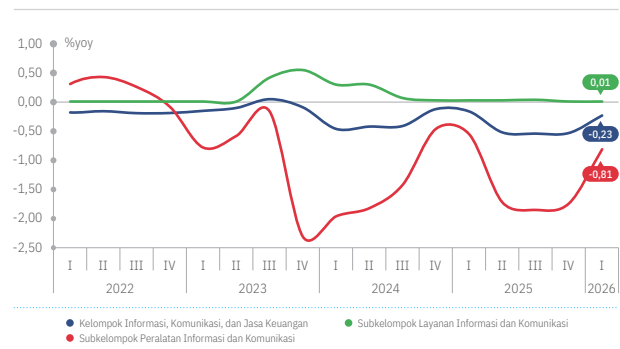
Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Maret 2026 lebih rendah dibandingkan harga efektif pada 1 Maret 2025 khususnya pada produk Pertamina dari Rp12.900/ltr menjadi Rp12.300/ltr. Kemudian, Pertamina turbo dari Rp14.000/ltr menjadi Rp13.100/ltr. Pertamina green dari Rp13.700/ltr menjadi Rp12.900/ltr. Dari kelompok solar, harga Pertamina Dex menjadi Rp14.200/ltr dari Rp14.600/ltr dan Dexlite menjadi Rp14.500/ltr dari Rp14.600/ltr.

### 2.2.2.2 Kelompok Penahan Inflasi

#### Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan kembali mengalami deflasi pada triwulan I 2026. Selama tiga triwulan berturut-turut, kelompok ini terus mencatatkan penurunan. Deflasi pada periode laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar -0,23% (yoy) dengan andil sebesar -0,02%. Tekanan deflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar -0,81% (yoy) dengan komponen telepon seluler memiliki andil paling besar yakni -0,01%. Selain itu, komoditas laptop/notebook juga mendukung deflasi tahunan dengan andil -0,01%. Penurunan biaya telepon seluler didorong oleh banyaknya promo yang diberikan oleh berbagai operator seluler selama triwulan laporan, khususnya dalam rangka Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

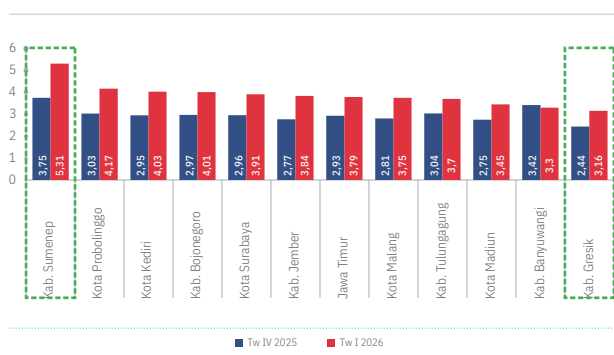
**Grafik 2.15. Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**



Sumber: BPS, diolah

## 2.3. Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur

Pada triwulan I 2026, seluruh wilayah pantauan IHK Jawa Timur sebanyak 11 kab/kota tercatat mengalami inflasi tahunan dengan catatan inflasi tertinggi di Kab. Sumenep sebesar 5,31% (yoy), dan terendah Kab. Gresik dengan inflasi 3,16% (yoy) (Grafik 2.16). Kab. Sumenep tercatat sebagai kabupaten dengan inflasi tertinggi di triwulan laporan. Inflasi di Kab. Sumenep tercatat 5,31% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 3,75% (yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi pendorong inflasi utama di triwulan laporan dengan tingkat inflasi 23,59% (yoy) dengan andil 2,33%. Catatan inflasi dimaksud lebih tinggi dari

**Grafik 2.16. Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)**

Sumber: BPS, diolah

triwulan sebelumnya yaitu sebesar 21,42% (yoy) dengan andil 2,04%. Kenaikan pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh komoditas emas perhiasan yang memiliki andil terhadap inflasi Kab. Sumenep sebesar 2,20% sejalan dengan budaya pembelian emas menjelang hari raya Idulfitri di tengah peningkatan harga emas global yang tertransmisi ke harga komoditas emas perhiasan domestik termasuk di Kab. Sumenep. Kemudian dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau terdapat beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan antara lain beras dan daging ayam ras yang masing-masing memiliki andil 0,30% dan 0,24%. Berdasarkan pantauan SISKAPERBAPO rata-rata harga beras medium pada triwulan I 2026 adalah sebesar Rp13.000/Kg atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 yaitu sebesar Rp11.750/Kg.

**Kabupaten Gresik tercatat menjadi wilayah pantauan IHK dengan inflasi terendah sebesar 3,16% (yoy).** Kelompok penyumbang inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 3,63% (yoy) dengan andil 1,23%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tercatat 3,38% (yoy) dengan andil 1,12%. Komoditas

yang signifikan memberikan andil inflasi tahunan pada periode laporan yaitu daging ayam ras dengan inflasi sebesar 16,25% (yoy) dan andil 0,34%, ikan bandeng inflasi 22,11% (yoy) dengan andil 0,18%, udang basah inflasi 19,19% (yoy) dengan andil 0,18% serta beras dengan andil 0,16%. Berdasarkan pantauan SISKAPERBAPO, harga komoditas daging ayam ras terpantau meningkat 18,32% (yoy) atau dari Rp35.559/kg pada triwulan I 2025 menjadi Rp42.075/kg pada triwulan I 2026. Selanjutnya komoditas beras medium meningkat dari Rp12.167/kg dari triwulan I 2025 menjadi Rp13.260/kg pada triwulan pelaporan atau naik 8,98% (yoy).

## 2.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali, Sekretariat TPID Provinsi telah menetapkan Kerangka Kerja Strategis Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025 melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 500/11530/021.1/2025 tanggal 27 Maret 2025 serta penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Jawa Timur menjelang HBKN Idulfitri pada tanggal 26 Februari 2026 yang menghasilkan rekomendasi *quick wins* untuk dijalankan oleh TPID Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi *quick wins* HLM TPID Provinsi Jawa Timur pada K1, dilakukan intensifikasi pemantauan harga melalui sinergi Satgas Pangan dan aparat penegak hukum, serta optimalisasi pasar murah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses komoditas strategis. Pada K2, penguatan produktivitas dan cadangan pasokan didukung oleh Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta langkah untuk memastikan ketersediaan pasokan. Sementara itu, pada K3 (Kelancaran Distribusi), *quick wins* difokuskan pada penyelenggaraan mudik gratis darat dan laut, dukungan moda transportasi intra dan luar provinsi, penurunan tarif angkutan untuk masyarakat. Pada K4 (Komunikasi Efektif), *quick wins* diarahkan pada pengendalian ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga dan edukasi publik.

**Tabel 2.3. Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan I 2026 (%yoy)**

Kelompok Barang	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Malang	Kota Kediri	Kab. Jember	Kab. Sumenep	Kota Probolinggo	Kota Madiun	Kab. Banyuwangi	Kab. Bojonegoro	Kab. Gresik	Kab. Tulungagung
UMUM	3,79	3,91	3,75	4,03	3,84	5,31	4,17	3,45	3,30	4,01	3,16	3,70
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,75	4,25	2,81	2,89	4,10	4,82	3,05	3,70	3,13	4,64	3,63	2,17
Pakaian dan Alas Kaki	0,45	0,06	1,93	0,70	0,26	0,3	0,31	(0,08)	-0,37	0,12	2,7	0,88
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	10,43	10,13	10,59	14,46	11,82	9,77	11,28	8,66	10,71	11,59	7,07	14,47
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,24	-0,03	0,84	0,81	-0,16	0,65	-0,76	0,23	0,37	0,86	0,73	0,65
Kesehatan	1,69	2,27	2,65	0,26	1,28	0,68	1,00	2,95	0,23	0,14	0,25	0,43
Transportasi	1,14	2,1	0,28	1,31	0,92	(0,01)	0,48	2,27	-0,53	0,1	-0,01	-0,59
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,23	-0,22	0,06	0,03	-1,77	0,09	0,04	0,58	0,37	-0,2	0,29	-0,05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,88	0,45	1,94	0,58	0,81	2,17	0,12	0,51	0,28	0,75	1,91	1,55
Pendidikan	1,88	1,88	1,69	2,38	0,40	2,45	1,38	3,45	0,38	1,14	4,01	1,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,34	1,43	1,17	0,98	2,08	3,26	1,64	1,38	1,17	1,12	0,84	0,57
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	16,31	17,28	18,76	16,08	15,91	23,59	21,30	7,75	15,68	13,39	7,65	17,34

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur ■ Lebih Rendah dari Inflasi Jawa Timur

Sumber : BPS (diolah)

Triwulan I 2026 juga diwarnai dengan munculnya potensi berbagai fenomena yang membutuhkan aksi tindak lanjut cepat, seperti potensi kekeringan akibat El Niño yang membutuhkan *respons* cepat untuk mempertahankan kemandirian pangan dan eksistensi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Timur telah memberikan arahan strategis sebagai langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi tantangan yang timbul akibat kemarau panjang. Di sisi lain, triwulan I 2026 juga diwarnai dengan momen kenaikan permintaan khususnya komoditas strategis sebagai bagian dari momen HBKN Idulfitri 1447 H. Terdapat *quick wins* yang telah dilakukan berdasarkan hasil *High Level Meeting* sebagai *respons* dari *stakeholders* dalam mendorong stabilisasi harga.

#### K1 – Keterjangkauan Harga:

1. Pelaksanaan pasar murah baik berupa Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilaksanakan di kabupaten/kota sebanyak 602 kali yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan pasar murah ini sebagai upaya pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan masyarakat setempat untuk dapat mengakses komoditas strategis.
2. Pelaksanaan pasar murah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) mobile yang merupakan hasil sinergi Bank Indonesia Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 titik yang tersebar di 13 kabupaten/kota di bawah wilayah kerja Bank Indonesia Jawa Timur yang menjual beras medium, premium, minyak goreng (MinyaKita) dan gula pasir.
3. Pelaksanaan pasar murah Gebyar Ramadan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur saat Ramadan sebanyak 18 kali dengan komoditas yang dijual adalah beras, minyak goreng, aneka bawang dan cabai, gula pasir.
4. Pelaksanaan sidak pasar dilakukan oleh satgas pangan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur seperti di Kota Kediri, Kab. Ngawi, serta Kota Surabaya untuk memastikan harga di pasar terkait stabil di tengah kenaikan permintaan menjelang HBKN Idulfitri.

#### K2 – Ketersediaan Pasokan

1. Program peningkatan produktivitas di Jawa Timur dilakukan melalui 136 program *on farm* yang mencakup sektor pertanian, perikanan, dan peternakan guna mempercepat proses budidaya serta meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, terdapat 19 program *off farm* yang difokuskan pada penguatan pemasaran dan distribusi pangan melalui pembangunan infrastruktur jalan serta lumbung cadangan pangan.
2. Pelaksanaan program kesehatan hewan melalui pemberian vaksinasi PMK, LSD, Antraks, Brucellosis untuk meningkatkan kualitas daging dan kesehatan hewan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
3. Pendampingan optimalisasi *drone sprayer* di area pesawahan Koperasi Multi Pihak Madiun sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu.

4. Pemerintah Provinsi Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim melakukan kembali Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebanyak 17 kali dengan rincian 7 kali di Bulan Januari 2026, dan 10 kali secara berturut turut sejak tanggal 16 – 25 Maret 2026. Pelaksanaan OMC ini untuk meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi guna mendukung ketersediaan pasokan.
5. Penerapan pola *build up stock* untuk komoditas BBM oleh Pertamina Patra Niaga sebagai langkah untuk menyiapkan pasokan BBM dalam menunjang masa mudik menjelang Idulfitri dan mengantisipasi disrupsi rantai pasok energi akibat tensi geopolitik.
6. Pencanangan gerakan tanam tanaman pertanian cepat panen dan pelatihan pembuatan pestisida beserta pupuk organik cair oleh Pemda yang bersinergi dengan Bank Indonesia Kediri untuk meningkatkan ketersediaan pasokan.
7. Sidak pasar dilakukan secara langsung oleh Bupati Kab. Mojokerto dan Bupati Banyuwangi guna memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang HBKN Idulfitri.
8. Pemberian bantuan sarana dan prasarana dari Bank Indonesia Jawa Timur kepada Pondok Pesantren Annuqayah Kab. Sumenep yakni *Combine Harvester* untuk meningkatkan produktivitas.

#### K3 – Kelancaran Distribusi

1. Pemanfaatan truk hibah BI Jatim yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jatim sebagai alat pengangkutan barang/komoditas dalam menunjang terlaksananya pasar murah baik pasar murah EPIK Mobile ataupun pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemberian fasilitas distribusi pangan untuk pelaksanaan pasar murah EPIK Mobile yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bersinergi dengan Kab. Sampang.
3. Penyelenggaraan program Mudik Gratis untuk mendukung mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya. Sekitar 4000 pemudik diberangkatkan dengan menggunakan 100 armada bus menuju kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperlancar arus mudik. Pelaksanaan program ini diharapkan mengurangi beban biaya perjalanan serta meningkatkan keselamatan peserta mudik.
4. Penyelenggaraan program Mudik Gratis jalur laut dengan rute Jangkar – Raas dan Jangkar – Sapudi sebanyak 12 *trip* dengan kapasitas mencakup 250 penumpang dan 100 unit kendaraan sepeda motor.
5. Layanan Trans Jatim digratiskan selama periode Idulfitri (21 – 22 Maret 2026) sebagai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas silaturahmi.
6. Pemerintah Provinsi Jatim melalui UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Abdurrachman Saleh turut mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada hari raya Idulfitri 1447 H/2026 melalui penurunan tarif jasa kebandarudaraan (PJP2U dan PJP4U) sebesar 50%.

Kebijakan ini sejalan dengan penurunan *fuel surcharge* serta pemberian insentif PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk penerbangan kelas ekonomi pada periode lebaran.

7. Layanan Bus Trans Jatim yang menyelenggarakan promo berkah Ramadan berupa potongan harga tiket hingga 50% bagi penumpang yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau QRIS Tap.

#### K4 – Komunikasi Efektif

##### 1. Penguatan Koordinasi melalui Rapat dan *High Level Meeting* (HLM)

Pelaksanaan Rapat koordinasi (Rakor) TPID Prov Jatim di Bulan Januari 2026 dalam rangka penajaman evaluasi program kerja TPID 2025 serta penajaman program kerja TPID Jatim 2026 berdasarkan roadmap TPID Prov Jatim 2025 – 2027. Penguatan sinergi juga dilakukan melalui berbagai *High Level Meeting* (HLM) di tingkat Kabupaten/Kota serta provinsi Jawa Timur 2026 khususnya menjelang HBKN Idulfitri sebagai upaya untuk mempersiapkan ketersediaan bahan pokok di tengah lonjakan harga. Selain itu, penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TPID se-Jawa Timur.

##### 2. Penguatan Transparansi dan Digitalisasi *Monitoring Harga* dan Ketersediaan Pasokan

Pemanfaatan website Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur (SISKAPERBAPO) untuk memantau harga di 38 kabupaten/kota dengan akurasi dan korelasi tinggi terhadap data inflasi BPS. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki *dashboard* pemantauan harga dan pasokan.

##### 3. Pengembangan dan Implementasi *Dashboard Pengendalian Inflasi*

Dalam rangka mendukung *monitoring* dan evaluasi program TPID Jawa Timur sesuai Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur, telah dikembangkan *dashboard* pelaporan pengendalian inflasi yang dapat diakses melalui <https://tpidjatim.com>. Ke depan, *dashboard* TPID Jawa Timur akan dilakukan pengembangan yang bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

##### 4. Edukasi Masyarakat mengenai Bijak Berbelanja

TPID Jawa Timur bersinergi guna menjaga ekspektasi masyarakat menjelang HBKN Idulfitri berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang mengajak bijak berbelanja serta edukasi agar masyarakat tidak melakukan *panic buying*.

bulan April 2026 tercatat sebesar 2,85% (yoy) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi triwulan I 2026 sebesar 3,79% (yoy). Prakiraan inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 utamanya didorong oleh terjaganya harga komoditas pangan strategis seiring peningkatan stok pada momen panen raya serta tren moderasi harga emas perhiasan domestik. Beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan harga yang relatif stabil seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca Ramadan serta Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, adanya potensi panen pada beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah dan cabai rawit pada triwulan II 2026 mendorong kecukupan pasokan komoditas hortikultura yang terjaga dan menjadi pendorong prakiraan inflasi yang lebih stabil. Selanjutnya, berlanjutnya panen raya komoditas beras di sentra-sentra produksi seperti Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Jember juga berpotensi mendorong terjaganya harga beras di Jawa Timur. Namun demikian, risiko rambatan atas kenaikan harga energi dunia terhadap harga komoditas energi domestik (termasuk produk turunannya) perlu diwaspadai mengingat dampaknya yang luas terhadap kenaikan harga berbagai komoditas serta perekonomian secara keseluruhan.

Beberapa faktor pendorong inflasi tahunan pada triwulan II 2026 di antaranya (i) peningkatan harga komoditas energi domestik (khususnya non-subsidi) serta komoditas angkutan udara seiring penyesuaian harga avtur, (ii) *second round effect* eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan harga sejumlah komoditas domestik lebih lanjut, serta (iii) penguatan nilai tukar USD yang berpotensi meningkatkan harga komoditas yang bersumber dari luar negeri. Selain itu, terdapat peluang terbentuknya El Niño kategori lemah hingga moderat sejak bulan Juni 2026 yang berpotensi memberikan disrupsi dalam masa tanam pasokan komoditas pangan, meski dampaknya positif terhadap produktivitas komoditas hortikultura saat masa panen raya yang diperkirakan pada bulan Mei – Juni 2026. Selanjutnya, dampak *second round effect* eskalasi geopolitik Timur Tengah mulai terlihat pada komoditas turunan seperti harga plastik dan pupuk non-subsidi. Kenaikan harga pupuk non-subsidi mulai terpantau sejak awal April 2026, didorong oleh naiknya harga bahan baku serta plastik kemasan yang terdampak konflik Timur Tengah. Risiko ini tertahan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% di tengah harga pupuk dunia yang melonjak lebih dari 40%, guna melindungi biaya produksi petani dari sisi hulu. Kemudian, harga BBM non-subsidi pada bulan April dan Mei 2026 tercatat meningkat cukup signifikan khususnya pada kategori produk solar non-subsidi di mana Dextrite naik menjadi Rp26.000/liter dan Pertamina Dex menjadi Rp27.900/liter, sementara BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Tren kenaikan harga BBM non subsidi untuk produk Pertamina Turbo, Pertamina Dex, serta Dextrite telah terjadi sejak penyesuaian pada Maret 2026. Harga Pertamina Turbo mengalami kenaikan dari Rp13.100/ltr pada Maret 2026 lalu menjadi Rp19.400/ltr pada April 2026.

## 2.5. Tracking Inflasi Triwulan II 2026

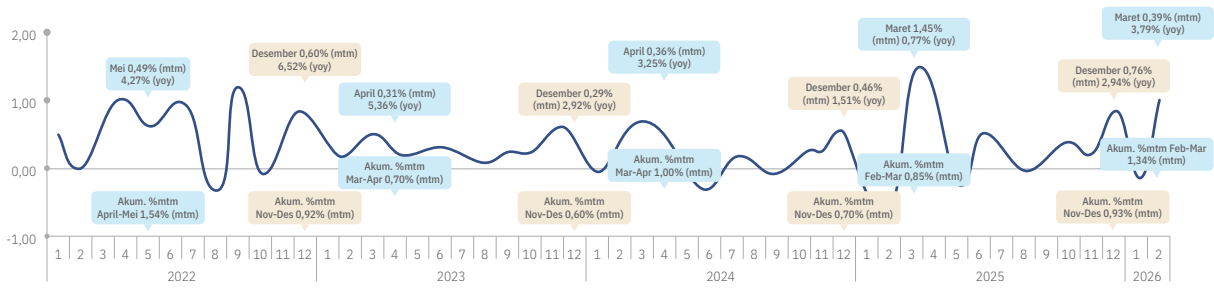
Inflasi Jawa Timur Triwulan II 2026 (realisasi hingga bulan April 2026) diperkirakan berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy). Inflasi tahunan Jawa Timur pada

Selanjutnya terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada komponen Pertamina Dex dan Dexlite. Pertamina Dex pada Maret 2026 berada pada harga Rp14.200/ltr dan menjadi Rp23.600/ltr pada penyesuaian tanggal 17 April 2026. Hal serupa juga terjadi pada produk dexlite yang pada Maret 2026 berada pada level Rp14.500/ltr menjadi Rp23.900/ltr di April 2026. Lebih lanjut, kenaikan harga avtur dan bahan bakar rumah tangga juga diprakirakan turut meningkatkan biaya logistik dan distribusi barang dan jasa, yang berpotensi menjadi tekanan inflasi lanjutan kepada berbagai komoditas. Namun demikian, berlanjutnya penguatan sinergi program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur serta koordinasi erat dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) yang telah diselenggarakan melalui kegiatan GPIPS Jawa pada bulan Mei 2026 di Sidoarjo akan turut mendukung tingkat inflasi yang tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional pada triwulan II 2026, salah satunya melalui komitmen stabilisasi harga komoditas yang diatur oleh Pemerintah khususnya kategori komoditas yang diberikan subsidi oleh Pemerintah.

**BOKS 3**

## High Level Meeting Kunci Sinergi Pengendalian Inflasi Pada Idulfitri 1447 Hijriah

**Grafik 1.** Inflasi Jawa Timur Tahun 2022 s.d. 2026



Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idulfitri, secara historis menjadi momentum yang kerap memicu tekanan inflasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Peningkatan permintaan masyarakat secara serentak menciptakan tekanan inflasi yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu daya beli masyarakat. Namun, pada Idulfitri 1447 Hijriah (Maret 2026), Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 3,79% (yoy) dan 0,39% (mtm), lebih rendah dan terkendali jika dibandingkan periode Februari 2026 sebesar 4,88% (yoy) dan 0,95% (mtm). Capaian tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi pada periode HBKN Idulfitri 1446 Hijriah (Maret 2025) yang mencapai 1,45% (mtm), HBKN Nataru (Desember 2025) yang mencapai 0,76% (mtm), maupun rata-rata inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,71% (mtm) (Grafik 1).

Stabilitas inflasi menjadi wujud nyata keberhasilan intervensi dini melalui *High Level Meeting* (HLM) pada 26 Februari 2026 yang mensinergikan kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan 38 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur (Gambar 1). Dengan mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat”, forum yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur ini menjadi fondasi krusial dalam menyelaraskan langkah strategis untuk (i) menghadapi volatilitas harga menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah. Fokus utama diarahkan untuk mensinergikan strategi 4K pengendalian inflasi (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) di tengah tantangan di tingkat global dan domestik; (ii) mendiskusikan terkait kecukupan pasokan komoditas pangan strategis dan energi; (iii) kebijakan stimulus

ekonomi Pemerintah a.l. diskon tarif angkutan udara dan penyediaan mudik gratis; serta (iv) upaya pengendalian harga oleh Satgas Pangan.

Sepanjang tahun 2022-2025, pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri, inflasi Jawa Timur utamanya disumbang oleh lonjakan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Transportasi. Pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, komoditas peternakan seperti daging dan telur ayam ras, serta komoditas hortikultura khususnya bawang merah, konsisten menjadi *volatile foods* utama akibat ketidakseimbangan antara lonjakan permintaan musiman dengan kapasitas pasokan yang tersedia.

Menindaklanjuti tren historis tersebut, implementasi konkret strategi 4K pengendalian inflasi pada periode HBKN Idulfitri tahun ini difokuskan terhadap kelompok makanan dan minuman sebagai kontributor utama inflasi



**Gambar 1.** HLM TPID dan TP2DD se-Jawa Timur Menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah

Sumber: Hasil Rapat Bicarawil se-Jawa Timur (Diolah 2026)

## BOKS 3

**selama 3 (tiga) tahun terakhir, didukung optimalisasi dan intensifikasi program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile (K1) secara signifikan.**

Program ini merupakan perwujudan sinergi erat Bank Indonesia, TPID kabupaten/kota, dan Bulog dalam bentuk pasar murah secara keliling ke lokasi yang mengalami peningkatan harga komoditas pangan strategis secara signifikan atau di atas HET guna mendukung intervensi secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi. Sepanjang periode Februari hingga Maret 2026, EPIK *Mobile* telah menjangkau secara masif ke 15 titik strategis di 13 kabupaten/kota. Pelaksanaannya terus diakselerasi seiring mendekati HBKN Idulfitri. Sejumlah 4 titik direalisasikan pada Februari 2026 kemudian ditingkatkan secara signifikan menjadi 11 titik pada Maret 2026. Melalui program ini, berbagai komoditas pangan strategis seperti beras premium (Jatim Cettar), beras medium SPHP, minyak goreng Minyakita, dan gula pasir disediakan dengan harga di bawah HET maupun harga pasar. Program ini terbukti efektif memotong rantai pasok guna menghadirkan komoditas pangan strategis yang terjangkau sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung daya beli masyarakat menjelang HBKN Idulfitri.

**Penguatan kelembagaan korporasi petani menjadi sebuah terobosan strategis Jawa Timur sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan secara berkelanjutan (K2).** Korporasi petani merupakan gabungan gapoktan yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi guna menghadirkan ekosistem pertanian yang efisien sehingga dapat menawarkan produk yang lebih terjangkau diikuti peningkatan pendapatan oleh produsen. Keunggulan ekosistem ini tidak hanya terletak pada standarisasi proses budidaya untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil panen, tetapi juga pada penguatan hilirisasi melalui *communal branding* “Jatim Cettar”. Merek ini merepresentasikan jaminan kualitas beras premium asli Jawa Timur yang mampu bersaing di pasar modern, namun tetap mempertahankan komitmen harga yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat.

**Kedua inovasi tersebut turut didukung oleh program TPID pada aspek Kelancaran Distribusi (K3) dan Komunikasi Efektif (K4).** Dalam hal ini, PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai BUMD Provinsi berperan sebagai *offtaker* dari korporasi petani tersebut untuk memastikan distribusi berjalan efektif ke berbagai kanal, termasuk ASN,

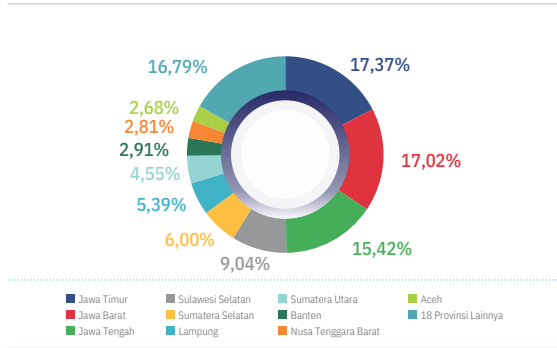
pasar murah, dan jaringan pemasaran lainnya. Jaringan EPIK (K1) yang bersifat toko permanen di berbagai Kab/Kota turut berperan sebagai *benchmark* harga pangan murah sekaligus pasar yang pasti bagi produk Korporasi Petani. Ketika terjadi tekanan peningkatan harga di suatu wilayah, EPIK *Mobile* (K1) dapat segera dioperasikan sebagai instrumen intervensi cepat untuk menjaga stabilitas harga. Efektivitas program tersebut semakin diperkuat melalui dukungan *platform* SISKAPERBAPO dan *platform Dashboard* TPID Jatim (K4) yang menyediakan data pemantauan harga komoditas pangan strategis secara harian serta pemantauan pelaksanaan program pengendalian inflasi.

**Secara keseluruhan, integrasi berbagai inisiatif program pengendalian inflasi menjadi kunci penting keberhasilan Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi dan volatilitas harga pada HBKN Idulfitri 1447 Hijriah.** Selain itu, sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah dan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan TPIP turut mendukung efektivitas pengendalian inflasi di Jawa Timur. Keberhasilan tersebut semakin diperkuat oleh implementasi *framework* 4K yang dijalankan secara nyata dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui pendekatan ini, Jawa Timur menghadirkan terobosan dalam pengendalian inflasi dengan membangun ekosistem pangan yang utuh dan berkelanjutan dengan menghubungkan petani, penggilingan, distributor, pasar, hingga sistem monitoring digital dalam satu rantai nilai yang saling terintegrasi. Pendekatan komprehensif tersebut tidak hanya efektif dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi selama periode HBKN Idulfitri, tetapi juga berperan strategis dalam mempertahankan daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan.

BOKS 4

## El Niño, Potensi Kekeringan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur

Grafik 1. Produksi Beras di Indonesia Tahun 2025



Sumber: Bapanas, diolah

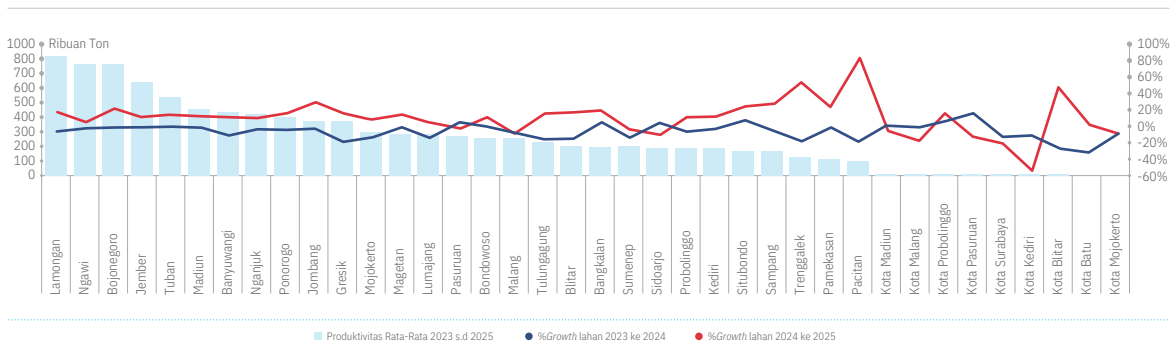
Jawa Timur merupakan lumbung utama produksi beras nasional. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa produksi beras Jawa Timur tahun 2025 sebesar 6,02 juta ton sedangkan produksi beras nasional sebesar 34,6 juta ton, atau menyumbang sebesar 17,37% terhadap produksi beras di Indonesia, sehingga menjadikannya provinsi dengan kontribusi terbesar secara nasional. Sektor pertanian Jawa Timur memiliki bobot yang tidak kecil dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Data BPS Jawa Timur (2026) menunjukkan di sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Jawa Timur pada Tw I 2026 memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 15,85% (q-to-q). Pertumbuhan yang tinggi didukung kondisi iklim yang baik, tecermin dari suhu udara yang stabil dan optimal serta curah hujan yang teratur dan mencukupi. Namun, fenomena iklim, seperti El Niño dapat membawa dampak kekeringan sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas di sektor pertanian.

Berdasarkan data statistik BPS tahun 2023-2025, Kabupaten dengan rata-rata produksi tertinggi selama 2023–2025 adalah Lamongan (818.329,84 ton), Ngawi (769.841,97 ton), dan Bojonegoro (765.391,60 ton), yang secara kolektif menyumbang lebih dari 24% kontribusi terhadap total produksi Jawa Timur. Grafik 2 menggambarkan adanya fluktuasi luas panen dan produktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari intervensi faktor iklim, khususnya fenomena El Niño yang berdampak luas pada sistem pertanian berbasis irigasi maupun tadah hujan. Ketahanan pangan Jawa Timur tidak hanya diukur dari angka produksi atau stok beras semata, tetapi juga dari kemampuan sistem pertanian dan tata kelola pangan untuk beradaptasi dan merespons secara efektif ketika El Niño melanda.

### Penerapan masa tanam yang telah disusun pemerintah sebagai panduan rekomendasi bagi petani di lapangan.

Budidaya padi di Indonesia umumnya terbagi dalam tiga Musim Tanam (MT) utama yaitu: MT I berlangsung pada Oktober–Desember yang merupakan periode awal hingga puncak musim hujan. MT II pada bulan Februari–April yang merupakan musim transisi dari hujan ke kemarau. MT III berlangsung pada periode Juni – Agustus merupakan periode memasuki musim kemarau. Berdasarkan kajian spasial menggunakan Indeks Risiko Kekeringan (IRK) yang dibangun dari integrasi enam indikator remote sensing menghasilkan pemetaan risiko potensi kekeringan di Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemetaan periode El Niño berlangsung pada Subround 2 dan 3, sesuai hasil pemetaan seperti pada Gambar 1. wilayah-wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi kekeringan tinggi adalah kawasan pesisir utara dan Pulau Madura. Wilayah-wilayah

Kota/Kabupaten dan Growth lahan



Sumber: BPS, diolah

**BOKS 4**

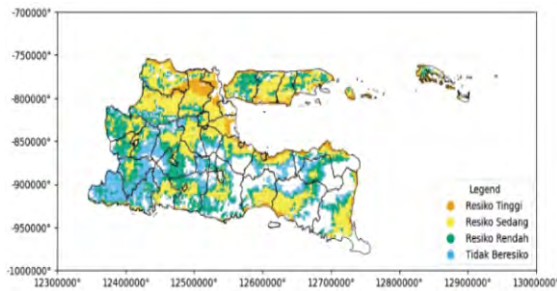
ini meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, serta seluruh kabupaten di Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. (Putri et al., 2024), beberapa daerah merupakan daerah sentra penghasil beras, sehingga pada periode El Niño terdapat potensi produktivitas beras menjadi turun serta bergesernya periode masa panen.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada periode Juni 2026 sampai dengan Oktober 2026, curah hujan di hampir seluruh wilayah Jawa Timur sangat rendah. Periode tersebut sesuai kalender tanam, merupakan periode MT III. Curah hujan yang rendah menunjukkan bahwa indeks ENSO (El Niño–Southern Oscillation) telah berada dalam fase moderat hingga kuat. Berkurangnya curah hujan secara langsung akan mengurangi ketersediaan air irigasi,

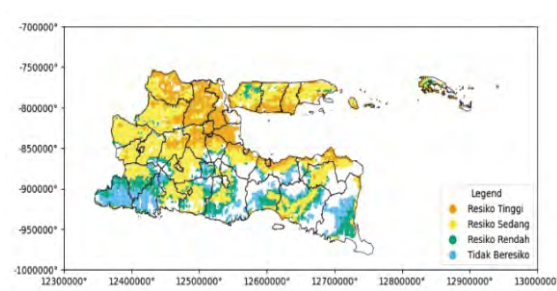
**Gambar 1.** Peta Sebaran Risiko Mengalami Kekeringan Di Jawa Timur

**Gambar 2.** Peta Sebaran Prakiraan Curah Hujan di Wilayah Indonesia

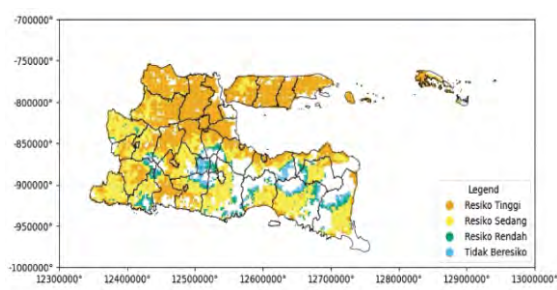
*Subround 1* (Bulan Januari – April 2023)



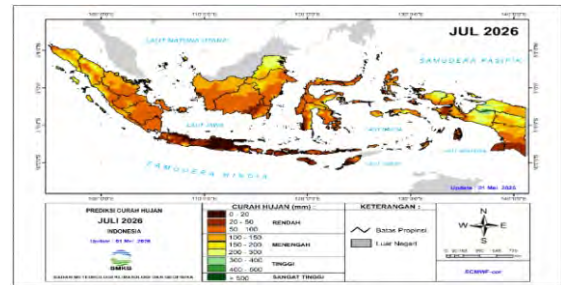
*Subround 2* (Bulan Mei – Agustus 2023)



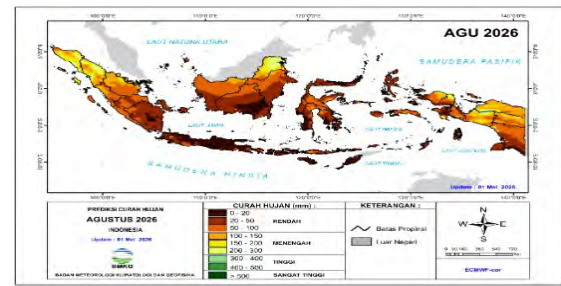
*Subround 3* (Bulan September – Desember 2023)



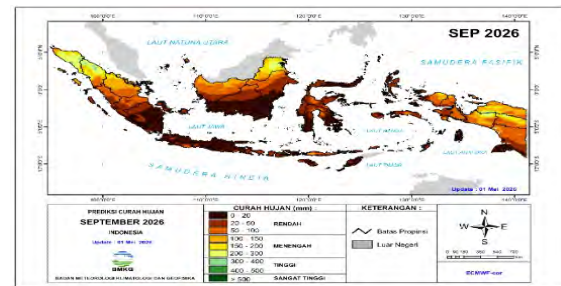
Prakiraan curah hujan bulan Juli 2026



Prakiraan curah hujan bulan Agustus 2026



Prakiraan curah hujan bulan September 2026



Sumber: BMKG

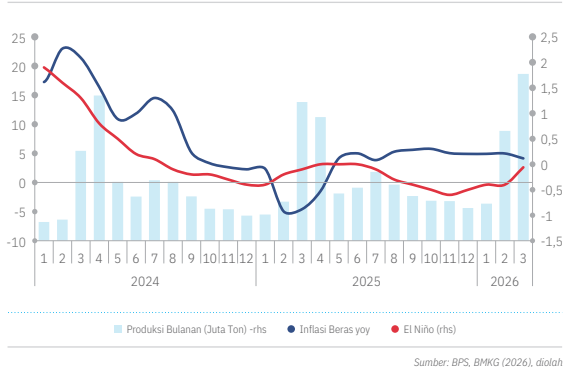
**BOKS 4**

terutama bagi sawah tadah hujan. Suhu udara yang lebih tinggi selama musim kemarau akan meningkatkan laju evapotranspirasi tanaman, sehingga kebutuhan air tanaman justru meningkat saat pasokan air semakin berkurang atau sering disebut sebagai *water stress*. (Boer et al., 2020). Selain itu, kondisi panas dan kering yang ekstrem menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proliferasi hama dan penyakit tanaman, terutama wereng coklat dan blas padi yang kerap meledak populasinya (Estiningtyas et al., 2022) dan memicu terjadinya gagal panen dan mempengaruhi ketersediaan pasokan.

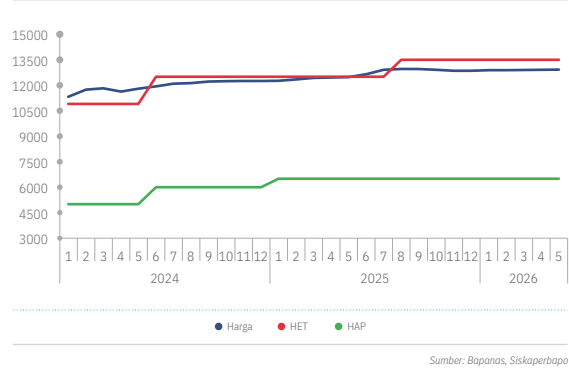
**Gangguan iklim akibat El Niño berdampak langsung terhadap produksi dan stabilitas harga beras.** Grafik 3 ini memberikan gambaran bahwa El Niño memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga beras. Ketika indeks intensitas El Niño meningkat, inflasi harga beras hampir selalu ikut bergerak naik. Pada periode 2023, di mana indeks El Niño mengalami penguatan dan inflasi beras merespons dengan peningkatan. Pada periode tahun 2022, kondisi relatif tenang. Inflasi beras bergerak pada kisaran rendah antara 0,5% hingga 2,3%, sejalan dengan indeks El Niño yang masih berada pada level netral hingga lemah. Produksi beras bulanan pun berjalan mengikuti pola musiman yang normal, dengan puncak panen di awal tahun dan penurunan di pertengahan tahun.

Dalam konteks pengendalian inflasi beras, Pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). HAP berfungsi sebagai harga dasar yang melindungi petani dari harga gabah yang terlalu rendah saat panen raya, sementara HET berfungsi melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali serta menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan

**Grafik 2. Pengaruh El Niño terhadap Inflasi dan Produksi Beras**



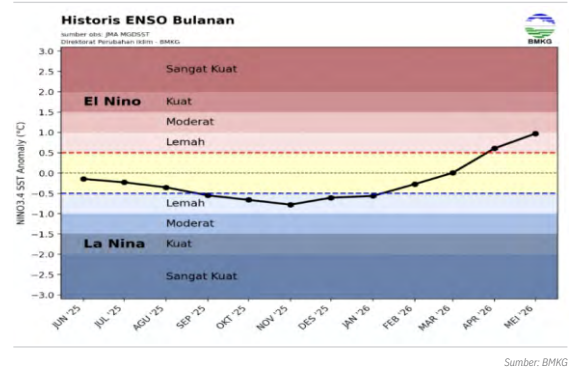
**Grafik 3. Perbandingan Harga Jual Beras, HAP dan HET**



HAP berfungsi sebagai instrumen perlindungan harga di tingkat petani, membatasi lonjakan penurunan selama musim panen utama. Pemerintah dalam menentukan HPP mempertimbangkan struktur biaya usaha tani (biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan sewa lahan), margin keuntungan bagi petani, konversi gabah ke beras (*milling ratio*), serta kondisi permintaan dan pasokan beras secara nasional. Sementara HET diterapkan untuk melindungi konsumen menengah dan bawah dari harga beras yang tidak terjangkau.

Kondisi pada Grafik 3 di atas menggambarkan pada saat terdapat penyesuaian HAP maka HET akan merespon dengan melakukan penyesuaian harga, sedangkan di sisi harga jual dijaga agar masih berada pada level dibawah atau sama dengan HET. Di saat terjadi gangguan dari faktor pasokan akibat El Niño maupun gangguan distribusi, HET dapat kehilangan daya ikatnya dan pemerintah akan melakukan penyesuaian yang justru berpotensi memvalidasi ekspektasi inflasi lebih lanjut.

**Gambar 3. Historis indeks ENSO bulanan**



## BOKS 4

Untuk memulihkan efektivitas HET sebagai instrumen stabilisasi, diperlukan penguatan sistem cadangan pangan nasional seperti melalui Bulog, perbaikan infrastruktur distribusi untuk memangkas rantai pasok yang panjang, serta pengembangan sistem pemantauan harga *real-time* yang memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat dan antisipatif sebelum harga aktual melampaui batas HET yang ditetapkan.

**Fenomena El Niño secara umum akan berdampak pada tingkat curah hujan yang dapat mengakibatkan kekeringan.** Hal tersebut akan berpengaruh pada penyesuaian periode masa tanam serta tingkat produksi beras. Daerah-daerah di Jawa Timur bagian utara dan Pulau Madura memiliki potensi kekeringan yang tinggi. Beberapa daerah tersebut merupakan sentra produksi beras utama Jawa Timur. Prakiraan periode El Niño tahun 2026 akan terjadi pada bulan Juli sampai dengan September, sehingga telah memasuki kalender tanam MT III. Fenomena ini mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian melalui mekanisme: berkurangnya ketersediaan air irigasi yang mengakibatkan peningkatan *water stress* pada tanaman padi, munculnya proliferasi hama dan penyakit tanaman sehingga memicu terjadinya gagal panen. Seiring dengan jumlah produksi yang turun maka berpotensi menurunkan jumlah pasokan dan dapat memicu lonjakan harga komoditas beras.

**Risiko iklim El Niño bersifat prediktabel dengan siklus ulang tiga hingga tujuh tahun dengan kondisi yang dapat dideteksi sebelum dampaknya terasa di lapangan.** Karakteristik ini memberikan kesempatan strategis bagi pemangku kebijakan untuk melakukan mitigasi secara antisipatif. Mempertimbangkan proyeksi peningkatan intensitas El Niño seiring akselerasi perubahan iklim global, penguatan ketahanan pangan Jawa Timur dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi yaitu:

1. Membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis data iklim yang terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh lapisan pengampu kebijakan dimulai dari tingkat kementerian pusat hingga petani di tingkat desa. Sistem ini didesain bukan sekadar sebagai mekanisme penyiaran informasi, melainkan sebagai *platform* interaksi dua arah yang membantu petani menerjemahkan prediksi iklim musiman ke dalam keputusan pertanian yang konkret.
2. Investasi infrastruktur irigasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi kerentanan pertanian terhadap

perubahan fenomena iklim. Kerentanan sistem pertanian padi di Jawa Timur bukan semata persoalan iklim, melainkan juga persoalan berkaitan dengan infrastruktur pengairan sehingga terdapat beberapa dukungan yang perlu diakselerasi yaitu:

- a. rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang sudah mengalami degradasi. Pemerintah dapat melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah berisiko tinggi. Inovasi seperti pompanisasi tenaga surya dan pembangunan embung desa terbukti efektif menekan biaya pengairan hingga 90% (Putri et al., 2024). Modernisasi sistem distribusi air irigasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air (Kementan, 2023).
  - b. pembangunan embung-embung kecil di wilayah yang memiliki potensi kekeringan yang tinggi untuk memanen air hujan selama periode La Niña.
  - c. pengembangan sumur dalam (*deep well*) berbasis tenaga surya di kawasan yang memiliki akuifer yang layak.
3. Penyuluh pertanian perlu diperkuat untuk membantu petani memahami prakiraan iklim musiman. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pemodelan iklim sehingga dapat menyesuaikan rencana tanam mereka secara proaktif berdasarkan kondisi cuaca dan iklim.
  4. Pengembangan dan diseminasi varietas padi yang tahan kekeringan. Beberapa varietas padi toleran kekeringan yang dikembangkan oleh lembaga riset nasional, seperti Inpari Sidenuk dan Inpari IR Nutri Zinc, telah menunjukkan kemampuan yang baik untuk tetap berproduksi dalam kondisi defisit air. Namun, adopsi varietas-varietas ini masih relatif terbatas di tingkat petani. Penggunaan varietas ini dapat digunakan sebagai alternatif selama periode El Niño, agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
  5. Memperkuat pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui pengoptimalan stok ketika produksi sedang melimpah dan harga relatif rendah, sehingga tersedia buffer yang memadai ketika El Niño melanda dan produksi turun. Peta risiko kekeringan berbasis remote sensing dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami defisit pasokan pangan lebih awal, sehingga distribusi dari cadangan pangan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara proaktif, bukan reaktif setelah krisis harga sudah terjadi.



# Pembiayaan Daerah

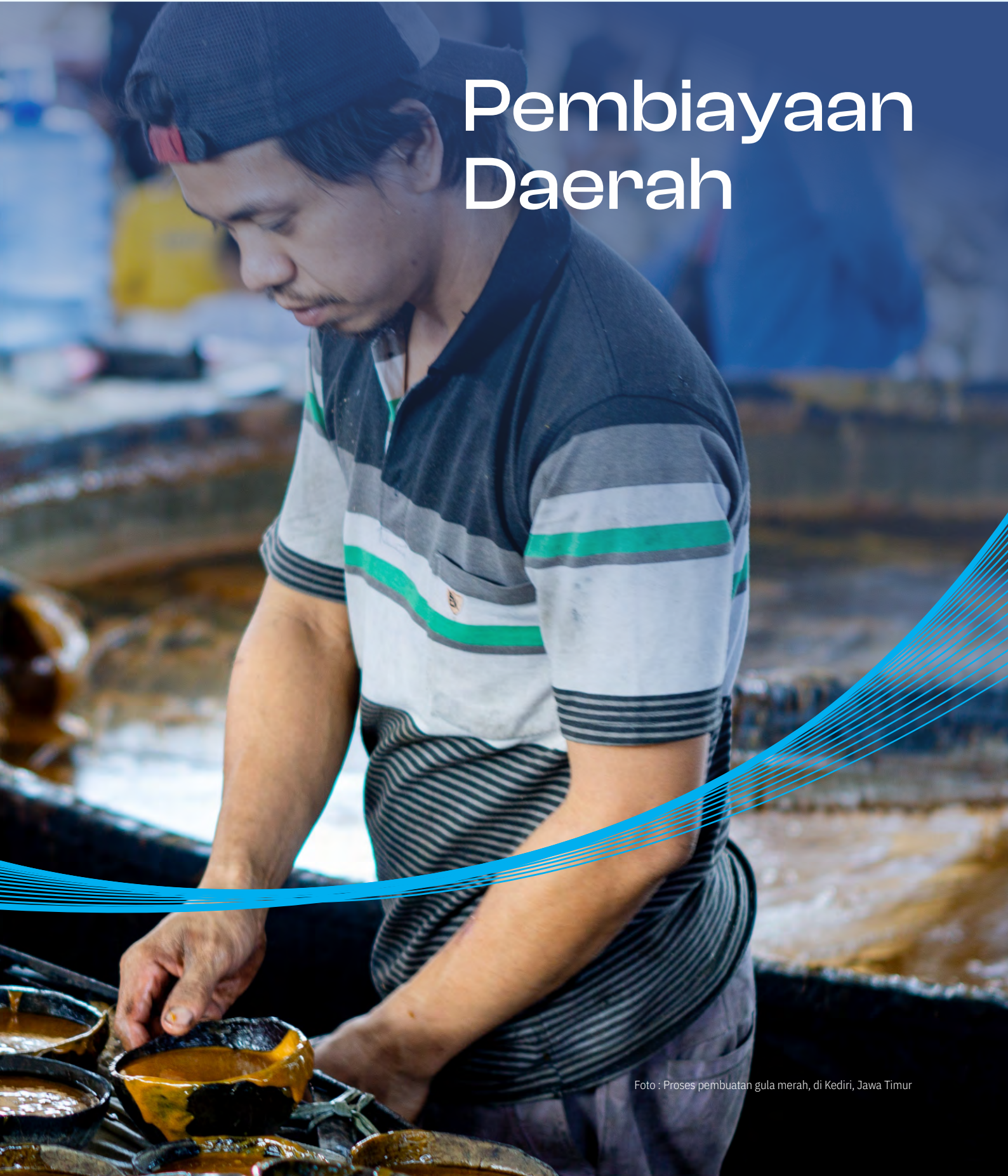


Foto : Proses pembuatan gula merah, di Kediri, Jawa Timur

### 3.1. Kondisi Umum

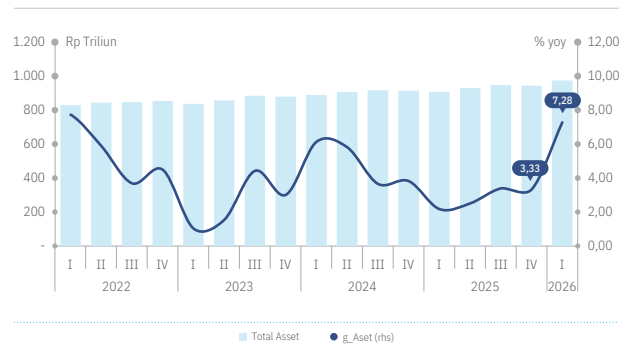
Kinerja intermediasi perbankan pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian positif ini utamanya didorong oleh akselerasi penyaluran kredit sektor korporasi yang terus berlanjut, dengan tetap menjaga profil risiko kredit dalam batas yang terkendali. Penyaluran kredit perbankan umum mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama perbaikan pada segmen korporasi. Kendati masih berkontraksi, pertumbuhan kredit korporasi tercatat membaik, sejalan dengan membaiknya kinerja kredit perdagangan dan industri pengolahan serta turunnya suku bunga kredit korporasi di tengah sikap *wait and see* perusahaan akibat dampak ketidakpastian global yang masih tinggi khususnya dampak rambatan perang Timur Tengah. Sementara itu, kredit rumah tangga tetap tumbuh positif cenderung moderat utamanya akibat melambatnya pertumbuhan pada hampir seluruh komponen pembentuk kredit kecuali Peralatan RT dan Multiguna. Kondisi perlambatan tersebut, sejalan dengan moderasi minat masyarakat terhadap pembelian *durable goods* khususnya aset properti, dan kendaraan bermotor menggunakan kredit seiring kenaikan tingkat suku bunga meski BI Rate dalam tren penurunan. Hal ini tecermin dari penurunan realisasi KPR, KPA, KP Ruko/Rukan dan KKB. Kinerja penyaluran kredit UMKM berkontraksi pada Triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan kehati-hatian bank di tengah kenaikan risiko kredit serta tekanan terhadap daya beli masyarakat khususnya segmen berpenghasilan menengah dan rendah, meskipun suku bunga kredit UMKM terus mengalami penurunan. Lebih lanjut, pangsa UMKM masih di atas 30%, kendati terus menunjukkan penurunan. Tingkat intermediasi perbankan pada periode laporan berada pada level optimal dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat sebesar 87,81%, sedikit berada di atas rentang intermediasi optimal 84%–94% sebagaimana digunakan dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia. Penghimpunan DPK masih mencatatkan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan DPK Rumah Tangga yang tercatat mengalami peningkatan didorong kenaikan pada komponen giro dan tabungan. Selanjutnya, DPK Korporasi tumbuh meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pada komponen giro.

Ketahanan perbankan di Jawa Timur tetap menunjukkan resiliensi yang kuat, meskipun risiko kredit sedikit meningkat namun berada dalam batas aman. Secara agregat, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,27%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,23%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) meningkat menjadi 32,93% pada triwulan I 2026 dari sebelumnya 30,48% pada triwulan IV 2025, jauh di atas ketentuan minimum 8% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Capaian tersebut menegaskan resiliensi sektor perbankan yang tetap terjaga dalam memitigasi dampak risiko eksternal, di tengah eskalasi ketidakpastian global yang masih berlanjut.

### 3.2. Pembiayaan Daerah di Jawa Timur

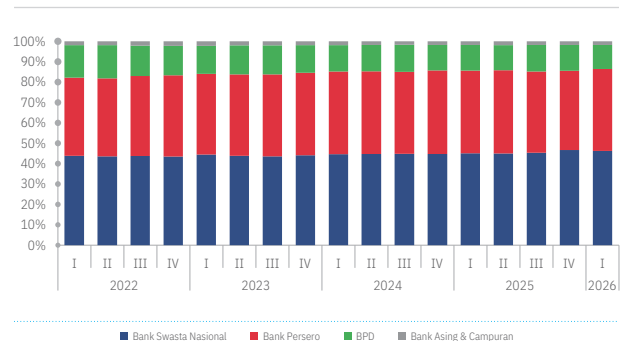
Fungsi intermediasi perbankan pada triwulan I 2026 terus menunjukkan tren penguatan. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari penyaluran kredit yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Likuiditas perbankan Jawa Timur pada triwulan laporan tetap tumbuh positif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), terutama bersumber dari peningkatan komponen tabungan dan giro. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan total aset perbankan meningkat dari 3,33% (yoy) atau sebesar Rp943,89 triliun pada triwulan IV 2025 menjadi 7,28% (yoy) atau sebesar Rp974,08 triliun pada triwulan laporan (Grafik 3.1). Kenaikan total aset terutama terjadi pada seluruh kelompok bank kecuali Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mencatatkan perlambatan. Kondisi tersebut ditengarai sejalan dengan strategi penguatan neraca melalui pengurangan utang luar negeri dan peningkatan cadangan pada Bank Persero. Adapun peningkatan pertumbuhan aset pada bank persero, bank swasta nasional, dan bank asing campuran seiring peningkatan pertumbuhan kredit dan DPK didukung tren BI-Rate yang tetap rendah di level 4,75% guna memberikan kepastian bagi pasar dan menjaga biaya dana (*cost of funds*) tetap terkendali, serta perbaikan indikator di berbagai sektor riil pada akhir 2025 memberikan momentum bagi perbankan pada awal 2026. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar masih didominasi oleh bank swasta nasional (pangsa 46,27%), bank persero (pangsa 40,13%), bank BPD (pangsa 11,81%) serta bank asing campuran (pangsa 1,79%) (Grafik 3.2).

Grafik 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

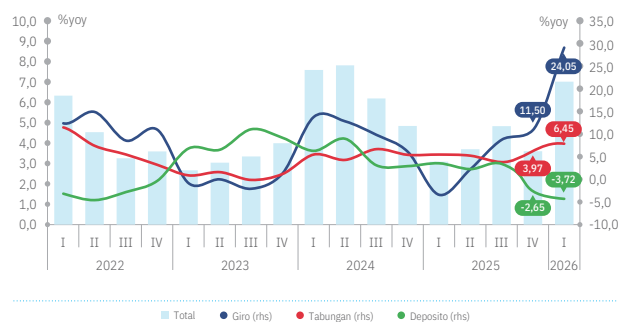
### 3.2.1. Dana Pihak Ketiga

**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada triwulan I 2026 tercatat mengalami kenaikan.** Total DPK tercatat sebesar Rp831,07 triliun dengan pertumbuhan 7,08% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yakni 3,60% (yoy) (Grafik 3.3). Peningkatan DPK utamanya didukung oleh kenaikan DPK Rumah Tangga seiring dengan HBKN Ramadan dan Idulfitri, sementara DPK Korporasi mengalami perlambatan. Berdasarkan jenis DPK, peningkatan laju DPK terutama berasal dari kenaikan pada komponen giro dan tabungan. Pada triwulan I 2026, giro tercatat meningkat dari 11,50% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 28,99% (yoy) pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, tabungan juga mengalami kenaikan, dari 4,97% (yoy) menjadi 6,45% (yoy) pada triwulan I 2026. Peningkatan tersebut sejalan dengan momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri yang meningkatkan pendapatan korporasi serta menjadi momen pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Peningkatan penggunaan instrumen digital<sup>7</sup> seperti QRIS, UE dan APMK turut menjadi faktor pendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dana di rekening bank sehingga turut mendukung peningkatan likuiditas perbankan. Di sisi lain, terjaganya suku bunga acuan BI-Rate dan suku bunga penjaminan LPS<sup>8</sup> yang tetap rendah turut mempengaruhi reposisi struktur pendanaan, yang tercermin dari

migrasi dana ke komponen giro yang lebih likuid di tengah masih berlangsungnya preferensi *internal financing* dalam pembiayaan aktivitas korporasi. Sementara itu, komponen deposito tercatat mengalami kontraksi lebih dalam dari periode sebelumnya, dari -2,65% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi -3,72% (yoy) pada triwulan I 2026. Penurunan ini sejalan dengan kecenderungan masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur untuk mencairkan deposito yang jatuh tempo untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek menjelang Lebaran. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok nominal simpanan, peningkatan DPK terutama terjadi pada kelompok depositan besar (nilai simpanan lebih dari Rp5 miliar hingga lebih dari Rp20 miliar). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan DPK bukan digerakkan oleh masyarakat ritel menengah ke bawah, melainkan oleh sektor korporasi dan depositan besar.

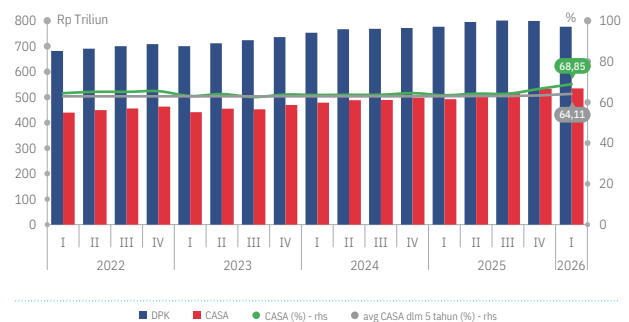
**Current Account Saving Account (CASA) perbankan di Jawa Timur tetap berada pada level yang tinggi.** Pada triwulan I 2026, rasio CASA tercatat sebesar 67,13%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 66,62%, serta berada di atas rata-rata rasio CASA dalam lima tahun terakhir sebesar 64,11%<sup>9</sup> (Grafik 3.4). Peningkatan porsi CASA pada periode ini didorong oleh pertumbuhan simpanan giro dan

**Grafik 3.3. Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.4. Perkembangan Rasio CASA Bank Umum**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Tabel 3.1. Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai**

Klasifikasi	Kelompok Nilai	III 2025		IV 2025		I 2026	
		Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy
Kecil	<10 JT	33.915	4,78	35.624	4,15	35.807	0,44
	>10 JT - 100 JT	112.984	1,04	115.720	0,74	116.320	0,43
	>100JT - 500JT	145.671	2,32	147.656	2,30	147.647	2,34
Menengah	>500JT - 1 M	73.521	3,04	73.737	1,36	72.077	(1,20)
	>1 M - 2 M	60.996	3,66	59.747	4,68	61.139	3,98
	>2 M - 5M	79.513	1,16	76.989	(1,02)	77.758	(0,45)
Besar	>5M - 10M	56.094	4,92	53.263	0,18	55.020	5,50
	>10M -15M	24.382	8,22	24.557	3,90	25.146	7,43
	>15M - 20M	20.830	9,23	19.335	4,65	21.484	17,36
	>20M	197.649	11,01	192.858	9,93	218.686	23,81

Sumber: Laporan Bank Umum, Diolah

7. Pertumbuhan sistem pembayaran non tunai secara nominal Rp87,8 triliun atau 42,74% (yoy)

8. Suku bunga penjaminan LPS pada periode triwulan I 2026 adalah 3,50%

9. Rata-rata 5 tahun terakhir (2021-2025).

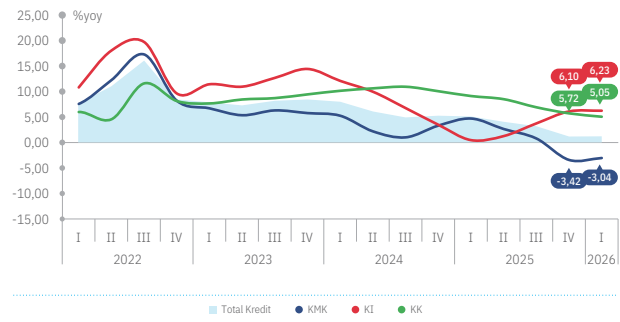
tabungan yang signifikan. Lonjakan saldo giro mencerminkan strategi pelaku usaha dalam memprioritaskan pendanaan internal untuk menopang biaya operasional. Fenomena ini juga diperkuat oleh akselerasi digitalisasi keuangan, sementara depositan ritel mulai melakukan diversifikasi aset demi imbal hasil yang lebih kompetitif di tengah melandainya BI Rate.

### 3.2.2. Penyaluran Kredit

**Kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek di Jawa Timur tercatat tumbuh meningkat sepanjang triwulan I 2026.** Total kredit yang disalurkan mencapai Rp729,77 triliun atau tumbuh 1,21% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,18% (yoy) (Grafik 3.5). Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan pertumbuhan terutama terjadi pada kredit modal kerja (pangsa 48,18%) yang membaik kendati masih terkontraksi dari -3,42% (yoy) menjadi -3,04% (yoy), serta peningkatan pada kredit investasi (pangsa 20,50%) menjadi 6,23% (yoy). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh membaiknya pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan<sup>10</sup> yang berimplikasi pada ekspansi dan penyerapan pembiayaan modal kerja dari perbankan. Keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur strategis dalam PSN periode 2026–2027, diprakirakan menjadi katalis utama<sup>11</sup>. **Kredit investasi** mengalami penguatan yang didorong oleh peningkatan impor barang pendukung konstruksi serta realisasi berbagai proyek industri strategis dan pembangunan infrastruktur Danantara di wilayah Jawa Timur pada triwulan I 2026<sup>12</sup>. Peningkatan kredit investasi juga didorong oleh percepatan realisasi Belanja Modal APBN di Jawa Timur yang melonjak signifikan sebesar 302,66% (yoy) pada triwulan I 2026, dengan prospek pertumbuhan yang terus ekspansif didorong oleh akselerasi berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. **Kredit Modal Kerja (KMK)** juga mengalami perbaikan meski masih terkontraksi, yang turut mendorong kenaikan kredit total di Jawa Timur pada Triwulan I 2026, dari sebesar -3,42% (yoy) menjadi -3,04%(yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain, perlambatan kredit konsumsi dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran dari pemanfaatan kredit untuk konsumsi barang tahan lama (*durable goods*) menjadi ke sektor jasa dan pengalaman (*leisure*) seiring adanya momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri. Di samping itu, terdapat kecenderungan rumah tangga untuk lebih memilih *self-financing* dalam memenuhi kebutuhan sejalan dengan tingkat keyakinan konsumen yang sedikit melambat dari 129,85 pada triwulan IV 2025 menjadi 126,37 pada triwulan laporan serta tecermin dari penurunan penyaluran KPR, KPA, KP Ruko/Rukan, dan KKB.

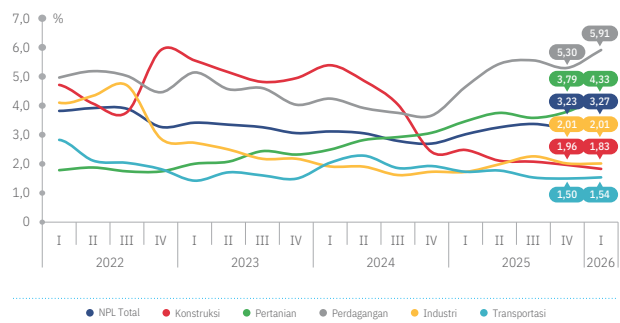
**Kualitas kredit perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tetap terjaga di bawah threshold 5%.** NPL gross tercatat sebesar 3,27%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,23% (Grafik 3.8). Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan NPL terutama terjadi utamanya pada lapangan usaha Perdagangan sejalan dengan potensi kenaikan harga komoditas terutama energi yang meningkatkan biaya produksi dan disrupsi permintaan-pasokan barang dan jasa

**Grafik 3.5. Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.6. Perkembangan NPL Berdasarkan LU Utama**



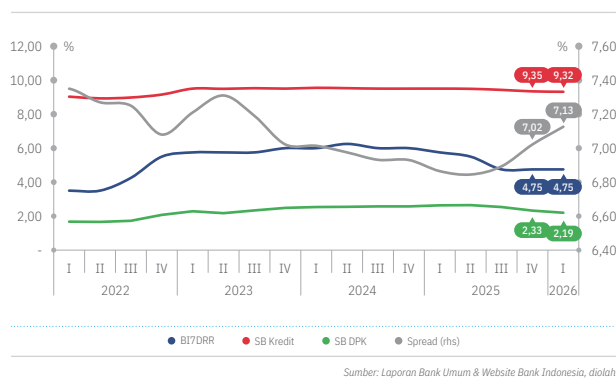
Sumber: Laporan Bank Umum, Diolah

seiring konflik geopolitik. Selanjutnya, peningkatan NPL LU Pertanian sejalan dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan terganggunya produksi dan pasokan pertanian hortikultura. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan rasio NPL terjadi pada komponen Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). Selain itu, tingkat kredit berisiko atau *Loan at Risk* (LaR) menunjukkan kenaikan sejalan dengan kenaikan *outstanding* kredit kolektabilitas 2 dari sebelumnya sebesar 7,37% pada triwulan IV 2025 menjadi 7,74% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.9).

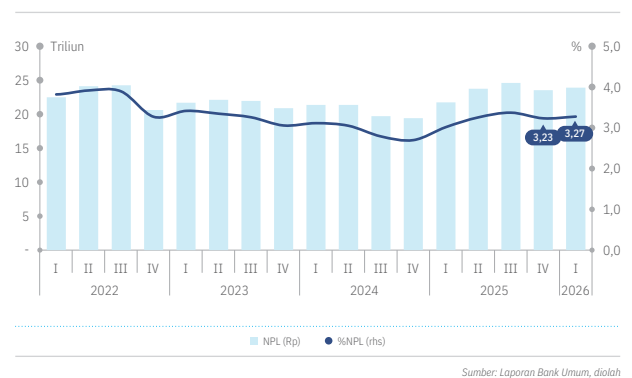
**Spread suku bunga perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat meningkat.** *Spread* suku bunga naik dari 7,02% pada triwulan IV 2025 menjadi 7,13% pada triwulan I 2026. Peningkatan tersebut terjadi seiring penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit. Suku bunga DPK menurun dari 2,33% pada triwulan IV menjadi 2,19% pada triwulan I 2026, sejalan dengan penurunan BI Rate dari 5,00% pada 20 Agustus 2025 menjadi 4,75% sejak tanggal 17 September 2025. Di sisi lain, suku bunga kredit mencatatkan penurunan terbatas dari 9,35% menjadi 9,32% pada periode laporan.

10. Kinerja kredit LU Industri Pengolahan membaik dari -4,05% (yoy) menjadi -1,89% (yoy), LU Perdagangan dari kontraksi -0,02% (yoy) meningkat menjadi 0,37% (yoy).  
 11. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, khususnya pada akses bandara Kediri, serta pembangunan jalur lintas selatan (JLS), terutama pada Brumbun-Pantai Sine, Bululawang-Tambak Rejo, Pantai Serang-Sumbersih, dan pembangunan Jalan Sirip Gondanglegi ke Balekambang.  
 12. Pengembangan kawasan industri, pembangunan pabrik kimia PT Hebang, industri kimia Golden Elephant, dan investasi nonbangunan pabrik kaca Xinyi Glass, serta groundbreaking beberapa proyek Danantara di Jawa Timur

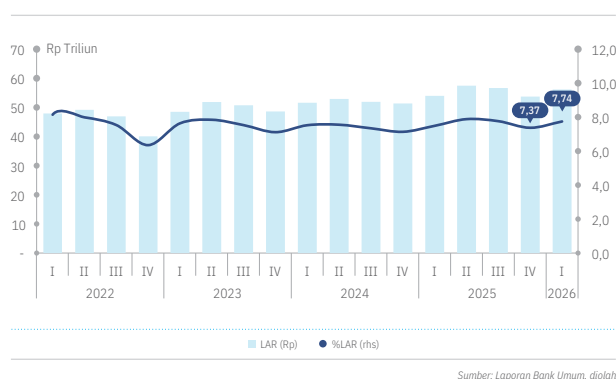
**Grafik 3.7. Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Bank Tertimbang**



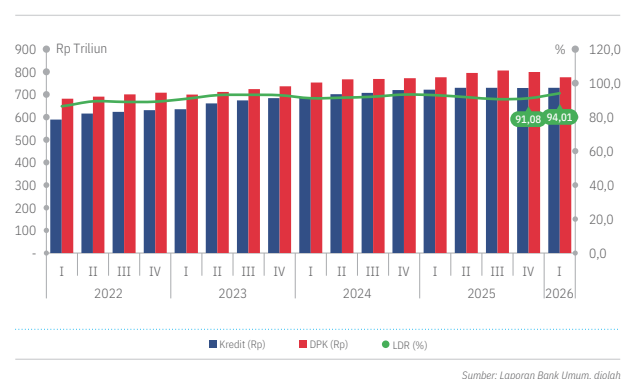
**Grafik 3.8. Perkembangan Rasio NPL Bank Umum**



**Grafik 3.9. Perkembangan Loan at Risk (LAR) Bank Umum**



**Grafik 3.10. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum**



### 3.2.3. Loan To Deposit Ratio (LDR)

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank umum di Jawa Timur pada awal triwulan 2026 menurun menjadi 87,81%, dan berada pada rentang intermediasi optimal (Grafik 3.10). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan laporan tetap berjalan cukup ekspansif menyalurkan kreditnya, sejalan dengan rentang intermediasi ideal sebesar 84%–94% sebagaimana diatur dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia.

## 3.3. Perkembangan Kinerja Korporasi

### 3.3.1. Kinerja Umum Korporasi

Kinerja umum korporasi di Jawa Timur tetap terjaga, tecermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, aktivitas dunia usaha di Jawa Timur masih berada pada level yang kuat, ditunjukkan oleh nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) meningkat untuk LU Industri Pengolahan sebesar 0,75% dan peningkatan juga terjadi pada LU Perdagangan 6,23% pada triwulan I 2026 hal tersebut juga sejalan dengan membaiknya kinerja manufaktur negara mitra dagang<sup>13</sup>. Kinerja korporasi yang terjaga juga tecermin dari kondisi rentabilitas dan likuiditas yang tetap terjaga. Hasil SKDU menunjukkan bahwa 92,04% korporasi menilai rentabilitas

pada triwulan IV 2025 berada dalam kondisi stabil cenderung meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, 93,84% korporasi menyatakan likuiditas berada dalam kondisi yang relatif stabil menguat selama periode laporan.

### 3.3.2. Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

#### 3.3.2.1 Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2026 tercatat membaik dari triwulan sebelumnya kendati masih terkontraksi. Kredit segmen korporasi secara nominal mencapai Rp301,57 triliun atau terkontraksi sebesar -0,54% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar -1,16% (yoy) (Grafik 3.11). Pertumbuhan kredit korporasi yang membaik tersebut sejalan dengan lebih tingginya kinerja kredit perdagangan dan industri pengolahan serta turunnya suku bunga kredit korporasi di tengah preferensi *internal financing* untuk aktivitas perusahaan dan sikap *wait and see* akibat dampak rambatan perang Timur Tengah. Lebih tingginya kinerja kredit korporasi khususnya pada LU perdagangan sejalan dengan peningkatan kinerja LU perdagangan dari sisi PDRB yang meningkat seiring kenaikan konsumsi masyarakat pada momen Imlek, Nyepi, Ramadan dan HBKN Idulfitri 2026.

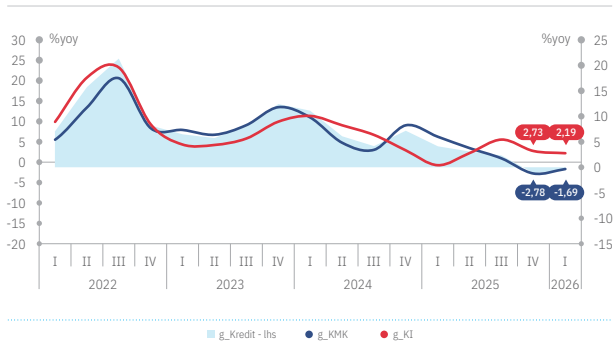
13. Kinerja manufaktur negara mitra dagang, seperti AS, Jepang, Tiongkok, Eropa, Swiss, dan Vietnam, masing-masing meningkat dari 49,4; 50,2; 49,8; 48,1; 48,5; dan 51,2 pada Des-2025 menjadi 52,3; 51,6; 50,8; 51,6; 53,3; dan 51,2 pada Maret-2026 (Sumber: tradingeconomics)

Peningkatan kinerja penyaluran kredit korporasi yang lebih tinggi cenderung tertahan oleh masih adanya kecenderungan *wait and see* korporasi dalam melakukan investasi di tengah ketidakpastian global yang tecermin dari (i) moderasi pertumbuhan kredit investasi korporasi; (ii) peningkatan DPK korporasi; serta (iii) penarikan fasilitas kredit yang sudah disetujui namun belum digunakan (*undisbursed loan*) yang cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, penerapan standar penyaluran kredit baru yang relatif lebih ketat (aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit)<sup>14</sup> Pada triwulan II 2026, standar penyaluran kredit diperkirakan tetap berada di zona positif seiring ketidakpastian global yang masih tinggi. Berdasarkan jenis penggunaan, perbaikan kredit korporasi terutama bersumber dari membaiknya tingkat penyaluran kredit modal kerja korporasi (pangsa 69,69%) yang lebih tinggi meski masih terkontraksi sebesar -1,69% (yoy) pada triwulan laporan dibandingkan triwulan lalu yang terkontraksi sebesar -2,78% (yoy). Namun demikian, kredit investasi korporasi (pangsa 30,22%) juga mencatatkan perlambatan dari 2,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,19% (yoy), seiring fase penyiapan proyek investasi pada awal tahun.

**Secara sektoral, kinerja kredit korporasi yang lebih tinggi didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha utama yakni industri pengolahan dan sektor perdagangan (Grafik 3.12).**

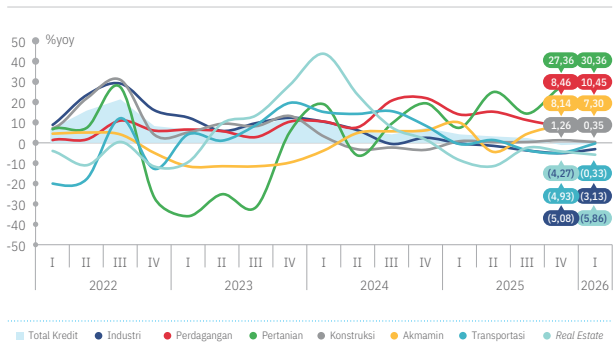
Pada triwulan I 2026, penyaluran kredit kepada LU Industri Pengolahan (pangsa 45,82%) tercatat sebesar -3,13% (yoy),

**Grafik 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis**



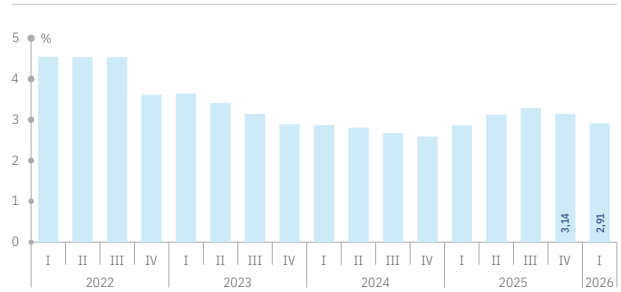
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.12. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.13. Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

membalik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,08% (yoy) kendati masih terkontraksi sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi Industri Pengolahan<sup>15</sup>. Kinerja kredit LU Perdagangan (pangsa 21,71%) juga meningkat dari 8,46% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 10,45% (yoy) pada triwulan I 2026, seiring peningkatan pendapatan korporasi di tengah solidnya konsumsi masyarakat pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri<sup>16</sup>. Sedangkan, peningkatan kredit korporasi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) konstruksi (pangsa 11,69%) dari 1,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 0,35% (yoy) pada triwulan I 2026.

**Profil risiko kredit korporasi tetap solid yang tecermin dari tren penurunan NPL.** Pada triwulan I 2026, NPL kredit korporasi masih berada di bawah *threshold* 5%, turun dari 3,14% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,91% pada triwulan laporan (Grafik 3.13) didukung peningkatan kinerja dan *cashflow* seiring momen HBKN Idulfitri.

### 3.3.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Korporasi

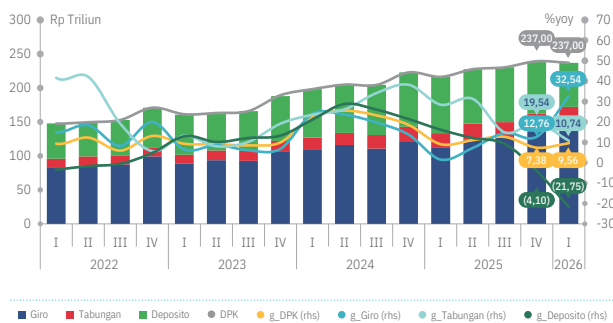
**DPK korporasi perbankan menunjukkan pertumbuhan positif melebihi capaian triwulan sebelumnya.** Pada triwulan I 2026, penghimpunan DPK korporasi tumbuh sebesar 9,56% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 7,38% (yoy) (Grafik 3.14) seiring adanya momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri yang mendongkrak pendapatan serta *cashflow* Korporasi. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan DPK korporasi terjadi pada komponen giro yang naik dari 12,76% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 32,54% (yoy) pada triwulan I 2026. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (i) meningkatnya penjualan dan *cashflow* Korporasi seiring HBKN Idulfitri; (ii) stimulus belanja Pemerintah yang tecermin dari peningkatan realisasi belanja modal APBN 30,81% (yoy); (iii) kecenderungan korporasi untuk *wait and see* dalam melakukan ekspansi di tengah penurunan

14. Berdasarkan Survei Perbankan, standar penyaluran kredit pada triwulan I 2026 terindikasi dilakukan pengetatan, tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) untuk keseluruhan jenis kredit yang positif 0,15% berbanding terbalik dengan ILS pada triwulan sebelumnya.  
 15. Berdasarkan data SKDU Bank Indonesia, rata-rata kapasitas produksi industri pengolahan triwulan I 2026 70,57% naik dari triwulan sebelumnya sebesar 67,77%.  
 16. IKE Tw I 2026 berada pada angka 118,13, naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 118,03.

suku bunga deposito. Peningkatan DPK lebih tinggi tertahan oleh pertumbuhan komponen tabungan yang masih tumbuh moderat sebesar 10,74% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 19,54% (yoy). Adapun DPK jenis deposito berkontraksi sangat dalam dari 4,10% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 21,75% (yoy) pada triwulan laporan sejalan dengan penurunan suku bunga deposito khususnya suku bunga bagi depositan *special rate* seiring kecukupan likuiditas di perbankan, didukung oleh kebijakan injeksi likuiditas Pemerintah sejak akhir tahun 2025. Komposisi DPK korporasi perbankan masih terkonsentrasi pada instrumen giro dan deposito, dengan pangsa masing-masing sebesar 62,41% dan 27,31% dari total DPK korporasi. Sementara itu, porsi tabungan relatif terbatas, yakni sebesar 10,28%, hal ini menunjukkan preferensi korporasi terhadap kemudahan likuiditas dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis mereka.

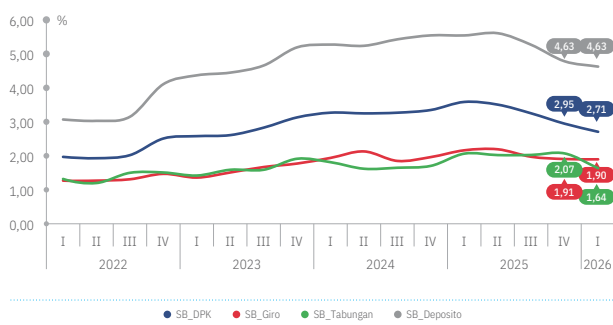
**Rata-rata suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 3.15).** Pada periode laporan, suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat sebesar 2,71%, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,95% sejalan dengan tren penurunan BI Rate. Penurunan suku bunga DPK terjadi pada seluruh komponen, suku bunga giro dari 1,91% menjadi 1,90% dan komponen deposito dari 4,78% menjadi 4,63% serta suku bunga tabungan dari 2,07% menjadi 1,64%.

**Grafik 3.14. Pertumbuhan DPK Korporasi**



Sumber : Laporan Bank Umum (dialah)

**Grafik 3.15. Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi**



Sumber : Laporan Bank Umum (dialah)

### 3.4. Perkembangan Kinerja Rumah Tangga

#### 3.4.1. Kinerja Umum Rumah Tangga

Kinerja Kredit Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur tetap solid kendati pertumbuhan yang sedikit termoderasi. Kondisi ini terjadi seiring (i) preferensi rumah tangga yang cenderung menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan konsumsi jangka panjang dan meningkatnya NPL kredit RT, (ii) perbankan cenderung bersikap lebih hati-hati dalam memberikan kredit di tengah tingginya ketidakpastian global dan risiko transmisinya terhadap perekonomian domestik, (iii) melemahnya kepedulian terhadap pembelian properti rumah dan apartemen serta kendaraan bermotor, yang tecermin dari perlambatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KP Ruko/Rukan dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Moderasi kredit rumah tangga juga ditengarai seiring masih tingginya suku bunga tertimbang kredit Rumah Tangga yang meningkat di tengah tren penurunan BI Rate. Kendati demikian, kinerja rumah tangga masih tetap resilien, terutama didukung oleh berbagai stimulus Pemerintah dan Bank Indonesia, antara lain (i) Insentif perpajakan bagi UMKM, (ii) insentif PPN DTP sektor properti sebesar 100% hingga akhir 2026<sup>17</sup>; (iii) insentif PPh 21 DTP sebesar 100% untuk pegawai di industri tertentu<sup>18</sup> hingga akhir 2026; (iv) penerapan batas atas Rasio LTV/FTV untuk kredit properti hingga 100% dan Uang Muka untuk KKB atau PKB hingga 0% oleh Bank Indonesia hingga akhir 2026<sup>19</sup>. Selain itu, keberlanjutan berbagai stimulus pemerintah yang mencakup bantuan sosial seperti BLTS, PKH, BPNT, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu beban pengeluaran rumah tangga di sektor pangan. Intervensi ini berperan krusial dalam menjaga stabilitas kinerja ekonomi utamanya sektor rumah tangga. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya mendorong 4.716 desa mandiri di wilayahnya yang merupakan jumlah terbanyak di Indonesia (23% dari total nasional) menjadi Desa Mandiri Berkelanjutan demi mendukung visi Indonesia Maju 2045. Untuk mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, Pemprov Jatim secara konsisten menjalankan berbagai program strategis, seperti Program Desa Berdaya, Dewi Cemara (Desa Wisata), dan Desa Devisa yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Melalui langkah-langkah inovatif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh perangkat desa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada guna memperkecil kesenjangan kota dan desa sekaligus memperkuat peran strategis desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Bertepatan dengan periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026, terdapat penyaluran THR

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 (PMK-90/2025)  
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2025 tentang PPh 21 atas penghasilan tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026  
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

bagi ASN tecermin dari kenaikan APBN/APBD sebesar 10,54% (yoy). Selain itu, pemerintah turut mengalokasikan stimulus ekonomi nontunai melalui penyediaan ribuan kuota mudik gratis untuk mengurangi beban pengeluaran transportasi masyarakat.

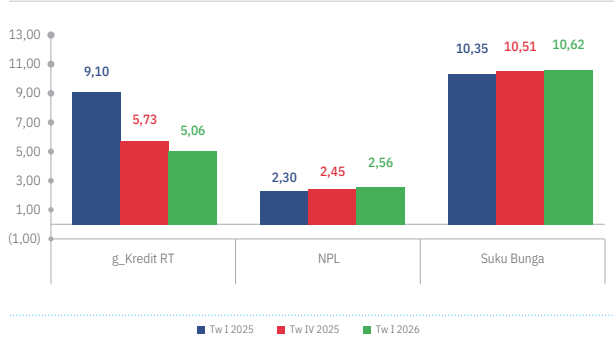
### 3.4.2. Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga

#### 3.4.2.1 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Kinerja kredit RT tercatat tumbuh positif pada triwulan laporan seiring masih kuatnya konsumsi RT, kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, kredit RT tumbuh sebesar 5,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,73% (yoy) (Grafik 3.16). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh preferensi rumah tangga yang cenderung menggunakan *internal financing* untuk kebutuhan konsumsi jangka panjang serta peningkatan *lending standard* perbankan seiring meningkatnya NPL kredit RT. Selain itu, melemahnya kepeminatan terhadap pembelian properti rumah dan apartemen serta kendaraan bermotor, yang tecermin dari perlambatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KP Ruko/Rukan dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), serta sejalan dengan penurunan permintaan masyarakat terhadap *durable goods*<sup>20</sup>. Berdasarkan jenisnya, perlambatan kredit RT terutama bersumber dari melambatnya penyaluran KPR, KKB, KPA, KP Ruko/Rukan yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 36,23%, 5,58%, 1,38% dan 1,25% (Grafik 3.17). Di sisi lain, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit peralatan RT (pangsa 1,15%) dan multiguna (pangsa 40,53%).

Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga tecermin dari NPL yang masih berada di bawah *threshold*. Rasio NPL kredit rumah tangga tercatat sedikit meningkat dari 2,45% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,56%, namun tetap dibawah *threshold* 5% (Grafik 3.16). Kualitas NPL yang terkendali tersebut menjadi indikator kuat bahwa daya bayar rumah tangga masih kuat.

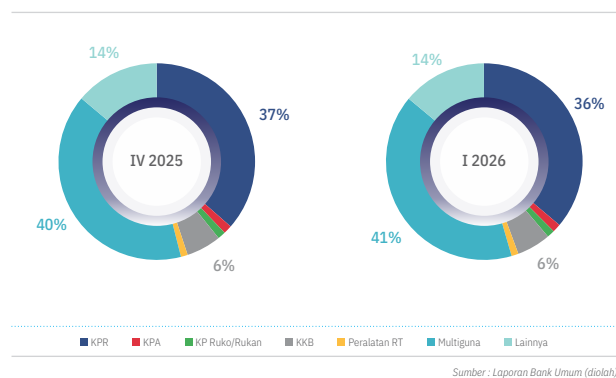
Grafik 3.16. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

20. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur, indeks konsumsi barang tahan lama tercatat pada level 112,20 pada triwulan I 2026, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 114,21.

Grafik 3.17. Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

### Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPR dan KPA)

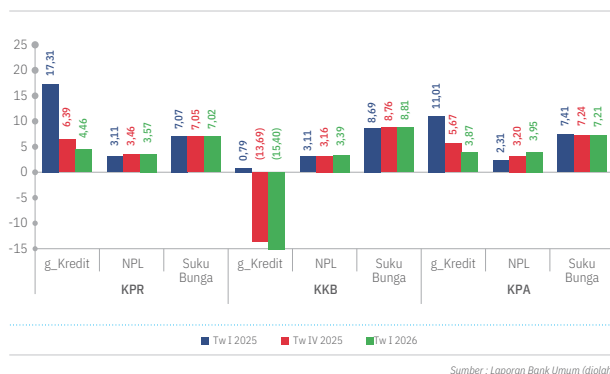
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada triwulan I 2026 tercatat lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.18). Pada awal tahun, penyaluran KPR tumbuh positif sebesar 4,46% (yoy), melanjutkan tren perlambatan dari triwulan sebelumnya 6,39% (yoy) pada triwulan IV 2025. Terdapat beberapa faktor perlambatan penyaluran kredit kepemilikan properti/residensial<sup>21</sup>, antara lain disebabkan oleh (i) penolakan kredit seiring *lending standard* perbankan yang meningkat; (ii) masih tingginya suku bunga kredit; dan (iii) perlambatan kepeminatan properti sebagai aset investasi di kalangan menengah ke atas. Di samping itu, pangsa Jawa Timur dalam penyerapan manfaat KPR FLPP baru sebesar 6,65%, lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki tingkat serapan lebih tinggi<sup>22</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi KPR FLPP di Jawa Timur masih belum optimal sehingga terdapat ruang untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bersubsidi. Perlambatan penyaluran KPR juga dapat dilihat dari menurunnya pertumbuhan pada rumah tipe 22–70 m<sup>2</sup> dan tipe di atas 70 m<sup>2</sup>, masing-masing melambat dari 8,40% (yoy) dan 4,35% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 5,89% (yoy) dan 3,37% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah tipe di bawah 21 m<sup>2</sup> tumbuh positif dari 11,00% (yoy) menjadi 14,00% (yoy), mencerminkan tetap kuatnya permintaan pada segmen menengah bawah.

Kinerja KPR tetap mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh sinergi kebijakan akomodatif yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain insentif PPN DTP, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makprudensial yang bersifat akomodatif dan longgar hingga akhir tahun 2026<sup>23</sup> untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan OJK yang akomodatif, antara lain: (i) Dalam mendukung Program Prioritas 3 Juta Rumah, OJK telah melakukan berbagai upaya dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui

Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK, (ii) Pembiayaan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana telah disalurkan pembiayaan untuk mendukung ekosistem MBG kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai sebesar Rp1,02 triliun (iii) POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai Rp5 miliar; (iv) SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, yang memberikan bobot risiko ATMR rendah untuk kredit properti rumah tinggal dibandingkan kredit lain, termasuk kredit korporasi; dan (v) Penguatan sistem kesehatan nasional dengan sinergi bersama Kementerian Kesehatan dan *stakeholders* terkait melalui penguatan ekosistem asuransi Kesehatan. Lebih lanjut, regulasi tersebut diperkuat oleh suku bunga KPR pada level relatif stabil dan cenderung menurun tipis, dari 7,05% pada triwulan IV 2025 menjadi 7,02% pada triwulan I 2026, sejalan dengan tren penurunan BI *Rate*.

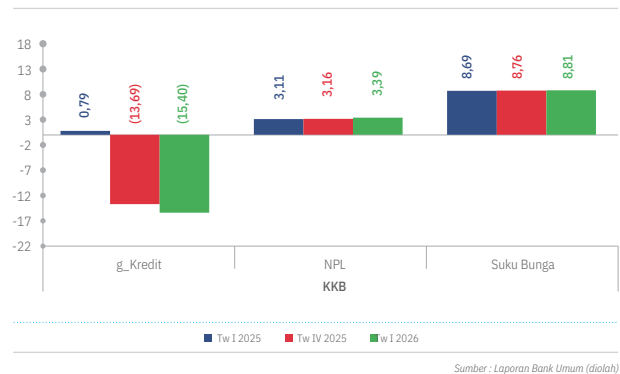
**Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.18).** Kinerja KPA melambat dari 5,67% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 3,87% (yoy) pada triwulan laporan. Landainya penyaluran kredit ini dipengaruhi oleh tantangan sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025, yang mengatur batas waktu dua tahun untuk pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan<sup>24</sup>. Pada periode laporan, kecenderungan rumah tangga dalam mengalokasikan dananya ditengarai masih cenderung bersifat moderat atau *risk averse*. Hal ini merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi ketidakpastian ekonomi yang muncul sejak awal tahun 2026 sehingga masyarakat cenderung bersikap *wait and see*. Di sisi lain, perlambatan penyaluran KPA yang lebih rendah tertahan oleh ketersediaan unit apartemen siap huni (*ready stock*) yang jauh lebih mencukupi daripada rumah tapak (*landed house*)<sup>25</sup> sehingga pemanfaatan insentif Pemerintah seperti PPN DTP

**Grafik 3.18. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR, KPA dan KKB**



24. Berdasarkan informasi anekdotal, kendala administratif dan teknis dalam pengadaan lahan sering kali memakan waktu yang cukup lama. Di beberapa titik di Jawa Timur, proses konsolidasi lahan dalam satu hamparan yang utuh dilaporkan dapat memakan waktu hingga 5 s.d 6 tahun.  
25. Hasil liaison dengan pengembang properti di Jawa Timur.

**Grafik 3.19. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB**



dapat lebih optimal. Kondisi ini turut didukung oleh penurunan suku bunga tertimbang perbankan dari 7,24% pada triwulan sebelumnya menjadi 7,21% pada triwulan laporan. Di samping itu, *apartment* di Surabaya tetap menjadi pilihan populer bagi masyarakat yang membutuhkan solusi hunian temporer.

**Kualitas kredit pada sektor KPR dan KPA tetap terjaga dengan baik. Hal ini tecermin dari rasio NPL yang secara konsisten berada di bawah ambang batas pengawasan kualitas aset, yakni maksimal sebesar 5%.** Pada periode laporan, rasio NPL KPR tercatat sebesar 3,57%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 3,46%. Begitu pula NPL KPA tercatat lebih tinggi dari 3,20% pada triwulan IV 2025 menjadi 3,95% pada triwulan I 2026.

### Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

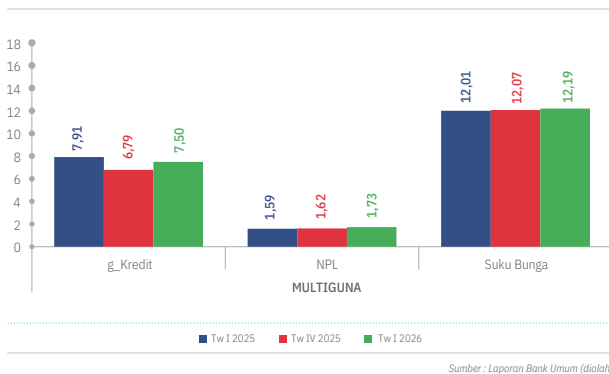
**Kinerja penyaluran KKB terus melanjutkan tren kontraksi pada triwulan I 2026 (Grafik 3.19).** Pada triwulan I 2026, penyaluran KKB kembali terkontraksi sebesar -15,40% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -13,69% (yoy). Penurunan terutama terjadi pada KKB jenis mobil roda empat (pangsa 81,40%), yang kembali terkontraksi -18,71% (yoy) pada periode laporan, lebih dalam dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi -15,97% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan tersebut dipicu oleh selesainya masa berlaku sejumlah insentif pajak daerah bagi kendaraan bermotor per akhir November 2024. Kebijakan yang berakhir tersebut mencakup pemutihan Bea Balik Nama (BBN) II, eliminasi denda administratif, serta peniadaan pajak progresif di wilayah Jawa Timur. Pasca-berakhirnya program insentif, normalisasi permintaan terjadi di mana masyarakat cenderung menunda pembelian kendaraan bermotor. Kejadian serupa terjadi pula pada jenis kendaraan lain, seperti sepeda motor, truk, kendaraan roda enam atau lebih, yang turut menunjukkan kontraksi pertumbuhan. Penyaluran KKB untuk kendaraan mobil roda empat (pangsa 81,40%) tercatat terus mengalami kontraksi, sebesar -18,71% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya -15,97% (yoy). Sementara itu, KKB untuk truk dan kendaraan roda enam atau lebih mengalami juga kontraksi lebih dalam sebesar -23,66% (yoy) pada triwulan I 2026. Namun

demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/898/013/2025, pada Tahun 2026 berlaku tidak ada kenaikan PKB dan BBNKB, serta BBNKB kendaraan bekas digratiskan, sebagai upaya mendorong penyaluran KKB dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026. Secara keseluruhan, risiko kredit KKB tetap terjaga dan berada di bawah *threshold* 5%, kendati terdapat kenaikan rasio NPL dari 3,16% pada triwulan IV 2025 menjadi 3,39% pada triwulan I 2026.

### Kredit Multiguna

**Kinerja kredit multiguna menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2026 (Grafik 3.20).** Kredit multiguna tumbuh positif pada periode laporan sebesar 7,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (yoy). Peningkatan terjadi pada hampir seluruh tipe kredit multiguna kecuali kredit multiguna beragunan rumah tinggal s.d tipe 21. Lebih tingginya kredit multiguna tersebut sejalan dengan HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026 yang jatuh pada triwulan I 2026, utamanya kredit multiguna beragunan rumah tinggal tipe di atas 70 (pangsa 8,66%) dari yang sebelumnya berkontraksi -0,74% (yoy) menjadi 0,47% (yoy) pada triwulan I 2026. Lebih lanjut, kredit multiguna sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berkontraksi menjadi 4,65% (yoy). Namun demikian, risiko kredit multiguna tetap terkendali, berada di bawah *threshold* 5%, namun sedikit meningkat dari 1,62% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,73% pada triwulan laporan.

**Grafik 3.20. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna**



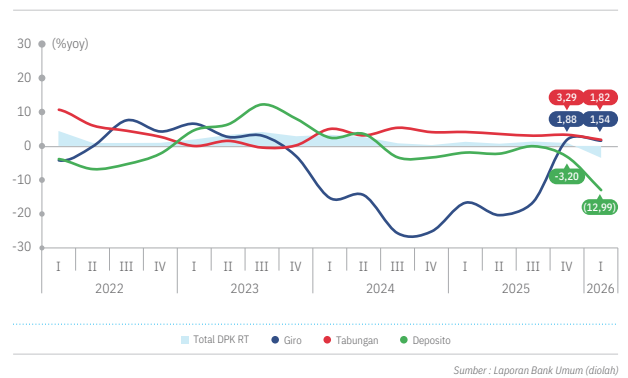
### 3.4.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

**Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga (DPK RT) di Jawa Timur menunjukkan tren penguatan pada triwulan I 2026.** Nilai simpanan tercatat mencapai Rp513,36 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 1,78% (yoy). Capaian ini mengindikasikan adanya akselerasi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh di angka 0,90% (yoy) (Grafik 3.21). Pertumbuhan DPK Rumah Tangga pada triwulan I 2026 utamanya ditopang oleh kinerja giro dan tabungan.

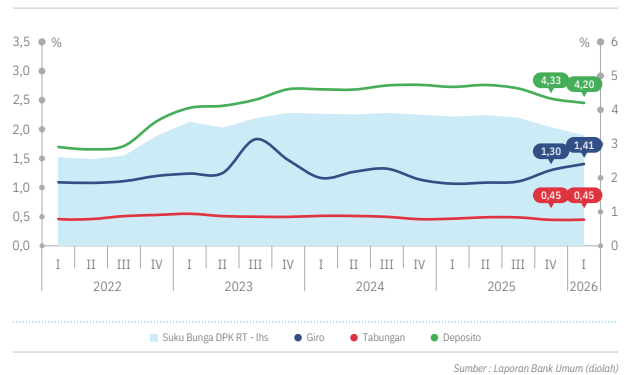
Hal ini terindikasi dari akselerasi pertumbuhan giro yang mencapai 3,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 1,88% (yoy). Sejalan dengan itu, komponen tabungan juga mencatatkan kenaikan signifikan menjadi 5,66% (yoy) dari sebelumnya 3,29% (yoy). Peningkatan tabungan dan giro ditengarai seiring dengan preferensi penempatan dana rumah tangga pada instrumen investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi di tengah suku bunga deposito yang turut menurun sekaligus preferensi *internal financing* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan imbal hasil yang rendah, rumah tangga cenderung mengalihkan dana ke simpanan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan belanja rutin. Penurunan suku bunga deposito juga berdampak pada kontraksi deposito sebesar -4,98% (yoy) pada triwulan I 2026. Secara komposisi, DPK RT masih didominasi oleh tabungan (63,98%), diikuti deposito (33,52%) dan giro (2,49%).

**Tingkat suku bunga tertimbang DPK Rumah Tangga pada Triwulan I-2026 terkoreksi menjadi 1,98% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,03%.** Penurunan ini tecermin pada suku bunga deposito, yang melandai dari 4,33% menjadi 4,25%. Berbeda dengan komponen deposito, suku bunga giro dan tabungan justru meningkat, masing-masing dari 1,30% menjadi 1,40% dan dari 0,45% menjadi 0,48% pada periode laporan. Tren melandainya suku bunga DPK RT sejalan dengan penurunan BI *Rate*, mencerminkan penyesuaian pasar terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar.

**Grafik 3.21. Perkembangan Pertumbuhan DPK RT**



**Grafik 3.22. Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT**



### 3.5. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM

#### 3.5.1. Eksposur Perbankan Pada UMKM

**Penyaluran kredit perbankan pada sektor UMKM di Jawa Timur tetap kuat.** Pada triwulan I 2026, porsi penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur tercatat sebesar 30,63% dari total kredit, melampaui target pangsa kredit UMKM nasional yang ditetapkan Pemerintah sebesar 30% (Grafik 3.23). Besarnya porsi penyaluran kredit UMKM mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan industri perbankan dalam memperkuat kerja sama dan sinergi untuk memaksimalkan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah, mengingat posisinya sebagai penyokong utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

**Penyaluran kredit kepada sektor UMKM tercatat kembali mengalami kontraksi sebesar 0,96% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,65% (yoy)** (Grafik 3.24). Pada triwulan I 2026, realisasi penyaluran kredit UMKM mencapai Rp223,56 triliun. Ditinjau dari jenis penggunaannya, perlambatan pertumbuhan kredit ini dipicu utamanya oleh Kredit Modal Kerja (KMK) yang mengalami kontraksi lebih dalam, yakni sebesar 5,24% (yoy) pada triwulan laporan dari yang sebelumnya 4,79% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan skala usaha, deselerasi penyaluran kredit UMKM terjadi pada usaha kecil. Laju kredit UMKM skala kecil berkontraksi dari 6,87% (yoy) menjadi 0,13% (yoy), sedangkan UMKM skala mikro dan menengah masing-masing membaik dari sebesar -5,65% (yoy) dan -1,03% (yoy) menjadi -3,12% (yoy) dan 2,79% (yoy). Struktur penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2026 masih didominasi segmen mikro dengan porsi 45,90%, diikuti skala kecil sebesar 33,60%, dan skala menengah 20,50% dari total kredit.

**Kinerja kredit UMKM terus didorong melalui berbagai stimulus kebijakan yang mencakup sisi penawaran dan permintaan.** Kebijakan yang mendorong sisi permintaan diawali secara langsung lewat kemudahan akses pembiayaan bagi bank dan LKNB melalui implementasi POJK No. 19 Tahun 2025<sup>26</sup>, yang kemudian didukung secara tidak langsung oleh penguatan daya beli rumah tangga melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan pangan (Banpang), serta kebijakan Work From Anywhere (WFA). Melalui strategi penawaran tersebut, bank yang adaptif terhadap penurunan suku bunga Bank Indonesia akan mendapatkan insentif lebih besar demi mempercepat penurunan suku bunga kredit, yang secara keseluruhan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pada triwulan I 2026, realisasi anggaran MBG yang diestimasi mencapai Rp60 triliun<sup>27</sup>, serta alokasi Banpang sebesar Rp11,92 triliun untuk 35,04 juta keluarga terbukti efektif menstimulasi ekonomi kerakyatan. Sementara itu, kebijakan WFA yang berlaku pada Maret 2026 tidak hanya menjaga kelancaran mobilitas masyarakat menjelang hari besar, tetapi juga mempertahankan perputaran konsumsi RT. Penguatan sektor riil pun berjalan simultan melalui implementasi Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan serta optimalisasi Program Padat Karya Tunai oleh Kementerian

Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini didukung oleh percepatan deregulasi lewat PP No. 28 Tahun 2025 guna mengintegrasikan sistem Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, dijalankan pula program perkotaan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan ruang fasilitas bagi para pekerja mandiri.

Menjelang Ramadan dan libur Idulfitri 2026, Pemerintah juga meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 yang mengintegrasikan berbagai insentif transportasi, pengaturan kerja, dan bantuan sosial demi menjaga stabilitas ekonomi. Melalui paket ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp911,16 miliar (bersumber dari APBN dan non-APBN) untuk mendanai diskon tarif berbagai moda transportasi, mencakup potongan harga kereta api (30%), angkutan laut (30%), angkutan penyeberangan (100%), serta tiket pesawat domestik kelas ekonomi (17–18%)<sup>28</sup>. Sebagai langkah antisipasi kepadatan arus mudik, kebijakan WFA selama 5 (lima) hari pada pertengahan hingga akhir Maret 2026 menjadi komplementer penting dalam paket stimulus tersebut.

Dari sisi penawaran, Bank Indonesia memperkuat dukungannya melalui implementasi KLM dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yang dirancang untuk mendorong perbankan memperluas jangkauan kredit UMKM. Bank Indonesia terus mengoptimalkan KLM demi memacu penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penguatan kebijakan yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 2025 ini berfokus pada dua aspek utama yakni memberikan insentif lebih tinggi bagi bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor pilihan (*lending channel*), serta bank yang responsif menurunkan suku bunga kredit baru mengikuti penurunan suku bunga acuan (*interest rate channel*). Pada minggu pertama Maret 2026, total insentif KLM yang tersalurkan mencapai Rp427,1 triliun, dengan rincian Rp357,6 triliun untuk *lending channel* dan Rp69,5 triliun untuk *interest rate channel*.

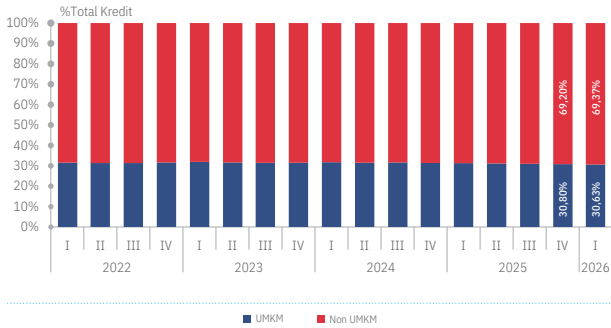
Dilihat dari klasifikasi perbankan, stimulus KLM secara nasional mendukung tambahan likuiditas bagi Bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, BUSN Rp165,8 triliun, BPD Rp28,0 triliun, dan KCBA Rp7,7 triliun. Adapun secara sektoral, insentif ini mengalir ke berbagai bidang strategis, mulai dari pertanian, industri, dan hilirisasi; jasa dan ekonomi kreatif; konstruksi, real estat, dan perumahan; hingga sektor UMKM, koperasi, serta program inklusi dan berkelanjutan. Upaya tersebut diperkuat oleh kemudahan akses pembiayaan yang sejalan dengan penerapan POJK Nomor 19 Tahun 2025 mengenai Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. Regulasi ini mewajibkan sektor perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) untuk menghadirkan skema pembiayaan yang inklusif, terjangkau, cepat, tepat, dan praktis. Melalui simplifikasi persyaratan administratif tersebut, peluang pelaku usaha dalam memperoleh modal kerja kini menjadi jauh lebih luas.

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

27. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-terima-laporan-perkembangan-paket-stimulus-ekonomi-triwulan-pertama-2026/>

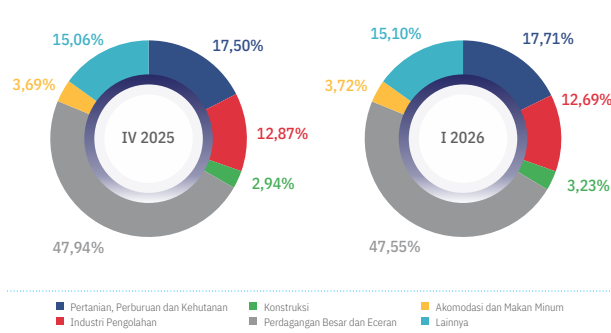
28. <https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-paket-stimulus-ekonomi-2026/>

**Grafik 3.23. Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 3.25. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral**

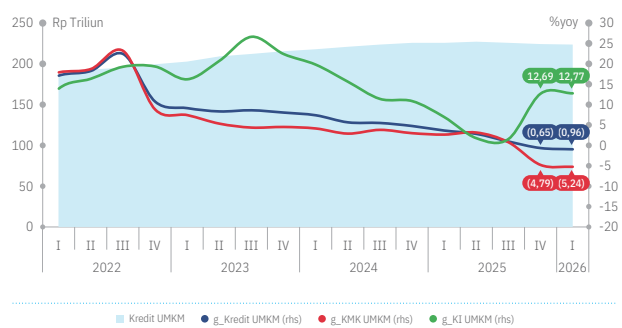


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur sebagian besar terpusat pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan, Pertanian, serta Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut merupakan penopang sekaligus kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Proporsi penyaluran ke sektor-sektor tersebut masing-masing sebesar LU Perdagangan (47,55%), LU Pertanian (17,71%), dan LU Industri Pengolahan (12,69%) (Grafik 3.25). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM mencatatkan kinerja yang bervariasi. LU Perdagangan, Pertanian, terpantau mengalami perlambatan. Sebaliknya, LU industri pengolahan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang meningkat pada periode laporan (Grafik 3.26).

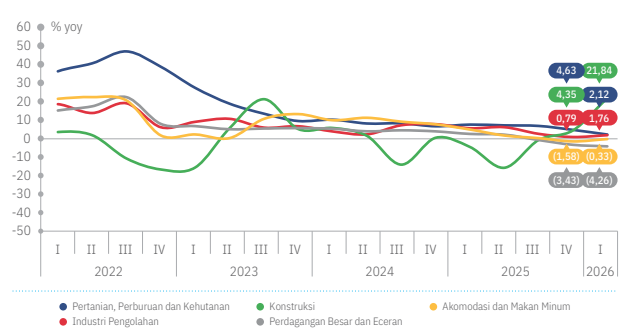
**Kualitas kredit UMKM di Jawa Timur tetap terjaga.** Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,89%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,47% (Grafik 3.27). Terjaganya kualitas kredit UMKM didukung oleh sinergi beberapa kebijakan strategis. Didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, program Prokesra dengan bunga ringan 3% untuk memitigasi risiko gagal bayar baru, serta POJK Nomor 19/2025 yang memungkinkan pemulihan status debitur UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam akibat faktor eksternal. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi bank dan LKNB BUMN untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih, yang pada gilirannya memperkuat struktur keuangan lembaga sekaligus mereaktivasi pembiayaan sektor riil. Kendati membuka peluang

**Grafik 3.24. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 3.26. Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral**

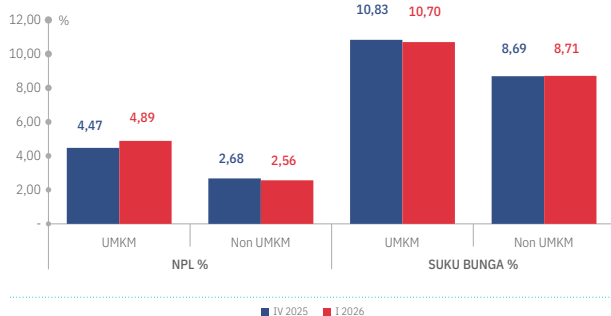


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

besar bagi pemulihan ekonomi, implementasinya diproyeksikan menghadapi tantangan operasional, khususnya terkait kompleksitas verifikasi kriteria debitur dan kewajiban perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk mencegah penurunan kualitas kredit ke depan. Di sisi lain, suku bunga tertimbang kredit UMKM tercatat turun sejalan dengan tren penurunan BI Rate, yakni dari 10,83% pada triwulan sebelumnya menjadi 10,70% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.27).

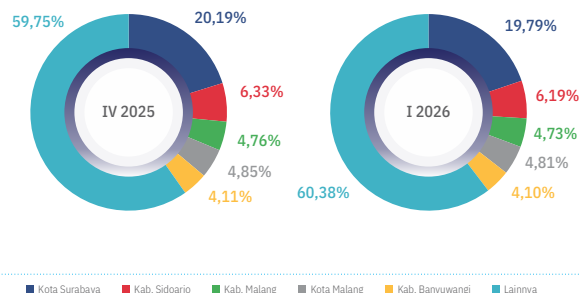
**Berdasarkan spasial, alokasi kredit UMKM di Jawa Timur sebagian besar terpusat di Kota Surabaya, yang mencatatkan diri sebagai wilayah dengan volume penyerapan modal terbesar.** Konsentrasi spasial kredit UMKM di Jawa Timur tecermin dari dominasi tiga wilayah dengan pangsa tertinggi, yakni Kota Surabaya (pangsa 20,27%), Kabupaten Sidoarjo (pangsa 6,35%), dan Kota Malang (pangsa 4,86%) (Grafik 3.28). Distribusi penyaluran kredit UMKM bergerak selaras dengan kluster ekonomi utama di Jawa Timur. Pola ini terlihat dari pemusatan modal di Kota Surabaya sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Kabupaten Sidoarjo sebagai basis sektor industri, serta Kota Malang yang menjadi destinasi pariwisata unggulan di wilayah tersebut. Pertumbuhan kredit UMKM di sebagian besar Kabupaten/Kota Jawa Timur pada triwulan I 2026 terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025, menunjukkan pelemahan permintaan pembiayaan yang merata di tingkat daerah (Grafik 3.29).

**Grafik 3.27. Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 3.28. Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Grafik 3.29. Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

### 3.5.2. Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM

Dalam upaya memperkuat peran *sebagai strategic advisor* bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Sinergi serta kolaborasi pentahelix antar pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, khususnya melalui peningkatan kapasitas UMKM. Sejalan dengan tujuan tersebut, terdapat tiga pilar utama dalam implementasi kebijakan, yaitu korporatisasi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas baik SDM dan usaha, serta perluasan akses pembiayaan. Ketiga pilar ini telah diimplementasikan oleh KPw BI Jawa Timur pada triwulan I tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan Klaster Tanaman Pangan dan Potensi Ekspor

##### a. Pengembangan Klaster Pangan Strategis

Sebagai upaya mendukung strategi 4K pengendalian inflasi, khususnya pada pilar ketersediaan pasokan, KPwBI Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan kelompok tani/klaster melakukan asesmen pembentukan kelompok tani yang fokus pada komoditas ketahanan pangan Jawa Timur guna mendukung stabilitas inflasi *volatile foods*. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk menentukan target pengembangan klaster baru dalam rangka peningkatan

produksi dan stabilisasi pasokan di daerah sentra. Dari hasil kajian tersebut, KPwBI Prov. Jawa Timur telah melakukan pengembangan dalam bentuk pendampingan kepada 4 (empat) klaster pangan dan 2 (dua) klaster potensial ekspor di antaranya sebagai berikut:

##### 1) Klaster Bawang Merah Kabupaten Pamekasan

KPwBI Provinsi Jawa Timur bersama *stakeholder* terkait melaksanakan pendampingan pengembangan klaster bawang merah di wilayah Pamekasan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices* (GAP), sehingga terdapat peningkatan produktivitas sebesar 28,43% (yoy) atau dari 8,50 ton/ha menjadi 10,9 ton/ha. Lebih lanjut, implementasi GAP dimaksud juga membantu menekan biaya produksi sebesar 32% melalui penggunaan teknologi *sprinkler* dan *lightrap*.

##### 2) Klaster Cabai Rawit Tuban

Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan komoditas cabai, KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan pendampingan Klaster Cabai Rawit Tuban melalui implementasi penggunaan agens hayati dan pupuk kompos. Pemanfaatan media dimaksud dapat meningkatkan produktivitas sebesar 25,25% (yty) atau tumbuh dari 4,95 ton/ha menjadi 6,2 ton/ha. Pada sisi hilir, kelompok tani

juga mampu memproduksi produk olahan cabai rawit yang telah dipasarkan melalui *e-commerce* sejak tahun 2024.

### 3) Klaster Padi Kabupaten Lamongan

KPwBI Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi pendampingan program pengembangan berupa pendampingan optimalisasi budidaya padi melalui implementasi agens hayati, pupuk organik cair dan pestisida nabati sehingga mampu meningkatkan produktivitas sebesar 11,07% (yty) atau tumbuh dari 8,4 ton/ha menjadi 9,33 ton/ha. Melalui program pendampingan tersebut, klaster juga telah meningkatkan produksi beras dibandingkan periode sebelumnya yang hanya terfokus pada produksi GKP (Gabah Kering Panen). Peningkatan produktivitas juga didukung oleh implementasi *digital farming* sisi hulu yaitu *drip irrigation and smart monitoring controller*.

### 4) Klaster Sapi Potong Kabupaten Bojonegoro

KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan optimalisasi budidaya sapi potong melalui *bio-security* dalam pembibitan dan penggemukan, pengolahan pakan, pengolahan pupuk organik dan olahan pangan, serta optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) sapi peranakan ongole (PO). Melalui serangkaian program tersebut, klaster mampu memproduksi olahan daging sapi dan meningkatkan potensi kelahiran betina sebesar 33,33% atau meningkat dari 9 potensi kelahiran menjadi 12 potensi kelahiran pasca pelaksanaan program. Untuk mendukung operasional klaster, KPwBI Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa mobil distribusi untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik dan perlengkapan kelembagaan klaster guna memperkuat kelembagaan klaster.

## b. Pengembangan Klaster Potensial Ekspor

### 1) Klaster Kopi Jombang

Dalam upaya mendukung pengembangan klaster unggulan daerah yang berorientasi ekspor, KPw BI Provinsi Jawa Timur menginisiasi program pengembangan klaster kopi di wilayah Jombang dengan fokus pada *specialty coffee* jenis Liberica/Excelsa. Kopi jenis Liberica/Excelsa merupakan kopi yang diminati oleh pasar global karena profil rasanya yang unik dan langka dan berbeda dari arabika maupun robusta sehingga bernilai tinggi di segmen *specialty coffee*. Selain itu, dari sisi produksi juga terbatas menjadikannya komoditas eksklusif sekaligus potensial untuk masa depan industri kopi. Hingga saat ini, klaster tersebut mampu memproduksi secara mandiri berbagai varian produk, mulai dari *green bean*, *roasted bean*, hingga kopi bubuk, dengan kualitas yang telah mencapai *cupping score* 85.

Sebagai bagian dari strategi perluasan akses pasar, Klaster Kopi Wonosalam telah merealisasikan ekspor kopi excelsa ke berbagai negara, sebagai tindak lanjut dari kegiatan *business matching* yang difasilitasi oleh Bank Indonesia maupun pihak lainnya. Salah satu kegiatan promosi perdagangan yang dilakukan oleh Kopi Wonosalam adalah *World of Coffee* (WoC) di Bangkok, Thailand. Berbagai kesepakatan bisnis dilakukan mulai dari *purchase order* sampai dengan rencana kunjungan ke lahan akan dilakukan pada tahun 2026 ini.

### 2) Klaster Kopi Trawas

Sejalan dengan upaya pengembangan kopi sebagai komoditas potensial ekspor, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan inisiasi peningkatan kapasitas Klaster Kopi di Kec. Trawas Kab. Mojokerto. Hingga triwulan I 2026, kelompok tani telah terlibat dalam program pendampingan sehingga mampu meningkatkan kualitas *greenbean* dengan *cupping score* di atas 80 serta meningkatkan kapasitas produksi dari 9 kuintal/tahun menjadi 1,5 ton/tahun.

## 2. Monitoring terhadap Klaster yang telah Phasing Out

Selain melakukan *monitoring* terhadap klaster binaan eksisting, KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan *monitoring* kepada klaster binaan yang telah *phasing out* untuk mempertahankan kualitas klaster. Klaster yang telah *phasing out* diantaranya sebagai berikut:

### a. Klaster Padi Organik Kabupaten Mojokerto

Klaster mengimplementasikan pertanian organik yang telah tersertifikasi halal dan organik. Selain itu, telah dilakukan implementasi *digital farming* sisi hulu melalui penggunaan teknologi *drone* untuk proses pemupukan yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sebesar 15%. Sementara pada sisi hilir, klaster padi organik telah aktif melakukan pemasaran digital melalui sosial media dan *e-commerce* sebagai salah satu strategi perluasan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.

### b. Klaster Jagung Madura

Dalam pengembangannya, klaster menggunakan varietas bibit unggul jagung Madura 3 yang telah mencapai peningkatan produktivitas jagung dari yang sebelumnya 3 ton/Ha menjadi 7,1 ton/Ha. Secara lebih spesifik, teknik budidaya untuk 50% petani klaster jagung ini menggunakan *integrated farming* yang memungkinkan untuk memanfaatkan limbah peternakan menjadi pupuk. Di sisi hilir, klaster telah berhasil memasarkan produk olahan/turunan berupa *tatocis (tortilla)* berbahan jagung yang telah dipasarkan melalui pasar modern, dan briket yang berasal dari limbah bonggol jagung sebagai alternatif pengganti bahan bakar.

- c. **Klaster Sapi Kabupaten Tuban**  
Klaster Sapi Tuban telah berhasil menerapkan teknik budidaya sapi potong yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan mampu meningkatkan produktivitas hingga 200%. Pada sisi hilir, klaster ini bekerja sama dengan *platform* penjualan *online (marketplace)* dan berhasil memperoleh *rolling out* transaksi penjualan yang menandai perluasan pemasaran produk klaster.
3. **Penyelenggaraan Sarana Akselerasi Klaster Agribisnis Jawa Timur (SAKA JATIM)**  
Dalam rangka mendukung penguatan ketahanan pangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah se-Jatim melakukan kurasi dan pemilihan kelompok/klaster tani potensial. SAKA JATIM diharapkan dapat menjangkau kelompok tani komoditas strategis yang dapat dikembangkan secara *multiyears*. Tercatat 31 klaster dari 7 komoditas yaitu Padi, Cabai, Bawang Merah, Sapi, Ayam, dan Kopi yang mengikuti program *capacity building*. Klaster tersebut juga dilakukan *monitoring* dan evaluasi selama 6 (enam) bulan untuk dilaksanakan identifikasi penerapan *good agricultural practices*. Selain itu, terdapat 3 kelompok yang mendapatkan dukungan sarana prasarana penunjang pertanian guna memperkuat klaster sebagai wujud dukungan penguatan pasokan pada kerangka 4K Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di tahun 2026, peserta SAKA JATIM diharapkan mampu menjadi target program pengembangan baik untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, maupun perluasan pemasaran.
4. **Peningkatan Kapasitas dan Promosi Perdagangan UMKM**
- a. **Pelaksanaan UMKM Jatim Go Export**  
Dalam upaya mendorong UMKM potensial ekspor, Bank Indonesia Prov. Jawa Timur melakukan pengembangan UMKM berorientasi ekspor melalui 2 strategi yaitu *Pull Strategy (market driven)* melalui pameran dan kurasi nasional atau internasional dan *Push Strategy* melalui peningkatan kapasitas, sertifikasi, digitalisasi, akses pemasaran. Dalam upaya mengimplementasikan program tersebut, KPwBI Jawa Timur telah melaksanakan program UMKM Jatim Go Export yang diikuti oleh 35 UMKM pada sektor mamin, komoditas, *craft*, dan *home decor* dari wilayah kerja KPwBI Jawa Timur dan perwakilan UMKM unggulan dari KPwBI se Jawa Timur.
- b. **Pelaksanaan Promosi Perdagangan**  
KPwBI Provinsi Jawa Timur memfasilitasi produk UMKM binaan/mitra yang memiliki potensi ekspor untuk dipromosikan baik di dalam maupun luar negeri. Sepanjang, triwulan I kami telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait dengan promosi perdagangan a.l.: pelaksanaan misi dagang, Pameran INACRAFT, Pameran Batik Bordir Nusantara, dan berbagai event lainnya.
- c. **Forum Harmonisasi (FORHAR) Pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah**  
Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan UMKM dan ekonomi Syariah telah dilaksanakan Forhar UMKM pada bulan Maret 2026 dengan tujuan antara lain: (i) Penyelarasan program pengembangan UMKM dan Eksyar antar lembaga/instansi agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih, (ii) Penguatan sinergi antar instansi yang diimplementasikan melalui kolaborasi program, dan (iii) Pengkinian data UMKM potensial ekspor bagi *presentation book* serta updating isu pengembangan UMKM dan Eksyar terkini. Kegiatan ini melibatkan Dinas, Instansi, Akademisi, dan Praktisi pengembangan UMKM.
5. **Pelaksanaan *Impactful Program* pada Pelaku Barista dan Wastra Jawa Timur**  
Kegiatan *Impactful Program* merupakan program yang mendukung ekonomi kerakyatan serta selaras dengan misi ketiga Asta Cita yaitu peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini terdiri dari **championship Pejuang Kopi Nusantara (Cangkir Barista)** serta **Championship Inovasi Wastra Nusantara (Citra Nusa)** sebagai komitmen dalam mendorong penguatan ekonomi nasional yang berbasis potensi unggulan daerah serta upaya dalam meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan daya saing pelaku usaha, khususnya di sektor kopi dan wastra yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus mengandung kekayaan budaya Indonesia. Adapun tahapan yang telah kami lakukan antara lain bootcamp kewirausahaan dasar dan bootcamp regional atau intermediate. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan secara intensif kepada para pelaku barista dan wastra yang telah lolos pada masing-masing tahap.
6. **Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah**
- a. **Sertifikasi Halal.**  
KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan proses pendaftaran dan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren. Fasilitasi ini telah dilakukan sejak tahun 2021. Hingga saat ini sebanyak ±1.300 UMKM telah tersertifikasi halal. Adapun pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 600 produk UMK. Program sertifikasi halal bekerja sama Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Lembaga Halal Universitas Islam Negeri Surabaya, Pusat Halal Universitas Airlangga Surabaya dan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Fasilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk untuk siap masuk ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, untuk mendukung sertifikasi halal sisi hulu, akan dilakukan program lanjutan pelatihan dan sertifikasi

kompetensi Juru Sembelih Halal (juleha) yang telah dimulai sejak tahun 2022 dan hingga saat ini sebanyak 350 peserta telah berhasil lolos ujian sertifikasi. Pada tahun 2026, sertifikasi juleha telah dilakukan pada bulan April 2026 dengan 31 peserta dan semuanya lolos ujian sertifikasi. Adapun batch kedua akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026 menargetkan 30 peserta yang akan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Jawa Timur dan Asosiasi Juru Sembelih Halal Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Timur.

b. **Gerakan Sadar Wakaf**

Pelaksanaan Gerakan Sadar Wakaf Jawa Timur untuk memastikan terciptanya inklusivitas perekonomian dan meningkatkan akses layanan keuangan sosial syariah bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan tenaga ahli dari Universitas Airlangga Surabaya sebagai tenaga pendamping lembaga dalam melakukan penggalangan dana serta kurator proyek strategis berbasis wakaf yang akan dikampanyekan dalam *platform* digital. Pada tahun 2026, sebanyak 23 proyek strategis berbasis wakaf telah *onboarding* pada platform satu wakaf dan telah dilakukan *capacity building* terkait materi strategi kampanye wakaf dan pengelolaan keuangan kepada nazhir yang terlibat.

c. **Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Dalam mendorong upaya penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, KPwBI Jawa Timur secara konsisten melaksanakan literasi dan edukasi melalui kerjasama dengan berbagai mitra, terutama *Key Opinion Leader* (KOL) seperti Dai, Guru, dan Penyuluh Agama sebagai upaya bersama dalam peningkatan literasi eksyar di Jawa Timur. Hingga awal tahun 2026, telah dilakukan pemetaan kerjasama dan kurasi terhadap calon peserta strategis yang akan diikuti pelatihan ToT Dai dan *Content Creator*.

d. **Pengembangan Komoditas Pangan Halal Ponpes**

Dalam upaya pengembangan ekosistem komoditas pangan halal yang mendukung pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), KPwBI Provinsi Jawa Timur sedang berada di tahap implementasi *best practice greenhouse* sebagai infrastruktur untuk melakukan pembenihan, pembibitan, dan pemeliharaan dalam budidaya komoditas cabai di Ponpes Binaan KPwBI Provinsi Jawa Timur yaitu Ponpes Al Falah, Ponpes Chasbullah dan Ponpes Fathul Ulum Jombang. Pada awal tahun 2026, pesantren tersebut telah berhasil melakukan panen dengan tingkat produktivitas mencapai 1 Kg per pohon. Ke depan, program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

e. **Bulan Pembiayaan Syariah Jawa Timur**

Dalam mendukung percepatan pembiayaan syariah untuk pengembangan Pelaku Usaha Syariah (PUS) di Jawa Timur, akan dilaksanakan program *Kick Off* Bulan Pembiayaan Syariah yang melibatkan 12 Perbankan

Syariah se-Jawa Timur dengan berbagai rangkaian kegiatan a.l. kurasi UMKM potensial dibiayai, *business matching* dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.





04.

# Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Cinta · Bangga · Paham  
**Rupiah**

### 4.1. Kondisi Umum

Kebutuhan uang tunai di Jawa Timur pada triwulan I 2026 mengalami penurunan, tecermin dari posisi uang kartal yang mencatatkan *net-inflow*. Secara spasial, *net-inflow* terjadi di KPwBI di Jawa Timur, kecuali KPwBI Kediri. Lebih lanjut, melambatnya aktivitas tarik dan setor tunai melalui APMK dibandingkan triwulan sebelumnya turut mengonfirmasi tren *net-inflow* ini. Terjadinya *net-inflow* pada momen HBKN Idulfitri menjadi sinyal terjadinya pergeseran preferensi masyarakat yang semakin masif menuju metode pembayaran digital.

Sementara itu, sistem pembayaran nontunai dan aktivitas transfer dana besar secara umum menguat sejalan dengan akselerasi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta kenaikan investasi pada momen HBKN Idulfitri. Sistem pembayaran nontunai meningkat melalui UE dan QRIS, serta tetap tumbuh positifnya APMK nontunai untuk mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, sistem transfer melalui RTGS dan BI-FAST juga meningkat signifikan sejalan dengan kenaikan investasi dan pertumbuhan pada LU Perdagangan dan LU Konstruksi. Kendati demikian, aktivitas kliring pada triwulan laporan mengalami kontraksi yang lebih dalam sejalan dengan normalisasi siklus usaha di awal tahun sekaligus mengonfirmasi adanya pergeseran preferensi masyarakat ke BI-FAST yang menawarkan efisiensi waktu dan biaya. Sementara itu, transaksi ritel berbasis QRIS tetap tumbuh positif meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan Triwulan IV 2025. Selain itu, tingginya mobilitas internasional pada awal tahun turut mengakselerasi pertumbuhan transaksi valuta asing melalui UKA di Jawa Timur.

Digitalisasi pembayaran dan penguatan Cinta Bangsa Paham Rupiah di Jawa Timur terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Akseptansi digitalisasi semakin meluas, tecermin dari pemanfaatan kanal QRIS dan BI-FAST yang terus menguat. Momentum digitalisasi ini juga dimanfaatkan untuk mendukung program Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) guna meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan pemerintah. Di samping itu, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting Rupiah melalui kampanye nasional CBP Rupiah. Dalam rangka menjaga integritas mata uang, KPwBI Provinsi Jawa Timur turut

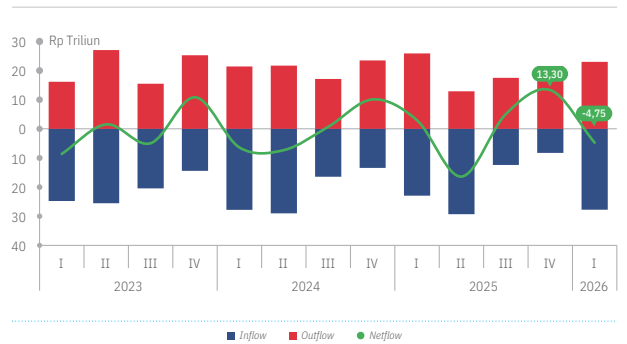
bersinergi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah preventif, preemptif, dan represif guna menekan peredaran uang palsu. Melalui serangkaian inisiatif tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menjaga sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan aman, sekaligus mendukung stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur

#### 4.2.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Cash Inflow/Outflow*)

Peredaran uang kartal di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat mengalami *net inflow*. Kondisi *net-inflow* pada triwulan laporan terjadi karena kenaikan *inflow* yang signifikan, sementara *outflow* mengalami perlambatan. Aliran uang masuk (*inflow*) di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp27,77 triliun atau tumbuh 20,95% (yoy) dibanding triwulan lalu yang sebesar Rp23,26 triliun. Di sisi lain, aliran uang keluar (*outflow*) tercatat sebesar Rp23,02 triliun dibanding triwulan lalu sebesar Rp21,55 triliun. Meskipun meningkat secara nominal, *cash outflow* mengalami kontraksi 11,08% (yoy) karena aktivitas *cash outflow* triwulan yang sama tahun sebelumnya lebih tinggi, seiring dengan adanya HBKN Idulfitri yang tahun lalu jatuh di akhir triwulan, sementara tahun ini jatuhnya pada pertengahan triwulan (Grafik 4.1). Selain faktor musiman, kondisi ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap

Grafik 4.1. Perkembangan *Inflow-Outflow* Uang Kartal



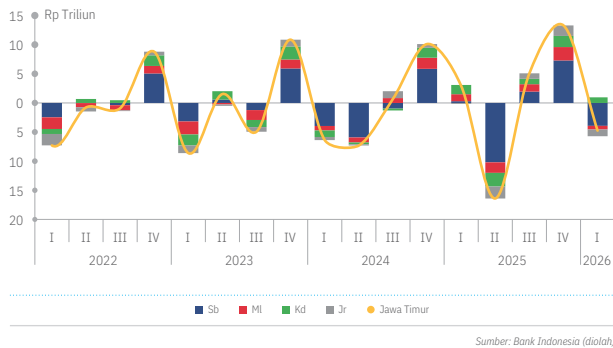
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan IV 2025 dan I 2026

Pembayaran Nontunai	Nominal (Rp Triliun)				Volume (Juta Trx)				Rata-rata Nilai/Transaksi (Rp Triliun/Juta Trx)	
	IV-2025	I-2026	yoy IV-25 (%)	yoy I-26 (%)	IV-2025	I-2026	yoy IV-25 (%)	yoy I-26 (%)	IV 2025	I 2026
SKNBI	51,62	43,66	(8,66)	(9,31)	0,81	0,63	(7,92)	(12,14)	63,91	69,70
BI-RTGS	489,58	405,35	6,18	11,77	0,12	0,11	(5,79)	(10,65)	4.097,01	3.843,43
APMK	269,90	300,69	7,73	11,41	232,59	218,68	(0,12)	(6,63)	1,16	1,37
UE	20,00	22,02	18,44	21,85	224,69	226,56	16,92	18,14	0,09	0,10
QRIS	46,26	44,44	105,11	70,59	506,44	487,21	125,70	80,86	0,09	0,09
BI-FAST	580,38	682,13	16,12	38,06	215,64	266,61	13,78	42,12	2,69	2,56
KUPVA	3,10	3,05	7,73	27,95						

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 4.2. Perkembangan Inflow-Outflow Uang Kartal Secara Spasial**



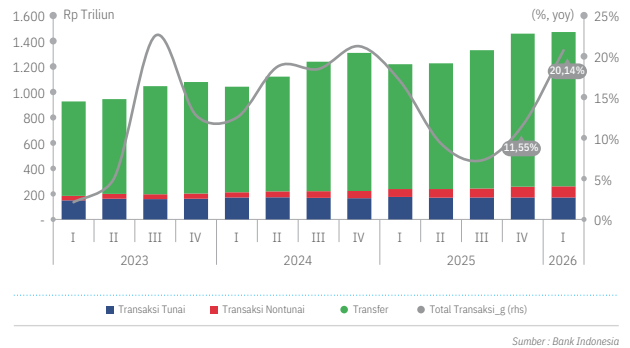
transaksi nontunai. Perkembangan sistem pembayaran digital dan kemudahan akses layanan perbankan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang lebih memilih transaksi digital.

Secara spasial, KPwBI di Jawa Timur mengalami *net-inflow* kecuali KPwBI Kediri. Dari keseluruhan *net-inflow* tersebut, wilayah Surabaya dan sekitarnya mendominasi dengan kontribusi sekitar 82,64%, sejalan dengan perannya sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, hub distribusi barang dan jasa, serta pusat aktivitas perbankan dan korporasi. Sementara itu, Kediri mengalami *net outflow* sebesar Rp957 miliar dipengaruhi kondisi pertumbuhan *outflow* yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan *inflow* (Grafik 4.2).

#### 4.2.2. Sistem Pembayaran

**Sistem pembayaran di Jawa Timur menguat sejalan dengan peningkatan perekonomian pada triwulan I 2026, didorong oleh peningkatan aktivitas transfer.** Kinerja sistem pembayaran pada triwulan laporan sebesar Rp1,46 kuadriliun atau tumbuh 20,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang juga tercatat Rp1,45 kuadriliun atau dengan pertumbuhan 11,55% (yoy) (Grafik 4.3). Pertumbuhan tersebut terjadi terutama karena peningkatan aktivitas transfer yang tumbuh 23,37% (yoy) dan berkontribusi sebesar 82,80% dari total sistem pembayaran, menggunakan instrumen BI-FAST dan APMK. Peningkatan ini sejalan dengan akselerasi investasi, LU perdagangan dan LU konstruksi. Meskipun demikian,

**Grafik 4.3. Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur**

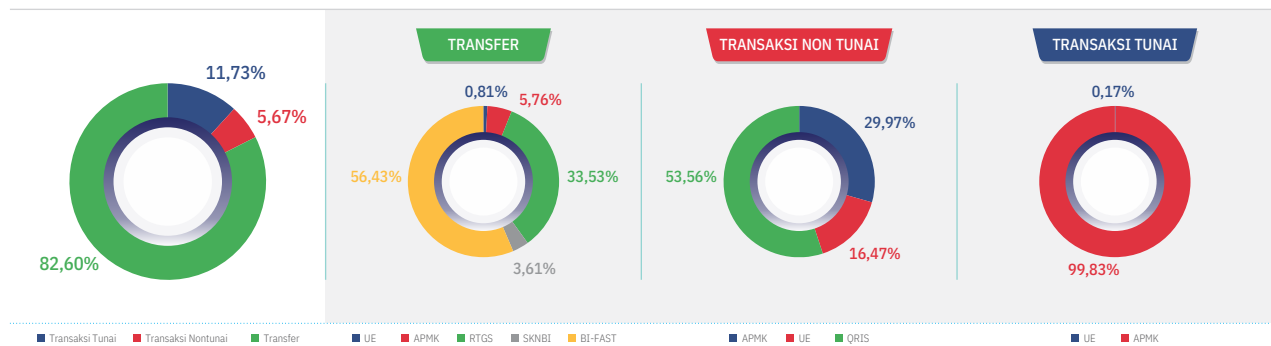


pertumbuhan lebih tinggi terkendala oleh kontraksi aktivitas transaksi tunai sebesar 2,84% (yoy) yang berkontribusi sebesar 11,73%. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai tetap tumbuh kuat, meskipun mengalami moderasi dari yang pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 46,78% (yoy) menjadi sebesar 34,89% (yoy) pada triwulan laporan, dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas pembayaran menggunakan QRIS dan penurunan penggunaan SKNBI.

##### 4.2.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

**Aktivitas tarik dan setor tunai melalui APMK dan UE pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi, seiring dengan perilaku digitalisasi pembayaran masyarakat yang terus meningkat.** Kinerja tarik dan setor tunai pada triwulan laporan sebesar Rp171,61 triliun atau terkontraksi sebesar 2,84% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang sebesar Rp172,13 triliun (Grafik 4.5). Kontraksi yang terjadi secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh penurunan aktivitas pada kanal APMK yang memiliki porsi dominan dalam struktur transaksi tarik dan setor tunai. Pertumbuhan tarik dan setor tunai pada APMK terkontraksi sebesar 2,88% (yoy) (Grafik 4.6). Kendati demikian, tarik tunai pada UE melalui e-wallet meningkat secara nominal di triwulan I 2026 yakni Rp299 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar Rp267 miliar. Kondisi tersebut mengonfirmasi tetap terjadinya *net-inflow* pada periode HBKN Idulfitri di tengah semakin meluasnya adopsi pembayaran digital di masyarakat.

**Grafik 4.4. Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan I 2026**

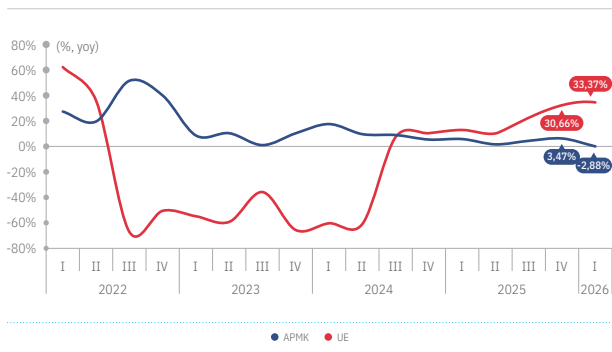


**Grafik 4.5. Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai**



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 4.6. Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai melalui APMK dan UE**

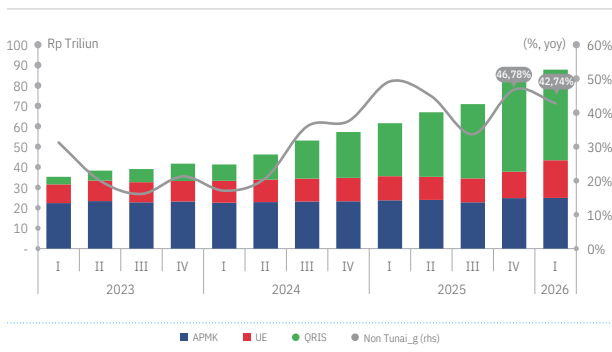


Sumber : Bank Indonesia

#### 4.2.2.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai

**Transaksi sistem pembayaran nontunai tetap menguat untuk mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.** Sistem pembayaran nontunai secara nominal tercatat sebesar Rp82,98 triliun, masih tumbuh kuat 34,89% (yoy) meskipun sedikit melandai dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 yang sebesar 46,78% (yoy) (Grafik 4.7). Pertumbuhan transaksi nontunai yang tetap kuat tersebut secara dominan dipengaruhi oleh akselerasi kinerja QRIS di Jawa Timur sebesar 70,59% (yoy), diikuti UE sebesar

**Grafik 4.7. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai di Jawa Timur untuk pembelian dan pembayaran**



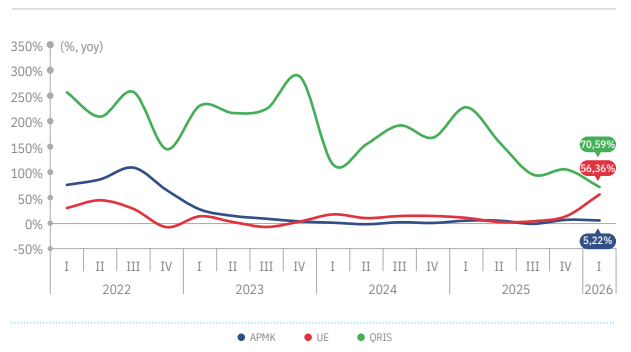
Sumber : Bank Indonesia

15,54% (yoy), serta APMK sebesar 5,22% (yoy) (Grafik 4.8). Kinerja ini mencerminkan semakin luasnya akseptasi pembayaran digital, khususnya pada sektor ritel dan UMKM, pasar tradisional, transportasi, hingga layanan publik, seiring intensifikasi digitalisasi oleh perbankan dan pemerintah daerah. Pertumbuhan QRIS yang tinggi menunjukkan ekspansi *merchant* dan peningkatan frekuensi transaksi nominal kecil-menengah, terutama pada periode meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, UE yang tetap tumbuh kuat mengindikasikan konsistensi penggunaan dompet digital untuk transaksi harian, sementara APMK yang tumbuh lebih moderat mengarah pada kecenderungan substitusi ke instrumen berbasis QR dan transfer instan yang lebih efisien. Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan bahwa preferensi masyarakat terhadap transaksi yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CEMUMUAH) semakin menguat untuk menunjang aktivitas ekonomi di Jawa Timur, sekaligus mencerminkan pendalaman ekosistem keuangan digital di daerah.

#### Sistem pembayaran melalui transfer juga meningkat signifikan sejalan dengan kenaikan investasi dan pertumbuhan pada LU Perdagangan dan LU Konstruksi.

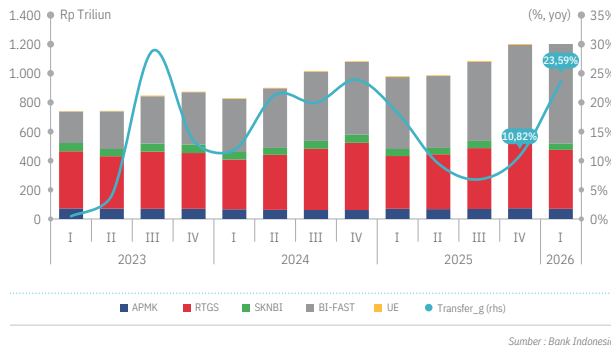
Aktivitas transfer terutama yang dilakukan menggunakan instrumen BI-FAST, RTGS, dan SKNBI tumbuh sebesar 23,36% (yoy) pada triwulan I 2026 dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 10,92% (yoy) (Grafik 4.9). Pertumbuhan tersebut didominasi oleh transaksi UE sebesar 56,25% (yoy), yang kemudian disusul oleh BI-FAST sebesar 38,06% (yoy), dan RTGS sebesar 11,77% (yoy), sementara APMK mengalami kontraksi sebesar -0,36% (yoy) dan SKNBI sebesar -9,31% (yoy) (Grafik 4.10). Peningkatan transaksi menggunakan RTGS dan BI-FAST mendukung akselerasi kinerja investasi dan LU Konstruksi pada triwulan laporan. Sementara peningkatan UE sejalan dengan aktivitas transaksi ritel, UMKM, transportasi, dan pariwisata di berbagai kota utama yang meningkat signifikan. Di sisi lain, kontraksi APMK dan SKNBI mengarah pada indikasi pergeseran ke kanal pembayaran yang lebih *real-time* dan efisien seiring meningkatnya literasi dan adopsi digital di Jawa Timur.

**Grafik 4.8. Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai melalui APMK, UE, dan QRIS**



Sumber : Bank Indonesia

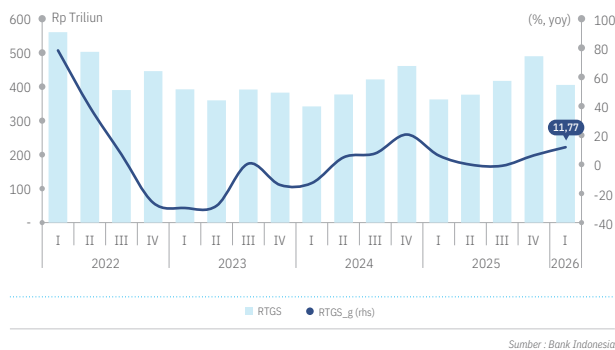
**Grafik 4.9. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran melalui Transfer**



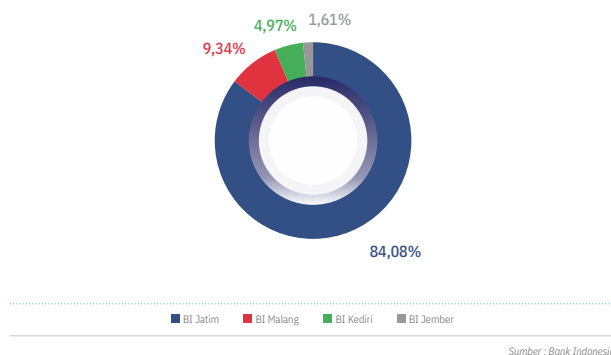
### Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi RTGS di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh akseleratif sejalan dengan peningkatan investasi. Pertumbuhan RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar 11,77% (yoy) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 dengan pertumbuhan sebesar 6,18% (yoy) (Grafik 4.11). Secara historis, nominal RTGS pada triwulan I cenderung menurun karena fase awal tahun, namun demikian, pertumbuhan (yoy) yang tetap positif menunjukkan bahwa aktivitas korporasi pada LU Perdagangan, LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Akomodasi dan Makan Minum yang masih terjaga kuat, meskipun secara siklus mengalami normalisasi pada awal tahun. Perbaikan kinerja RTGS juga turut tecermin dari

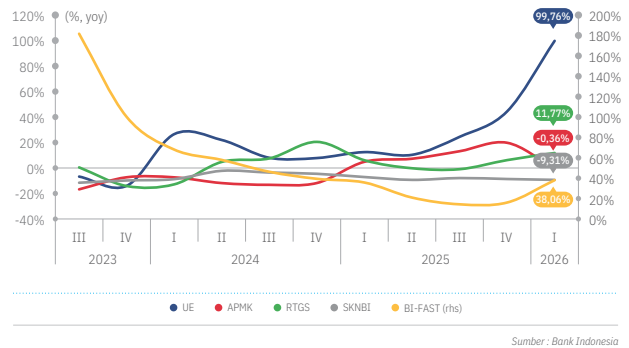
**Grafik 4.11. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Jawa Timur**



**Grafik 4.13. Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur**



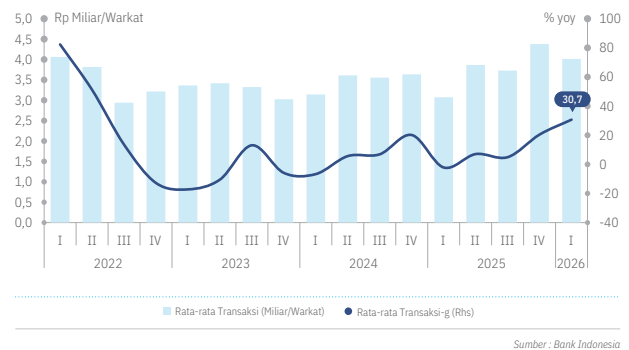
**Grafik 4.10. Pertumbuhan Volume Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST**



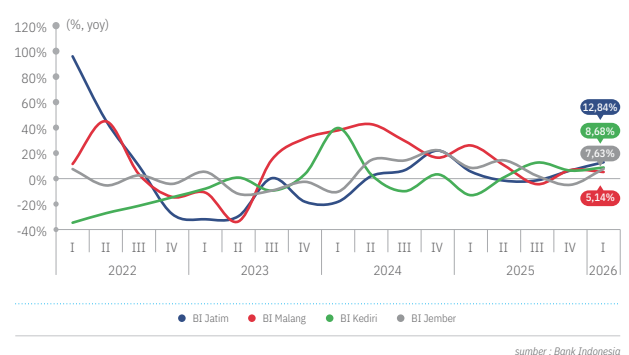
pertumbuhan rata-rata transaksi RTGS per warkat tercatat lebih tinggi dari triwulan lalu, dari 12,7% (yoy) menjadi 25,1% (yoy) dengan nilai rata-rata sebesar Rp4,02 miliar per warkat (Grafik 4.12).

Pertumbuhan positif RTGS terjadi di semua area di Jawa Timur dengan didominasi oleh wilayah kerja Bank Indonesia Jawa Timur Surabaya dan sekitarnya yang mencapai 84% dari total transaksi (Grafik 4.13). Lebih lanjut, urutan pertumbuhan yang terjadi di semua area KPwBI di Jawa Timur meliputi KPwBI Jawa Timur, KPwBI Kediri, KPwBI Jember, dan KPwBI Malang dengan pertumbuhan masing-masing 12,84% (yoy); 8,68% (yoy); 7,63% (yoy); dan 5,14% (yoy).

**Grafik 4.12. Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS Jawa Timur**



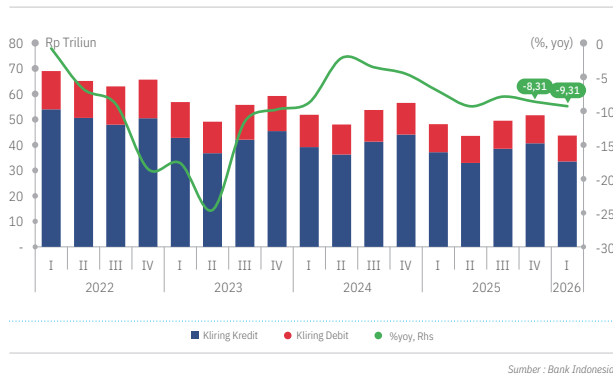
**Grafik 4.14. Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia**



### Transaksi Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

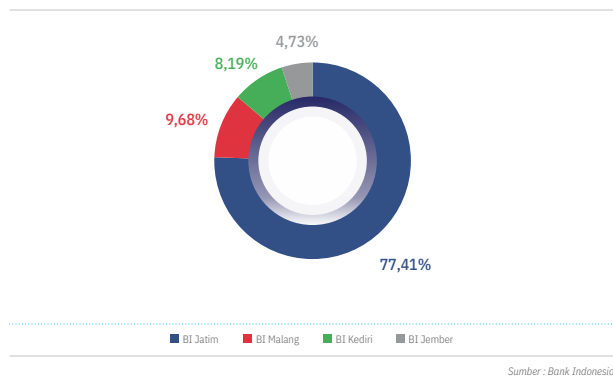
Transaksi kliring pada triwulan I 2026 kembali mengalami kontraksi yang lebih dalam sejalan dengan normalisasi siklus usaha di awal tahun. Kinerja kliring pada awal triwulan I 2026 tercatat secara nominal sebesar Rp43,66 triliun (-9,31% yoy), dan secara volume sebesar 626,43 ribu warkat (-12,14% yoy) (Grafik 4.15). Lebih lanjut, penurunan transaksi terjadi di semua komponen kliring baik kliring kredit (-9,73% yoy) maupun kliring debit (-7,88% yoy). Selain pola musiman, penurunan aktivitas kliring juga terjadi karena transaksi antar pelaku usaha dan pembayaran rutin lebih banyak dialihkan ke BI-FAST dan kanal digital lainnya yang menawarkan efisiensi waktu dan biaya. Secara spasial, dominasi KPwBI Provinsi Jawa Timur dengan pangsa 77,41% (Grafik 4.16) menunjukkan bahwa aktivitas kliring masih terkonsentrasi di Surabaya dan wilayah sekitarnya sebagai pusat perdagangan dan korporasi, sementara kontribusi KPwBI Malang, Kediri, dan Jember mencerminkan aktivitas ekonomi regional yang tetap berjalan namun dalam skala lebih terbatas. Secara keseluruhan, kontraksi kliring di Jawa Timur pada triwulan I 2026 salah satunya didorong oleh pergeseran preferensi masyarakat menuju instrumen pembayaran digital, sejalan dengan tren digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Grafik 4.15. Perkembangan Kliring Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.16. Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur

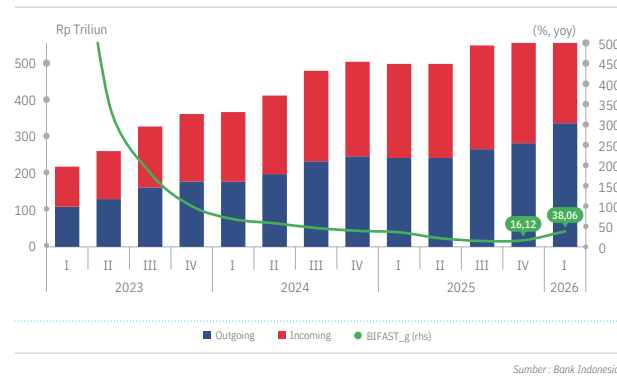


Sumber : Bank Indonesia

### Transaksi Melalui Bank Indonesia - Fast Payment (BI-FAST)

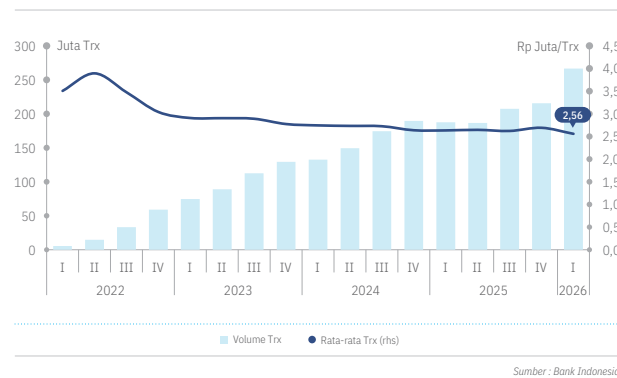
Transaksi BI-FAST di Jawa Timur kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Kinerja BI-FAST pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 38,06% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp682 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,12% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp580 triliun (Grafik 4.17). Dari sisi frekuensi, transaksi juga mengalami peningkatan yang mencapai 266,6 juta transaksi. Kenaikan nominal yang konsisten menunjukkan bahwa BI-FAST telah menjadi infrastruktur pembayaran utama transfer dana antarbank bernilai kecil hingga menengah, terutama untuk pembayaran perdagangan, UMKM, hingga korporasi. Lebih lanjut, dominasi transaksi *incoming* sebesar Rp384 triliun dibandingkan *outgoing* yang sebesar Rp333,6 triliun, mengindikasikan arus dana yang masuk ke Jawa Timur lebih besar daripada yang keluar. Kondisi ini mempertegas peran Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara dan sentra produsen utama, di mana arus pembayaran dari berbagai wilayah Indonesia mengalir ke pelaku usaha, distributor, dan industri pengolahan di Jawa Timur sebagai pusat produksi dan hub logistik kawasan timur.

Grafik 4.17. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.18. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Namun demikian, rata-rata transaksi di triwulan I 2026 mengalami penurunan. Nilai rata-rata transaksi BI-FAST pada triwulan laporan sebesar Rp2,56 juta/transaksi, menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar Rp2,69 juta/transaksi (Grafik 4.18). Penurunan rata-rata nominal transaksi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu efek musiman di mana triwulan I secara historis mencatat nilai transaksi lebih rendah dibandingkan triwulan IV yang didorong momentum belanja akhir tahun, dan semakin meluasnya penggunaan BI-FAST untuk transaksi ritel bernilai kecil seiring bertambahnya jumlah pengguna baru dan perluasan ekosistem *merchant*. Semakin meluasnya penggunaan BI-FAST ini sekaligus menjadi bukti efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam menyediakan sistem pembayaran yang CEMUMUAH. Karakteristik *real-time settlement*, biaya transfer yang rendah, serta interoperabilitas antarbank pada BI-FAST telah mendorong efisiensi transaksi lintas daerah dan mempercepat perputaran dana dalam ekosistem perdagangan. Dengan demikian, pertumbuhan BI-FAST tidak hanya merefleksikan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat transformasi struktural sistem pembayaran yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkuat posisi Jawa Timur sebagai episentrum aktivitas ekonomi dan distribusi nasional.

### Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Transaksi menggunakan APMK secara umum pada triwulan I 2026 tumbuh positif, seiring dengan akselerasi konsumsi rumah tangga dan pemerintah pada momen HBKN Idulfitri. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan APMK tercatat sebesar 11,41% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp300,68 triliun, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 7,73% (yoy) atau sebesar Rp269,9 triliun. Akselerasi penggunaan APMK berdasarkan sumbernya, terutama terjadi melalui kartu kredit yang tumbuh signifikan mencapai 389,84% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penggunaan APMK melalui kartu debit mengalami kontraksi sebesar 2,10% (yoy). Kondisi ini mengonfirmasi kenaikan kredit pada masyarakat untuk triwulan I 2026 yang digunakan untuk kredit konsumsi. Lebih lanjut berdasarkan tujuan penggunaannya, pertumbuhan APMK untuk aktivitas pembayaran nontunai yang meningkat 5,22% (yoy), mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi menghadapi momen HBKN Idulfitri. Sementara itu, APMK yang digunakan untuk tarik setor tunai dan transfer mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,88% (yoy) dan 0,36% (yoy).

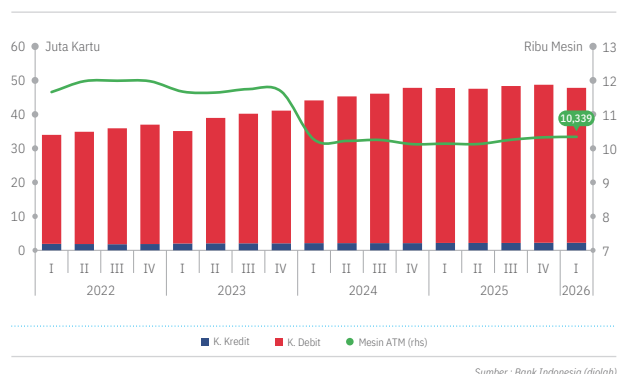
Instrumen pembayaran APMK turut meningkat pada jumlah kartu kredit dan mesin ATM, sementara terjadi penurunan pada jumlah kartu debit. Kepemilikan kartu kredit di Jawa Timur pada triwulan laporan mencapai 2,24 juta kartu, meningkat dibanding akhir triwulan tahun 2025 yang sebanyak 2,23 juta kartu kredit. Peningkatan juga terjadi pada mesin ATM yang menjadi 10.339 unit di akhir triwulan I 2026 atau dengan rasio

Grafik 4.19. Perkembangan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



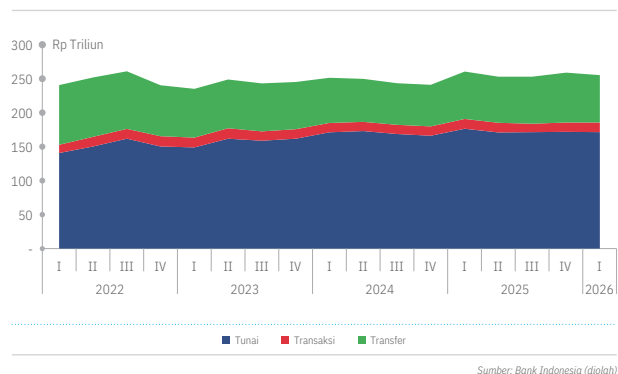
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.20. Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



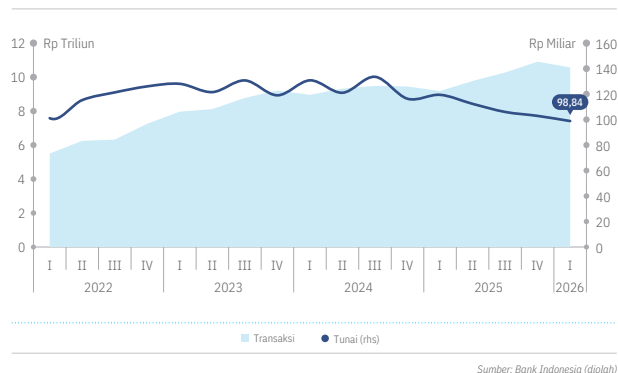
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.21. Penggunaan Kartu ATM/Debit



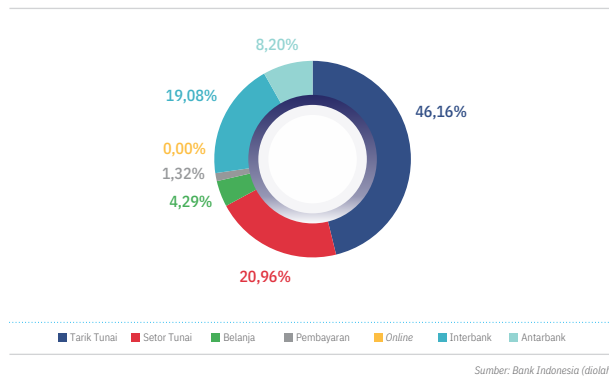
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.22. Penggunaan Kartu Kredit

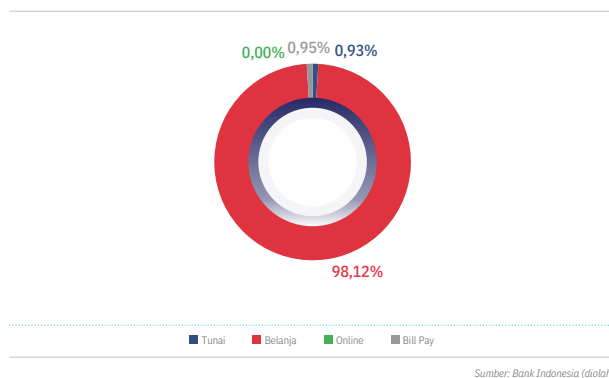


Sumber: Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 4.23. Pangsa Nominal Transaksi Kartu Debit**



**Grafik 4.24. Pangsa Nominal Transaksi Kartu Kredit**

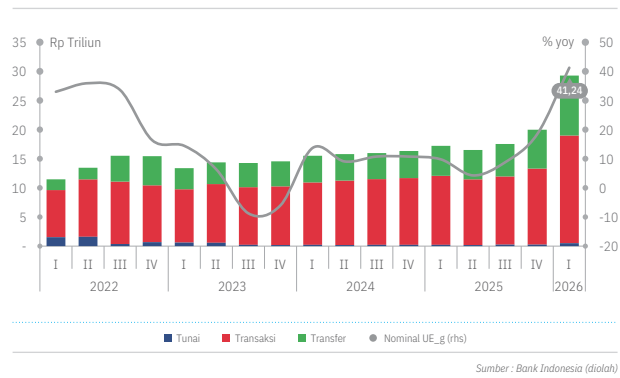


1:4,7 km/unit untuk mendukung akses layanan perbankan tetap luas dan terjaga. Sementara itu, jumlah kepemilikan kartu debit sebanyak 45,57 juta kartu atau menurun dibanding triwulan lalu yang mencapai 46,47 juta kartu.

### Transaksi Uang Elektronik (UE)

**Nominal dan volume transaksi UE di Jawa Timur menunjukkan penguatan pada triwulan I 2026, seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat.** Nilai transaksi UE tercatat sebesar Rp22,02 triliun, tumbuh 21,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar Rp19,73 triliun dengan pertumbuhan 18,44% (yoy) (Grafik 4.25). Dari sisi frekuensi, volume transaksi juga meningkat menjadi 226,56 juta transaksi atau tumbuh 18,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 224,69 juta transaksi dengan pertumbuhan 16,92% (yoy) (Grafik 4.26). Sejalan dengan itu, rata-rata nilai transaksi turut mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp97.180/transaksi, dari sebelumnya Rp89.000/transaksi pada triwulan IV 2025. Peningkatan nilai dan volume transaksi secara bersamaan mengindikasikan bahwa akseptasi UE di Jawa Timur terus meluas, tidak hanya dari sisi jumlah pengguna dan frekuensi penggunaan, tetapi juga dari sisi nilai transaksi per kejadian yang semakin besar. Hal ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat yang kini menggunakan UE tidak sebatas untuk transaksi mikro, melainkan juga untuk kebutuhan konsumsi bernilai lebih tinggi.

**Grafik 4.25. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik**



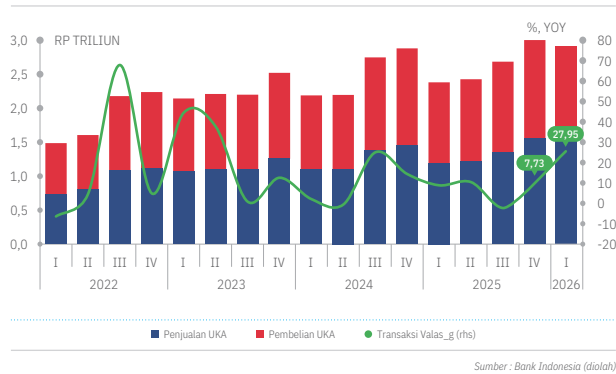
**Grafik 4.26. Perkembangan Volume Uang Elektronik**



### Transaksi Valuta Asing (Valas)

**Transaksi UKA di Jawa Timur pada triwulan I 2026 meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas internasional di wilayah Jawa Timur.** Transaksi UKA pada akhir triwulan I 2026 ekuivalen sebesar Rp3,05 triliun atau tumbuh 27,95% (yoy) (Grafik 4.27). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,73% (yoy). Komposisi transaksi penjualan dan pembelian valuta asing di Jawa Timur pada triwulan I 2026 didominasi oleh mata uang USD sebesar 30,06%, SGD sebesar 23,7%, dan MYR sebesar 7,4% terhadap total transaksi (Grafik 4.28). Dominasi USD mengindikasikan kuatnya aktivitas perdagangan dan pembayaran bisnis internasional yang secara konvensional menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi lintas negara. Sementara itu, berdasarkan data BPS, jumlah wisman ke Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak 65.391 orang atau tumbuh 2,04% (yoy), dengan asal negara utama yaitu Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong penggunaan MYR dan SGD yang tinggi di Jawa Timur, serta mencerminkan tingginya intensitas hubungan ekonomi dan mobilitas antara Jawa Timur dengan Singapura dan Malaysia. Lebih lanjut, pertumbuhan transaksi UKA yang jauh melampaui pertumbuhan volume kunjungan wisman mengindikasikan bahwa pendorong peningkatan UKA tidak semata bersumber dari aktivitas pariwisata. Kondisi ini lebih mencerminkan meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk mendukung transaksi impor dan aktivitas bisnis internasional, perdagangan, dan investasi internasional Jawa Timur pada triwulan I 2026.

**Grafik 4.27. Perkembangan UKA di Jawa Timur**



### 4.3. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

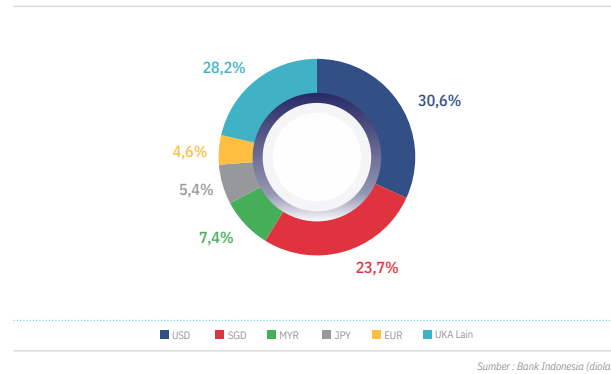
#### 4.3.1. Penanganan Uang Palsu

Sejalan dengan penguatan pengelolaan uang rupiah, pada triwulan I 2026 Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) guna memastikan distribusi uang layak edar menjangkau wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Bawean, Pulau Masalembu, Pulau Sakala, Pulau Sapeken, dan Pulau Kangean bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, sehingga ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas tetap terjaga meskipun menghadapi keterbatasan akses geografis. Selain distribusi dan layanan penukaran uang tidak layak edar, ERB juga disertai edukasi Rupiah kepada masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan perlindungan terhadap Rupiah. Langkah ini menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang layak edar hingga pulau-pulau terluar sekaligus mencegah dan menindak peredaran uang palsu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah tetap terpelihara di seluruh wilayah Jawa Timur.

Pada periode yang sama, edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah turut diintensifkan melalui berbagai segmen masyarakat. Kegiatan diselenggarakan di sejumlah institusi pendidikan, antara lain SMA Unggulan Amatul Ummah, SMP Pembangunan Jaya, Pondok Pesantren Amatul Ummah, serta kepada mahasiswa UINSA dan UNESA. Edukasi juga dilaksanakan di De Javasche Bank dengan menyasar siswa, mahasiswa, hingga pengunjung lokal dan mancanegara guna menginternalisasi nilai cinta Rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan tersebut semakin diperluas pada momentum HBKN Idulfitri 1447 H melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI), yang mencakup pemenuhan dan ketersediaan uang Rupiah agar distribusi oleh DKW Jawa Timur sesuai Estimasi Kebutuhan Uang dan tersalur tepat waktu ke seluruh satker kas di wilayah koordinasinya.

Selain memastikan kelancaran distribusi, SERAMBI juga menghadirkan layanan kas Rupiah untuk memenuhi kebutuhan perbankan serta edukasi bertema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah” guna meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap CBP Rupiah. Implementasi program

**Grafik 4.28. Komposisi Penjualan & Pembelian UKA berdasarkan mata uang**

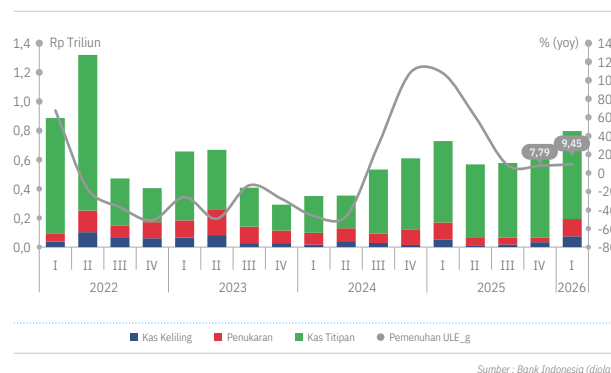


diawali dengan *kick off* SERAMBI 2026 pada tanggal 19 Februari 2026 di De Javasche Bank, Surabaya. Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan ini mencerminkan penguatan pengelolaan uang Rupiah yang terintegrasi antara aspek operasional dan edukatif, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat, sehingga stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga sekaligus memperdalam kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

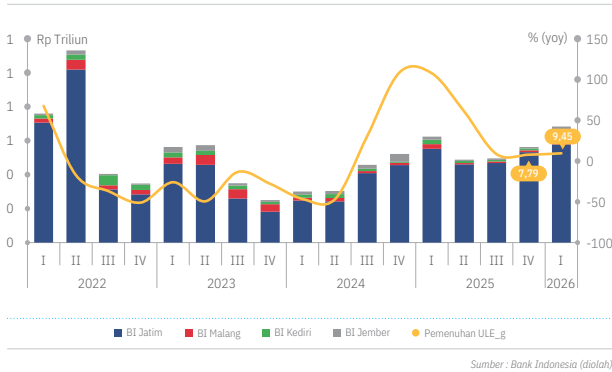
#### 4.3.2. Penyediaan Uang Rupiah

**Penyediaan ULE pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Penyediaan ULE tercatat sebesar Rp796,9 miliar atau tumbuh 9,4% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar Rp656,62 miliar. Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan momentum HBKN Idulfitri yang mendorong peningkatan kebutuhan uang baru, terutama untuk keperluan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) (Grafik 4.30). Berdasarkan jenis layanan, pemenuhan ULE didominasi oleh Kas Titipan dengan pangsa 75,87%, diikuti oleh layanan penukaran dengan kontribusi 14,7% dan kas keliling dengan pangsa kontribusi sebesar 9,3%. Tingginya kebutuhan ULE pada momen HBKN terlihat dari tingginya peningkatan transaksi baik melalui kas keliling, penukaran maupun kas titipan. Namun demikian, kegiatan kas keliling menunjukkan

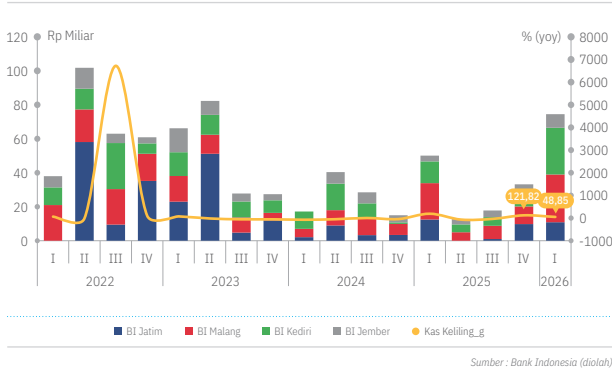
**Grafik 4.29. Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis**



**Grafik 4.30. Pemenuhan ULE Secara Spasial**



**Grafik 4.32. Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur**



peningkatan aktivitas yang lebih besar dibanding penukaran karena adanya dorongan untuk memberikan pelayanan dengan lebih baik kepada masyarakat.

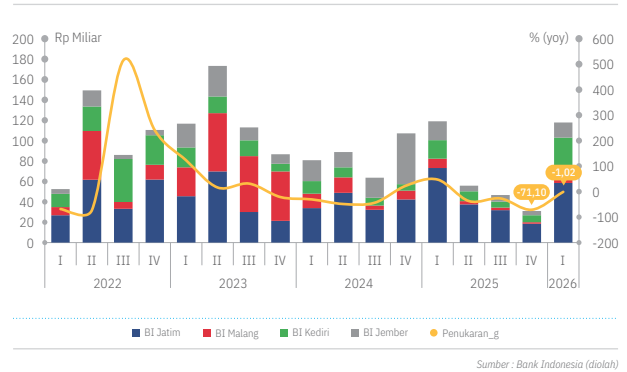
### 4.3.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

#### 4.3.3.1 Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Transaksi QRIS pada triwulan I 2026 tetap tumbuh positif dengan nominal mencapai Rp44,44 triliun atau meningkat 70,59% (yoy) seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang HBKN Idulfitri 1447 H, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 105,59% (yoy). Perlambatan juga tecermin pada rata-rata nilai transaksi yang turun menjadi Rp91.220 per transaksi dari Rp91.340 pada triwulan sebelumnya, serta pada volume transaksi yang tumbuh 80,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan 125,70% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perlambatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh efek dasar perbandingan (*base effect*) yang semakin tinggi, seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi QRIS pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Jumlah *merchant* QRIS di Jawa Timur pada triwulan I 2026 meningkat menjadi 5,51 juta atau tumbuh 22,27% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 24,32% (yoy). Hingga akhir 2025, jumlah *merchant* tercatat 5,23 juta dengan pertumbuhan 24,32% (yoy), dan masih didominasi oleh usaha mikro dengan pangsa 70,44%. Secara spasial,

**Grafik 4.31. Nominal Transaksi Penukaran**

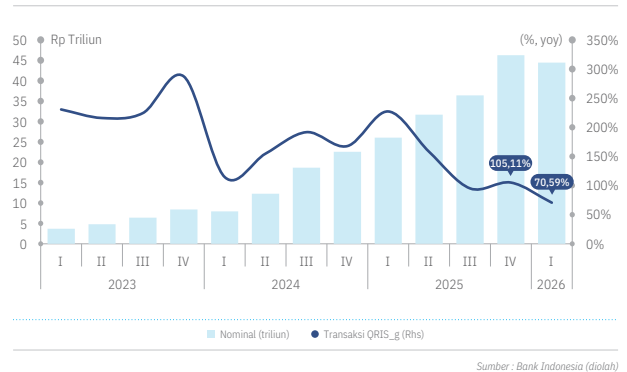


**Grafik 4.33. Nominal Transaksi Kas Titipan**

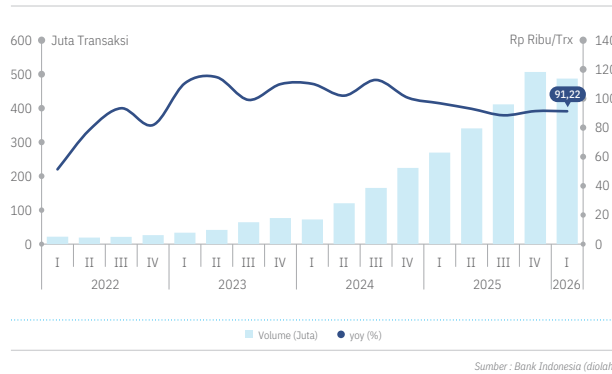


•konsentrasi *merchant* terbesar berada di Kota Surabaya dengan pangsa 25,5%, diikuti Kota Malang sebesar 12,5% dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,2% sebagaimana terlihat pada Grafik 4.38, sejalan dengan tingginya populasi UMKM di wilayah tersebut. Di sisi pengguna, hingga triwulan IV 2025 total pengguna QRIS di Jawa Timur mencapai 9,37 juta atau tumbuh 10,05% (yoy) sebagaimana tercantum pada Grafik 4.39, dan menempatkan Jawa Timur pada peringkat ke-2 nasional setelah Jawa Barat. Pertumbuhan *merchant* yang tetap kuat dengan dominasi usaha mikro menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran semakin terintegrasi dalam struktur ekonomi riil Jawa Timur yang berbasis UMKM dan perdagangan, sementara konsentrasi di wilayah perkotaan mencerminkan kuatnya aktivitas konsumsi dan distribusi di pusat pertumbuhan.

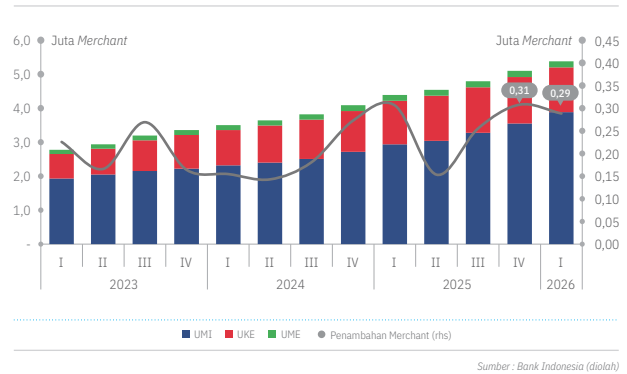
**Grafik 4.34. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS**



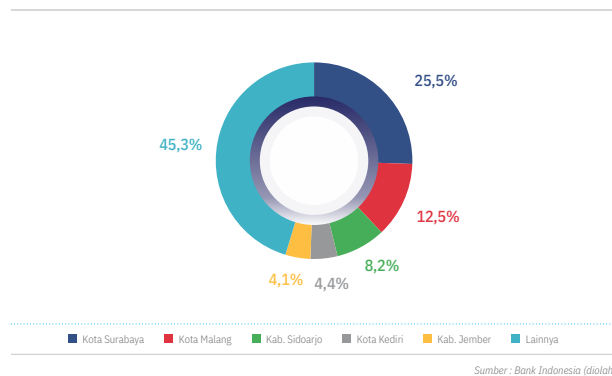
**Grafik 4.35. Perkembangan Volume Transaksi QRIS**



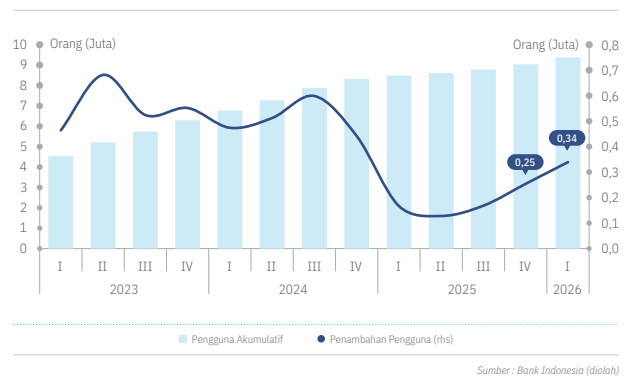
**Grafik 4.36. Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha**



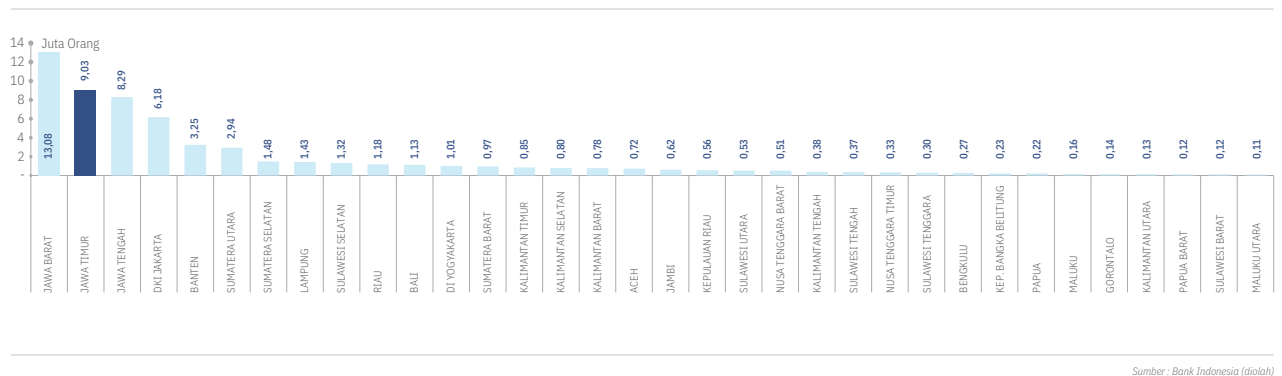
**Grafik 4.37. Merchant QRIS Spasial di Jawa Timur**



**Grafik 4.38. Perkembangan Pengguna QRIS**



**Grafik 4.39. Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur**



Ekspansi *merchant* dan pengguna yang berlanjut ini memperkuat pendalaman ekosistem pembayaran digital, meningkatkan efisiensi transaksi ritel, serta menopang daya tahan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan.

#### 4.3.3.2 Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai

Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital. Program ini mencakup penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pelaksanaannya mengacu pada kebijakan Kementerian Sosial selaku pemilik program, termasuk dalam penetapan periode penyaluran,

penunjukan pihak penyalur, serta mekanisme distribusi di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam implementasinya, Bank Indonesia turut berperan mendukung elektronifikasi penyaluran bantuan sosial melalui penguatan ekosistem pembayaran digital, perluasan akseptasi transaksi nontunai, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran. Elektronifikasi BSNT diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan potensi kebocoran, meningkatkan akuntabilitas penyaluran, serta mendorong inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga rentan, karena bantuan dapat diterima secara lebih tepat waktu, efisien, dan langsung melalui rekening atau media pembayaran elektronik.

## Penyaluran Program Sembako

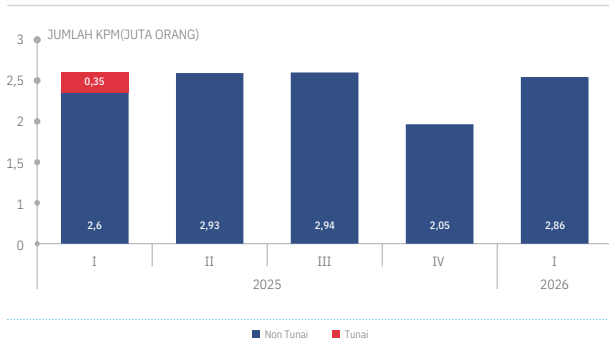
Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Pada periode ini, jumlah penerima manfaat mencapai 2,86 juta orang dengan total penyaluran sebesar Rp1,72 triliun, meningkat 10% (yoy). Kenaikan tersebut menunjukkan tetap kuatnya dukungan bantuan sosial pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah dinamika harga pangan pada awal tahun. Dibandingkan triwulan IV 2025, realisasi penyaluran juga mengalami peningkatan dari 2,05 juta penerima manfaat dengan total penyaluran Rp1,23 triliun (Grafik 4.41 dan Grafik 4.42). Secara spasial, realisasi penyaluran Program Sembako terbesar berada di Kabupaten Jember yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk dan

rumah tangga penerima bantuan di wilayah tersebut, sedangkan penyaluran terendah berada di Kota Batu sejalan dengan jumlah penduduk dan cakupan penerima manfaat yang relatif lebih terbatas dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

## Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

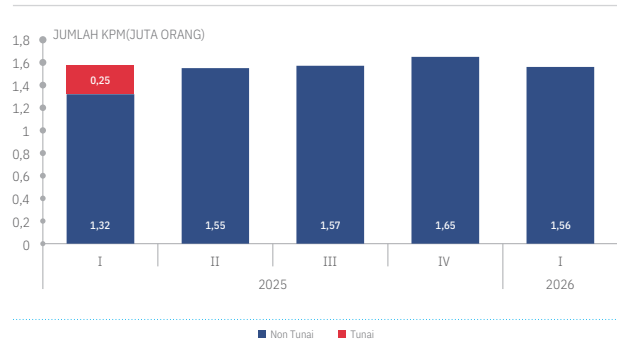
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan I 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Di triwulan ini, jumlah KPM PKH mencapai 1,56 juta dengan total penyaluran sebesar Rp1,2 triliun. Meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025, kondisi tersebut sejalan dengan pola musiman penyaluran bansos pada awal tahun, ketika proses pemutakhiran data penerima manfaat, verifikasi

Grafik 4.40. Penerima Program Sembako di Jawa Timur



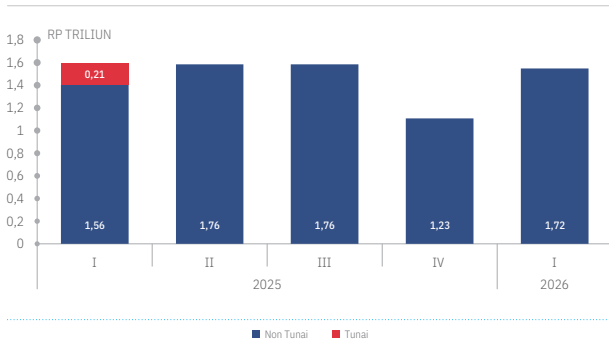
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 4.43. Jumlah Penerima PKH di Jawa Timur



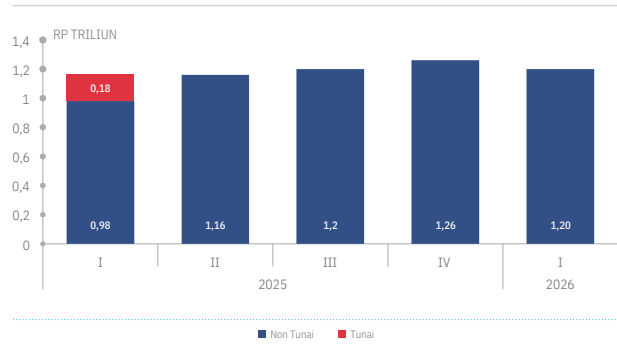
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 4.41. Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur



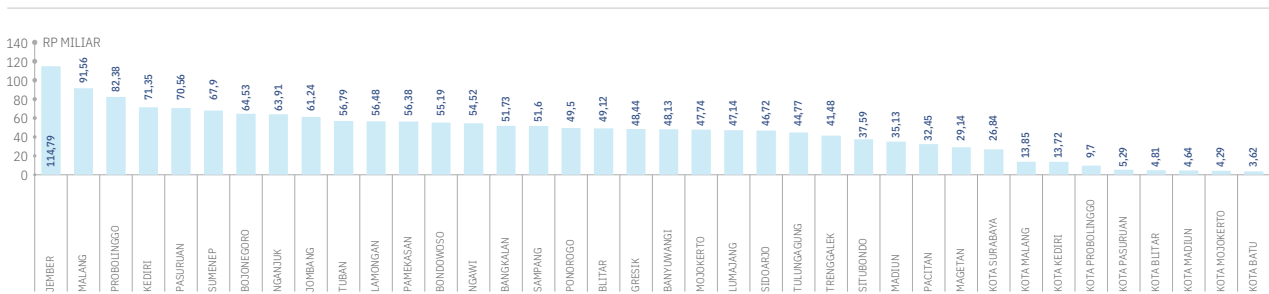
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 4.44. Penyaluran Program PKH di Jawa Timur



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 4.42. Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur Triwulan I 2026

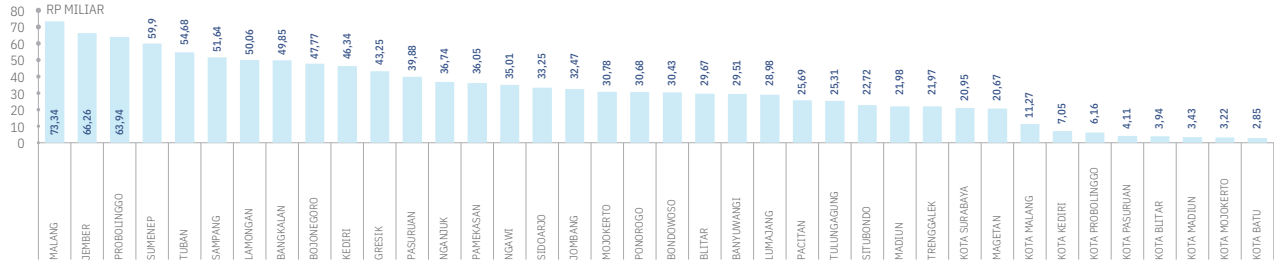


Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

kelayakan KPM, serta penyesuaian mekanisme penyaluran masih berlangsung. Hal ini tecermin dari jumlah KPM dan total penyaluran yang relatif sama dengan triwulan I 2025 (Grafik 4.44 dan Grafik 4.45), sehingga mengindikasikan bahwa perlambatan penyaluran lebih dipengaruhi faktor siklus administrasi tahunan dibandingkan penurunan cakupan

program secara struktural. Secara spasial, realisasi penyaluran PKH tertinggi berada di Kabupaten Malang sejalan dengan besarnya jumlah penduduk dan rumah tangga rentan di wilayah tersebut, sedangkan terendah berada di Kota Batu yang memiliki jumlah penduduk dan cakupan KPM relatif lebih terbatas dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur.

**Grafik 4.45. Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur pada Triwulan I 2026**



Sumber: Himbara dan Kemenko PH (diolah)



05.

# Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Foto : 2 Nelayan menjaring ikan di Pacitan Jawa Timur

## 5.1. Gambaran Umum

**Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2026 secara struktural masih cukup terjaga.** Hal ini ditandai dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,55% dan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 74,78%, seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada LU Pertanian, jasa kemasyarakatan, dan perdagangan besar dan eceran. Namun demikian, jumlah tenaga kerja formal menurun seiring dengan penurunan penyerapan tenaga kerja pada LU industri dan konstruksi. Peningkatan tenaga kerja informal lebih menggambarkan tingginya peningkatan tenaga kerja buruh dan pekerja keluarga seiring dengan adanya masa panen raya tanaman pangan. Jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah juga mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor pertanian dan jasa.

**Kesejahteraan masyarakat pedesaan masih relatif terjaga seiring dengan kenaikan harga hortikultura sayuran, peningkatan penerimaan petani komoditas hasil ternak dan perikanan,** serta meningkatnya permintaan pada momen Ramadan, perayaan Nyepi, momen Imlek, HBKN Idulfitri 2026, dan dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan IV 2025. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 118,39 pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 118,96. Tetap kuatnya NTP didukung oleh peningkatan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang putih, tomat, dan kol/kubis. Lebih lanjut, peningkatan harga yang diterima petani dari ternak perunggasan, serta peningkatan harga yang diterima petani perikanan/nelayan, turut memperkuat NTP. Meski demikian, penurunan tetap dirasakan pada harga yang diterima oleh petani, utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan penurunan harga gabah pada level produsen, serta subsektor perkebunan karena penurunan harga kopi dan kakao/cokelat biji di tingkat petani.

**Pada semester I 2026, tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan membaik dibandingkan semester II 2025.** Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat 5,89% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,15% (yoy). Kesejahteraan rumah tangga diindikasikan masih terjaga yang tecermin dari penurunan TPT menjadi sebesar 3,55%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,71%. Perbaikan kesejahteraan juga sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan masyarakat.

## 5.2. Ketenagakerjaan

### 5.2.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

**Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada Februari 2026 secara struktural masih cukup terjaga dibandingkan November 2025 dan Februari 2025.** Hal ini tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang disertai dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPT Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55%, lebih rendah dibandingkan November 2025 dan Februari 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 3,71% dan 3,61% (Tabel 5.1). Penurunan TPT ini didorong oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor pertanian, yang tecermin pada meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor informal. Peningkatan jumlah tenaga kerja ditopang oleh peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. Sementara peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan Februari 2025 terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa kemasyarakatan. Peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian dibandingkan November 2025 maupun Februari 2025 terutama disebabkan oleh adanya panen raya padi, produksi jagung, hasil peternakan, seperti daging dan telur ayam, serta produksi kayu. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor pertanian. Pengangkatan ASN baru dan tenaga kerja sektor jasa lainnya turut menyokong peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor jasa kemasyarakatan.

Sementara itu, TPAK Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat 74,78%, lebih tinggi dibandingkan November 2025 sebesar 74,39% dan Februari 2025 yang tercatat 74,25% (Tabel 5.1). Secara umum, peningkatan TPAK menunjukkan kenaikan angkatan kerja terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas atau penduduk produktif. Peningkatan TPAK ini terutama terlihat pada angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dan angkatan kerja terampil yang aktif mencari pekerjaan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor informal.

**Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Jawa Timur cenderung meningkat.** Berdasarkan hasil SUPAS 2025, Jawa Timur tercatat sebesar 44,35%, artinya setiap 1.000 penduduk usia kerja (15–64 tahun, dianggap produktif) memiliki tanggungan sekitar 443 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 43,87%. Rasio ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum atau tidak produktif meningkat (Tabel 5.1).

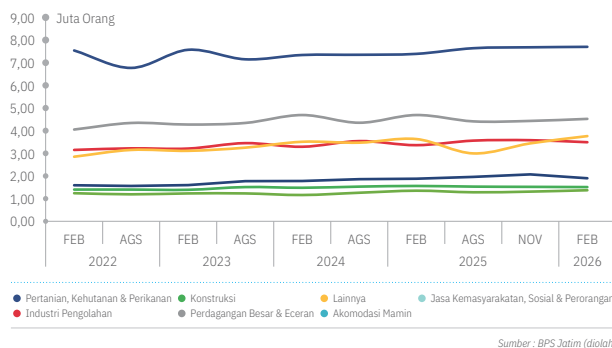
**Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada Februari 2026, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur.** Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Pertanian tercatat 31,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan November 2025 (31,96%) namun lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 (30,97%). Meski begitu, secara jumlah, tenaga kerja di LU Pertanian meningkat sejalan dengan aktivitas produksi pertanian yang masif, terutama didukung peningkatan produksi padi dan jagung seiring dengan siklus panen. Peningkatan permintaan hasil peternakan seperti daging dan telur ayam untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan produksi kayu bulat juga mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja di LU Pertanian pada Februari 2026.

**Tabel 5.1. Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)**

Kegiatan	2024		2025			2026
	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov	Feb
Angkatan Kerja	24,14	24,38	24,75	24,76	24,96	25,14
Bekerja Penuh	14,62	15,50	15,02	15,85	16,55	15,23
Bekerja Paruh Waktu	7,02	6,21	7,18	6,39	6,18	7,40
Bekerja Setengah Pengangguran	1,59	1,65	1,66	1,56	1,30	1,62
Penganggur	0,90	1,02	0,90	0,96	0,93	0,89
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,02%	73,46%	74,25%	73,98%	74,39%	74,78%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,74%	4,19%	3,61%	3,88%	3,71%	3,55%
Rasio Ketergantungan	43,87%		44,35%			

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

**Grafik 5.1. Jumlah Tenaga Kerja LU Utama**

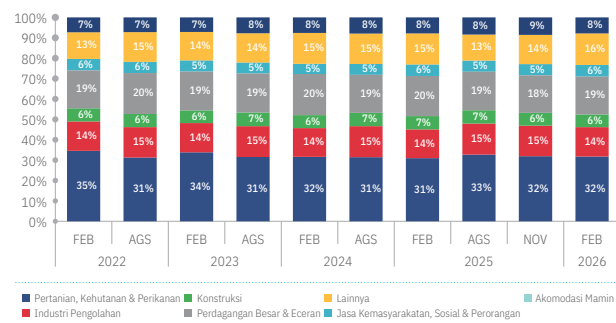


Sumber : BPS Jatim (diolah)

LU Perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Timur pada Februari 2026, dengan pangsa penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 18,62%, meningkat dibandingkan November 2025 (18,44%), namun lebih rendah dibandingkan Februari 2025 (19,65%). Lebih tingginya penyerapan tenaga kerja LU Perdagangan dibandingkan November 2025 didukung adanya peningkatan tenaga kerja musiman akibat aktivitas konsumsi pada momen Ramadan dan menjelang HBKN Idulfitri, serta rangkaian hari libur nasional sepanjang triwulan I 2026.

LU Industri Pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 14,38%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 (14,09%), kendati lebih rendah dibandingkan November 2025 (14,90%). Peningkatan penyerapan tenaga kerja di LU Industri Pengolahan pada Februari 2026 dibandingkan Februari 2025 ditopang oleh perbaikan kinerja manufaktur pada beberapa sub LU industri utama, yang tecermin dari peningkatan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) industri makanan dan minuman, industri kulit dan alas kaki, industri karet dan plastik, industri logam dasar, serta industri barang dari logam. Permintaan domestik dan permintaan eksternal terutama komoditas turunan sawit yang lebih tinggi dibandingkan awal tahun 2025 turut mendukung lebih tingginya tenaga kerja industri pada Februari 2026

**Grafik 5.2. Pangsa Tenaga Kerja Sektoral**



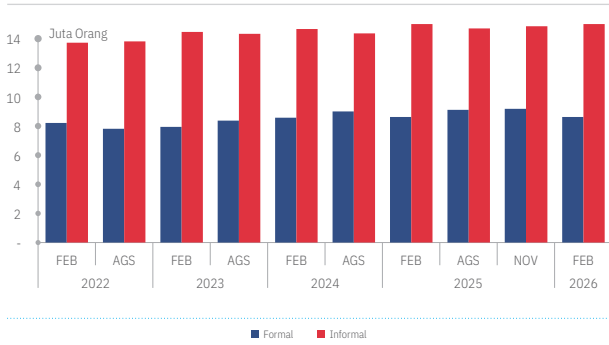
Sumber : BPS Jatim (diolah)

dibandingkan Februari 2025. Namun, lebih rendahnya tenaga kerja di Februari 2026 dibandingkan November 2025 terjadi seiring dengan kinerja ekspor Jawa Timur yang tertahan akibat tekanan ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, peningkatan penyerapan dan jumlah tenaga kerja juga terjadi pada LU Jasa Masyarakat. Pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor ini tercatat 15,52%, lebih tinggi dibanding November 2025 (14,32%) dan Februari 2025 (15,21%). Peningkatan tenaga kerja di LU Jasa Masyarakat pada Februari 2026 didorong oleh pengangkatan ASN baru dan peningkatan tenaga kerja di sektor jasa lainnya (pariwisata, ekonomi kreatif lokal), hal ini tecermin dari peningkatan pertumbuhan LU Administrasi Pemerintah, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya pada triwulan I 2026 yang masing-masing tumbuh mencapai 3,67%, 8,13%, dan 13,44% (yoy).

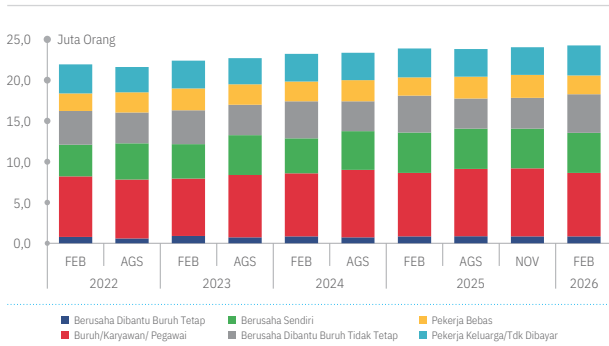
Sektor Informal masih mendominasi kondisi tenaga kerja di Jawa Timur pada Februari 2026. Pangsa penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2026 tercatat sebesar 64,44%, meningkat dibandingkan November 2025 (61,82%) dan Februari 2025 (63,90%) (Grafik 5.5). Peningkatan pangsa tenaga kerja sektor informal secara tahunan didominasi oleh pekerja Bebas, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, dan Pekerja Keluarga. Peningkatan jumlah tenaga kerja informal ini sejalan dengan meningkatnya tenaga kerja di LU Pertanian dan Jasa Lainnya.

**Grafik 5.3. Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

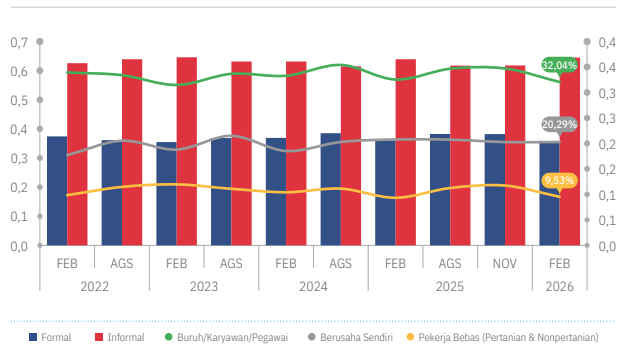
**Grafik 5.4. Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal**



Sumber : BPS Jatim (diolah)

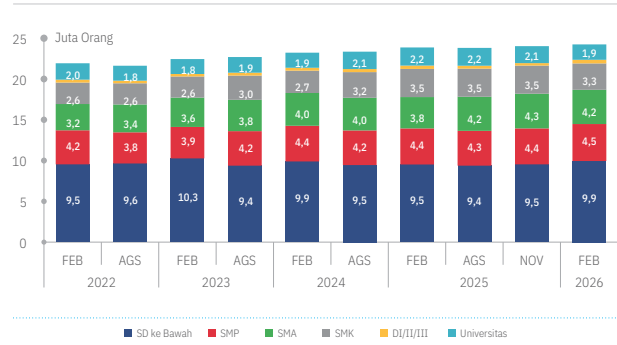
Persentase pangsa tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja di Jawa Timur pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan November 2025 dan Februari 2025. Pangsa tenaga kerja formal pada Februari 2026 sebesar 35,55%, lebih rendah dibandingkan 38,20% pada November 2025 dan 36,10% pada Februari 2025. Secara jumlah, tenaga kerja formal di Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat 8,62 juta tenaga kerja, cenderung stabil dan sedikit meningkat dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 8,61 juta, namun lebih rendah dari 9,18 juta pada November 2025. Penurunan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai berkontribusi pada penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan tenaga kerja LU Industri Pengolahan seiring dengan tertahannya kinerja ekspor di tengah

**Grafik 5.5. Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal Secara Status Pekerjaan (Berdasarkan Persentase)**



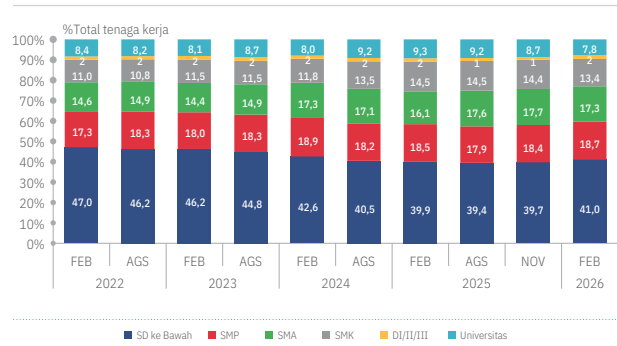
Sumber : BPS Jatim (diolah)

**Grafik 5.6. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

**Grafik 5.7. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



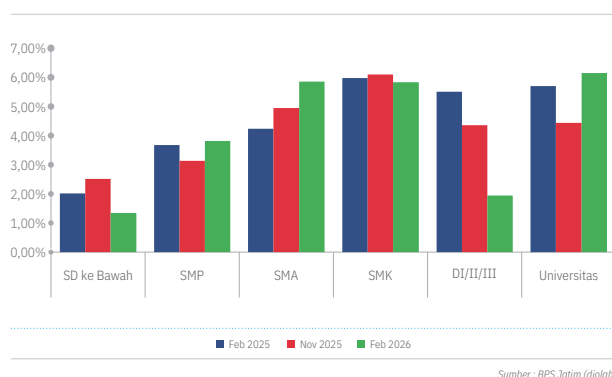
Sumber : BPS Jatim (diolah)

ketidakpastian ekonomi global dan moderasi permintaan, terutama permintaan eksternal.

**Secara kualitas, kinerja sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur masih tetap terjaga.** Jumlah tenaga kerja formal pada Februari 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan November 2025, namun stabil dan sedikit meningkat dibandingkan Februari 2025, sementara jumlah tenaga kerja sektor informal meningkat dibanding November 2025 dan Februari 2025.

**Pada Februari 2026, jumlah tenaga kerja dengan pendidikan rendah (SD dan SMP) mengalami peningkatan** dibanding November dan Februari 2025, sedangkan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi (SMA, SMK dan S1 Universitas) justru mengalami penurunan. Peningkatan tenaga kerja berpendidikan rendah didorong oleh LU Pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja, sedangkan penurunan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi sejalan dengan penurunan kebutuhan tenaga kerja pada LU Akomodasi Makan Minum, beberapa LU Industri Pengolahan dan LU konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja terampil (Grafik 5.6).

**Sementara itu, pangsa dan jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SMK dan perguruan tinggi mengalami penurunan.** Di tengah penurunan jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran di kelompok SMK juga menurun, namun tingkat pengangguran kelompok lulusan perguruan tinggi meningkat. Penurunan pengangguran lulusan SMK menunjukkan bahwa tenaga kerja terampil khusus pada periode Februari 2026 lebih banyak

**Grafik 5.8. Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

terserap oleh sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan lebih spesifik, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sementara itu, penurunan tenaga kerja yang diikuti peningkatan pengangguran pada kelompok lulusan perguruan tinggi disebabkan menurunnya TPAK pada lulusan Universitas periode Februari 2026, sedangkan di sisi lain, kebutuhan penyerapan tenaga kerja terdidik relatif rendah (Grafik 5.7 – 5.8).

Beberapa upaya yang telah diimplementasikan oleh Provinsi Jawa Timur untuk meminimalkan *gap* atau *mismatch* antara pasokan tenaga kerja terdidik dan permintaan industri meliputi:

1. Memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri dan sektor ekonomi produktif, sehingga lulusan lebih siap memasuki dunia kerja.
2. Memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMA maupun SMK.

3. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, khususnya bagi lulusan SMK, agar memiliki kredibilitas dan daya saing dengan tenaga kerja asing, serta mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
4. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja melalui penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan industri, peningkatan keterampilan praktis, serta pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
5. Memperluas kerja sama antara institusi pendidikan dengan industri, perusahaan, atau BUMN melalui program magang dan beasiswa (Program Magang Lulusan Baru).
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dengan pelaksanaan rekrutmen secara berkala, terutama untuk lulusan SMA, SMK, Diploma, dan Universitas, seperti rekrutmen bersama BUMN, CPNS, PPPK, serta *Officer Development Program*.
7. Memberikan insentif dan stimulus ekonomi (8+4+5), sebagai langkah terpadu pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi antara insentif fiskal, perlindungan sosial, dan akselerasi investasi.

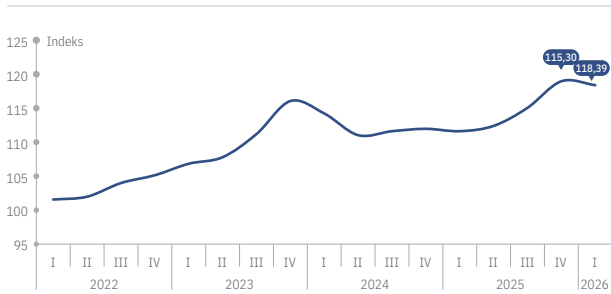
**Nilai tambah penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB relatif terbatas karena produktivitas terhadap PDRB yang relatif rendah.** Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi berdampak pada rendahnya pendapatan per pekerja di LU tersebut. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa

**Tabel 5.2. Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja (Feb 2026)		PDRB ADHK (Tw I 2026)		Nilai Tambah (PDRB/Tenaga Kerja)
	Jumlah (Juta)	Pangsa	Nominal (Rp. Triliun)	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,70	31,76%	46,32	8,85%	6,02
Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,46%	17,52	3,35%	159,28
Industri Pengolahan	3,49	14,38%	161,09	30,76%	46,16
Pengadaan Listrik	0,07	0,30%	1,70	0,32%	24,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,39%	0,51	0,10%	5,66
Konstruksi	1,51	6,23%	47,50	9,07%	31,46
Perdagangan Besar dan Eceran	4,52	18,62%	99,51	19,00%	22,02
Transportasi dan Pergudangan	0,73	2,99%	18,31	3,50%	25,08
Akomodasi dan Makan Minum	1,90	7,83%	32,04	6,12%	16,86
Informasi dan Komunikasi	0,19	0,80%	38,24	7,30%	201,29
Jasa Keuangan	0,27	1,10%	11,96	2,28%	44,29
<i>Real Estate</i>	0,03	0,13%	8,75	1,67%	291,78
Jasa Perusahaan	0,46	1,88%	4,30	0,82%	9,34
Administrasi Pemerintahan	0,57	2,36%	10,03	1,92%	17,60
Jasa Pendidikan	1,11	4,57%	13,77	2,63%	12,40
Jasa Kesehatan	0,39	1,62%	3,99	0,76%	10,22
Jasa Lainnya	1,11	4,58%	8,12	1,55%	7,32
<b>TOTAL</b>	<b>24,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>523,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,59</b>

Sumber: BPS Jatim (diolah)

**Grafik 5.9. Kondisi Ketersediaan Tenaga Kerja**



Sumber: SK Bank Indonesia

Keuangan, dan LU *Real Estate* yang menyerap masing-masing sebesar 14,38%, 0,46%, 0,80%, 1,10%, dan 0,13% tenaga kerja, berkontribusi sebesar 45,37% terhadap PDRB Jawa Timur. Penggunaan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 5.2).

**Pada triwulan I 2026, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tercatat tetap kuat.** Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia Jawa Timur, indeks ketersediaan tenaga kerja pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 116,85. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 115,30 (Grafik 5.9). Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan pertumbuhan PDRB pada triwulan I 2026. Peningkatan kualitas pendidikan serta transisi tenaga kerja ke sektor formal dan sektor dengan nilai tambah lebih tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Jawa Timur.

### 5.3. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

#### 5.3.1. Kesejahteraan Petani

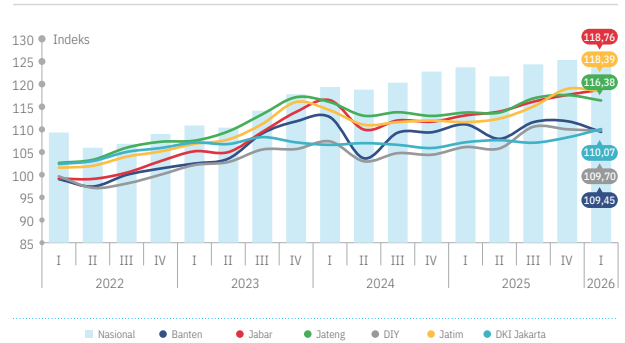
**Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan I 2026 tetap terjaga kuat meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.** Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 118,39, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 118,96. Tetap terjaganya NTP tecermin dari peningkatan penerimaan petani pada subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan. Meski demikian, NTP yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan penerimaan petani pada subsektor tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat. Hal ini sejalan dengan penurunan harga gabah di tingkat produsen, dan penurunan harga kopi dan kakao/cokelat biji seiring dengan adanya panen raya komoditas. NTP Jawa Timur pada triwulan ini berada pada posisi tertinggi kedua di Jawa setelah Jawa Barat (118,76) (Grafik 5.10–5.11).

**NTP yang terjaga sejalan dengan peningkatan penerimaan petani pada subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.** NTP subsektor Tanaman Hortikultura meningkat sebesar 3,93% (qtq), terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan petani hortikultura sayuran. Peningkatan penerimaan ini tecermin dari kenaikan harga cabai rawit, bawang

putih, tomat, dan kol/kubis, yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja produksi cabai rawit yang diiringi curah hujan yang masih tinggi pada triwulan I 2026, berakhirnya masa panen untuk tomat dan kubis, serta peningkatan permintaan saat Ramadan dan Idulfitri. NTP subsektor Peternakan meningkat sebesar 2,32% (qtq), terindikasi didukung oleh kenaikan indeks harga yang diterima peternak unggas dan hasil ternak. Kenaikan tersebut tecermin pada harga komoditas ayam hidup, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang lebih tinggi. NTP subsektor Perikanan juga naik sebesar 4,93% (qtq), sejalan dengan peningkatan penerimaan ikan tangkap maupun hasil budidaya. Peningkatan NTP subsektor peternakan dan perikanan terjadi seiring peningkatan permintaan pada momen Ramadan, perayaan Nyepi, momen Imlek, dan HBKN Idulfitri 2026, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

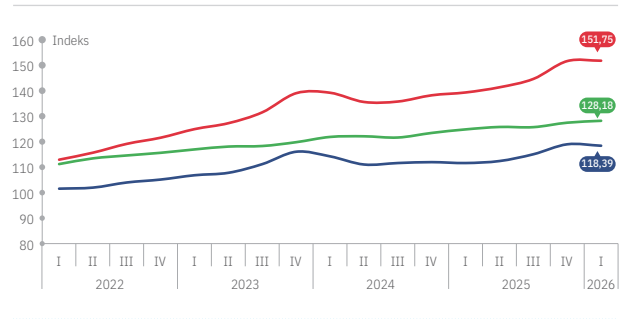
**Nilai konsumsi petani pada triwulan I 2026 meningkat (inflasi) meskipun lebih rendah dibanding triwulan IV 2025.** Hal ini tecermin dari inflasi pedesaan pada triwulan I 2026 yang tercatat 0,58% (qtq), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,39% (qtq) (Grafik 5.13). Peningkatan indeks harga yang diterima petani terutama terjadi pada komoditas tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan. Indeks harga yang dibayarkan petani juga meningkat melebihi kenaikan indeks yang diterima (Tabel 5.3).

**Grafik 5.10. Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa**



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 5.11. NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)**



Sumber: BPS Jatim (diolah)

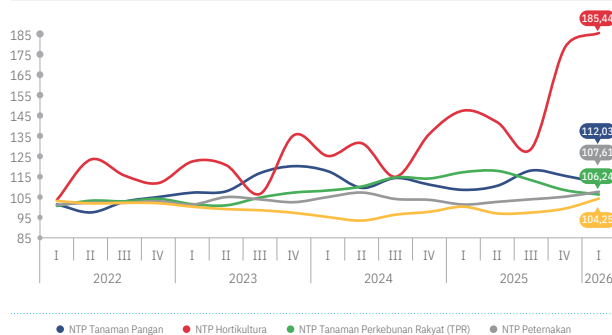
**Tabel 5.3. NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur**

Keterangan	IV 2025	I 2026	Perubahan (%)
<b>Tanaman Pangan</b>			
IT	149,48	145,97	-2,35%
IB	129,56	130,30	0,57%
NTP - P	115,38	112,03	-2,90%
<b>Hortikultura</b>			
IT	226,15	237,11	4,85%
IB	126,74	127,87	0,89%
NTP - H	178,43	185,44	3,93%
<b>Tanaman Perkebunan Rakyat</b>			
IT	135,60	133,67	-1,42%
IB	125,14	125,82	0,54%
NTP - Pr	108,36	106,24	-1,96%

Keterangan	IV 2025	I 2026	Perubahan (%)
<b>Peternakan</b>			
IT	130,54	134,19	2,80%
IB	124,12	124,70	0,47%
NTP - Pt	105,17	107,61	2,32%
<b>Perikanan</b>			
IT	122,41	129,16	5,51%
IB	123,20	123,90	0,57%
NTP - Pi	99,35	104,25	4,93%
<b>Gabungan/ Jawa Timur</b>			
IT	151,61	151,75	0,09%
IB	127,44	128,18	0,58%
NTP - JT	118,96	118,39	-0,48%

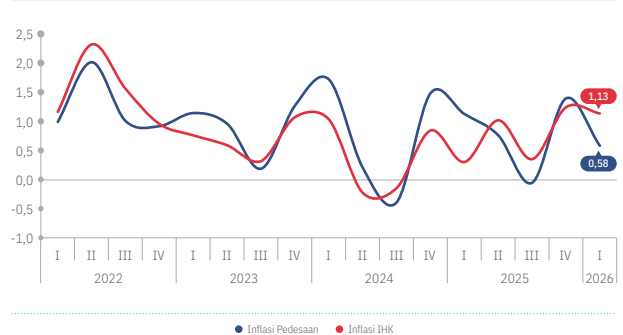
Sumber: BPS Jatim (diolah)

**Grafik 5.12. NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur**



Sumber: BPS Jatim (diolah)

**Grafik 5.13. Inflasi Pedesaan Jawa Timur**



Sumber: BPS Jatim (diolah)

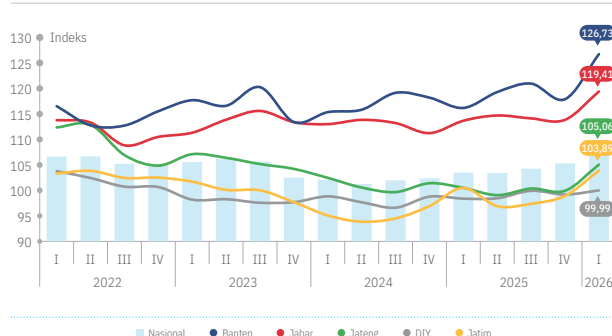
### 5.3.2. Kesejahteraan Nelayan

Tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Timur pada triwulan I 2026 membaik dibanding triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada triwulan I 2026 tercatat 103,89, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2025 yang sebesar 98,93, atau meningkat 5,01% (qtq). Peningkatan kesejahteraan nelayan disokong oleh naiknya penerimaan yang diterima oleh nelayan pada penangkapan di perairan umum dan di laut, di tengah meningkatnya permintaan pada momen Ramadan, perayaan

Nyepi, momen Imlek, dan HBKN Idulfitri 2026, serta dukungan program MBG. Di kawasan Jawa, NTN Jawa Timur berada pada posisi kelima atau terakhir (Grafik 5.14).

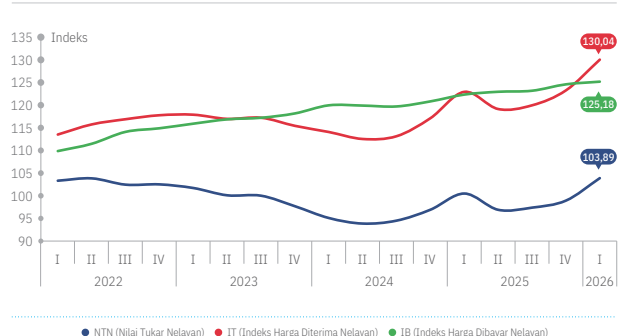
Berdasarkan komponennya, peningkatan NTN di Jawa Timur ditunjang oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan (IT) lebih tinggi dibanding indeks harga yang dibayar (IB). Indeks harga yang diterima nelayan (IT) naik sebesar

**Grafik 5.14. Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa**



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 5.15. NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur**



Sumber: BPS Jatim (diolah)

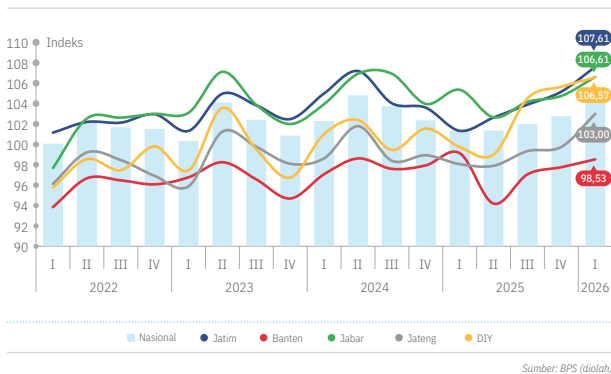
5,50% (qtq) dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya harga komoditas ikan tangkap di perairan umum, dan ikan tangkap laut. Kenaikan indeks harga terjadi pada ikan bandeng, ikan tongkol, ikan kembung, ikan layang, ikan tenggiri, ikan biji nangka, ikan bawal, ikan kakap, ikan belanak, ikan tuna, ikan kerisi, ikan ekor kuning, ikan cacalang, ikan selar, kepiting/rajungan, dan udang. Sementara itu, indeks harga yang dibayar nelayan (IB) naik sebesar 0,47% (qtq) (Grafik 5.15), dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi dan biaya konsumsi rumah tangga nelayan.

### 5.3.3. Kesejahteraan Peternak

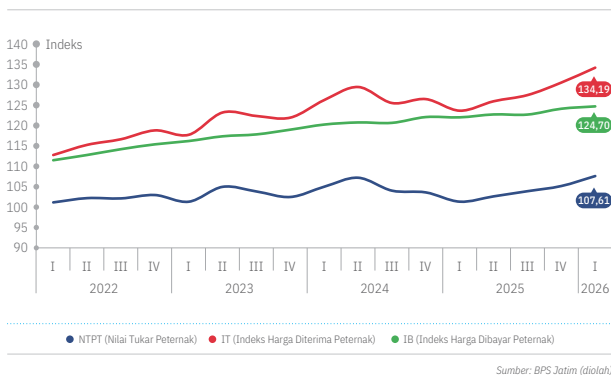
Pada triwulan I 2026, tingkat kesejahteraan peternak di Jawa Timur meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Peternak (NT Peternak) Jawa Timur pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 107,61, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2025 yang sebesar 105,17, atau meningkat 2,32% (qtq). Di kawasan Jawa, NT Peternak Jawa Timur berada pada posisi tertinggi (Grafik 5.16).

Berdasarkan komponennya, tingginya NT Peternak di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima peternak (IT) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (IB) peternak. IT peternak tercatat sebesar 134,19, meningkat 2,79% (qtq) dari triwulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan indeks harga yang diterima hasil ternak pada kelompok unggas dan hasil ternak/unggas. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya produksi yang diiringi peningkatan permintaan pada momen Ramadan, perayaan Nyepi, momen Imlek, dan HBKN Idulfitri 2026, serta dukungan program MBG.

Grafik 5.16. Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPT) Provinsi di Jawa



Grafik 5.17. NT Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur

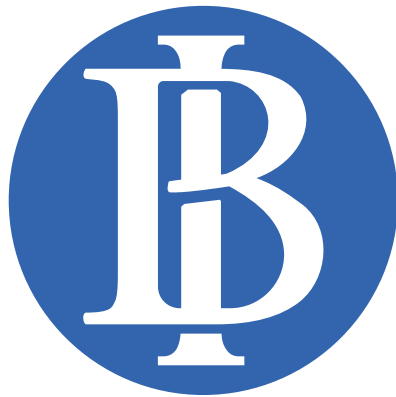


Komoditas penyumbang kenaikan harga indeks antara lain komoditas ayam hidup, daging ayam ras, telur ayam ras, dan telur burung puyuh. Lebih lanjut, IB peternak juga meningkat dari 124,12 pada triwulan IV 2025 menjadi 124,70 pada triwulan I 2026, atau naik sebesar 0,46% (qtq) (Grafik 5.17). Kenaikan IB ini sejalan dengan meningkatnya biaya untuk pengeluaran konsumsi maupun biaya produksi.

## 5.4. Kesejahteraan

Pada semester I 2026, tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan membaik dibandingkan semester II 2025. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat 5,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,15% (yoy). Potensi peningkatan kesejahteraan juga diindikasikan dengan peningkatan kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur yang tecermin dari penurunan TPT menjadi sebesar 3,55%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,71%. Perbaikan kesejahteraan juga sejalan dengan tingkat inflasi yang diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran.

Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pra-sejahtera, serta melalui program Insentif Stimulus Ekonomi diperkirakan turut menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan (penanggulangan kemiskinan) di Jawa Timur terus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makroekonomi maupun intervensi program. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029, pemerintah Jawa Timur menuangkan visi pengentasan kemiskinan dalam visi pertama Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Sejahtera. Misi Jatim Sejahtera menasar terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dengan indikator Jumlah Penduduk yang menerima Bantuan Perlindungan Sosial dengan target 84.379 penerima manfaat. Program prioritas Jatim Sejahtera mencakup program bantuan sosial dan pemberantasan kemiskinan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrem, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Keluarga Penerima Manfaat Jawa Timur Wani Sejahtera (KPM Jawara), Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera (Putri Jawara), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Wani Sejahtera (PPKS Jawara), Elektrifikasi, Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), Jambanisasi, Jatim *Infinity*, dan Pengurangan Beban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Selain itu, Jatim Sejahtera juga mencantumkan program prioritas terkait pemberdayaan, seperti Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Desa Devisa, Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa Plus), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Inklusif Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), dan Desa Berdaya. Lebih lanjut, program Insentif Stimulus Ekonomi (8+4+5) Pemerintah, sebagai langkah terpadu untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi antara insentif fiskal, perlindungan sosial, dan akselerasi investasi, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.





06.

# Prospek Ekonomi Daerah



## 6.1. Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026

Perekonomian global masih berada dalam fase moderasi dengan ketidakpastian yang tetap tinggi, dipengaruhi fragmentasi geopolitik dan geoekonomi, pengetatan kondisi keuangan global yang masih berlangsung, serta berlanjutnya restriksi perdagangan. Berdasarkan *World Economic Outlook* oleh *International Monetary Fund*, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diprakirakan berada pada kisaran 3,0% (yoy), melambat dibandingkan realisasi 2025 sekitar 3,4% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dan komoditas global yang tinggi, serta disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menunjukkan resiliensi yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya, didukung konsumsi rumah tangga yang solid, pasar tenaga kerja yang kuat, serta ekspansi investasi pada sektor teknologi, khususnya terkait *artificial intelligence*. Namun demikian, ruang ekspansi ke depan diprakirakan terbatas seiring pengetatan fiskal bertahap dan mulai melemahnya momentum konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan di Tiongkok cenderung melambat akibat tekanan sektor properti, lemahnya permintaan domestik, serta tantangan struktural jangka panjang. Ekonomi Jepang diprakirakan tumbuh moderat dengan dukungan normalisasi kebijakan moneter, meskipun masih dibayangi lemahnya konsumsi domestik. Di sisi lain, India tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan global dengan kinerja relatif kuat, meskipun mengalami moderasi seiring perlambatan global. Kelompok *Emerging Market and Developing Economies*, termasuk ASEAN-5, masih mencatatkan pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding negara maju, ditopang permintaan domestik, urbanisasi, dan bonus demografi. Namun demikian, kawasan ini tetap menghadapi risiko pelemahan permintaan eksternal, volatilitas arus modal global, tekanan nilai tukar, serta meningkatnya risiko pembiayaan eksternal akibat kondisi likuiditas global yang ketat. Sejalan dengan itu, prospek perdagangan global masih terbatas dengan volume perdagangan yang tumbuh di bawah rata-rata historis akibat meningkatnya proteksionisme dan realokasi rantai pasok global (*supply chain reconfiguration*). Dalam konteks tersebut, kinerja ekspor, investasi, dan sektor keuangan domestik negara-negara ASEAN-5 menjadi semakin sensitif terhadap dinamika global. Oleh karena itu, penguatan bauran kebijakan makroekonomi dan makroprudensial, akselerasi reformasi struktural, serta pendalaman pasar domestik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan eksternal dan kesinambungan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diprakirakan tetap kuat dan stabil, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan berada pada kisaran 4,9%–5,7% (yoy), dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik. Dari sisi permintaan, investasi diprakirakan meningkat, didorong oleh kelanjutan proyek infrastruktur pemerintah, proyek strategis Danantara, kelanjutan investasi *multiyears* oleh swasta, serta

program hilirisasi sumber daya alam, sehingga memperkuat kapasitas produksi domestik. Ekspor nonmigas tetap menunjukkan kinerja positif meskipun dibayangi perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas, didukung daya saing produk hilir, stabilnya permintaan negara mitra terhadap komoditas unggulan, serta diversifikasi pasar. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap terjaga sejalan dengan daya beli yang stabil dan dukungan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program prioritas yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi, terutama Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh manfaat dari hilirisasi dan peningkatan kapasitas produksi domestik. Sektor terkait pembangunan dan konektivitas, seperti konstruksi serta transportasi, pergudangan, dan kawasan industri, juga memberikan kontribusi positif. Selain itu, sektor berbasis konsumsi dan digitalisasi—meliputi Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi—diprakirakan tetap tumbuh kuat seiring perbaikan permintaan domestik. Kinerja tersebut turut didukung oleh sektor jasa lainnya, termasuk Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sehingga secara keseluruhan menopang prospek pertumbuhan ekonomi 2026 yang tetap solid dan berimbang.

Sejalan dengan trajektori pemulihan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2026 diprakirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2025, ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan eksternal dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diprakirakan berada pada bias atas dari titik tengah kisaran proyeksi sebesar 4,9%–5,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025. Dari sisi permintaan, kuatnya kinerja ekonomi Jawa Timur diprakirakan bersumber dari perbaikan konsumsi swasta, investasi, serta ekspor. Dari sisi

Tabel 6.1. Prospek Perekonomian Dunia

Negara	2023	2024	2025	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,3	3,0
Negara Maju	1,7	1,8	1,9	1,7
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	0,4	0,9	1,4	0,9
Jepang	1,5	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	4,4	4,3	4,4	3,9
Tiongkok	5,2	5,0	5,0	4,5
India	7,7	6,5	7,6	6,5
ASEAN-5	4,0	4,6	4,5	4,0
Amerika Latin	2,4	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	3,3	3,4	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	2,0	2,4	3,6	2,6

Sumber: IMF *World Economic Outlook*. \*Proyeksi Bank Indonesia

penawaran, sejalan dengan prospek peningkatan konsumsi swasta dan realisasi investasi, kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, lanskap perekonomian global yang relatif kondusif, ditopang oleh membaiknya kinerja ekonomi mitra dagang strategis Jawa Timur, diperkirakan membuka ruang bagi ekspansi ekspor luar negeri (LN) sekaligus mendorong penguatan investasi nonbangunan pada tahun 2026. Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2025, selaras dengan berlanjutnya realisasi proyek infrastruktur pemerintah dan swasta, akselerasi pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta *multiplier effect* dari berbagai kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diluncurkan pada tahun 2025 diperkirakan memasuki fase realisasi sesuai tahapan pada tahun 2026.

### 6.1.1. Sisi Permintaan

#### Konsumsi Swasta (Konsumsi RT dan Konsumsi LNPRT)

Konsumsi swasta di Jawa Timur pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, didukung oleh terjaganya daya beli sejalan dengan inflasi yang terkendali dan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif kondusif, serta didukung berlanjutnya pemulihan mobilitas dan meningkatnya kapasitas belanja masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh peningkatan pendapatan pada sektor-sektor berorientasi ekspor seiring prospek perbaikan permintaan eksternal yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah. Dari sisi kebijakan, penguatan konsumsi turut ditopang oleh keberlanjutan serangkaian stimulus fiskal dan program nasional di Indonesia yang diarahkan pada stabilisasi harga pangan dan energi, optimalisasi program perlindungan sosial dan bantuan sosial terarah, serta stimulus konsumsi (a.l pemberian subsidi/insentif terkait perumahan dan transportasi publik) untuk menjaga daya beli dan mendorong permintaan domestik. Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat diperkirakan mengalihkan sebagian pengeluaran pangan keluarga berpenghasilan rendah ke kebutuhan lain, sehingga secara efektif meningkatkan disposable income riil masyarakat serta keterlibatan langsung pesantren di Jawa Timur sebagai penerima manfaat program MBG diperkirakan mendorong peningkatan aktivitas dan pengeluaran lembaga-lembaga keagamaan, yang pada gilirannya memberikan impuls positif bagi pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT di Jawa Timur pada 2026. Prakiraan perbaikan konsumsi swasta terindikasi dari Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK) di Jawa Timur triwulan I 2026 yang mencerminkan ekspektasi kondisi ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026, yakni sebesar 134,6 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Jawa Timur hingga triwulan IV 2025, dan IKE pada Maret 2026, yakni masing-masing sebesar 115,7 dan 118,13.

## Investasi

**Investasi Jawa Timur diperkirakan meningkat pada tahun 2026, terutama ditopang oleh penguatan investasi nonbangunan seiring berlanjutnya ekspansi kapasitas produksi di kawasan industri strategis, serta investasi bangunan yang tetap tumbuh kuat sejalan dengan percepatan realisasi berbagai proyek infrastruktur.** Potensi peningkatan investasi Jawa Timur pada 2026 utamanya bersumber dari berlanjutnya arus masuk investasi baru di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, yang semakin menguat seiring peningkatan infrastruktur, konektivitas, serta iklim investasi yang kondusif. Berlanjutnya pembangunan PSN dan proyek Perpres No. 80 Tahun 2019, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan pendukung investasi baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menjadi penopang penting bagi kinerja investasi Jawa Timur pada 2026. Di tingkat nasional, keberlanjutan implementasi regulasi kemudahan berusaha, pemberian berbagai insentif fiskal dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus, serta paket stimulus penguatan investasi yang diluncurkan pada 2025 diperkirakan semakin memperkuat daya tarik investasi Jawa Timur. Dari sisi swasta, prospek investasi Jawa Timur pada 2026 diperkirakan juga ditopang oleh berlanjutnya pembangunan dan ekspansi sejumlah proyek strategis bernilai besar, khususnya di kawasan industri. Di KEK Gresik-JIPE, serangkaian proyek hilirisasi berskala besar mencakup industri pengolahan logam mulia, kaca dan panel surya, serta industri kimia terintegrasi diperkirakan memasuki fase produksi komersial maupun konstruksi lanjutan pada 2026, yang pada gilirannya mendorong peningkatan investasi nonbangunan secara lebih signifikan. Lebih lanjut, prospek aktivitas produksi yang ekspansif, sebagaimana tecermin dari PMI Manufaktur Indonesia (di atas level 50) yang diperkirakan tetap berada pada area ekspansi, turut mendukung akselerasi investasi di Jawa Timur pada tahun 2026.

## Ekspor dan Impor

**Kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif disokong oleh solidnya perdagangan LN di tengah dinamika ketidakpastian global dan penguatan aktivitas domestik.** Di sisi permintaan eksternal, kondisi mitra dagang utama Jawa Timur diperkirakan bervariasi. Amerika Serikat sebagai pangsa ekspor nonmigas terbesar Jatim diperkirakan tetap tumbuh moderat. Tiongkok yang juga merupakan mitra dagang strategis Jatim diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat perlambatan struktural sektor properti dan melemahnya permintaan domestik. Jepang turut diperkirakan mencatatkan pertumbuhan yang lebih moderat, sedangkan kawasan Eropa dan ASEAN-5 diperkirakan relatif stabil meski juga tidak terlepas dari tekanan global. India menjadi satu-satunya mitra dagang besar yang diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan tinggi, membuka peluang diversifikasi pasar ekspor Jawa Timur. Selain itu, posisi tarif Indonesia yang lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya membuka ruang strategis bagi

Jawa Timur untuk merebut pangsa pasar yang selama ini dinikmati negara-negara pesaing, khususnya untuk produk alas kaki, tekstil, dan manufaktur ringan. Kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah turut menjadi faktor penekan daya saing ekspor, mengingat dampaknya terhadap biaya produksi industri pengolahan dan logistik. Implementasi Perjanjian CEPA Indonesia-EU berpotensi meningkatkan akses pasar untuk ekspor nonmigas Jawa Timur ke Eropa, meski tantangan kepatuhan regulasi deforestasi UE perlu diantisipasi. Di sisi kebijakan, penguatan fasilitas kepabeanan dan insentif KITE, penyederhanaan tata niaga ekspor/impor untuk industri pengolahan, serta penataan arus devisa ekspor diprakirakan mendukung kelancaran aliran barang dan pembiayaan perdagangan luar negeri Jawa Timur pada 2026. Upaya diversifikasi pasar ekspor ke kawasan India, Amerika Latin, dan Afrika yang tengah diintensifkan pemerintah, serta stimulus ekspor nonmigas Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bantuan promosi dagang, sertifikasi halal, festival ekspor, desa devisa, dan misi dagang, diprakirakan turut mengakselerasi kinerja ekspor Jawa Timur ke depan.

Kebutuhan impor bahan baku diprakirakan tetap tinggi sejalan dengan ekspansi kapasitas industri pengolahan, hilirisasi, serta realisasi investasi PSN dan swasta. Dari sisi aktivitas domestik, penguatan permintaan dalam negeri diprakirakan menjadi penopang penting bagi kinerja impor Jawa Timur pada 2026. Solidnya konsumsi rumah tangga, akselerasi realisasi investasi baik yang bersumber dari PSN maupun swasta, serta berlanjutnya ekspansi kapasitas produksi di kawasan industri strategis diprakirakan mendorong peningkatan kebutuhan impor bahan baku dan barang modal. Hal ini berimplikasi positif bagi industri pengolahan berorientasi ekspor, sekaligus mencerminkan keterkaitan erat antara dinamika permintaan domestik dan arus perdagangan luar negeri Jawa Timur.

### 6.1.2. Sisi Lapangan Usaha

#### LU Industri Pengolahan

**Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan di Jawa Timur pada 2026 diprakirakan tumbuh solid, ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal.** Kinerja LU Industri Pengolahan Jawa Timur diprakirakan ditopang oleh penguatan hilirisasi dan dukungan kebijakan makro-fiskal yang kondusif di tengah ketidakpastian permintaan global, potensi tekanan biaya produksi domestik, serta dinamika harga komoditas. Dari sisi domestik, peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat, perbaikan keyakinan konsumen, serta inflasi yang terkendali menjadi faktor pendorong utama peningkatan kinerja industri pengolahan, khususnya pada subsektor makanan dan minuman, kimia-farmasi, serta logam dasar. Solidnya permintaan domestik sebagai penopang utama industri pengolahan juga tecermin dari kinerja PMI Manufaktur Indonesia triwulan I 2026 yang konsisten berada pada fase ekspansi. Pendorong utama ekspansi berasal dari permintaan domestik yang masih cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penjualan ritel yang positif, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar.

Subsektor dengan kinerja ekspansi tertinggi meliputi industri kulit dan alas kaki serta industri makanan dan minuman yang merupakan dua subsektor yang memiliki basis produksi besar di Jawa Timur yang diprakirakan melanjutkan tren positif pada tahun 2026.

Sementara itu, dari sisi penawaran, kapasitas produksi diprakirakan meningkat seiring dengan penguatan permintaan eksternal dan akselerasi penyelesaian proyek hilirisasi di kawasan industri strategis. Subsektor logam dasar dan kimia tergolong sebagai *sunrise industry* karena memiliki pertumbuhan tinggi dan prospek ekspansi yang kuat, tidak terlepas dari kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Perkembangan tersebut meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi sekaligus mendorong penambahan kapasitas baru pada sejumlah subsektor industri, sehingga memperkuat kemampuan produksi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri. Di sisi lain, tantangan berupa volatilitas pasar keuangan global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan risiko geopolitik konflik Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak, serta kendala jaminan konsistensi bahan baku dan rendahnya adopsi teknologi modern, perlu diantisipasi sebagai faktor penahan yang dapat meredam laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan. Dari sisi eksternal, kinerja industri pengolahan nasional diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi pada triwulan II 2026, dengan ekspansi terutama didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan. Kondisi ini, dikombinasikan dengan upaya diversifikasi pasar ekspor dan penguatan daya saing produk berbasis hilirisasi, diprakirakan memberikan faktor pendorong positif bagi keberlanjutan pertumbuhan LU Industri Pengolahan Jawa Timur pada 2026.

#### LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Jawa Timur pada 2026 diprakirakan tetap mencatatkan pertumbuhan yang moderat dan resilien, selaras dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang terjaga serta kuatnya permintaan domestik.** Konsumsi rumah tangga yang diprakirakan tetap solid ditopang oleh mobilitas masyarakat yang terjaga, prospek perbaikan pendapatan riil, dan stabilitas daya beli di tengah inflasi yang terkendali menjadi motor penggerak utama kinerja LU Perdagangan Jawa Timur. Penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis desa diprakirakan memberikan kontribusi nyata bagi aktivitas perdagangan Jawa Timur pada 2026. Kehadiran simpul-simpul distribusi baru di tingkat pedesaan yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi secara terintegrasi diprakirakan memperluas jangkauan perdagangan kebutuhan pokok, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil. *Multiplier effect* dari penguatan kelembagaan ekonomi desa ini, dikombinasikan dengan berlanjutnya berbagai stimulus fiskal dan program perlindungan sosial pemerintah serta pelaksanaan

program padat karya, diperkirakan secara kolektif menopang aktivitas perdagangan di berbagai lapisan ekonomi Jawa Timur. Lebih lanjut, akselerasi adopsi *platform digital* dan *e-commerce* oleh pelaku UMKM Jawa Timur diperkirakan semakin memperluas pangsa pasar, sejalan dengan tren pertumbuhan transaksi perdagangan digital yang terus menguat secara nasional. Perbaikan kinerja ekspor khususnya pada industri pengolahan turut berpotensi mengakselerasi aktivitas distribusi dan perdagangan antardaerah melalui penguatan permintaan antara dan peningkatan pendapatan domestik. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, permintaan domestik yang solid dan kinerja ekspor yang tetap positif diperkirakan menjadi penopang utama bagi berlanjutnya pertumbuhan LU Perdagangan Jawa Timur pada 2026, meski dinamika global dan volatilitas harga komoditas tetap perlu dicermati sebagai faktor risiko yang dapat memengaruhi laju pertumbuhannya.

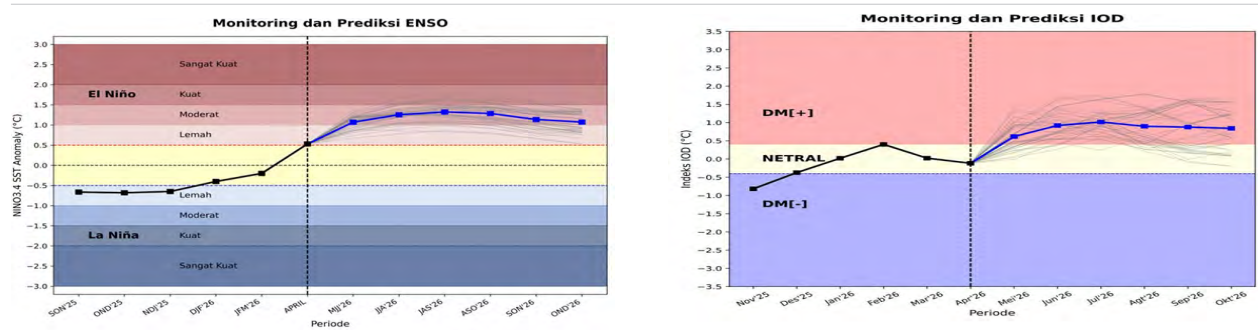
### LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian di Jawa Timur pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pergeseran kondisi iklim yang perlu diantisipasi. Dinamika cuaca pada 2026 menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada awal 2026, fase La Niña lemah masih bertahan dan berkontribusi terhadap peningkatan potensi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, sebelum kondisi ENSO berangsur beralih menuju fase netral pada Februari hingga Maret 2026. Namun, pemodelan iklim BMKG mengindikasikan bahwa ENSO berpotensi berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026, dengan prediksi intensitas pada kategori lemah hingga moderat, yang diperkirakan berdampak pada pola tanam dan ketersediaan air irigasi, khususnya pada periode pertengahan hingga akhir tahun. Musim kemarau 2026 diprediksi akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya, sehingga menjadi faktor yang perlu dimitigasi agar tidak menahan laju produksi pertanian secara lebih dalam. Kendati demikian, berbagai langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah termasuk penjagaan pasokan air irigasi melalui optimalisasi bendungan dan infrastruktur pengairan diperkirakan dapat meredam dampak negatifnya secara signifikan.

Di sisi hulu, keberlanjutan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk penyelesaian sejumlah bendungan strategis, diharapkan memperluas cakupan layanan air irigasi dan mendorong peningkatan indeks pertanaman. Program intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura tetap menjadi prioritas, meliputi pendampingan teknis budidaya, optimalisasi luas tanam padi dan jagung, serta penerapan teknologi pertanian berbasis data untuk efisiensi input produksi. Penguatan sarana produksi dilakukan melalui pemanfaatan pupuk bersubsidi, distribusi benih unggul, dan modernisasi alat mesin pertanian. Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan, termasuk *replanting* perkebunan rakyat (antara lain tebu, kakao, kopi, kelapa), penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan hilirisasi hasil pertanian, diharapkan memperkuat rantai nilai hulu, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di sektor kehutanan.

Di sisi hilir, penguatan cadangan pangan pemerintah dan pelaksanaan program stabilisasi harga yang dikoordinasikan Badan Pangan Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah diperkirakan menjaga keberlanjutan distribusi dan stabilitas harga. Program kesehatan hewan dan peningkatan populasi ternak mencakup vaksinasi, pemberian pakan, dan program regenerasi peternakan rakyat diharapkan mempertahankan insentif produksi dan daya saing subsektor peternakan, sekaligus memberi prospek pemulihan produksi daging dan susu sapi di Jawa Timur. Dukungan terhadap akses pasar, logistik, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM pertanian dan perikanan diperkirakan memperkuat rantai hilir, sehingga hasil produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terserap secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor primer dan agroindustri. Secara keseluruhan, sinergi antara penguatan infrastruktur hulu, intensifikasi produksi, modernisasi sarana pertanian, pengembangan agribisnis, dan pengelolaan rantai hilir diperkirakan menjadi fondasi yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja LU Pertanian Jawa Timur pada 2026, sekaligus mendukung ketahanan pangan, pemulihan sektor perikanan, dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal. Di sisi lain, potensi tekanan dari kondisi iklim pada paruh kedua tahun, biaya pakan yang meningkat, dan volatilitas harga komoditas tetap perlu dicermati sebagai faktor risiko yang dapat memoderasi laju pertumbuhan LU Pertanian Jawa Timur sepanjang 2026.

Grafik 6.1. Prediksi El Niño/La Niña 2025-2026



Sumber: BMKG, Mei 2026

## LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi Jawa Timur pada 2026 diprakirakan tetap mencatatkan pertumbuhan positif, ditopang oleh sinergi antara keberlanjutan proyek infrastruktur strategis pemerintah dan ekspansi investasi swasta di kawasan industri, kendati dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pemerintah, momentum pertumbuhan LU Konstruksi diprakirakan bersumber dari akselerasi penyelesaian proyek infrastruktur berskala besar yang masuk dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres No. 80 Tahun 2019 beserta regulasi pelaksanaannya. Berlanjutnya pembangunan ruas tol strategis (termasuk Tol Probolinggo–Banyuwangi dan Tol Kediri–Tulungagung yang terhubung dengan Bandara Internasional Dhoho), jalur kereta api, dan bendungan diharapkan menjadi tulang punggung yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Dari sisi swasta, pertumbuhan konstruksi diprakirakan didorong oleh berlanjutnya pembangunan dan perluasan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) beserta fasilitas pendukungnya, termasuk infrastruktur logistik dan pelabuhan. Aktivitas ini secara langsung memperkuat permintaan pekerjaan konstruksi non-residential dan utilitas, sekaligus meningkatkan nilai proyek swasta di sektor industri dan logistik. Akselerasi pembangunan SPPG dalam kerangka program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih di ribuan desa Jawa Timur juga diprakirakan memberikan kontribusi tambahan bagi aktivitas konstruksi, khususnya di wilayah perdesaan.

Di sisi lain, tekanan pada kapasitas fiskal menjadi faktor penahan yang perlu dicermati. Ruang fiskal pemerintah daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun 2026 relatif terbatas sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan melakukan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, sehingga mempersempit ruang gerak belanja modal untuk infrastruktur. Kondisi tersebut berpotensi memoderasi kontribusi investasi fisik pemerintah daerah terhadap LU Konstruksi di Jawa Timur. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, khususnya pada Dana Alokasi Khusus fisik, berpotensi berdampak signifikan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah, serta mengurangi efek pengganda di sektor riil daerah. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa anggaran belanja yang tersedia akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, sehingga dampak perlambatan belanja fiskal daerah terhadap kinerja konstruksi diprakirakan dapat dimitigasi secara terukur melalui penajaman prioritas dan penguatan sinergi dengan pembiayaan pusat dan swasta.

## LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jawa Timur pada 2026 diprakirakan tetap mencatatkan pertumbuhan positif, selaras dengan penguatan permintaan

domestik, berlanjutnya program stimulus pemerintah (insentif permintaan, program padat karya, dukungan UMKM dan pariwisata), serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan perdagangan ritel. Dari sisi permintaan, stabilitas daya beli masyarakat yang ditopang oleh inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran, prospek perbaikan pendapatan riil, serta meningkatnya keyakinan konsumen diprakirakan mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat untuk kegiatan wisata dan kuliner di Jawa Timur. Penjualan ritel yang diprakirakan tetap tumbuh positif sepanjang 2026 mencerminkan masih terjaganya permintaan domestik, meskipun kecenderungan masyarakat untuk lebih selektif dalam belanja non-esensial perlu dicermati sebagai faktor pemoderasi laju pertumbuhan, khususnya pada segmen akomodasi. Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok prioritas di Jawa Timur diprakirakan turut memperkuat permintaan terhadap jasa penyediaan makanan secara lebih berkelanjutan. Dari sisi pariwisata, konsistensi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah event unggulan terbanyak dalam Karisma Event Nusantara (KEN) diprakirakan semakin memperkuat daya tarik wisata daerah dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sepanjang 2026, yang pada gilirannya mengakselerasi permintaan terhadap akomodasi dan layanan makan minum. Keberlanjutan paket stimulus ekonomi pemerintah, termasuk insentif permintaan, dukungan UMKM, serta program padat karya, diprakirakan turut memperkuat ekosistem usaha di sektor ini. Kendati demikian, konsolidasi fiskal pemerintah melalui pengetatan belanja nonprioritas dalam APBN 2026 yang diikuti dengan penyesuaian serupa dalam APBD Provinsi Jawa Timur diprakirakan menjadi faktor penahan bagi segmen *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, khususnya yang bersumber dari permintaan pemerintah atas kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan penyelenggaraan *event* seremonial berskala besar. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan diversifikasi segmen pasar MICE ke arah permintaan swasta dan internasional sebagai sumber pertumbuhan alternatif, agar keberlanjutan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada 2026 tetap terjaga secara optimal.

## 6.2. Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2026

Inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy) dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Prospek inflasi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong dan penahan inflasi baik dari sisi global maupun domestik. Dari sisi eksternal, faktor utama pendorong inflasi berasal dari risiko (i) *Imported inflation* masih perlu diwaspadai seiring berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global dan meningkatnya volatilitas harga sejumlah komoditas dunia, khususnya komoditas energi; serta (ii) Prakiraan terjadinya fenomena El Niño dan kekeringan sejak bulan Juni hingga akhir tahun 2026 yang berpotensi memberikan disrupsi produktivitas komoditas pangan. Sementara itu, dari sisi domestik, terdapat faktor pendorong inflasi antara lain (i) Peningkatan permintaan

masyarakat didukung kenaikan UMP/UMK; (ii) Dampak rambatan lanjutan atas peningkatan harga energi di tingkat domestik kepada berbagai kelompok komoditas; (iii) Mobilitas masyarakat seiring banyaknya momen libur panjang; serta (iv) peningkatan penyerapan komoditas pangan strategis dalam rangka penguatan dan perluasan pelaksanaan program Prioritas Pemerintah. Namun demikian, berbagai faktor penahan inflasi diperkirakan tetap kuat mendukung terjaganya inflasi, terutama ditopang oleh (i) Prospek produksi pangan Jawa Timur yang tetap kuat; (ii) Dukungan program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional; (iii) Komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas Komponen Harga yang Diatur oleh Pemerintah (*administered prices*), serta (iv) Penguatan sinergi pengendalian inflasi TPID melalui implementasi Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur dan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

**Dari sisi penawaran, risiko *imported inflation* dari kenaikan harga komoditas energi dunia menjadi tantangan utama yang saat ini dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia.** Rerata harga komoditas energi dunia mengalami peningkatan dibandingkan posisi pada awal tahun, khususnya minyak dunia seiring disrupsi pasokan akibat konflik geopolitik di timur tengah. Harga minyak dunia WTI mencatatkan peningkatan harga yang signifikan dari rerata harga di tahun 2025 senilai USD64,5/bbl menjadi USD98,6/ bbl atau meningkat sebesar 53%. Selain itu, harga batu bara dan gas alam dunia turut mengalami peningkatan masing-masing senilai 21% dan 6%, di mana rerata harga batu bara pada tahun 2025 senilai USD108,4/metric ton menjadi USD130,9/metric ton pada bulan April 2026 dan index world bank untuk harga gas alam dunia pada tahun 2025 tercatat sebesar 107,8 menjadi 114,8. Selain itu, harga pupuk dunia turut mengalami peningkatan di mana rerata harga pada tahun 2025 sebesar 138,7 menjadi 208,7 pada bulan April 2026 atau meningkat sebesar 50%. Adapun berbagai institusi dunia memprakirakan bahwa harga komoditas dunia pada tahun 2026 meningkat cukup signifikan. Dalam laporan *Commodity Markets Outlook* (April, 2026), Bank Dunia memprakirakan harga komoditas dunia secara rerata meningkat sebesar 24% pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Selain harga komoditas energi dunia, harga emas dunia turut diperkirakan meningkat sebesar 36% pada tahun 2026 dibandingkan rerata harga pada tahun 2025 yang mencatatkan harga senilai USD3.442/toz, di mana pada bulan April 2026 mencatatkan harga senilai USD4.721/toz. Prakiraan kenaikan turut terjadi pada harga minyak sawit dunia sebesar 8% pada tahun 2026 dibandingkan rerata harga pada tahun 2025 yang tercatat sebesar USD1.007/metric ton, di mana pada bulan April 2026 mencatatkan harga senilai USD1.148/metric ton. Perkembangan harga komoditas yang telah menunjukkan kenaikan signifikan pada April 2026 dan prakiraan rerata harga sepanjang tahun 2026 yang tinggi terjadi seiring disrupsi pasokan di timur tengah akibat konflik geopolitik di tengah peningkatan kebutuhan untuk rumah tangga dan industri, khususnya industri terkait *artificial intelligence* dan biofuel sebagai substitusi minyak dunia.

**Berdasarkan prakiraan iklim berbagai lembaga pusat iklim dunia terkini, terdapat potensi terjadinya kemarau dan kekeringan sejak bulan Mei-Juni-Juli yang berisiko mendisrupsi produktivitas komoditas pangan.** Indeks El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) (Gambar 7.1) menunjukkan adanya potensi El Niño di Jawa Timur dan kemarau serta kekeringan yang dimulai sejak bulan Juni 2026 (Gambar 7.2 dan 7.3) dan lebih panjang dari pola historisnya di beberapa daerah sentra produsen. El Niño di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada periode bulan Juni 2026 hingga akhir tahun 2026 (Gambar 7.4, 7.5, 7.6) pada level moderat dengan potensi peningkatan suhu sebesar 1 – 1,5°C diikuti dengan IOD di level positif hingga Oktober 2026 di mana keduanya menjadi faktor utama yang mempengaruhi peningkatan suhu, kemarau, dan kekeringan. Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan di Jawa Timur berada pada level yang rendah sejak bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026, cenderung lebih cepat dan lama dibandingkan provinsi lain di Indonesia sejalan dengan prakiraan iklim El Niño moderat dan IOD positif (Gambar 7.7). Kondisi iklim dan cuaca tersebut berpotensi memberikan tantangan pada produksi komoditas pangan di tengah periode musim tanam dan dapat berdampak pada mundurnya musim panen raya di tengah kebutuhan yang tinggi pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun 2027 yang akan datang lebih cepat dibandingkan tahun 2026. Di sisi lain, kondisi kemarau tersebut berpotensi mendukung kinerja komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai di tahun 2026 sehingga turut mendukung stabilitas harga khususnya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

**Dari sisi permintaan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong inflasi.** Pertama, peningkatan permintaan masyarakat didukung kenaikan gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan rerata sebesar 6% di tengah suku bunga BI Rate yang tetap rendah. Kedua, dampak rambatan lanjutan atas peningkatan harga energi di tingkat domestik khususnya kenaikan harga bensin dan solar non-subsidi, gas rumah tangga non-subsidi, solar industri, serta avtur kepada berbagai kelompok komoditas. Ketiga, peningkatan mobilitas masyarakat seiring banyaknya momen libur panjang khususnya pada periode triwulan II 2026. Keempat, potensi peningkatan penyerapan produksi komoditas pangan strategis seiring intensifikasi dan ekstensifikasi penerapan program Makan Bergizi Gratis, meski berdasarkan prognosis, pasokan komoditas pangan strategis tetap mencukupi untuk Jawa Timur didukung implementasi program prioritas Pemerintah yang mendorong produktivitas pangan. Adapun harga sewa/kontrak rumah dan biaya pendidikan diperkirakan turut mendorong inflasi sebagaimana pola historis tahunan, khususnya pada periode awal dan tengah tahun.

Selama tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mendukung terjaganya inflasi. Pertama, prospek produksi pangan Jawa Timur yang tetap kuat di tengah potensi disrupsi akibat El Niño dan kekeringan. Prakiraan produksi komoditas pertanian yang tetap kuat. Berdasarkan prakiraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi komoditas padi pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 didukung berbagai bauran kebijakan dan program Pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun demikian, prakiraan iklim yang cenderung kering seiring fenomena El Niño moderat sejak bulan Juni hingga Desember 2026 berpotensi menekan produktivitas komoditas padi yang perlu diwaspadai dampaknya khususnya pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri tahun 2027 saat terjadi peningkatan permintaan secara musiman serta mempertimbangkan bobot komoditas beras yang besar dalam perhitungan inflasi. Kedua, dukungan program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional, seperti penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan percepatan penguatan infrastruktur irigasi pertanian. Ketiga, komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas komoditas harga yang diatur oleh Pemerintah (*administered prices*). Berdasarkan perkembangan terkini, belum terdapat rencana penyesuaian harga komoditas di level nasional seperti pertalite, pertamax, solar, tarif listrik, cukai rokok serta di level daerah seperti tarif air minum, gas LPG 3Kg sehingga diperkirakan turut mendukung stabilitas harga di tahun 2026 baik di level nasional maupun Jawa Timur. Keempat, penguatan sinergi pengendalian inflasi TPID melalui implementasi Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur dan penguatan program pengendalian inflasi dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diluncurkan secara nasional pada tanggal 13 Mei 2026 di Jawa Timur.

Meski terdapat potensi El Niño serta kekeringan pada tahun 2026, komoditas pangan dan hortikultura secara umum diperkirakan tetap surplus untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur pada tahun 2026 didukung berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah. Berdasarkan prakiraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi komoditas pangan meningkat meski komoditas hortikultura cenderung termoderasi pada tahun 2026 (tetap surplus) didukung berbagai program prioritas Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Beberapa program penguatan produktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan) Provinsi Jawa Timur a.l. (i) intensifikasi pelatihan produsen dan perluasan program *Good Handling Practices* (GHP); (ii) kampanye konsumsi komoditas pertanian Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA); (iii) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); (iv) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT); (v) peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan pengembangan kawasan agropolitan; (vi) distribusi alsintan modern dan saprodi melalui gapoktan; (vii) penguatan kesiapan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (viii) penajaman cakupan dan akurasi data neraca pangan sebagai fondasi untuk mendukung perumusan

kebijakan dan pelaksanaan program; serta (ix) pengamanan hasil produksi dan distribusi pertanian serta pengawasan harga, kemasan, dan mutu pangan.

Pada komoditas peternakan, prognosis produksi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras diperkirakan meningkat pada tahun 2026, mendukung kebutuhan Jawa Timur dan nasional (termasuk pemenuhan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)). Beberapa program prioritas Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan untuk memperkuat produktivitas peternakan antara lain (i) peningkatan populasi sapi antara lain melalui peningkatan kelahiran, akseptor, mutu genetik, dan pedet jantan/betina; (ii) optimalisasi pembibitan pakan dan produksi peternakan; (iii) penjaminan kesehatan hewan melalui pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular; (iv) peningkatan kualitas produk hewan melalui intervensi sertifikasi dan standarisasi; (v) pengolahan dan pemasaran hasil peternakan melalui intervensi teknologi pengolahan dan pemasaran serta fasilitasi akses permodalan; (vi) peningkatan agribisnis persusuan melalui intervensi pakan, perbaikan kandang, dan peningkatan populasi; serta (vii) program *Youth Agriculture Hub* untuk membangun regenerasi peternak sekaligus meningkatkan produktivitas melalui sosialisasi *good farming practices*.

Berlanjutnya program prioritas Pemerintah Pusat yang konsisten berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan produsen diperkirakan turut mendukung terjaganya inflasi. Berbagai program prioritas yang telah dilakukan sejak tahun 2025 terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan produsen terus berlanjut, antara lain (i) penguatan dan perluasan jaringan irigasi dan pompanisasi; (ii) modernisasi sarana prasarana pertanian/peternakan; (iii) kebijakan peningkatan harga acuan pembelian gabah dan jagung serta penurunan harga pupuk subsidi; (iv) penguatan peran Bulog dan BUMN Pangan dalam penyerapan dan distribusi guna mendukung peningkatan CPP; (v) modernisasi infrastruktur pasca panen; serta (vi) peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan pengembangan kawasan. Program-program tersebut mampu mendorong penguatan produktivitas pertanian dan peternakan yang pada gilirannya mendukung stabilitas harga, khususnya pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sekaligus kesejahteraan produsen.

Secara umum, prognosa produksi komoditas pertanian (pangan dan hortikultura) serta komoditas peternakan Jawa Timur pada tahun 2026 mampu mendukung kebutuhan program prioritas Pemerintah khususnya program MBG. Intensitas dan skala program prioritas Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan menjadi salah satu faktor kunci kuatnya produksi Jawa Timur pada tahun 2026. Namun demikian, keselarasan momen antara permintaan setiap komoditas secara spesifik dalam program MBG dibandingkan dengan konsistensi pasokan komoditas terkait tetap perlu menjadi perhatian guna menjaga stabilitas harga yang konsisten sepanjang tahun 2026.

Di tengah berbagai tantangan, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh 38 TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi dan terus memperkuat koordinasi kebijakan baik dengan pusat maupun daerah. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan oleh TPIP dan TPID disertai upaya ekstra sinergi pengendalian inflasi pangan termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang merupakan sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Sinergi dilakukan melalui penguatan implementasi program utama dalam kerangka kerja pengendalian inflasi Jawa Timur, yang dikategorikan dalam pilar 4K yaitu:

1. Keterjangkauan harga: (i) Intensifikasi Operasi Pasar dan (ii) Optimalisasi dan Perluasan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK).
2. Ketersediaan pasokan:
  - a. Peningkatan produktivitas (*on-farm/off-farm*) antara lain melalui (i) penerapan *good agricultural/farming/handling/manufacturing practice*, bantuan sarana dan prasarana, (ii) bimbingan teknis terkait pemanfaatan saprodi unggul, alsintan modern, (iii) pengendalian hama dan penyakit;
  - b. Pengembangan kawasan produksi antara lain melalui (i) optimalisasi lahan dan pekarangan; serta (ii) pengembangan kawasan agropolitan
  - c. Peningkatan infrastruktur irigasi antara lain melalui (i) revitalisasi saluran irigasi; (ii) elektrifikasi sawah; dan (iii) pompanisasi
  - d. Penguatan kelembagaan produsen antara lain melalui (i) pengembangan korporasi petani didukung ekosistem *end-to-end* yang terintegrasi dan sinergi pentahelix; (ii) Penguatan lumbung pangan; (iii) penggunaan *communal branding* seperti Jatim Cettar yang diinisiasi Pemerintah Provinsi;
  - e. Penguatan dukungan pembiayaan petani antara lain penguatan akses pembiayaan dan mendorong adopsi asuransi pertanian
  - f. Penguatan SDM pertanian melalui penguatan champion lokal dan pembentukan petani millennial
3. Kelancaran distribusi:
  - a. Penguatan kerjasama antardaerah antara lain melalui (i) penguatan peran BUMD/BUMDes Pangan dalam mendukung konsistensi pasokan dan distribusi.
  - b. Penyediaan transportasi antara lain melalui (i) fasilitasi distribusi pangan; (ii) pelaksanaan mudik gratis; (iii) penguatan dan perluasan kerjasama intraprovinci dan antardaerah, (iv) subsidi ongkos angkut, serta (v) monitoring dan evaluasi tarif angkutan
  - c. Peningkatan kualitas infrastruktur produksi dan konektivitas.
4. Komunikasi efektif: (i) penguatan koordinasi pusat-daerah, (ii) peningkatan kualitas digitalisasi data harga dan pasokan di level provinsi dan kabupaten/kota seperti platform SISKAPERBAPO dan Neraca Pangan BAPANAS, (iii) pengendalian ekspektasi inflasi; serta (iv) peningkatan kapasitas SDM TPID.

Pada tahun 2026, beberapa inovasi langkah pengendalian inflasi akan dilakukan sebagai penguatan atas program pengendalian inflasi daerah eksisting, antara lain pelaksanaan program utama setiap pilar 4K yang terintegrasi dalam program EPIK Mobile dan integrasi *dashboard* TPID Jawa Timur dengan *platform* pusat data Jawa Timur. Program EPIK Mobile merupakan wujud integrasi dari pelaksanaan program 4K pengendalian inflasi yang terdiri dari (i) K1: wadah penjualan komoditas pangan dengan harga yang murah secara *mobile* atau keliling; (ii) K2: dukungan penguatan kelembagaan produsen dengan menghadirkan pasar bagi hilirisasi produk dari korporasi petani beras binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan *brand* beras Jatim Cettar; (iii) K3: pasokan korporasi petani yang dijual menjadi wujud hasil kerjasama intradaerah dari wilayah surplus ke wilayah defisit didukung oleh fasilitasi distribusi oleh *offtaker* BUMD Provinsi Jawa Timur; serta (iv) K4: berupa pemanfaatan *platform monitoring* harga untuk penentuan waktu dan lokasi EPIK *Mobile* serta komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat bahwa harga komoditas pangan tetap terjaga di berbagai lokasi di Jawa Timur. Adapun integrasi *dashboard* TPID Jawa Timur (<https://tpidjatim.com>) dengan platform pusat data di Jawa Timur yaitu MAJADIGI dan Open Data Jawa Timur, diharapkan dapat memperkuat perumusan kebijakan TPID Jawa Timur serta penguatan komunikasi kebijakan bagi masyarakat terkait program-program pengendalian inflasi yang telah dilakukan guna menjaga ekspektasi tingkat inflasi yang terkendali. Selain

**Tabel 6.2. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2026**

#### Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2026

*Imported inflation* dari inflasi komoditas energi dan non-energi (khususnya emas) dunia di tengah tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih tinggi

Potensi disrupsi produksi komoditas pangan seiring potensi El Niño di mana mayoritas sentra produsen di Jawa Timur diprakirakan cenderung mengalami kemarau lebih panjang dari tren historis pada Semester II 2026

Dampak rambatan lanjutan atas peningkatan harga energi non-subsidi di tingkat domestik kepada berbagai kelompok komoditas

#### Faktor Penahan Inflasi Tahun 2026

Dukungan berbagai program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan kebijakan stimulus/insentif untuk mendukung kesejahteraan produsen dan masyarakat.

Penguatan serta akselerasi kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi oleh TPID Jawa Timur, termasuk implementasi program GPIPS yang dirangkai dalam Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur secara konsisten, antisipatif, akurat, dan efektif.

Stabilitas harga komoditas yang diatur Pemerintah di tengah masih tingginya harga komoditas energi dunia.

itu, penguatan fitur visualisasi data dalam *dashboard* TPID Jawa Timur akan turut dilakukan sebagai bentuk *feedback* bagi TPID dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran.

**Sinergi kebijakan antara otoritas pusat dan pemerintah daerah akan terus diperkuat, terutama dalam upaya meredam tekanan inflasi *volatile food* yang secara struktural masih rentan terhadap gangguan cuaca dan ketidakmerataan distribusi pasokan antardaerah.** Di sisi kelembagaan, penguatan koordinasi juga akan terus diintensifkan guna memastikan internalisasi Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur berjalan efektif, selaras dengan implementasi peta jalan TPID se-Jawa Timur periode 2025–2027.

**Berbagai penguatan sinergi pengendalian inflasi TPID Jawa Timur dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta dukungan faktor fundamental seperti cuaca dan komoditas global yang cukup kondusif, inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan terjaga dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy).** Namun demikian, beberapa faktor utama risiko khususnya yang bersumber dari global tetap perlu dicermati untuk memastikan tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan.

## Pengembangan Konektivitas dan Pemerataan Pariwisata di Jawa Timur

BOKS 5

Di tengah kebutuhan memperkuat daya saing ekonomi regional dan mengurangi disparitas antarwilayah, **konektivitas menjadi instrumen strategis untuk memperluas distribusi pertumbuhan di Jawa Timur.** Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96% (yoy), tertinggi di Pulau Jawa, serta menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi 25,16% (Gambar 1). Kinerja tersebut didukung oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, serta pariwisata. Namun, agar pertumbuhan tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada koridor ekonomi utama, penguatan konektivitas perlu diarahkan untuk membuka akses ke kawasan selatan, *hinterland*, wilayah kepulauan, serta destinasi wisata potensial yang selama ini belum terintegrasi optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur konektivitas tidak hanya berfungsi memperlancar mobilitas barang dan orang, tetapi juga menjadi **pengungkit investasi, efisiensi logistik, pengembangan UMKM dan pemerataan pariwisata.** Jawa Timur telah memiliki jaringan utama yang relatif kuat (Gambar 2), terutama di koridor utara melalui Tol Trans Jawa serta jaringan jalan nasional yang menghubungkan pusat ekonomi besar seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang Raya, Pasuruan, hingga Banyuwangi. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022, panjang jalan nasional di Jawa Timur mencapai 2.261,68 km, yang terdiri dari Jalan Arteri Primer sepanjang 1.396,58 km, Jalan Kolektor Primer-1 sepanjang 844,83 km, dan JKP-1/JSN sepanjang 20,27 km.

Gambar 1. Perekonomian Pulau Jawa Triwulan I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari sisi kualitas layanan, kondisi jalan nasional di Jawa Timur juga tergolong relatif baik. Data SMD Bina Marga Semester II 2024 menunjukkan bahwa 2.206,97 km jalan nasional berada dalam kondisi mantap, terdiri dari 1.168,05 km kondisi baik dan 1.038,92 km kondisi sedang. Sementara itu, jalan dengan kerusakan ringan tercatat 54,45 km dan rusak berat hanya 0,39 km. Capaian ini menunjukkan bahwa struktur konektivitas utama telah cukup memadai untuk mendukung mobilitas regional. Meski demikian, tantangan pemerataan masih muncul karena kualitas jaringan utama belum sepenuhnya diikuti oleh keterhubungan antarkoridor, jalan penghubung menuju destinasi, serta akses *last mile* ke pusat-pusat ekonomi lokal.

Kesenjangan konektivitas paling nyata terlihat pada wilayah selatan Jawa Timur dan sebagian kawasan *hinterland*. Berbeda dari koridor utara yang lebih dahulu berkembang melalui jaringan tol, pelabuhan, kawasan industri dan pusat perdagangan, koridor selatan masih menghadapi hambatan aksesibilitas akibat kondisi topografi, kapasitas jalan yang terbatas, serta belum optimalnya integrasi antara jalur utama, sentra produksi dan destinasi wisata. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh relatif panjang, biaya perjalanan lebih tinggi, serta keterhubungan ke pasar utama belum efisien.

Jalur Lintas Selatan atau Pansela menjadi infrastruktur kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Koridor ini membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi dan melintasi 8 kabupaten, yaitu : Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,

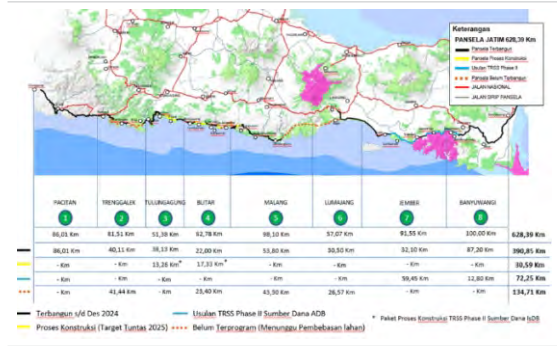
Gambar 2. Konektivitas Jaringan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur



Sumber: Keputusan Menteri PUPR No.430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), diolah

BOKS 5

Gambar 3. Peta Progres Pembangunan Pansela Provinsi Jawa Timur



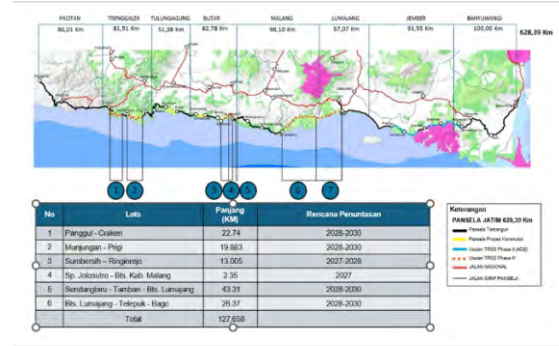
Sumber: KemenPU 2025, diolah

Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Dengan panjang sekitar 628,39 km di Jawa Timur, Pansela diposisikan sebagai backbone konektivitas selatan untuk membuka pusat pertumbuhan baru, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM. Hingga 2024, progres pembangunan Pansela di Jawa Timur telah mencapai sekitar 60% (Gambar 3) atau ±350 km dan ditargetkan selesai pada 2029. Jalur ini juga menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang Jawa Timur 2025-2045 dan termasuk dalam Program Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Meskipun demikian, sejumlah ruas strategis masih membutuhkan percepatan, antara lain Pacitan-Trenggalek, Trenggalek-Tulungagung, Malang Selatan-Lumajang, hingga Jember-Banyuwangi. Di Banyuwangi, pembangunan Pansela sepanjang sekitar 99,18 km masih menyisakan ±14,1 km ruas yang belum tersambung menuju perbatasan Jember, termasuk koridor Kendenglembu-Malangsari, Malangsari-batas Jember dan Senenrejo-batas Banyuwangi (Gambar 4). Sebagian ruas melintasi kawasan hutan dan perkebunan sehingga memerlukan percepatan proses perizinan, pembebasan lahan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Selain penyelesaian jalur utama, pemerataan manfaat konektivitas sangat bergantung pada kualitas jalan sirip atau *feeder road* menuju destinasi. Jalan tol, jalan nasional dan Pansela tidak otomatis menciptakan pemerataan pariwisata apabila akses dari koridor utama menuju pantai, desa wisata, kawasan konservasi, pusat kuliner dan sentra UMKM masih sempit, rusak, minim penerangan, atau belum ramah kendaraan wisata. Karena itu, peningkatan ruas Gondanglegi-Balekambang melalui Desa Suwaru di

Gambar 4. Peta Rencana Penuntasan Jalan Pansela Provinsi Jawa Timur



Sumber: KemenPU 2025, diolah

Kabupaten Malang, dengan pelebaran dari 6 meter menjadi 11 meter pada koridor ±30 km, menjadi contoh penting penguatan akses menuju kawasan wisata selatan dan jaringan JLS. Demikian pula peningkatan ruas Ngantru-Ngantang dapat memperkuat konektivitas Blitar, Batu, dan Kabupaten Malang dalam mendukung agroindustri, jasa dan pariwisata regional.

**Pengembangan jalan tol tetap menjadi instrumen penting untuk memperkuat integrasi ekonomi Jawa Timur.** Ruas eksisting seperti Tol Surabaya-Gempol dan Tol Gempol-Pasuruan telah mendukung mobilitas barang dan orang pada koridor Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan wilayah timur. Dalam periode 2025-2029 (Gambar 5), pemerintah merencanakan sejumlah ruas strategis, antara lain Tol Probolinggo-Banyuwangi, Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Demak-Tuban, Kertosono-Kediri, Kediri-Tulungagung, serta Malang-Kepanjen. Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi prioritas karena berperan sebagai penghubung akhir Tol Trans Jawa menuju ujung timur Pulau Jawa dan diproyeksikan memangkas waktu tempuh Probolinggo-Banyuwangi dari 4-5 jam menjadi sekitar 2 jam. Sementara itu, Tol Kertosono-Kediri dan Kediri-Tulungagung penting untuk memperkuat konektivitas kawasan Mataraman, akses Bandara Dhoho Kediri, serta pembentukan koridor utara-selatan menuju kawasan wisata selatan.

**Perkembangan pariwisata Jawa Timur pada Maret 2026 menunjukkan penguatan mobilitas wisatawan.** Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 21.068 kunjungan atau meningkat 34,65% (yoy), sementara perjalanan wisatawan nusantara tujuan Jawa Timur mencapai 20,78 juta perjalanan atau tumbuh 26,45% (yoy).

**BOKS 5**

**Gambar 5. Program Pembangunan Jalan Provinsi Jawa Timur**



Sumber: KemenPU - Dirjen Bina Marga 2025, diolah

Penguatan ini mendorong aktivitas ekonomi pada sektor transportasi, perdagangan, akomodasi, makan minum, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan demikian, pariwisata memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sumber pertumbuhan, tetapi juga sebagai kanal pemerataan nilai tambah antarwilayah.

Namun distribusi kunjungan masih terkonsentrasi pada destinasi dan kota/kabupaten yang memiliki aksesibilitas, amenitas, serta branding lebih kuat. Destinasi seperti

Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, Tumpak Sewu, Pantai Klayar, Kota Batu, Kota Malang, dan Surabaya masih menjadi magnet utama. Pola perjalanan wisatawan nusantara juga menunjukkan dominasi kawasan perkotaan, antara lain Kota Surabaya dengan 1,94 juta perjalanan dan Kabupaten Sidoarjo dengan 1,28 juta perjalanan (Grafik 1). Konsentrasi ini menunjukkan bahwa destinasi potensial di wilayah selatan, pegunungan dan kepulauan belum sepenuhnya memperoleh limpahan kunjungan yang proporsional.

**Tabel 1. Prioritas Sektor Jalan Wilayah Provinsi Jawa Timur**

Program Prioritas	Panjang (Km)	Waktu	Biaya (Juta)
Pembangunan Jalan Brumbun – P. Sine	14,5	2025-2028	27.848
Pembangunan Jalan Bululawang – Sidomulyo – Tambakrejo	16,1	2025-2029	316.533
Pembangunan Jalan Pantai Serang – Sumbersih	6,1	2025-2029	167.422
Pembangunan Jalan Puger – Sumberrejo	15,8	2025-2028	73.687
Pembangunan Jalan Sumberrejo – Sidodadi	14,6	2026-2029	161.835
Pembangunan Jalan Sidodadi – Sanenrejo	9,6	2026-2027	12.802
Pembangunan Jalan Sanenrejo – Bts. Kab. Banyuwangi	25,9	2025-2028	1.272.781
Pembangunan Jalan Tengkinol – Malang Sari – Kedunglembu	5,2	2026-2029	55.272
Pembangunan Jalan Malang Sari – Bts. Kab. Jember	7,7	2026-2029	808.445
Pembangunan Sumbersih – Ringinrejo	13,1	2026-2029	16.978
Pembangunan Akses Pelabuhan Pacitan	3,0	2029	534
Pembangunan Jembatan Ruas Sumberrejo - Sidodadi	166,2	2026	45
Pembangunan Jembatan Ruas Sumberrejo – Bts. Kab. Banyuwangi I	215,6	2027	41
Pembangunan Jembatan Ruas Sumberrejo – Bts. Kab. Banyuwangi II	283,4	2027	66
Pembangunan Jembatan Ruas Sumberrejo – Bts. Kab. Banyuwangi III	249,5	2027	112.268

Sumber: KemenPU, Dirjen Bina Marga 2025, diolah

**BOKS 5**

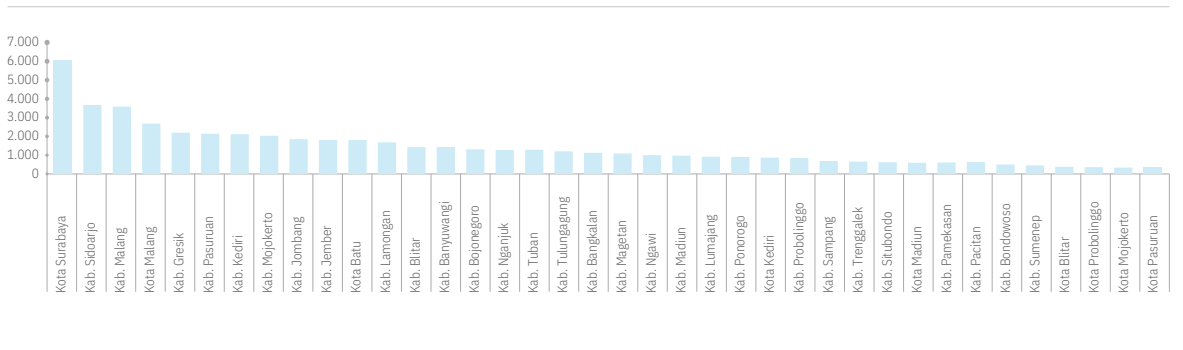
Ketimpangan tersebut juga tecermin dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel. Pada Maret 2026, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Kota Mojokerto sebesar 59,06%, Kabupaten Gresik 58,49% dan Kota Madiun 55,87%. Sebaliknya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan mencatat TPK relatif rendah, masing-masing 12,97%, 21,84% dan 23,11% (Grafik 2). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kinerja pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek wisata, tetapi juga oleh kualitas konektivitas, ketersediaan akomodasi, standar layanan dan integrasi destinasi dengan aktivitas ekonomi sekitar.

Sejalan dengan TPK yang belum merata antarwilayah, Neffertiti et al. (2025) menyatakan bahwa konsentrasi kunjungan wisata di wilayah selatan Jawa dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas dan keterhubungan infrastruktur, posisi destinasi dalam jaringan wisata regional, serta tingkat proaktivitas kebijakan daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata (Gambar 6).

Dengan demikian, disparitas TPK tidak hanya merefleksikan perbedaan intensitas kunjungan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam ekosistem pariwisata, terutama pada aspek konektivitas, tata kelola destinasi dan distribusi investasi antarwilayah.

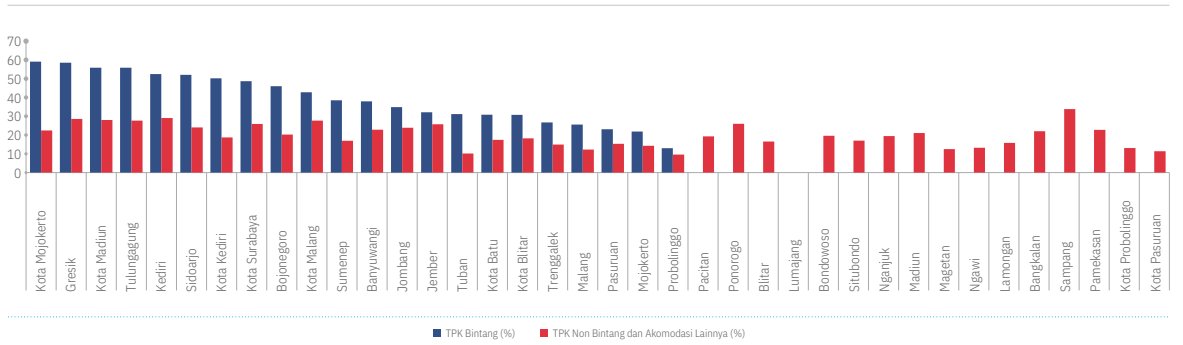
Di tengah tantangan tersebut, pengembangan wisata minat khusus dapat menjadi strategi adaptif untuk mendorong pemerataan. Destinasi dengan akses terbatas tidak selalu harus diarahkan menjadi wisata massal, tetapi dapat dikembangkan sebagai *quality tourism* berbasis pengalaman, eksklusivitas dan keberlanjutan. Pulau Gili Iyang dan Kepulauan Sapeken di Sumenep dapat diperkuat sebagai *wellness tourism* dan *marine tourism* berbasis ekowisata. Pantai Sukamade di Banyuwangi memiliki posisi kuat sebagai destinasi petualangan dan konservasi penyu. Pegunungan Wilis dapat dikembangkan melalui *eco-adventure*, agrowisata, *private trip* dan desa wisata, sementara kawasan Cangar di Batu-Mojokerto dapat diarahkan sebagai destinasi wisata premium. Pada segmen

**Grafik 1. Kunjungan Wisatawan ke Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tujuan**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Grafik 2. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Kabupaten/Kota**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

## BOKS5

budaya dan edukasi, *Geopark* Kayangan Api Bojonegoro, Desa Wisata Gosari Gresik dan pengembangan *Mega Science Center & Budaya* di Kota Batu menunjukkan bahwa pemerataan pariwisata juga dapat didorong melalui diferensiasi produk, *event* berkualitas dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan utama pemerataan pariwisata Jawa Timur bukan semata kurangnya destinasi baru, melainkan belum terbangunnya ekosistem yang menghubungkan konektivitas, amenitas, promosi, investasi dan rantai nilai lokal. Fenomena ini dapat dibaca sebagai *potential lag*, yaitu kondisi ketika potensi destinasi dan minat wisatawan sebenarnya tinggi, termasuk karena eksposur media sosial, tetapi realisasi kunjungan tertahan oleh tingginya *travel cost*, lamanya waktu tempuh, biaya perjalanan dan rendahnya kepastian aksesibilitas.

Pada koridor Pansela, belum tersambung sejumlah ruas menyebabkan wisata pesisir selatan belum terbentuk sebagai *integrated coastal tourism corridor*. Padahal, apabila akses tersambung secara utuh, wilayah selatan berpotensi menjadi koridor wisata *road trip* yang menghubungkan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang Selatan, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Pada kawasan selingkar Wilis, konektivitas antarlereng yang belum optimal menyebabkan pola perjalanan masih parsial, sehingga wisatawan cenderung hanya mengunjungi satu titik tanpa melanjutkan perjalanan lintas kabupaten. Di kepulauan Sumenep, keterbatasan kapal reguler, ketergantungan cuaca dan belum kuatnya transportasi antarpulau menghambat pengembangan wisata bahari premium. Di ujung timur, Banyuwangi, Situbondo dan

Gambar 6. Peta Klasifikasi Daya Saing Pariwisata Kabupaten di Jalur Pantai Selatan Jawa



Sumber: Neffertiti et al., ditiadakan

Bondowoso masih menghadapi tantangan integrasi destinasi, sehingga sebagian kawasan masih berfungsi sebagai daerah transit menuju Bromo atau Bali, meskipun memiliki potensi besar seperti Baluran, Kawah Ijen, Kawah Wurung dan Pantai Bama.

Selain konektivitas, disparitas amenitas dan kualitas layanan masih menjadi hambatan pemerataan. Banyak destinasi potensial di luar kawasan utama masih menghadapi keterbatasan akomodasi, sanitasi, transportasi publik, konektivitas digital, fasilitas keselamatan, pusat informasi wisata, serta mitigasi kebencanaan. Distribusi investasi dan promosi juga cenderung terkonsentrasi pada destinasi populer, sementara integrasi pariwisata dengan UMKM, ekonomi kreatif dan rantai pasok lokal belum optimal. Akibatnya, *multiplier effect* terhadap masyarakat sekitar masih terbatas dan sebagian aktivitas wisata berisiko berkembang sebagai *enclave economy*.

Untuk mendorong pemerataan pariwisata, strategi pengembangan perlu diarahkan pada penguatan konektivitas menyeluruh, bukan hanya penambahan destinasi. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. **Mempercepat penyelesaian konektivitas strategis antarwilayah.** Penyelesaian Pansela, Tol Probowangi, koridor Kertosono-Kediri-Tulungagung, Tol Malang-Kepanjen, serta integrasi Lingkar Wilis perlu menjadi prioritas untuk menurunkan *travel cost*, mempersingkat waktu tempuh dan membentuk koridor wisata lintas kabupaten yang lebih *seamless*.
2. **Memperkuat jalan sirip dan akses *last mile* menuju destinasi.** Penguatan akses dari koridor utama menuju destinasi seperti Pantai Papuma dan Payangan di Jember Selatan, Pantai Kedung Tumpang Tulungagung, Pantai Ngliyep Malang Selatan, kawasan Pegunungan Wilis, serta pelabuhan kecil penghubung Gili Iyang dan Sapeken perlu diprioritaskan agar manfaat pembangunan jalan utama tersambung langsung dengan pusat aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat.
3. **Mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan *feeder tourism*.** Pemerataan pariwisata perlu didukung oleh *Trans Jatim* koridor wisata, bus perintis, *shuttle tourism*, kapal cepat antarpulau serta optimalisasi rute udara regional seperti Surabaya-Jember. Strategi ini penting untuk menjangkau

## BOKS 5

destinasi yang belum tersambung tol maupun kereta api, sekaligus memperpanjang pola perjalanan wisatawan lintas daerah.

4. **Mendorong digitalisasi pariwisata dalam satu platform terpadu.** Implementasi konsep *smart tourism* melalui *Jatim Tourist Pass* berbasis QRIS dan *one-pass system* dapat mengintegrasikan informasi destinasi, tiket transportasi, *shuttle* wisata, *e-ticketing* destinasi, pembayaran nontunai dan promosi digital. Sistem ini juga dapat membantu mendistribusikan wisatawan ke destinasi alternatif ketika kawasan utama mengalami kepadatan.
5. **Memperkuat amenitas, investasi dan standar layanan destinasi.** Pemerintah daerah perlu mendorong investasi swasta, KPBU, *blended financing*, CSR, serta dana desa untuk memperkuat akomodasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, konektivitas digital, fasilitas keselamatan, pusat informasi dan kualitas layanan. Penguatan ini penting agar destinasi potensial memiliki standar kenyamanan yang lebih kompetitif.
6. **Mengembangkan wisata minat khusus dan desa wisata berbasis potensi lokal.** Destinasi dengan akses terbatas dapat diarahkan pada *quality tourism*, *special interest tourism*, ekowisata, agrowisata, wisata bahari, konservasi, dan desa wisata. Pendekatan ini memungkinkan wilayah selatan, pegunungan dan kepulauan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi tanpa harus bergantung pada wisata massal.
7. **Memperkuat tata kelola pariwisata berkelanjutan.** Pengembangan destinasi perlu memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pengaturan *carrying capacity*, pengelolaan sampah, konservasi kawasan pesisir dan pegunungan, mitigasi kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemerataan pariwisata tidak hanya mendorong kunjungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

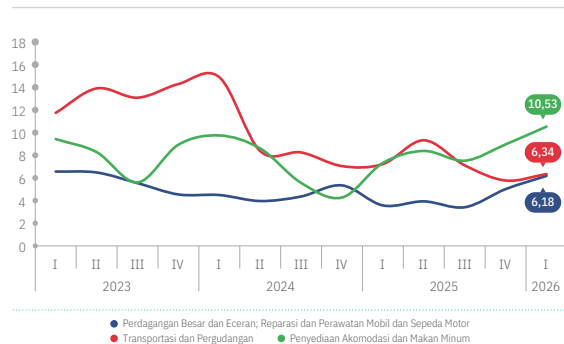
**Dengan arah tersebut, pengembangan konektivitas tidak hanya menjadi agenda infrastruktur, tetapi juga fondasi pemerataan ekonomi pariwisata Jawa Timur.** Penyelesaian koridor utama seperti JLS, penguatan akses *last mile*, integrasi transportasi dan digitalisasi, serta peningkatan amenitas dan tata kelola berkelanjutan akan memperbesar peluang destinasi potensial untuk masuk ke rantai nilai pariwisata regional. Peningkatan konektivitas

tersebut juga berpotensi menciptakan *multiplier effect* ekonomi melalui kenaikan hunian hotel dan restoran, penyerapan produk UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan perdagangan serta transportasi lokal, bertambahnya investasi sektor jasa dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, pariwisata Jawa Timur dapat berkembang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas distribusi nilai tambah ke kawasan selatan, *hinterland* dan kepulauan.

## Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi Unggulan untuk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur

BOKS 6

**Grafik 1.** PDRB LU Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2026



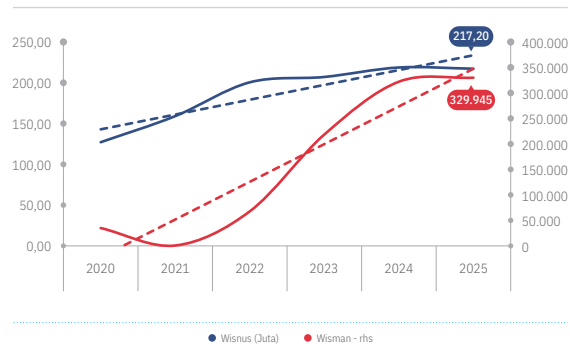
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pariwisata merupakan katalis penting bagi akselerasi ekonomi, tidak hanya sebagai sumber pertumbuhan, tetapi juga sebagai penggerak produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (UNWTO, 2021). Peran strategis tersebut tecermin dari kuatnya keterkaitan sektor pariwisata dengan berbagai lapangan usaha pendukung, khususnya Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan.

Pada triwulan I 2026, kinerja lapangan usaha yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata menunjukkan akselerasi. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling tinggi sebesar 10,53% (yoy), meningkat dari 8,96% (yoy) pada triwulan IV 2025. Selanjutnya, Transportasi dan Pergudangan tumbuh 6,34% (yoy), lebih tinggi dari 5,77% (yoy), sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 6,18% (yoy), meningkat dari 5,01% (yoy) (Grafik 1).

Kinerja sektor pariwisata yang semakin kuat juga tecermin dari tingginya mobilitas wisatawan menuju Jawa Timur. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 2,45%, dari 322.045 kunjungan pada 2024 menjadi 329.945 kunjungan. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara tetap berada pada level yang tinggi, yakni 217,20 juta kunjungan pada 2025, atau sedikit lebih rendah sebesar 0,69% dibandingkan 218,72 juta kunjungan pada 2024 (Grafik 2). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pariwisata Jawa Timur tetap solid, ditopang oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta basis wisatawan domestik yang tetap besar dan resilien.

**Grafik 2.** Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tujuan Jawa Timur (juta) dan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur Melalui Pintu Masuk Juanda



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Peningkatan kunjungan wisatawan turut didukung oleh keberagaman destinasi unggulan Jawa Timur, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga religi. Destinasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, serta kawasan pantai di Pacitan dan Banyuwangi menjadi daya tarik alam ikonik dengan nilai jual tinggi. Daya tarik tersebut diperkuat oleh kekayaan budaya dan sejarah, antara lain peradaban Majapahit, Reog Ponorogo, peninggalan arsitektur kolonial, serta wisata religi seperti Makam Sunan Ampel dan kompleks Gunung Kawi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Salah satu destinasi dengan daya tarik kuat adalah Kawasan Ijen di Banyuwangi, yang memadukan keindahan alam vulkanik dan budaya masyarakat Osing, dengan kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 400.000 orang pada 2023 (Disbudpar Banyuwangi, 2023).

Selain ditopang oleh kekayaan alam dan budaya, daya saing pariwisata Jawa Timur semakin diperkuat oleh berkembangnya destinasi rekreasi keluarga dan tematik. Berdasarkan jumlah ulasan Google Maps (Tabel 1), enam dari sepuluh destinasi dengan ulasan tertinggi berada di Batu, seperti Museum Angkut, Jawa Timur Park 2, Jawa Timur Park 3, Selecta Recreation Park, Alun-Alun Kota Wisata Batu, dan Jawa Timur Park 1. Pola ini menunjukkan bahwa daya saing pariwisata Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada kekayaan lanskap alam, tetapi juga pada kualitas atraksi buatan, aksesibilitas, amenitas, dan pengalaman wisata yang mudah dikonsumsi oleh pasar domestik. Dengan demikian, penguatan pariwisata Jawa Timur perlu diarahkan pada keseimbangan antara optimalisasi destinasi ikonik berbasis alam-budaya dan

**BOKS 6**

pengembangan destinasi rekreasi yang terintegrasi, agar distribusi kunjungan dan nilai tambah ekonomi dapat semakin merata.

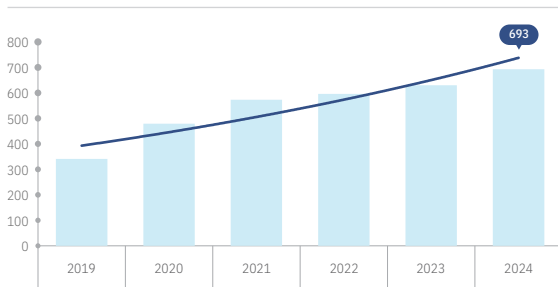
**Tabel 1. Top 10 Destinasi Wisata Jawa Timur**

Destinasi	Lokasi	Jumlah Review Google Maps
Museum Angkut	Batu	57.824
Jawa Timur Park 2	Batu	52.585
Jawa Timur Park 3	Batu	43.195
Selecta Recreation Park	Batu	39.125
Alun-Alun Kota Wisata Batu	Batu	33.289
Jawa Timur Park 1	Batu	18.695
Mt. Bromo	Pasuruan/Probolinggo/ Malang/Lumajang	13.099
De Djawatan Forest	Banyuwangi	8.472
Tumpak Sewu Waterfall	Lumajang	8.330
Wisata Bahari Lamongan (WBL)	Lamongan	5.934

Sumber: Google Review, diolah

Di sisi destinasi wisata, Jawa Timur memiliki basis atraksi yang luas dan semakin berkembang. Pada 2024, Jawa Timur memiliki 1.464 DTW, terdiri dari 610 DTW alam, 473 DTW buatan, dan 381 DTW budaya (Disbudpar Jawa Timur, 2024). Struktur tersebut menegaskan bahwa wisata alam menjadi kekuatan utama pariwisata Jawa Timur, dengan dukungan wisata buatan dan budaya yang memperkaya variasi produk pariwisata daerah. Sejalan dengan itu, jumlah desa wisata terus menunjukkan tren peningkatan, dari 630 desa pada 2023 menjadi 693 desa pada 2024, atau tumbuh sebesar 10,0% (Grafik 3). Dalam periode yang

**Grafik 3. Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Timur**



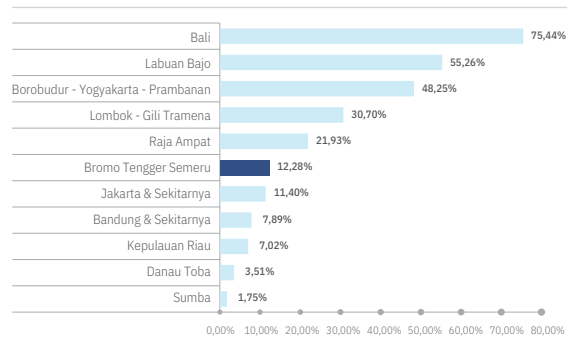
Sumber: Disbudpar Provinsi Jawa Timur, diolah

lebih panjang, jumlah desa wisata bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang tercatat sebanyak 341 desa. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin kuatnya basis pariwisata berbasis komunitas di Jawa Timur, meskipun sebagian besar masih berada pada tahap rintisan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi daya saing destinasi yang kuat, terutama jika dibandingkan dengan destinasi prioritas lain di tingkat nasional.

**Meski menunjukkan tren peningkatan, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global masih perlu terus diperkuat.** Berdasarkan *Travel and Tourism Development Index World Economic Forum (2022)*, Indonesia berada pada peringkat ke-32 dari 117 negara. Dalam konteks Jawa Timur, dari berbagai destinasi wisata unggulan yang dimiliki, hanya kawasan Bromo Tengger Semeru yang masuk dalam daftar 11 destinasi nasional yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2026 (Grafik 4), dengan estimasi pertumbuhan sebesar 12,28%. Angka tersebut masih berada di bawah sejumlah destinasi utama lainnya, seperti Bali sebesar 75,44%, Labuan Bajo sebesar 55,26%, Borobudur–Yogyakarta–Prambanan sebesar 48,25%, Lombok–Gili Tramenas sebesar 30,70%, dan Raja Ampat sebesar 21,93%.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi ekosistem pariwisata, baik dari sisi perencanaan lintas kabupaten/kota, konektivitas transportasi, promosi terpadu, maupun kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Handoko et al. (2024) yang menunjukkan bahwa jaringan ekonomi pariwisata Jawa Timur masih

**Grafik 4. Proyeksi Destinasi yang diperkirakan mengalami Pertumbuhan Signifikan pada Tahun 2026**

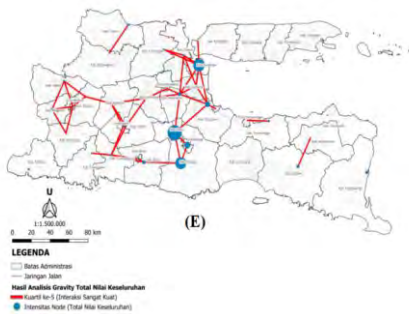


Sumber: Expert Survey, diolah

**BOKS 6**

menghadapi ketidakseimbangan antarwilayah, terutama antara wilayah tengah, barat, dan timur, dengan pola polarisasi yang terlihat pada interaksi, konektivitas, dan kluster jaringan ekonomi pariwisata (Gambar 1).

**Gambar 1.** Pola Spasial Model Gravitasi Gabungan Node Pendapatan Per Kapita, Node Jumlah Wisatawan, Node Jumlah Objek Wisata, dan Node Total Pendapatan Sektor Pariwisata



Sumber: Handoko et al., diolah

Tantangan tersebut semakin kompleks dalam menghadapi dinamika global, seperti tren pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), digitalisasi layanan wisata, hingga penurunan daya beli wisatawan internasional akibat ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks ini, penting untuk membangun konsep *resilient tourism* yakni pariwisata yang tangguh, adaptif, dan inklusif terhadap perubahan zaman dan guncangan eksternal (UNWTO, 2021). Resiliensi ini mencakup aspek digitalisasi layanan, penguatan kapasitas lokal, serta keterpaduan kebijakan antar wilayah dalam membangun sistem pariwisata regional.

Penguatan pariwisata Jawa Timur perlu ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah, bukan semata pengembangan sektor wisata. Arah ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, RKP 2026, serta kerangka regulasi daerah terkait pembangunan kepariwisataan dan pemberdayaan desa wisata. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi unggulan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan nilai tambah sektor pendukung, serta memperluas sumber pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata menjadi instrumen transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif, berdayasaing, dan berkelanjutan.

Daya tarik wisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah destinasi, tetapi juga kualitas atraksi, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan variasi pengalaman. Di Jawa Timur, Bromo Tengger Semeru diminati karena panorama sunrise dan wisata jeep, namun masih terkendala kemacetan dan suhu ekstrem. Pantai Balekambang menarik melalui lanskap pantai dan nuansa spiritual, namun menghadapi isu kebersihan dan akses jalan. Sementara itu, Kawah Ijen unggul dengan fenomena api biru, namun tetap memerlukan penguatan aspek keamanan akibat risiko gas belerang (Moreno, 2025). Hal ini diperkuat oleh hasil temuan *topic modeling and sentiment analysis* (Gambar 2) atas *review Google Maps* dalam 9 bulan terakhir yang telah dinormalisasi menggunakan *Artificial intelligence (AI)*, di mana sentimen positif terhadap Bromo terutama didorong oleh apresiasi terhadap panorama, sunrise, udara sejuk, dan pengalaman jeep, sementara sentimen negatif relatif terbatas pada aspek akses, perjalanan, dan layanan pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing destinasi Jawa Timur tidak cukup bertumpu pada keunikan atraksi alam, tetapi perlu didukung oleh pengelolaan destinasi yang lebih terintegrasi agar pengalaman wisata menjadi lebih aman, nyaman, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

**Gambar 2.** Heatmap Topic Modelling dan Sentiment Analysis Wisata Bromo

	Negatif	Netral Sentimen	Positif		
Topik	bosan, senang, moga, kunjung, kenang -	2	0	44	-40
	bagus, baik, satu, layak, alam -	0	0	35	-35
	pandang, bagus, indah, takjub, kunjung -	0	0	27	-30
	jeep, jalan, unjung, kaki, sewa -	4	0	11	-25
	dingin, udara, sejuk, jaket, suasana -	1	0	14	-20
	indah, anggun, ikon, cantik, ikonik -	3	0	20	-15
	cipta, tuhan, allah, masyaallah, indah -	0	0	20	-10
	matahari, terbit, kota, indah, sesi -	0	0	19	-5
	indonesia, salah, letak, probolinggo, muka -	0	0	15	0
	saksi, matahari, terbit, ramai, oleh -	0	0	15	0

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Aksesibilitas menjadi prasyarat utama dalam penguatan daya saing destinasi wisata Jawa Timur, terutama melalui integrasi kawasan wisata lintas kabupaten/kota. Penguatan konektivitas antardestina diperlukan untuk membentuk pola perjalanan wisata yang lebih terstruktur, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta memperluas sebaran manfaat ekonomi ke wilayah sekitar destinasi utama. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan et

## BOKS 6

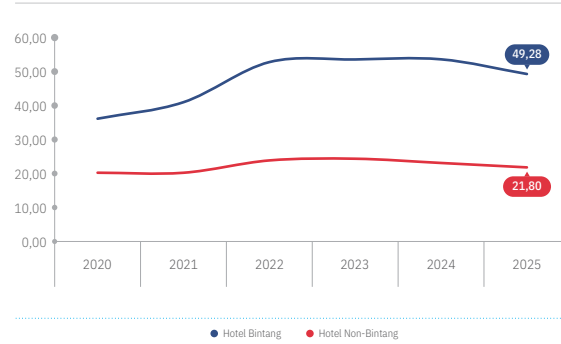
al. (2022) yang menunjukkan bahwa integrasi destinasi di kawasan Bromo-Tengger-Semeru mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan hingga 1,8 kali lipat. Sebaliknya, studi Anggraeni & Hartono (2023) di kawasan Pantai Selatan Jawa Timur menunjukkan bahwa belum optimalnya integrasi transportasi dan promosi lintas wilayah masih menjadi salah satu faktor yang menahan pertumbuhan wisata.

**Penguatan atraksi wisata diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman dan nilai tambah pariwisata Jawa Timur.** Pengembangan atraksi tidak hanya diarahkan pada penambahan objek wisata, tetapi juga pada diversifikasi aktivitas, penguatan narasi lokal, penyelenggaraan event berkualitas, serta penciptaan pengalaman khas di setiap destinasi. Dalam konteks tersebut, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting untuk menjaga otentisitas destinasi, memperkuat kepemilikan komunitas, dan memastikan manfaat ekonomi pariwisata lebih inklusif, sejalan dengan prinsip pembangunan wisata berkelanjutan (World Bank, 2022).

**Amenitas berperan sebagai faktor penentu kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi.** Amenitas mencakup fasilitas dasar destinasi, akomodasi, layanan makan minum, transportasi pendukung, pusat informasi, kebersihan, keamanan, serta kemudahan transaksi. Urgensi penguatan amenitas semakin relevan seiring menurunnya TPK hotel di Jawa Timur pada 2025 (Grafik 5). TPK hotel bintang tercatat turun dari 53,60% pada 2024 menjadi 49,28% pada 2025, sementara TPK hotel non-bintang menurun dari 23,10% menjadi 21,80%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan kualitas layanan pendukung agar peningkatan kunjungan wisatawan diimbangi dengan kesiapan amenitas yang memadai, mengingat keberhasilan pariwisata bergantung pada efisiensi transportasi serta kapasitas dan kualitas sektor akomodasi, makanan, dan minuman dalam rantai pasok pariwisata (Dwyer et al., 2010; UNWTO, 2022).

**Di luar aspek fisik destinasi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi prasyarat penting dalam memperkuat daya saing pariwisata.** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), rata-rata lama sekolah di Jawa Timur tercatat sebesar 8,69 tahun, lebih rendah dibandingkan rerata nasional sebesar 9,22 tahun, sehingga masih terdapat ruang peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor *hospitality* dan pariwisata.

Grafik 5. TPK pada Hotel Bintang dan Non Bintang Provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Digitalisasi menjadi akselerator penting dalam memperkuat daya saing destinasi wisata, terutama melalui peningkatan visibilitas, akses informasi, dan kemudahan layanan bagi wisatawan.** Pemanfaatan sistem *reservasi daring*, *e-ticketing*, dan promosi berbasis media sosial dapat memperluas jangkauan destinasi, termasuk destinasi berskala kecil yang memiliki keterbatasan akses promosi konvensional (UNWTO, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan Ramadani dan Yusuf (2023) yang menunjukkan bahwa desa wisata dengan tingkat *digital engagement* tinggi mampu mencatat peningkatan kunjungan hingga 34% per tahun.

Secara keseluruhan, penguatan daya saing pariwisata Jawa Timur perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu infrastruktur, ekosistem, dan daya tarik destinasi. Upaya penguatan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1. Penguatan konektivitas destinasi.** Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya percepatan JLS, perlu diarahkan sebagai koridor strategis untuk membuka potensi wisata kawasan selatan Jawa Timur. Konektivitas yang lebih baik akan mengintegrasikan destinasi potensial, memperlancar mobilitas wisatawan, serta memperluas sebaran kunjungan dan nilai tambah pariwisata di luar destinasi utama.
- 2. Peningkatan kualitas dan variasi atraksi wisata.** Pengembangan atraksi perlu diarahkan pada penyelenggaraan *event* yang berkualitas, berkelanjutan, dan terkurasi, melalui penyelarasan dengan *Calendar of Event* (CoE) daerah serta penguatan kurasi menuju Karisma *Event* Nusantara (KEN). Selain itu, atraksi wisata perlu diperkuat melalui pengembangan aktivitas berbasis pengalaman,

## BOKS 6

penciptaan narasi lokal yang khas di setiap destinasi, serta pelibatan aktif masyarakat lokal agar pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi secara lebih inklusif.

- 3. Penguatan amenitas dan standar layanan destinasi.**  
Peningkatan amenitas dapat ditempuh melalui penguatan investasi, terutama dari sektor swasta, pada penyediaan akomodasi, layanan makan minum, serta fasilitas dasar. Penguatan tersebut perlu diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata agar standar layanan lebih konsisten, profesional, dan mampu meningkatkan kenyamanan serta pengalaman wisatawan.
- 4. Pengembangan platform digital pariwisata terpadu.**  
Digitalisasi pariwisata perlu diarahkan pada integrasi layanan reservasi daring, *e-ticketing*, informasi destinasi, pembayaran nontunai, dan pemasaran digital dalam satu platform terpadu. Platform tersebut juga dapat berfungsi sebagai basis data perilaku wisatawan untuk memetakan pola kunjungan dan preferensi pasar, sehingga strategi promosi, pengembangan paket wisata, dan penguatan amenitas dapat disusun secara lebih terarah, tersegmentasi, dan berbasis data.

Dengan penguatan tersebut, pengembangan pariwisata Jawa Timur diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperpanjang lama tinggal, meningkatkan belanja wisatawan, dan memperluas dampak ekonomi ke sektor akomodasi, makan minum, transportasi, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Lebih lanjut, strategi tersebut perlu diarahkan pada prinsip *sustainable tourism* agar pertumbuhan pariwisata tetap menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat keterlibatan masyarakat lokal, serta menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BOKS 7

## Dampak Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Terhadap Perekonomian Jawa Timur

Perekonomian dunia diperkirakan masih dalam tren melambat. Lonjakan harga komoditas terutama komoditas energi berdampak terhadap penurunan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Berdasarkan *International Monetary Fund* (IMF) pada *World Economic Outlook* (WEO) di bulan Mei 2026, perekonomian dunia diperkirakan melambat menjadi 3,0% (yoy), bias bawah dari proyeksi sebelumnya yaitu 3,2% (yoy) pada WEO di bulan Januari 2026. Revisi bias ini merefleksikan disrupsi dari konflik geopolitik di Timur Tengah, yang mengkompensasi efek lanjutan dari kinerja data ekonomi yang kuat dan penurunan tarif resiprokal.

Selain itu, tingkat dispersi pertumbuhan ekonomi antar negara diperkirakan melebar. Dampak yang dirasakan pada negara dengan ekonomi rentan *emerging markets* dan negara berkembang lebih signifikan, khususnya negara pengimpor komoditas. Pertumbuhan di negara *emerging markets* diprediksikan sebesar 3,9% (yoy), bias bawah dibandingkan proyeksi sebelumnya yaitu 4,2% (yoy).

Tabel 1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Global

	2024	2025	2026*
Dunia	3,3	3,4	3,0
Negara Maju	1,8	1,9	1,7
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	0,9	1,4	0,9
Jepang	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	4,3	4,4	3,9
Tiongkok	5,0	5,0	4,5
India	6,5	7,6	6,7
Asean-5	4,6	4,5	4,0
Amerika Latin	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	3,4	2,1	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	2,4	3,6	2,6

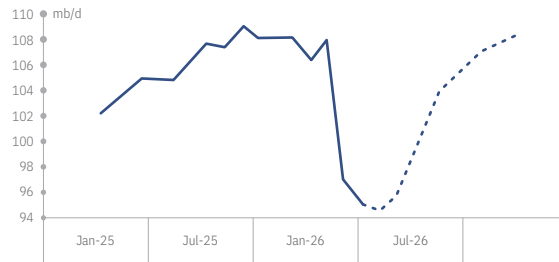
Sumber: IMF WEO (Apr '26);\*Proyeksi Bank Indonesia (Mei'26)

Konflik Geopolitik Timur Tengah (AS-Israel vs Iran) dimulai sejak 28 Februari 2026 ketika pasukan AS dan Israel meluncurkan 900 serangan dalam 12 jam, menargetkan rudal, pertahanan udara, infrastruktur militer, dan kepemimpinan Iran. Serangan ini menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Serangan balasan kemudian diluncurkan oleh Iran kepada sistem pertahanan AS di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi termasuk pertahanan Israel. Hal ini mendorong peningkatan tarif asuransi pelayaran di Selat Hormuz yang meningkat signifikan. Pada 4 Maret 2026, Iran mengumumkan penutupan *dual blockade* Selat Hormuz dan hanya mengizinkan kapal-kapal yang telah disetujui Iran untuk lewat.

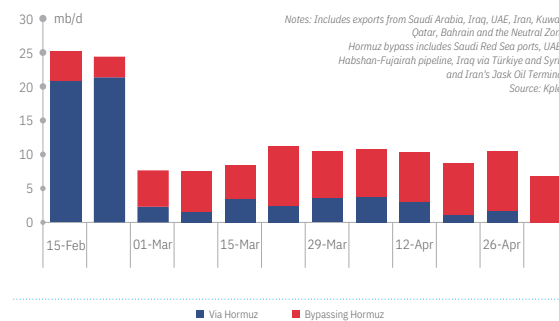
Menurut IMF<sup>9</sup>, konflik geopolitik ini berdampak terhadap perekonomian dan inflasi dunia melalui tiga kanal transmisi antara lain: (1) jalur harga komoditas (*energy prices*), (2) jalur perdagangan, dan (3) jalur finansial. Perang Timur Tengah secara langsung mempengaruhi produksi dan distribusi minyak dunia, terutama melalui Selat Hormuz yang berkontribusi sebesar 20% sebagai *supplier* minyak global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Grafik 1. Pasokan Minyak Global



Sumber: IEA (Mei 2026)

Grafik 2. Ekspor Minyak Negara Teluk

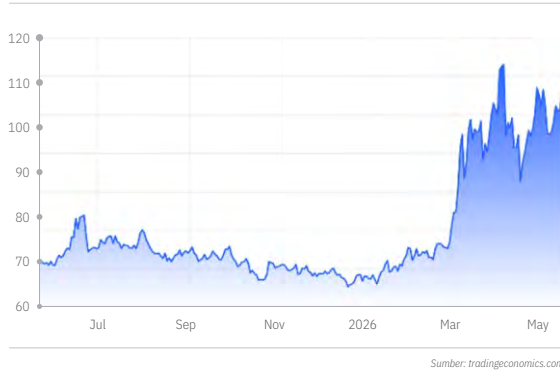


Sumber: Kpler, IEA (Mei 2026)

29. How The War in The Middle East is Affecting Energy, Trade, and Finance

**BOKS 7**

**Grafik 3. Harga Minyak Mentah**



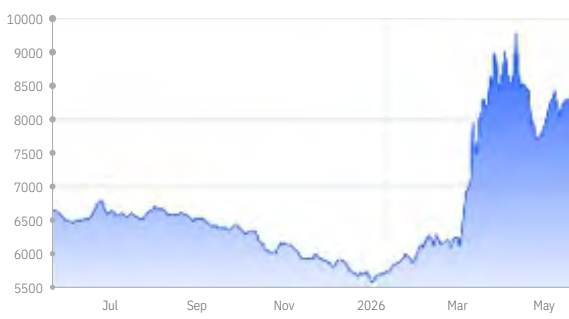
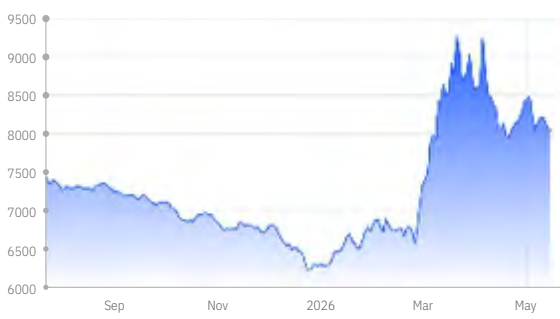
Berdasarkan data *International Energy Agency*, pasokan minyak dunia menurun 10 juta barrel per hari, dengan serangan yang terus berlangsung terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah dan hambatan di Selat Hormuz. Ekspor minyak dari negara teluk yang melewati Selat Hormuz rata-rata 2,3 juta barrel per hari, hanya 10% dari tingkat rata-rata sebelum konflik geopolitik terjadi, dengan

Iran menyumbang 70% dari lalu lintas ekspor. Hal ini berdampak pada peningkatan harga energi sebagai dorongan disrupsi pasokan. Berdasarkan IEA, peningkatan harga minyak tertinggi di bulan Maret, semenjak peningkatan *supply shock* minyak. Namun demikian, harga kembali mengalami sedikit penurunan pasca gencatan senjata selama 2 minggu, namun kembali *rebound* setelah gagalnya negosiasi AS-Iran.

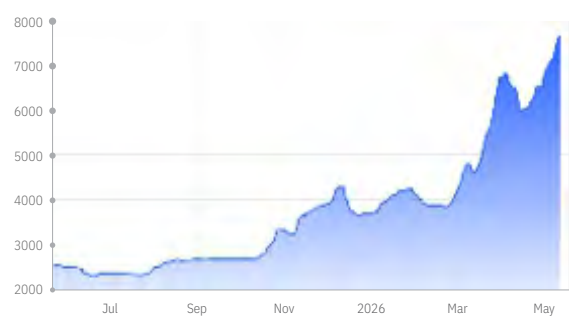
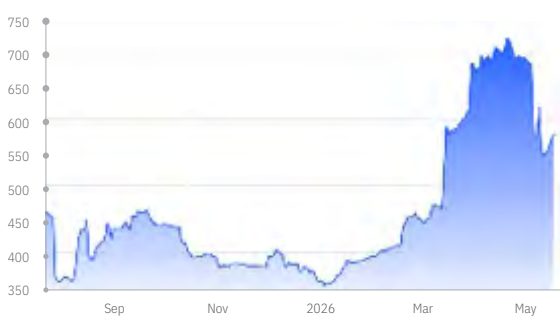
Selain minyak, komoditas lainnya yang menjadi komoditas strategis negara teluk mengalami peningkatan akibat hambatan Selat Hormuz. Komoditas turunan minyak seperti *polymer*, *naphta*, bensin, avtur, dan serta komoditas non energi lainnya seperti metanol dan pupuk juga mengalami peningkatan harga sebagai dampak gangguan lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz.

Dari sisi keuangan, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah mengakibatkan peningkatan ketidakpastian pada pasar keuangan global dan mendorong peningkatan *risk aversion* investor. Selain itu, prospek inflasi dunia yang meningkat

**Grafik 4. Harga Polymer (Polyethylene dan Polypropylene)**



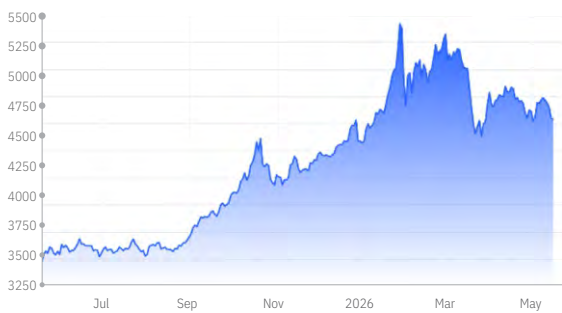
**Grafik 5. Harga Pupuk (Urea dan Sulfur)**



**BOKS 7**

juga mendorong pandangan *hawkish* pada suku bunga negara maju. Hal ini berdampak terhadap *risk off sentiment* dari investor asing dan mendorong aliran modal keluar dari negara *emerging markets* sehingga menyebabkan tekanan pada nilai tukar dan inflasi. Potensi dampak dari aliran modal keluar ini yaitu penurunan harga saham, peningkatan imbal hasil (*yield*) obligasi, *credit spread* yang meningkat, dan tekanan intervensi pada cadangan devisa di negara *emerging market*. *Risk off sentiment* investor berdampak terhadap permintaan aset *safe haven* tecermin pada peningkatan harga emas.

**Grafik 6. Harga Emas Dunia**



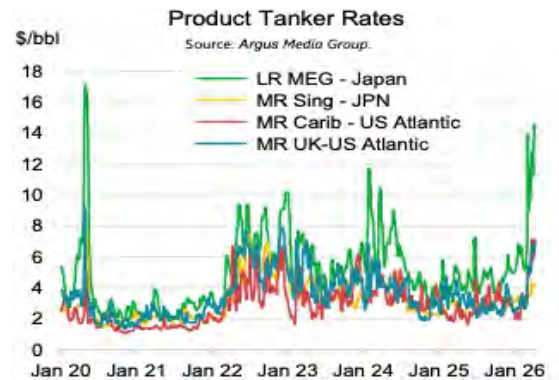
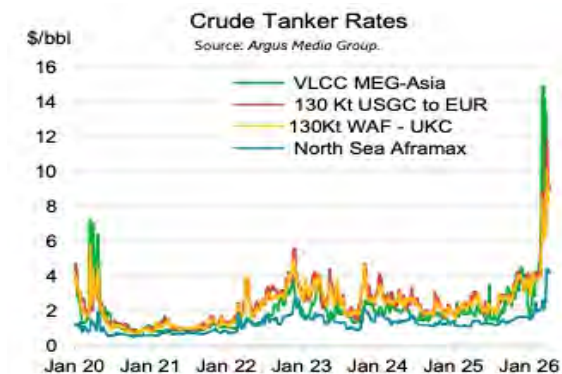
Sumber: tradingeconomics.com

Di sisi lain, sektor perdagangan global juga mengalami gangguan akibat konflik geopolitik utamanya setelah penutupan Selat Hormuz. Mengubah rute tanker dan kapal kontainer berdampak terhadap biaya logistik, premi asuransi, dan memperpanjang waktu pengiriman. Disrupsi lalu lintas udara di sekitar negara teluk juga turut menambah kompleksitas perdagangan. Berdasarkan IEA,

tarif VLCC (*Very Large Crude Carrier*) kapal tanker dari Teluk Timur Tengah ke Asia meningkat drastis hingga rata-rata \$12,86 per barel, sekitar 600% di atas rata-rata lima tahun. Kenaikan tarif VLCC juga menyebar ke kategori kapal tanker lainnya, dengan kapal Suezmax dan Aframax mengalami peningkatan tarif yang signifikan karena kilang minyak Eropa mencari sumber minyak mentah alternatif di luar Timur Tengah, yang berakibat pada peningkatan permintaan akan kapal yang tersedia. Pasar kapal tanker produk juga menghadapi gangguan yang signifikan. Penurunan ekspor Timur Tengah memaksa pembeli untuk mencari sumber pasokan alternatif. Tarif kapal tanker jarak jauh (LR) pada rute Teluk Timur Tengah–Jepang dan tarif kapal tanker jarak menengah (MR) melonjak tajam, terutama pada rute cekungan Atlantik.

Lebih lanjut, peningkatan harga komoditas juga berdampak terhadap peningkatan beban impor utamanya pada negara yang dominan melakukan impor energi. Di negara Asia yang merupakan negara manufaktur, beban biaya bahan bakar dan energi meningkatkan biaya produksi dan menekan neraca perdagangan yang berdampak pada tekanan nilai tukar. Selain itu, negara pengimpor minyak juga melakukan realokasi perdagangan. Berdasarkan laporan Reuters, negara pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia, India, melakukan impor minyak mentah dari Rusia di bulan Maret 2026 sejumlah hampir dua kali lebih besar dari Februari 2026, dengan kiriman dari negara Timur Tengah turun hingga 61%. Hal ini menunjukkan bahwa krisis geopolitik tidak hanya mengganggu rute perdagangan, namun mengakibatkan reposisi perdagangan dan struktur biaya ekonomiglobal.

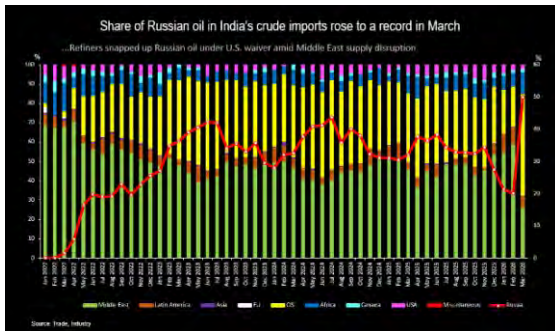
**Grafik 5. Harga Tarif Tanker (Crude Tanker dan Product Tanker)**



Sumber: IEA (2026)

**BOKS 7**

**Grafik 6. Pangsa Impor Minyak Mentah India dari Rusia**

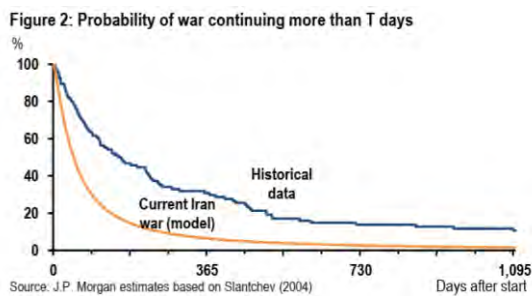


Sumber: Reuters (April 2026)

Berdasarkan riset yang dikembangkan oleh J.P. Morgan<sup>30</sup>, durasi perang AS-Israel dengan Iran memiliki dampak yang substansial terhadap *outcome* pasar dan ekonomi global. Menurut statistik yang dikembangkan oleh penelitian tersebut, 50% dari perang di dunia pada dua dekade sebelumnya berakhir dalam lima bulan. Dari karakteristik perang AS-Israel dan Iran saat ini, jika ditelaah secara historis berakhir pada durasi yang lebih pendek, dengan 80% probabilitas, perang berakhir pada bulan ke 4,5 setelah perang dimulai.

Kendati demikian, durasi perang juga didasarkan atas strategi kedua belah pihak dalam melakukan serangan. Berdasarkan penelitian Bennet dan Stam (1996), ketika strategi manuver dilaksanakan, perang cenderung berakhir dengan cepat, karena keberhasilan dan kegagalan menjadi lebih jelas. Sedangkan, strategi atrisi bergantung pada penghancuran lawan dan seringkali berlangsung lebih lama seperti perang Rusia-Ukraina. Penelitian J.P. Morgan juga memprediksikan durasi perang berdasarkan perbedaan strategi tersebut, di mana jika kedua belah pihak

**Grafik 7. Probabilitas Perang Berakhir**



Source: J.P. Morgan estimates based on Slantchev (2004)

Sumber: J.P. Morgan (April 2026)

menggunakan strategi atrisi, maka nilai tengah durasi berakhirnya perang dapat meningkat hingga tujuh bulan dibandingkan dengan strategi *maneuver* yang diperkirakan hanya berlangsung 25 hari.

Konflik Timur Tengah turut berpotensi memberikan dampak pada aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara sekitar Selat Hormuz. Eksposur langsung total ekspor dan impor Indonesia dengan negara di sekitar Selat Hormuz cenderung kecil, hanya sebesar 3-6% dari total nilai ekspor dan impor Indonesia. Namun Indonesia memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi akibat penutupan jalur selat Hormuz terutama pada sektor energi.

**Tabel 2. Pangsa Ekspor-Impor Indonesia dengan Negara Hormuz**

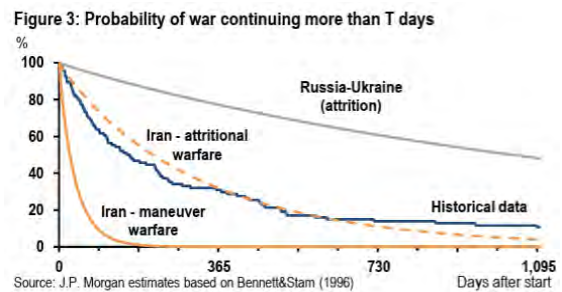
Keterangan	Nilai pada Tahun 2025 (USD Billion)	Share thdp Total
Ekspor Indonesia Menuju Negara Selat Hormuz	8,72	2,06%
Impor Indonesia Menuju Negara Selat Hormuz	8,88	5,98%

Sumber: TradeMap (April 2026)

Berdasarkan komoditas, pada tahun 2025 Indonesia mengimpor hampir 18% minyak mentah dari kawasan Teluk atau sebanyak 1,65 miliar Dolar AS khususnya dari Arab Saudi. Proporsi tersebut relatif moderat mengingat porsi terbesar impor minyak mentah Indonesia justru berasal dari negara-negara Afrika yang mencapai 54,11%.

Sedangkan dari komoditas minyak olahan yang sudah melalui proses penyulingan/distilasi dari minyak mentah, Indonesia mengimpor sekitar 11,05% atau

**Grafik 8. Probabilitas Perang Berakhir dengan Strategi Atrisi dan Strategi Maneuver**



Source: J.P. Morgan estimates based on Bennett&Stam (1996)

Sumber: J.P. Morgan (April 2026)

## BOKS 7

2,12 miliar dollar AS dari negara sekitar Selat Hormuz, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan impor Indonesia dari negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia yang mencakup masing-masing 49,47% dan 26,52% dari impor minyak olahan Indonesia. Sehingga secara langsung, eksposur Indonesia atas risiko disrupsi energi di Selat Hormuz yaitu 18% dan 11% atas komoditas minyak mentah dan minyak olahan, cenderung moderat namun tetap menjadi faktor risiko yang perlu diperhitungkan.

Meski demikian, negara mitra impor Indonesia atas komoditas minyak olahan yaitu Singapura dan Malaysia juga melakukan pemenuhan atas minyak mentah dari negara sekitar Selat Hormuz. Pangsa pemenuhan minyak mentah dari negara sekitar Selat Hormuz pada masing-masing negara adalah sejumlah 73,92% dan 66,48%. Dengan asumsi proses penyulingan dilakukan di Singapura dan Malaysia, dan dengan asumsi pangsa yang sama, maka eksposur Indonesia secara tidak langsung dari Singapura dan Malaysia atas risiko disrupsi energi di Selat Hormuz adalah masing-masing sejumlah 36,57% dan 17,63%.

Kendati cenderung moderat, namun eksposur Indonesia atas disrupsi energi berdampak terhadap kenaikan harga komoditas seperti minyak olahan atau bahan bakar. Selain itu, produk turunan dari minyak mentah seperti plastik, dan komoditas strategis Selat Hormuz lainnya seperti pupuk juga ikut terdampak. Eksposur Indonesia terhadap impor

dari kedua komoditas tersebut cenderung terjaga karena sebagian besar berasal dari negara Asia, Rusia, dan Kanada meskipun tetap menimbulkan risiko seiring kenaikan harga minyak dunia dan harga logistik.

### Disrupsi ketahanan pertumbuhan ekonomi juga ikut dirasakan oleh wilayah Jawa Timur.

Dalam konteks regional, Jawa Timur memiliki eksposur terhadap disrupsi konflik Timur Tengah melalui tiga komoditas impor utama, yakni minyak dan gas (pangsa 16,3%), plastik (4,9%), serta pupuk (4%). Ketiga komoditas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan rantai nilai industri di Jawa Timur, minyak dan gas sebagai sumber energi utama aktivitas produksi, plastik sebagai bahan baku industri hilir, serta pupuk sebagai input sektor pertanian dan agroindustri.

Lebih lanjut, tekanan pada sisi impor tersebut diduga dapat bertransmisi ke sisi ekspor melalui mekanisme rantai pasok. Kenaikan biaya input migas yang digunakan dalam sektor kelistrikan, plastik, konstruksi, dan kimia berpotensi menekan daya saing ekspor komoditas hilir seperti galian bukan logam, barang logam, makanan dan minuman, serta kertas dan tekstil. Di jalur lain, kenaikan harga pupuk yang menekan sektor tanaman pangan dan hortikultura juga berpotensi menghambat kinerja ekspor makanan dan minuman.

**Tabel 3. Pangsa Impor Komoditas Minyak Mentah dan Minyak Olahan Indonesia dari Negara Hormuz**

	Komoditas Impor	Negara Mitra	Nilai Impor (Miliar Dolar AS)	Share% Total Impor Komoditas
Indonesia	Minyak Mentah	Negara sekitar Hormuz	1,65	17,72%
	Minyak Olahan	Negara sekitar Hormuz	2,12	11,05%
	Minyak Olahan	Singapura	9,50	49,47%
	Minyak Olahan	Malaysia	5,09	26,52%

Sumber: TradeMap (April 2026)

**Tabel 4. Eksposur Tidak Langsung Minyak Olahan Indonesia dari Negara Selat Hormuz**

Negara	Pangsa Pemenuhan Minyak Mentah dari Negara Selat Hormuz ke Negara di kolom (a)	Nilai Impor Minyak Olahan Indonesia dari Masing-Masing Negara di Kolom (a) (Juta Dolar AS)	Potensi Disrupsi (Juta Dolar AS)	Pangsa Potensi Disrupsi
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) x (c)	(e) = (d) / Total nilai impor minyak olahan Indonesia
Singapura	73,92%	9.495.928	7.019.215	36,57%
Malaysia	66,48%	5.091.298	3.384.832	17,63%

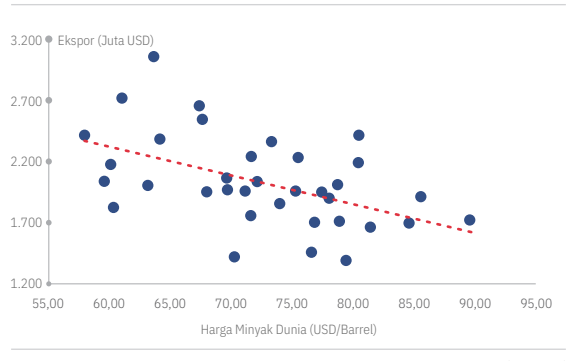
Sumber: TradeMap (diolah, April 2026)

**BOKS 7**

Hubungan antara harga minyak dunia dan kinerja ekspor Jawa Timur menunjukkan pola korelasi negatif. Berdasarkan grafik *scatter plot*, ekspor Jawa Timur dan harga memiliki indikasi hubungan negatif.

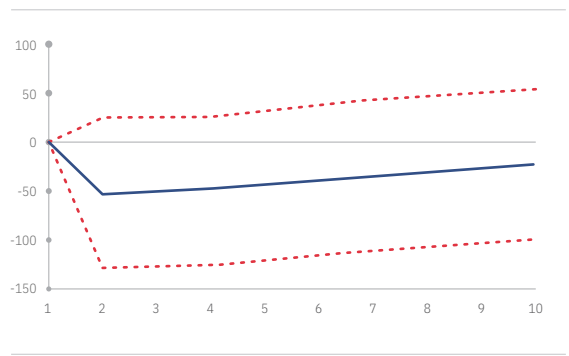
Selanjutnya dengan analisis *Impulse Response Function* (IRF), diperoleh hasil bahwa *shock* kenaikan harga minyak dunia memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor Jawa Timur yang terjadi secara cepat pada periode awal dan cenderung persisten hingga periode ke-10. Meski arah hubungannya konsisten negatif, presisi estimasi masih terbatas sebagaimana ditunjukkan oleh lebar *confidence interval*.

**Grafik 9. Scatter Plot Ekspor Jawa Timur dan Harga Minyak**



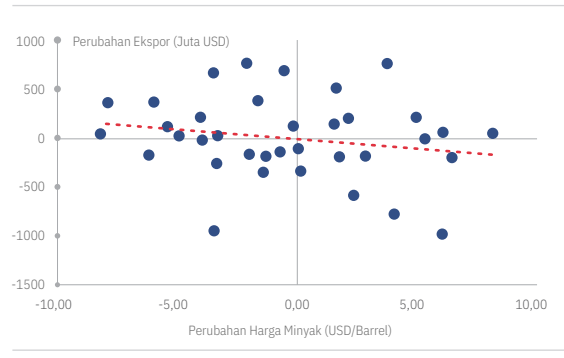
Pola serupa juga terkonfirmasi melalui *scatter plot* pada level perubahan, di mana kenaikan harga minyak secara konsisten diikuti oleh penurunan nilai ekspor. Konsistensi pola pada kedua pendekatan ini memperkuat indikasi bahwa harga minyak dunia memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja ekspor Jawa Timur. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi biaya produksi.

**Grafik 10. Impulse Response Function Ekspor Jawa Timur Terhadap Kenaikan Harga Minyak**



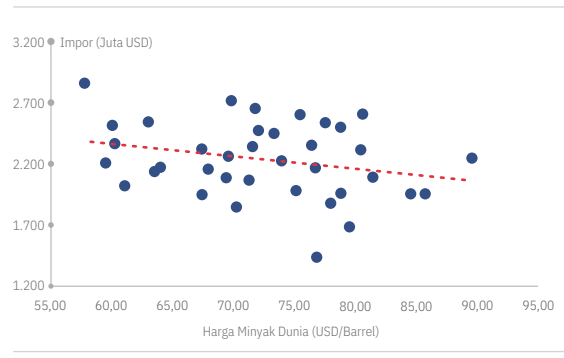
Kenaikan harga minyak dunia mendorong peningkatan biaya energi, bahan baku, dan logistik bagi sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor utama ekspor Jawa Timur.

**Grafik 11. Scatter Plot Perubahan Ekspor Jawa Timur dan Perubahan Harga Minyak**



Dari sisi impor, analisis pola hubungan antara harga minyak dunia dan impor Jawa Timur menunjukkan adanya korelasi negatif, meskipun dengan kemiringan tren yang lebih moderat dibandingkan jalur ekspor. *Scatter plot* pada level harga memperlihatkan bahwa kenaikan harga minyak cenderung diikuti oleh penurunan nilai impor Jawa Timur.

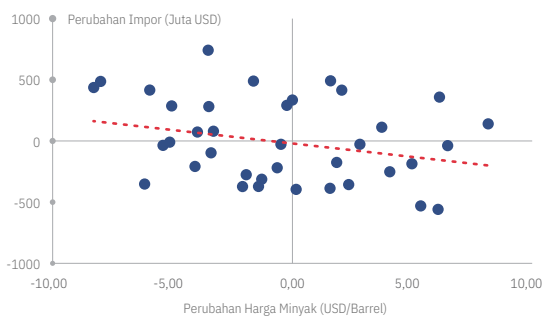
**Grafik 12. Scatter Plot Impor Jawa Timur dan Harga Minyak**



Analisis pada level perubahan memberikan gambaran pola yang serupa meskipun sebaran data yang cukup lebar. Hasil yang sejalan dari kedua metode analisis ini memperkuat argumen bahwa kenaikan harga minyak dunia cenderung menahan aktivitas impor Jawa Timur.

**BOKS 7**

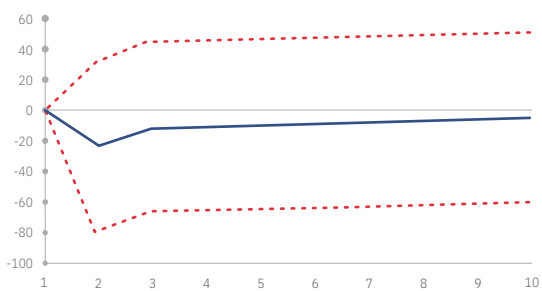
**Grafik 13. Scatter Plot Perubahan Impor Jawa Timur dan Perubahan Harga Minyak**



Sumber: Laporan Bea Cukai, IMF (diolah, 2026)

Berdasarkan hasil IRF, dampak *shock* harga minyak terhadap impor terlihat turun pada periode awal, namun kemudian relatif cepat kembali mendekati titik keseimbangan dan cenderung stabil di sekitar garis nol pada periode-periode selanjutnya. Pola ini mengindikasikan bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap impor Jawa Timur lebih bersifat sementara, berbeda dengan dampak terhadap ekspor yang cenderung persisten. Meski demikian, *confidence interval* yang melebar di kedua sisi menyebabkan besaran dampaknya tidak bisa diinterpretasikan secara presisi.

**Grafik 14. Impulse Response Function Impor Jawa Timur Terhadap Kenaikan Harga Minyak**



Sumber: Olahan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah, 2026)

Secara sektoral, dampak kenaikan harga minyak lebih lanjut dirasakan oleh Industri Pengolahan. Analisis regresi sederhana dilakukan untuk melihat dampak harga minyak dan tarif *freight* terhadap ekspor Industri dan diperoleh hasil bahwa kenaikan harga minyak dan tarif *freight* memberikan pengaruh pada penurunan ekspor sektor Industri. Namun berdasarkan estimasi model, kenaikan tarif *freight* lebih memberikan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil IRF, dampak *shock* harga minyak terhadap impor terlihat turun pada periode awal, namun kemudian relatif cepat kembali mendekati titik keseimbangan dan cenderung stabil di sekitar garis nol pada periode-periode selanjutnya. Pola ini mengindikasikan bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap impor Jawa Timur lebih bersifat sementara, berbeda dengan dampak terhadap ekspor yang cenderung persisten. Meski demikian, *confidence interval* yang melebar di kedua sisi menyebabkan besaran dampaknya tidak bisa diinterpretasikan secara presisi.

**Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Sederhana Ekspor Industri Pengolahan dengan Harga Minyak dan Tarif Freight**

	Koefisien	P-value	Keterangan
Konstanta	1.350.000.000	0,00	
harga Minyak	-2.920.914	0,22	Tidak Signifikan
Freight Index	-52.672	0,04	Signifikan
Outlier	464.000.000	0,00	Signifikan

Sumber: Olahan Bank Indonesia Jawa Timur (2026)

Lebih lanjut, jika diestimasi dengan harga minyak dan *freight index baseline* pada sebelum perang yaitu di bulan Februari 2026 dan *shock* yaitu pada posisi sesudah perang yaitu di bulan Maret 2026, diperoleh penurunan ekspor Industri sejumlah 9,87% dibandingkan periode sebelum perang. Jika menggunakan pangsa ekspor Industri Pengolahan terhadap kinerja Industri Pengolahan, maka potensi penurunan *output* yaitu -0,22% dibandingkan periode sebelum perang.

**Tabel 6. Hasil Estimasi Penurunan Output Industri Pengolahan Sebelum dan Sesudah Perang**

	Harga Minyak	Freight Index	Ekspor Industri
Baseline (sebelum)	60,28	1750,3	1.081.723.521
Shock (sesudah)	95,58	1820,0	974.955.690
Perubahan (%)			-9,87%
%Ekspor Industri thd LU Industri			2,24%
%Penurunan Output LU Industri			-0,22%

Sumber: Olahan Bank Indonesia Jawa Timur (2026)

Pada jalur impor, dengan asumsi bahwa tekanan harga minyak dunia bersifat temporer, hasil simulasi menunjukkan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diestimasi sebesar

## BOKS 7

-0,08% (yoy). Meskipun besarnya relatif terbatas, analisis keterkaitan mengindikasikan bahwa dampak tersebut tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki keterkaitan erat dengan komoditas berbasis energi. Tekanan paling signifikan diperkirakan terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebagai pengguna utama input energi dan bahan baku impor, diikuti oleh sektor Konstruksi yang terdampak melalui kenaikan harga material berbasis energi seperti barang galian bukan logam dan barang logam. Selain itu, sektor Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan juga berpotensi mengalami tekanan, mengingat sensitivitasnya terhadap kenaikan biaya energi dan logistik yang merupakan komponen utama dalam struktur biaya operasional kedua sektor tersebut.

**Tabel 7. Hasil Estimasi Keterkaitan Sektor dan PDRB Jawa Timur Akibat Kenaikan Harga Minyak dan Freight Index**

	% Perubahan	%Net Perubahan	% Kontribusi
Pertanian	-0,02	-0,02	0,00
Pertambangan	-0,01	-0,01	0,00
Industri Pengolahan	-0,27	-0,23	-0,07
Pengadaan Listrik Gas	-0,01	-0,01	0,00
Pengadaan Air, Kelola Sampah	-0,02	-0,02	0,00
Konstruksi	-0,06	-0,05	0,00
Perdagangan	-0,01	-0,01	0,00
Transportasi Pergudangan	-0,02	-0,02	0,00
Akomodasi Mamin	-0,04	-0,04	0,00
Infokom	-0,01	-0,01	0,00
Jasa Keuangan	-0,01	-0,01	0,00
Real Estate	-0,01	-0,01	0,00
Jasa Perusahaan	-0,02	-0,02	0,00
Administrasi Pemerintahan	-0,02	-0,02	0,00
Jasa Pendidikan	-0,03	-0,03	0,00
Jasa Kesehatan	-0,04	-0,04	0,00
Jasa Lainnya	-0,03	-0,03	0,00
<b>%Dampak Penurunan terhadap PDRB</b>			<b>-0,08</b>

Sumber: Olahan Bank Indonesia Jawa Timur (2026)

**Dari sisi harga, inflasi Jawa Timur cukup sensitif terhadap guncangan harga energi yang diakibatkan oleh eksternal, terutama melalui kenaikan harga BBM,** seperti yang terjadi pada tahun 2021 (Agresi Militer Rusia ke Ukraina), 2022 (Kenaikan pertalite dan solar), dan 2025 (Diskon tarif listrik). Lebih lanjut, guncangan eksternal yang terjadi akibat ketegangan AS-Israel ke Iran diprediksi dapat kembali memicu inflasi di Jawa Timur.

Inflasi ini terjadi akibat dampak berlapis dari kenaikan harga BBM domestik, peningkatan biaya transportasi dan produksi serta peningkatan harga barang dan jasa. Berdasarkan hasil *stress test*, inflasi IHK Jawa Timur pada kondisi *baseline* diproyeksikan tetap terkendali. Sedangkan guncangan eksternal berupa konflik geopolitik dapat memicu kenaikan harga minyak dan BBM serta berpotensi meningkatkan inflasi di atas titik tengah rentang inflasi.

Dalam jangka pendek, Pemprov Jatim menerapkan penyesuaian budaya kerja melalui kebijakan *Work From Home* bagi ASN setiap hari Rabu dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi BBM dan mobilitas. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat BBM sebanyak 108,000 liter per bulan diluar sektor Pendidikan untuk menekan biaya operasional dan mengurangi tekanan terhadap kebutuhan energi. Selanjutnya, Pemprov juga memiliki kebijakan untuk memberi Perlindungan untuk UMKM dan Masyarakat rentan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha ditengah kenaikan harga produksi dan distribusi melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Selain itu, program bantuan sosial seperti PKH Plus, bantuan disabilitas, BLT buruh dan dukungan permodalan Masyarakat miskin juga turut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memperkuat ketahanan dan stabilisasi pangan melalui ekosistem pangan hulu hingga hilir, percepatan distribusi pupuk bersubsidi melalui Jatim Agro-Hub, operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur serta Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah (CPPD). Untuk jangka panjang, Pemprov Jatim melakukan strategi hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan hilirisasi komoditas strategis dan investigasi berkelanjutan sebagai respons struktural terhadap tekanan global dan optimalisasi perdagangan antar daerah Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

## BOKS 7

Dalam merespons potensi dampak disrupsi geopolitik Timur Tengah terhadap perekonomian daerah, diperlukan serangkaian langkah kebijakan yang terukur dan adaptif, meliputi:

1. Memfasilitasi diplomasi perdagangan guna pembukaan akses pasar ekspor maupun impor alternatif. Pemerintah dapat memanfaatkan forum bilateral dan multilateral untuk memperluas perjanjian dagang, serta kerja sama energi dengan negara pemasok di luar kawasan konflik sebagai upaya diversifikasi sumber impor migas dan bahan baku industri.
2. Penguatan rantai pasok lokal dan substitusi impor dengan mendorong pengembangan industri hulu dan pemasok lokal. Strategi ini dapat diwujudkan melalui fasilitasi kemitraan antara industri besar dan UMKM lokal, pengembangan klaster industri berbasis sumber daya daerah, serta insentif bagi pelaku usaha yang melakukan *backward integration* dengan pemasok domestik.
3. Efisiensi biaya logistik regional dengan mengoptimalkan infrastruktur logistik daerah melalui peningkatan konektivitas antarpelabuhan, *dry port*, dan kawasan industri, dan penyederhanaan prosedur perizinan.
4. Pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha meliputi fasilitasi akses pembiayaan perdagangan, serta pelatihan manajemen risiko kurs dan rantai pasok.
5. Stabilisasi harga dan pasokan energi domestik melalui optimalisasi cadangan minyak, percepatan pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, serta pengelolaan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
6. Memperkuat ketahanan pangan melalui integrasi data harga dan pasokan secara *real-time* serta mengoptimalkan implementasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), baik pada level *Government to Government* (G to G) maupun *Business to Business* (B to B), guna memastikan stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tengah ketidakpastian rantai pasok global.
7. Mengoptimalkan ruang fiskal daerah yang terbatas dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak multiplikasi tinggi (*high multiplier effect*) serta memperkuat sinergi antarstakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat agar setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.



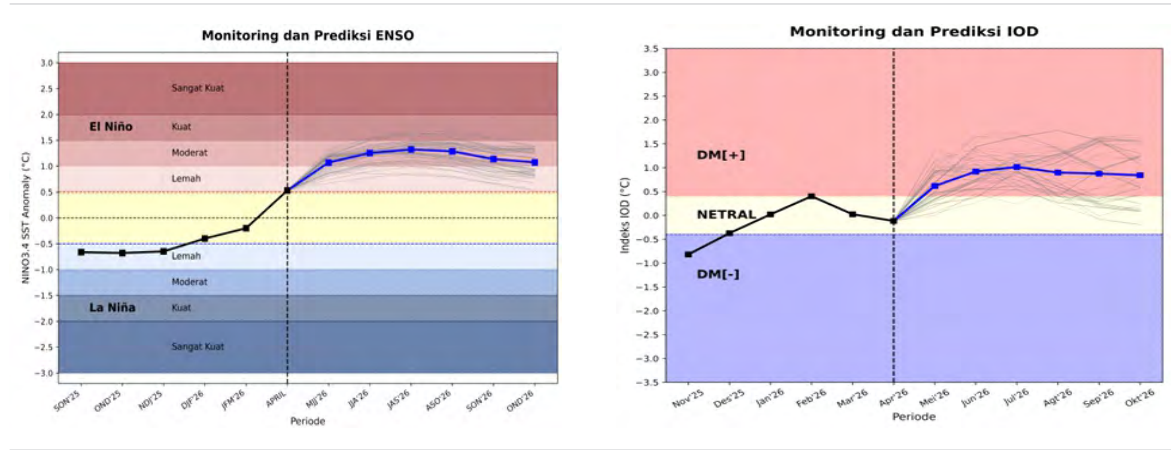
Lampiran

**Lampiran 1. Wilayah Kerja Bank Indonesia di Jawa Timur**

Wilayah Kerja	Area
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur*)	Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang	Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri	Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi.

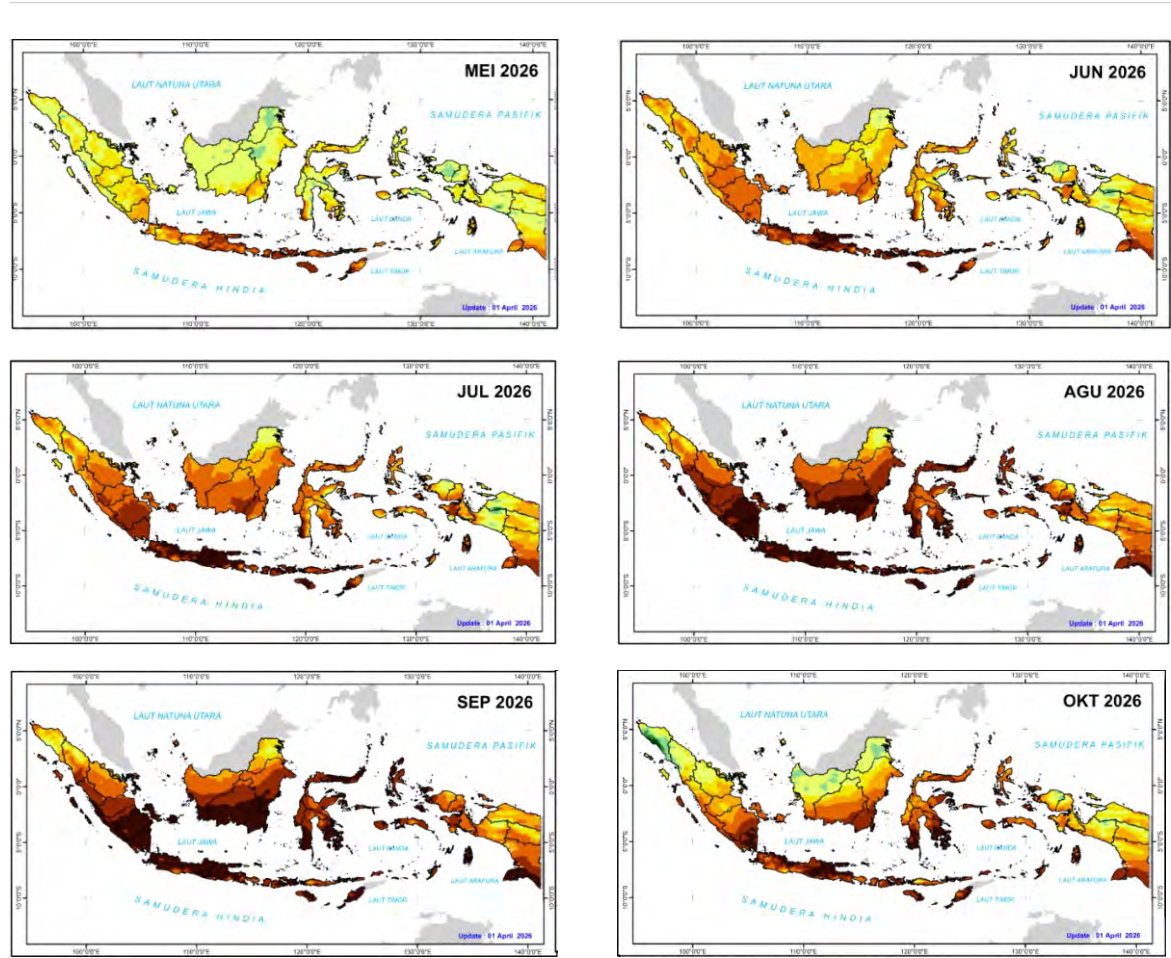
\* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur pada prinsipnya mewilayahi seluruh Jawa Timur dan melaksanakan fungsi koordinasi terhadap Kantor Perwakilan BI Malang, BI Kediri dan BI Jember.

Gambar 6.1. Model Prediksi ENSO dan IOD



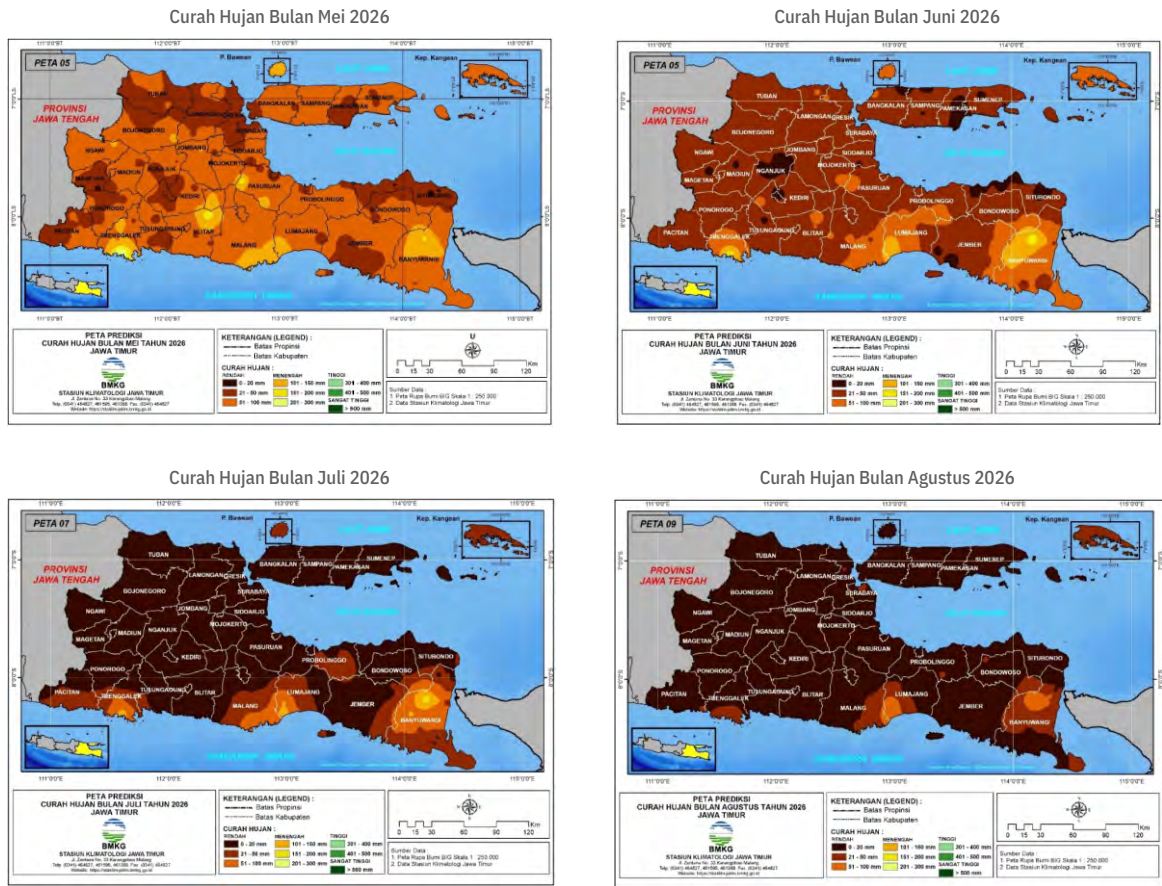
Sumber: BMKG, Mei 2026

Gambar 6.2. Prediksi Curah Hujan Bulanan Deterministik Indonesia Mei 2026 – Oktober 2026



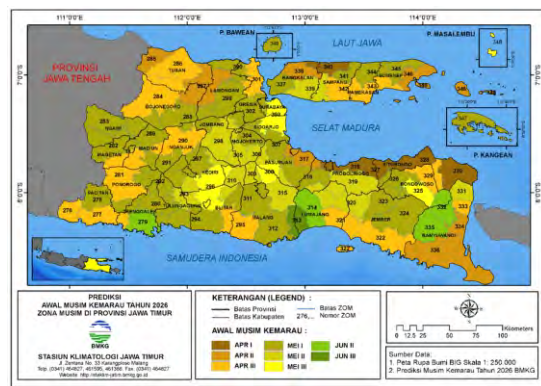
Sumber: BMKG, Mei 2026

Gambar 6.3. Prediksi Curah Hujan Jawa Timur Bulan Mei – Juli 2026



Sumber: BMKG Jawa Timur, Mei 2026

Gambar 6.4. Peta Prediksi Awal Musim Kemarau Tahun 2026



Sumber: BMKG, Maret 2026

Gambar 6.5. Peta Prediksi Puncak Kemarau Tahun 2026



Sumber: BMKG, Maret 2026



### **Inflow**

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

### **Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

### **Kredit**

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

### **Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

### **Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

### **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

### **Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

### **mtm**

*Month to month*. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

### **Net Inflow**

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

### **Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)**

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

### **Omzet**

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

### **Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

### **qtq**

*Quarter to quarter*. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

### **Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

### **Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

### **Volatile Food**

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

### **yoy**

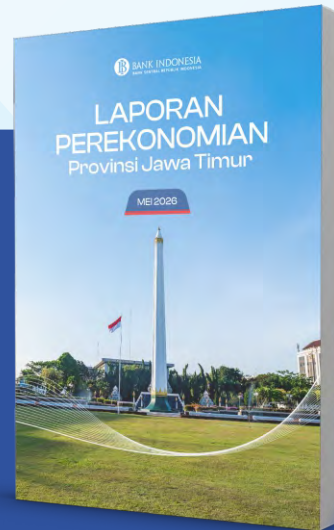
*Year on year*. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PLN	Perusahaan Listrik Negara
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PMA	Penanaman Modal Asing
BBM	Bahan Bakar Minyak	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah	qtq	<i>Quarter to quarter</i>
BPS	Badan Pusat Statistik	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i>	RTGS	<i>Real Time Gross Settlement</i>
DAU	Dana Alokasi Umum	SBT	Saldo Bersih Tertimbang
DAK	Dana Alokasi Khusus	SISKAPERBAPO	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok
DER	<i>Debt Equity Ratio</i>	SITC	<i>Standard International Trade Classification</i>
DOF	Derajat Otonomi Fiskal	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
DPK	Dana Pihak Ketiga	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>	SPE	Survei Penjualan Eceran
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
FOB	<i>Free on Board</i>	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
FTV	<i>Financing to Value</i>	TPK	Tingkat Penghunian Kamar
IHK	Indeks Harga Konsumen	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen	TTL	Tarif Tenaga Listrik
IPR	Indeks Penjualan Riil	UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
JISDOR	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i>	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
KI	Kredit Investasi	yoy	<i>Year on year</i>
KK	Kredit Konsumsi		
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor		
KMK	Kredit Modal Kerja		
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen		
KPR	Kredit Pemilikan Rumah		
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>		
LFR	<i>Loan to Funding Ratio</i>		
LNPRT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga		
LTV	<i>Loan to Value</i>		
mtm	<i>Month to month</i>		
NPF	<i>Non Performing Financing</i>		
NPL	<i>Non Performing Loan</i>		
NTN	Nilai Tukar Nelayan		
NTP	Nilai Tukar Petani		
PAD	Pendapatan Asli Daerah		
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto		



# Tim Penyusun



Pengarah	:	Ibrahim
Penanggung Jawab	:	Rifki Ismal
Koordinator Penyusun	:	Agung Budilaksono
Editor	:	Petrus Endria Effendhi
Tim Penulis	:	Imam Noegroho, Muhammad Hanif Rahmadyasa, Nur Qomariyah, Teuku Aldefa Angkasa Wangsa Banowo, Aisha Keyla Mazzetti, Shafa Salsabila, Mohammad Naufal Abdullah, Wahidatul Wardah Al Maulidiyah, Cahya Wulaningtyas, Alfrida Ista Anindya, Andini Fikarda, Ni Wayan Dian Honestty (Bank Indonesia Malang), Mei Wulandari (Bank Indonesia Kediri), Guntur Syafiqi (Bank Indonesia Jember)

## Kontributor

Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern



Link Survei LPP Jawa Timur

<https://bit.ly/Survei-LPP-Mei-2026>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya Jawa Timur

Telp. +6231 3520011

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

